



# Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia

06

TIDAK DIPERDAGANGKAN UNTUK UMUM



# Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia

PERPUSTAKAAN  
PUSAT PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

Hans Lapoliwa  
S.R.H. Sitanggang

**H A D I A H**

**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Jakarta  
1988

**SERI PUSTAKA PENELITIAN  
SKg 003  
SEMINAR TATA BAHASA BAKU BAHASA INDONESIA**

**Pembina Proyek**  
Anton M. Moeliono

**Penyunting**  
Drs. Hans Lapoliwa, M.Phil.  
Drs. S.R.H. Sitanggang

**Pewajah Kulit**  
Paramita Moeliono

**Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa  
Jalan Daksinapati Barat IV  
Jakarta 13220**

SEMINAR Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia/Disunting oleh Hans Lapoliwa dan S.R.H. Sitanggang — Cet. ke-1. — Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.  
xii, 221 hlm. lamp. 21 cm. (Seri Pustaka Penelitian : SKg 003)

**Bibliografi**

1. Sintaksis, 2. Morfologi, 3. Semantik I. Judul II. Lapoliwa, Hans  
III. S.R.H. Sitanggang IV. Seri

ISBN 979 459 0193

499 21 06

**Hak cipta dilindungi undang-undang**

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	
No. PB 499/215 06 SEM S	No. Induk: 378 Tgl. : 10/4-1989 Ttd. :

## KATA PENGANTAR

### KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

Kegiatan kebahasaan dewasa ini diarahkan ke penyediaan kelengkapan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi nasional dan, bersama dengan bahasa daerah, digunakan untuk berbagai tujuan. Kelengkapan itu disediakan bagi masyarakat sebagai pedoman berbahasa secara baik dan benar. Kegiatan kesusasteraan, yang seiring dengan kegiatan kebahasaan, diarahkan ke penyediaan kelengkapan kesusasteraan Indonesia dan daerah sebagai unsur kebudayaan nasional. Sejak tahun 1974 kedua kegiatan itu dilaksanakan oleh Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah yang bernaung di bawah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Proyek itu menerbitkan hasil penelitian bahasa dan susastra dan hasil penyusunan buku acuan yang dapat digunakan sebagai sarana kerja dan buku acuan bagi mahasiswa, dosen, guru, peneliti, pakar, dan masyarakat umum.

Pelaksanaan program itu didukung oleh proyek daerah yang dibentuk sebagai bagian dari proyek pusat. Sepuluh proyek daerah sudah dibentuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1976. Kesepuluh proyek itu berkedudukan di (1) Daerah Istimewa Aceh, (2) Sumatera Barat, (3) Sumatera Selatan, (4) Jawa Barat, (5) Daerah Istimewa Yogyakarta, (6) Jawa Timur, (7) Kalimantan Selatan, (8) Sulawesi Selatan, (9) Sulawesi Utara, dan (10) Bali. Pada tahun 1979 proyek penelitian ditambah di dua propinsi, yakni (11) Sumatera Utara dan (12) Kalimantan Barat; serta pada tahun 1980 dibentuk tiga proyek lagi, yaitu (13) Riau, (14) Sulawesi Tengah, dan (15) Maluku. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1983, proyek penelitian diperluas lagi di lima propinsi, yaitu (16) Jawa Tengah, (17) Lampung, (18) Kalimantan Tengah, (19) Irian Jaya, dan (20) Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, pada saat ini ada 21 proyek penelitian bahasa dan sastra, termasuk proyek penelitian yang berkedudukan di Jakarta.

Buku *Seminar Tata Bahasa Indonesia* semula merupakan laporan pelaksanaan seminar yang bertujuan mencari masukan bagi penyusunan tata bahasa Indonesia yang terbukti kemudian dapat terampungkan. Seminar itu dibiayai dengan dana Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun anggaran 1985/1986. Kepada Drs. Tony S. Rachmadie, Pemimpin Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia 1985/1986 beserta stafnya (Samidjo, Drs. S.R.H. Sitanggang, Drs. S. Amran Tasai, Drs. A. Patoni, Dra. Siti Zahra Yundiafi, dan Drs. E. Zainal Arifin) saya ucapkan terima kasih atas penyediaan penyusunan naskah ini. Saya juga menyatakan penghargaan saya kepada penyusun laporan itu, yakni Drs. Hans Lapoliwa, M. Phil dan Drs. S.R.H. Sitanggang.

Ucapan terima kasih saya tujukan pula kepada Drs. Dendy Sugono, Pemimpin Proyek Penelitian 1988/1989, beserta stafnya : Hans Lapoliwa, M. Phil., Drs. C. Ruddyanto, Warkim Hamaedi, B.A., Rahman Idris, dan Erwin Subagio, dan Pewajah kulit Paramita Moeliono yang telah mengelola menerbitkan naskah buku ini.

Jakarta, Desember 1988

Anton M. Moeliono

## PRAKATA

Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 11–16 Agustus 1985 diselenggarakan dalam rangka persiapan penulisan buku tata bahasa baku bahasa Indonesia yang diharapkan dapat diresmikan pemakaiannya pada Kongres Bahasa Indonesia V pada tahun 1988. Penyelenggaraan seminar itu bertujuan menyediakan forum bagi para ahli bahasa dan sastrawan di Indonesia untuk bertukar pikiran dan menyatukan pandangan mengenai berbagai hal yang bertalian dengan rencana penyusunan buku tata bahasa baku itu. Sejalan dengan itu, sasaran utama yang akan dicapai di dalam seminar itu adalah kesepakatan para ahli bahasa dan sastrawan mengenai garis-garis besar tata bahasa baku, khususnya yang menyangkut (1) pokok-pokok masalah yang harus dimuat dalam tata bahasa baku, (2) kerangka acuan/model penulisan yang dipakai, (3) tingkat ketuntasan pemerian yang harus dicapai, (4) ragam bahasa Indonesia yang dipakai sebagai data, dan (5) teknik penulisan yang harus diperhatikan dalam penyusunan tata bahasa baku itu.

Upacara pembukaan seminar itu dilangsungkan di ruang rapat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat pada pukul 9.00–10.00, hari Senin, tanggal 12 Agustus 1985, sedangkan sidang-sidang dilangsungkan di hotel Interhouse, Jalan Melawai Raya, Jakarta Selatan. Upacara pembukaan itu dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam sambutannya pada upacara pembukaan seminar itu, Prof. Dr. Anton M. Moeliono, selaku Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, menyatakan, antara lain, bahwa proses pembangunan menjerus ke

pembakuan bahasa pembangunan, yaitu bahasa yang secara resmi dipergunakan untuk komunikasi pada tingkat nasional dan bahwa kadar laju pembangunan itu banyak bergantung pada taraf kemahiran berbahasa masyarakat, dalam hal ini kemahiran berbahasa Indonesia. Dalam hubungan itu, beliau menggarisbawahi peranan tata bahasa baku bahasa Indonesia sebagai pedoman pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar bagi masyarakat luas sebagaimana diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1983.

Sebelum meresmikan pembukaan seminar itu, Prof. Dr. Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyampaikan pidato pengarahannya. Beliau menguraikan secara panjang lebar pengertian bahasa sebagai sistem perambangan yang merupakan ciri khas manusia dan karena itu kelangsungan hidup suatu bahasa sangat bergantung pada manusia penuturnya. Lebih jauh beliau menguraikan perbedaan antara bahasa mati yang tinggal sebagai sistem perambangan belaka (*language*) dan bahasa hidup yang digunakan sehari-hari sebagai sarana percakapan (*speech*). Pertumbuhan bahasa Indonesia sebagai *speech* sangat pesat dibandingkan dengan penataan sistemnya. Penyusunan tata bahasa Indonesia yang mantap merupakan salah satu usaha untuk menata sistem bahasa Indonesia. Usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia bukan hanya merupakan tugas, melainkan juga merupakan amanat karena sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan suatu karunia dan nikmat yang kita terima sebagai anugerah ilahi.

Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia itu diikuti oleh sekitar 60 orang ahli bahasa dan susastra dari berbagai lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian dari seluruh Indonesia. Dalam seminar itu dibahas 14 buah makalah. Keempat belas makalah itu disiapkan dalam rangka mencari kesepakatan para ahli bahasa dan susastra mengenai pokok-pokok yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan tata bahasa baku. Makalah "Selayang Pandang Tata Bahasa Baku" oleh Prof. Dr. Anton M. Moeliono memaparkan latar belakang serta proses terjadinya ragam bahasa baku, sedangkan 13 makalah lainnya merupakan tanggapan terhadap sejumlah topik tata bahasa yang terdapat di dalam naskah *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis* (TBDBIS) yang disusun oleh tim dari Fakultas Sastra, Univer Indonesia yang diketuai oleh Harimurti Kridalaksana dalam rangka kerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Tanggapan itu dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk tata bahasa karena pada dasarnya topik-topik tersebut relevan juga untuk penulisan tata bahasa baku.

Perlu dicatat di sini bahwa selain pembahasan makalah, seminar juga mendapat kesempatan untuk mendengarkan pokok-pokok pikiran Prof. Dr. Harsja

Bachtiar, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Prof. Dr. Goenawan A. Wardhana, Dekan Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia tentang cara-cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan mutu dan jumlah tenaga ahli dalam bidang kebahasaan di Indonesia.

Selain pidato sambutan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Upacara Pembukaan Seminar, serta makalah-makalah yang dibahas dalam Seminar (disusun menurut penyajian pada Seminar), risalah ini juga memuat Simpulan Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dan Daftar Peserta dan Panitia Seminar.

Panitia Seminar

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	v
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
SAMBUTAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA PADA UPACARA PEMBUKAAN SEMINAR TATA BA- HASA BAKU BAHASA INDONESIA PADA TANGGAL 12 AGUS- TUS 1985 .....	1
SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA UPACARA PEMBUKAAN SEMINAR TATA BAHASA BAKU BA- HASA INDONESIA PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 1985 .....	4
1. "Selayang Pandang Tata Bahasa Baku" Anton M. Moeliono .....	8
2. "Kata: Pembentukan dan Penggolongannya" M. Ramlan .....	36
3. "Nomina dan Pronomina: Tinjauan terhadap Tata Bahasa Des- kriptif Indonesia" Bambang Kaswanti Purwo .....	43
4. "Numeralia dan Adjektiva dalam Bahasa Indonesia" Henry Guntur Tarigan .....	61

5.	"Verba dalam Bahasa Indonesia" D.P. Tampubolon . . . . .	84
6.	"Sudut Pandangan Kependidikan tentang Preposisi dan Konjungsi dalam Pembahasan Tata Bahasa Indonesia Baku" Soenardji . . . . .	107
7.	"Interogativa dan Demonstrativa dalam Bahasa Indonesia" Stephanus Djawanai . . . . .	119
8.	"Jenis-jenis Informasi dalam Kalimat: Konsep Dasar dan Permasalahannya" – Abbas Badib . . . . .	126
9.	"Beberapa Catatan mengenai Pemerian Kalimat Bahasa Indonesia" Sudaryanto . . . . .	135
10.	"Dasar-dasar Klasifikasi Kata" Gorys Keraf . . . . .	158
11.	"Pola-Pola Kalimat dalam Bahasa Indonesia" Samsuri . . . . .	168
12.	"Elemen dalam Wacana dan Penerapannya pada Bahasa Indonesia" Soenjono Dardjowidjojo . . . . .	184
13.	"Adverbial dalam Bahasa Indonesia" M.S. Simatupang . . . . .	197
14.	"Beberapa Catatan tentang Klausa" M. Silitonga . . . . .	201
15.	Simpulan Seminar Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia . . . . .	216
16.	Daftar Peserta Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia . . . . .	218
17.	Daftar Panitia Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia . . . . .	221

**SAMBUTAN KEPALA PUSAT PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN BAHASA PADA  
UPACARA PEMBUKAAN SEMINAR TATA BAHASA BAKU  
BAHASA INDONESIA PADA TANGGAL  
12 AGUSTUS 1985**

Yang terhormat Bapak Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Yang terhormat para pimpinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan eselon I dan II,

Para peserta seminar dan para undangan yang menyemarakkan pertemuan ini, Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada hadirin yang datang pada pagi hari ini. Atas kerelaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kita dapat langsung berhadapan muka dengan penyelenggara tertinggi di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Dasar garis haluan Pasal 36, Undang-Undang Dasar 1945, dan penjelasannya menerangkan adanya hubungan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Atas dasar itu, bahasa dan sastra sebagai bagian kebudayaan Indonesia perlu dikembangkan dan dibina demi tujuan nasional, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu dilaksanakan sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara 1983, yang menggariskan bahwa masalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah merupakan masalah nasional yang harus digarap bersama-sama.

Di dalam kerangka Repelita yang sambung-menyambung, masyarakat Indonesia telah melakukan berbagai upaya mengembangkan penyelenggaraan tata usaha kenegaraannya di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, pendidikan, serta organisasi kemasyarakatan yang menerbitkan berbagai keperluan sehingga setiap orang diharapkan dapat berkata dan menulis tentang apa saja yang dipikirkan dalam konstelasi baru itu. Proses pembangunan itu menjurus ke pembakuan bahasa pembangunan, yaitu bahasa yang secara resmi digunakan untuk keperluan komunikasi pada tingkat nasional. Proses pembangunan yang betul-betul bergaris haluan, bukan hanya merupakan partisipasi politis berbagai lapisan masyarakat. Kadar lajunya juga banyak bergantung pada taraf kemahiran berbahasa Indonesianya. Barangsiapa yang menganut prinsip kesederajatan di dalam kehidupan ini, tujuannya adalah terjangkaunya pemerataan kesempatan bekerja dan keterlibatan dalam proses modernisasi itu. Kesempatan yang diciptakan oleh proses pembangunan nasional itu banyak yang hanya dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang yang dapat berbahasa Indonesia. Penggunaan bahasa daerah sampai ke tahun 2001 pun diperkirakan masih akan terjadi karena empat puluh satu juta anak-anak di bawah usia lima belas tahun masih menggunakan bahasa daerahnya dalam pergaulan sehari-hari. Jumlah ini, 68% dari seluruh penduduk Indonesia di bawah usia 15 tahun atau 60 juta jiwa pada tahun 1980. Dalam pada itu, selama dasawarsa tujuh puluhan, jumlah penduduk yang dapat berbahasa Indonesia meningkat, baik dalam persentase maupun dalam jumlah.

Pada tahun 1971 jumlah penduduk yang tidak memahami bahasa Indonesia sebanyak 59% dan pada tahun 1980 menyusut hingga 39%. Besarnya jumlah penduduk yang tidak mampu berbahasa Indonesia berhubungan erat dengan tingkat kesejahteraan mereka. Makin besar jumlah penduduk yang memahami bahasa Indonesia, makin besar pula pendapatan per kapita yang mereka peroleh.

Hubungan keterangan di atas dengan seminar ini ialah bahwa pemerolehan bahasa Indonesia untuk bagian besar penduduk kita berlangsung lewat sistem pengajaran di berbagai tingkat. Kita pun mengetahui bahwa mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah belum memuaskan. Dalam kaitan itu, untuk pengajaran bahasa yang memadai diperlukan pedoman kaidah bahasa yang berdasarkan wawasan kebahasaan yang sehat dan mutakhir. Wawasan itu perlu dituangkan ke dalam buku tata bahasa resmi, bukan sebagai bahasa yang tidak baku yang juga dipakai secara luas di kalangan masyarakat.

Sudah sejak Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954, yang kemudian juga disimpulkan dalam Kongres Bahasa Indonesia III pada tahun

1978, Kongres Bahasa Indonesia IV pada tahun 1983, kedua-duanya di Jakarta, perlunya disusun tata bahasa baku atau tata bahasa normatif demi pengajaran bahasa yang lebih baik dan pemakaian bahasa itu sebagai alat komunikasi resmi. Seminar nasional ini bukan satu-satunya kesempatan untuk menyusun buku tata bahasa baku itu. Telah direncanakan penyelenggaraan serangkaian seminar tahunan yang bertingkat-tingkat dengan tujuan mempersembahkan buku tata bahasa baku yang ade kuat menjelang Kongres Bahasa Indonesia V pada tahun 1988.

Seminar ini juga bersasaran memantapkan kerja sama kebahasaan di antara para tokoh ilmu bahasa dan sastra agar peningkatan jumlah dan mutu tenaga kebahasaan dapat dilaksanakan dengan berencana dan bertahap. Jika dikatakan orang bahwa pada awal lepas landas Indonesia memerlukan beribu-ribu insinyur, kita pun dapat mengatakan, tanpa ingin berlebih-lebih, bahwa pada saat itu Indonesia juga memerlukan beribu-ribu ahli bahasa dan sastra yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terhormat, sudilah Anda memberikan arahan pada perundingan kami ini dan sesudah itu membuka dengan resmi Seminar Nasional Tata Bahasa Baku tahun 1985.

Wasalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh.

**Anton M. Moeliono**

Kepala Pusat Pembinaan dan  
Pengembangan Bahasa

Jakarta, 12 Agustus 1985

**SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PADA UPACARA PEMBUKAAN SEMINAR  
TATA BAHASA BAKU BAHASA INDONESIA  
PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 1985**

Bahasa adalah salah satu ciri gejala kehidupan bermasyarakat yang pengejawantahannya hanya terdapat dalam masyarakat manusia; sejauh mana kehidupan berkelompok yang juga teramati pada hewan memiliki ciri serupa, sulit kiranya untuk dipastikan. Bahkan, sangat boleh jadi kita akan sampai pada simpulan yang pasti bahwa dunia hewan tidak memiliki ciri tersebut, apabila kita menetapkan batasan yang cermat tentang apa yang kita sebut *bahasa* itu. Merumuskan batasan itu adalah tugas setiap cabang ilmu agar apa yang dijadikan masalah yang dipelajarinya jelas ruang lingkupnya dan erat hubungannya dengan perumusan batasan. Oleh karena itu, pembentukan konsep-konsep juga menjadi tuntutan karena dengan pemahaman konsep-konsep itu terjadi pula tertib-pikir yang berdaya guna.

Bila kita menerima rumusan bahwa bahasa adalah salah satu sistem perlambangan, tegaslah bahwa bahasa itu ciri manusiawi.

Berpedoman pada rumusan bahwa bahasa adalah sistem perlambangan dan dengan demikian menjadi ciri yang khusus melekat pada gejala manusiawi. Dapatlah kiranya dikatakan juga bahwa perkembangan suatu bahasa amat dipengaruhi oleh manusia sebagai pemakainya. Oleh para pemakainya itulah, suatu bahasa terjamin hidup sebab suatu bahasa tak bisa bertahan adanya tanpa ada yang mempergunakannya lagi; bahasa itu tinggal sebagai suatu sistem perlambangan yang mati. Dengan demikian, terjalin hubungan yang

sangat erat antara bahasa yang dihidupkan melalui pemakaian sehari-hari (*speech*) dan bahasa sebagai gejala sistem perlambangan yang tidak berkembang lagi oleh tiadanya pemakai-pemakai yang temporal dan kondisional. Bahasa-bahasa demikian itu tinggal sebagai bahasa belaka (*language*), tanpa daya guna sebagai sarana percakapan (*speech*). Mungkin bahasa Latin dapat kita golongkan dalam golongan bahasa mati ini.

Kiranya tidak perlu kita risaukan persoalan "mana dulu" antara bahasa yang sekadar tinggal sebagai sistem perlambangan tanpa daya guna (*language*) dengan bahasa sebagai sarana ekspresi dan komunikasi antarmanusia (*speech*).

Sepintas lalu tampaknya *speech* mendahului *language* dan pengamatan ini dikukuhkan oleh kenyataan bahwa upaya membangun suatu bahasa tidak mungkin sekadar diandalkan pada cukupnya kosa kata atau tata tertibnya, melainkan harus cukup mengimbuai manusia sebagai pendukung penggunaannya. Nasib bahasa Esperanto kiranya dapat dipilih sebagai contohnya.

Hubungan antara bahasa dan pemakaiannya tidak selalu berdampak baik terhadap bahasa itu sendiri. Bagi pemakai umumnya penggunaan bahasa itu dianggap memadai bila fungsinya sebagai sarana ekspresi dan komunikasi terpenuhi; *Pidgin English* adalah suatu misal.

Bahasa Indonesia adalah bahasa dalam arti keduanya, yaitu sebagai *speech* dan sebagai *language*. Dukung-mendukung antara keduanya sangat tampak pada perkembangan bahasa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir. Hampir tidak ada tahun yang kita lewat tanpa kata dan istilah baru yang merambah khazanah bahasa kita. Bahkan, kadang-kadang kita terkesan oleh cara-cara munculnya suatu kata atau istilah baru itu. Ada kata yang muncul dari lingkungan tertentu seperti *kencan* (dari kalangan remaja untuk mengganti *date*) atau *daur* (dari kalangan peminat ekologi dan biologi sebagai pengganti *cyclus*), bahkan ada kata yang berasal dari suatu singkatan, tetapi dimengerti dengan muatan arti yang khusus seperti *berdikari* (yang di samping kata *mandiri* masih sering dipergunakan dalam arti 'selfstanding', yang semula diungkapkan dengan serangkaian kata *berdiri di atas kaki sendiri*).

Tidak terlalu sukar bagi seorang pengamat perkembangan bahasa Indonesia untuk menyaksikan betapa pesatnya perkembangan itu. Ia cukup membacabaca kembali catatan rapat-rapat pada masa lalu, dan membandingkannya dengan yang sekarang kita dapati.

Menyaksikan kenyataannya, boleh jadi bahasa kita sebagai *speech* maju lebih pesat daripada kemampuan kita untuk memberikan penataannya yang memadai. Berbagai generasi pemakai bahasa Indonesia tidak terlalu mudah melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh yang ikut memberi ciri pada pemakaian bahasa Indonesia.

Betapapun terjadinya kejar-mengejar antara pemakainya dan bahasa Indonesia itu sendiri, tidak mungkin kita melengahkan keharusan untuk mengupayakan penataannya, antara lain berupa suatu tata bahasa yang mantap.

Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah suatu *karunia* dan *nikmat* yang kita terima sebagai anugerah ilahi. Tanpa pemilikan ini, kiranya tak akan mudah bagi kita untuk menanggung tugas mempertahankan penghayatan persatuan dan kesatuan Indonesia.

Salah satu cara menghargai anugerah itu ialah kesungguhan kita untuk berikhtiar membangun suatu penataan yang sebaik-baiknya agar segala syarat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Konon sebagai bahasa nasional ada sekurang-kurangnya tiga syarat yang harus dipenuhi; pertama, sebagai *sarana komunikasi politik*, kedua, sebagai *sarana ungkapan sastra dan budaya*, dan ketiga, sebagai *medium pengajaran* sampai tingkat tertinggi.

Bahkan, perkembangan bahasa Indonesia di ketiga lingkungan itu pesat sekali.

Tantangan utama terletak pada kewajiban kita untuk menata bahasa nasional itu dengan sebaik-baiknya. Kewajiban itu harus kita hayati bersama meskipun penanggulangannya terutama terpikul pada para ahli bahasa kita. Karya utama ini niscaya akan dijunjung tinggi oleh generasi-generasi yang akan datang sebab, bagi kita, tanpa karya utama ini mungkin nantinya lebih sukar mengejar perkembangan bahasa Indonesia sebagaimana dipergunakan sehari-hari (sebagai *speech*).

Jika kita semua menghayati pemilikan bahasa Indonesia sebagai suatu anugerah dan nikmat ilahi, maka lebih dari sekadar tugas untuk mengembangkannya dengan baik, bahasa Indonesia itu adalah amanat pula. Oleh karena itu, setiap sumbangan jasa dan pikiran untuk menata bahasa nasional ini dengan sebaik-baiknya adalah suatu "sedekah" para ahlinya demi bertahannya bahasa itu sebagai alat pemersatu kehidupan bangsa dan negara.

Kita semua menyadari betapa besarnya dampak pemakaian bahasa sehari-hari terhadap bahasa itu sebagai suatu sistem yang pada gilirannya akan juga berpengaruh terhadap tertib arus dan ungkapan pikiran kita.

Tugas penataan yang kita maksudkan itu tidak akan henti-hentinya menjadi tantangan bagi para ahli bahasa kita. Semoga para ahli itu tidak jemu-jemu mengerahkan segala upayanya dan sesungguhnya sumbangan mereka itu ibarat sedekah yang *lumintu* pengaruhnya.

Suatu amanat ditentukan nilainya oleh mereka yang mendapat kehormatan untuk menanggungnya dan beruntunglah para ahli bahasa kita yang ter-

pilih untuk bertindak sebagai penanggung amanat ini. Lebih dari sekadar curahan upaya, mereka itu cinta pada tanggungannya.

Mudah-mudahan Seminar Tata bahasa Baku Bahasa Indonesia ini akan membuah hasil yang banyak menyumbang usaha pengembangan tata bahasa Indonesia, yakni bahasa nasional yang sangat besar nilainya sebagai alat penghayat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.

Pemerintah akan senantiasa mendukung setiap upaya untuk mengembangkan bahasa Indonesia sebagai gejala kehidupan kebangsaan yang bertekad membangun menuju kejayaan dengan identitasnya sendiri.

Selamat bekerja dan semoga segala yang kita dambakan tentang pengembangan bahasa Indonesia mendapat sumbangan besar dari pertemuan ini.

**Menteri Pendidikan dan Kebudayaan**

ttd.

**Jakarta, 12 Agustus 1985**

**Prof. Dr. Fuad Hassan**

## SELAYANG PANDANG TATA BAHASA BAKU\*

Anton M. Moeliono

### 1. Diglosia dan Bahasa Baku

Agar perbedaan antara bahasa yang baku dan yang tidak baku dapat dibandingkan di dalam situasi konkret masyarakat bahasa Indonesia, di bawah ini akan disajikan lebih dahulu paparan keadaan diglosia yang relevan dengan usaha pembakuan bahasa. Situasi diglosia dapat disaksikan di dalam masyarakat bahasa jika dua ragam pokok bahasa—yang masing-masing mungkin memiliki berjenis subragam lagi—dipakai secara berdampingan untuk fungsi sosiolinguistik yang berbeda-beda. Ferguson (1959) memperkenalkan istilah *diglosia* itu dalam karangannya tentang keadaan bahasa Arab, bahasa Tamil, bahasa Yunani, bahasa Jerman-Swis, dan bahasa Kreol-Haiti.

Ragam pokok yang satu, yang dapat dianggap dilapiskan di atas ragam pokok yang lain, merupakan sarana kepustakaan dan kesusastraan yang muncul pada masa lampau masyarakat bahasa ataupun di dalam masyarakat bahasa yang lain—seperti halnya dengan bahasa Melayu untuk Indonesia dan Malaysia—; sedangkan ragam pokok yang kedua bertumbuh dalam berbagai rupa dialek rakyat. Ragam pokok yang pertama dapat disebut ragam tinggi (istilah Ferguson: *high variety*) dan ragam pokok yang kedua dapat dinamai ragam rendah (*low variety*).

Situasi diglosia cenderung muncul di dalam masyarakat bahasa jika salah satu atau gabungan dari ketiga kondisi yang berikut terpenuhi: (1) keberaksaraan terbatas pada lapisan-atas-masyarakat yang kecil; (2) adanya ke-

\* Diambil dari buku Anton M. Moeliono, 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di Dalam Perencanaan Bahasa*, hlm. 85–110.

pustakaaan yang dianggap pengejawantahan nilai-nilai budaya yang "keramat" (misalnya, agama, kebatinan, raja dan kerajaan); dan (3) jangka waktu yang lama—dalam ukuran abad— antara taraf keberaksaraan masyarakat yang tinggi dan terjangkaunya kepustakaaan itu oleh orang kebanyakan (Ferguson 1964: 4336).

Ragam yang tinggi digunakan, misalnya, untuk pidato resmi, khotbah, kuliah, atau ceramah; penyiaran lewat radio dan televisi; penulisan yang bersifat resmi; tajuk rencana dan makalah surat kabar; dan susastra, khususnya puisi. Ragam yang rendah biasa dipakai, misalnya, di dalam percakapan yang akrab di lingkungan keluarga atau dengan teman sebaya; di pasar dalam tawar-menawar; di dalam seni dan sastra rakyat seperti lenong dan cerita Kabayan; di dalam penulisan yang tidak resmi seperti surat pribadi kepada yang karib; di dalam pojok surat kabar atau kolom khusus majalah yang secara khusus dimaksudkan untuk memperagakan ragam itu.

Karena ragam tinggi disarankan untuk peranan kemasyarakatan yang dinilai lebih tinggi atau lebih berharga, maka ragam itu pun memiliki gengsi yang lebih tinggi; bahkan ragam itu dianggap lebih elok, lebih adab, dan lebih mampu mengungkapkan pikiran yang berbobot dan majemuk.

Di dalam proses pemerolehan bahasa (*language acquisition*), ragam yang rendah dipelajari sebagai bahasa ibu atau lewat pergaulan dengan teman sebaya. Anak-anak pada usia prasekolah mungkin berpeluang mendengar ragam yang tinggi, tetapi pemerolehannya terutama didapatnya lewat pendidikan formalnya. Tata bahasa ragam yang rendah dihayati tanpa pembahasan kaidah-kaidahnya; sebaliknya, tata bahasa ragam yang tinggi dipelajari lewat pemahiran norma dan kaidahnya.

Di dalam situasi diglosia terdapat tradisi yang mengutamakan studi gramatikal tentang ragam yang tinggi. Hal ini dapat dipahami jika diingat bahwa ragam itulah yang diajarkan di dalam *sistem persekolahan*. Tradisi penulisan tata bahasa Melayu, Malaysia, dan Indonesia membuktikan kecenderungan itu. Kennedy (1945), Teeuw (1961), dan Uhlenback (1967) memberikan pustaka rujukan yang sangat berguna bagi studi tentang perkembangan penulisan gramatika bahasa itu.

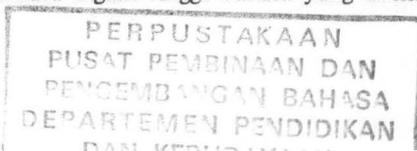
Tradisi itulah yang meletakkan dasar bagi usaha pembakuan bahasa. Norma ragam pokok yang tinggi di bidang ejaan, tata bahasa, dan kosa kata dikodifikasi. Ragam yang rendah yang tidak mengenal kodifikasi itu menunjukkan perkembangan ke arah keanekaan ejaan (cf. misalnya, Asmah, 1979), variasi yang luas di dalam lafal, tata bahasa, dan kosa kata. Bahkan jika wilayah pemakaian bahasa yang bersangkutan amat luas, seperti bahasa Arab

dan bahasa Indonesia, dapat timbul berjenis-jenis ragam rendah kedaerahan yang akhirnya tidak memungkinkan pemahaman timbal balik (*mutual intelligibility*). Penutur bahasa Arab ragam tinggi dapat berkomunikasi di dunia Arab, tetapi jika ia hanya memahiri ragam rendah yang digunakan di wilayah Magribi, misalnya, gangguan akan timbul di dalam komunikasinya dengan penutur ragam rendah di wilayah Mesir, Sudan, Siria, atau Irak. Demikian pula halnya dengan komunikasi penutur ragam rendah bahasa Melayu-Indonesia di berbagai wilayah kepulauan Nusantara yang bertambah sulit karena adanya sejumlah dialek geografis Melayu-Indonesia atau bahasa daerah yang hidup secara berdampingan dan yang mencoraki ragam itu dengan warna setempat.

Situasi kebahasaan yang baru saja dibentangkan di atas memberikan alasan untuk membedakan sekurang-kurangnya tiga macam keadaan diglosia. Jenis diglosia yang pertama merujuk ke masyarakat bahasa yang secara umum dapat disebut ekabahasa sifatnya. Situasi diglosia bahasa Arab (*al-fushā* dan *al-āmmiyyah*), seperti yang digambarkan oleh Ferguson, dapat disebutkan sebagai contohnya. Jenis diglosia yang kedua dapat disaksikan di dalam masyarakat aneka-bahasa. Jenis itu dapat diperinci lagi jadi dua subjenis. Di dalam subjenis yang pertama terdapat bahasa yang dominan dengan berbagai dialek geografisnya. Di samping itu, secara berdampingan, ada sejumlah bahasa lain yang tidak serumpun yang digunakan sebagai bahasa kelompok etnis atau sebagai bahasa perhubungan luas yang tidak resmi. Ragam tinggi bahasa yang am itu yang akan, sedang, atau sudah dibakukan mula-mula didasari norma salah satu dialektanya yang dianggap berprestise. Di dalam perkembangan kemudian dapat terjadi bahwa norma dialek yang lain juga dipadukan ke dalam ragam yang tinggi itu.

Contoh situasi subjenis itu ialah masyarakat bahasa Semenanjung Malaysia. Di situ terdapat berbagai dialek Melayu, di antaranya, Kedah, Terengganu, Kelantan, dan Johor. Dengan bertumpu pada dialek Johor terkembanglah ragam-pokok tinggi yang baru di ibu kota Kuala Lumpur yang kemudian disebut bahasa baku Malaysia. Penutur bahasanya dewasa ini agaknya lebih senang merujuk ke ragam bahasa yang disiarkan oleh radio dan televisi Malaysia di Kuala Lumpur daripada ke dialek Johor jika harus menunjuk ragam bahasa bakunya. Dalam pada itu, pelbagai variasi dialek geografis tetap berfungsi sebagai ragam yang rendah di dalam masyarakat bahasa itu.

Subjenis diglosia yang kedua melukiskan situasi kebahasaan yang lebih rumit. Di dalam masyarakat aneka-bahasa yang bersangkutan tidak saja terdapat hubungan antara ragam tinggi bahasa yang dominan dengan pelbagai



dialek geografisnya, tetapi juga interaksi antara bahasa yang dominan dengan bermacam-macam bahasa lain—yang berkerabat atau tidak—di satu pihak, dan di antara dialek geografis bahasa yang dominan itu dengan dialek setempat bahasa yang serumpun itu di pihak lain. Maka kadar interferensi yang terjadi di situ lebih tinggi daripada yang terdapat di dalam situasi subjenis yang pertama. Akibatnya, norma yang mendasari ragam pokok yang tinggi tidak dapat lagi dikatakan bertumpu pada satu dialek bahasa yang dominan itu. Patokan norma ragam yang tinggi itu akan bersifat majemuk dengan merangkum baik unsur norma ragam dialek regional maupun unsur norma yang berasal dari bahasa lain—yang serumpun atau tidak (cf. Fishman, 1967).

Contoh situasi kebahasaan itu, pada hemat penulis ini, terjadi di Indonesia. Walaupun pemerian yang berikut terlalu sederhana sifatnya, jika dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya, penjelasannya dapat membayangkan gambaran evolusi situasi dalam garis-garis besarnya. Uraian ini diajukan sebagai hipotesis yang masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut. Alisjahbana (1933, 1956) dan Teeuw (1959) secara implisit menggunakan konsep diglosia juga di dalam karangannya.

## 2. Situasi Diglosia di Indonesia

Dengan merujuk kepada Teeuw (1959) untuk fase perkembangan bahasa Melayu Kuno, hipotesis ini bertolak dari masa Melayu Klasik. Ragam yang menurut tradisi disebut bahasa Melayu Klasik, yang terdapat di dalam kepustakaan lama, sejak dahulu berfungsi sebagai ragam pokok yang tinggi. Ragam itu jugalah yang dipakai sebagai bahasa istana, bahasa persuratan, dan bahasa diplomasi. Ragam rendahnya dipakai oleh rakyat jelata yang kebanyakannya masih niraksarawan. Selama beberapa kurun waktu—yang mungkin harus diukur dalam bilangan abad—terjadi proses yang berikut. Pertama, ragam tinggi yang asli meluas ke daerah yang bukan wilayah bahasa Melayu dan menjadi bahasa kedua penutur bahasa bukan-Melayu. Di dalam proses penyebaran itu ragam tinggi itu menjadi bahasa *koiné* yang ciri-ciri gramatikalnya disederhanakan. Ragam yang dipakai di Pulau Jawa, misalnya, tidak identik lagi dengan ragam bahasa aslinya.

Dalam pada itu, terjadi proses lain yang sejajar. Ragam Melayu tinggi dan/atau ragam yang rendah menyebar pula karena dibawa oleh saudagar, nelayan, dan perantau. Dua hal dapat terjadi. (1) Ragam itu berkembang menjadi dialek Melayu yang baru karena jumlah penutur aslinya dapat bertahan di daerah pemukiman yang baru. Berbagai dialek di Sumatra, antara lain

Besemah, Serawai, Orang Darat, dan Belitung (Voorhoeve, 1955), di Kalimantan, antara lain Serawak, Brunai, Iban, Banjar, dan Kutai (Cense dan Uhlenbeck, 1958), serta dialek di kawasan Jakarta agaknya termasuk di dalam kategori itu. (2) Ragam itu mengalami percampuran dan menjadi pijin di daerah bandar laut dan pusat perdagangan. Proses pemijinan ragam itu kemudian beralih ke taraf pengkreolan ketika pijin itu menjadi bahasa ibu generasi penutur yang berikut. Berbagai variasi ragam "Melayu-Pasar" (Pijnappel, 1986; Van Eck, 1883); ragam Melayu-China (Lie Kimhok, 1884; Nio Joe Lan, 1939); ragam Melayu-Jawa (Kats, 1934); ragam Melayu-Portugis (Schuchardt, 1890); ragam Melayu-Ambon (de Clercq, 1876; Joest, 1892); ragam Melayu-Menado (de Clercq, 1871) ragam Melayu-Ternate (Van der Crab, 1878); ragam Melayu-Timor (de Clercq 1874) agaknya dapat dimasukkan ke dalam kategori bahasa kreol Melayu.

Situasi diglosia itu dapat bertahan terutama karena taraf keberaksaraan masyarakat yang rendah yang berlangsung lama sekali. Pada tahun sensus 1930 saja di antara penduduk yang berjumlah 61 juta orang, hanya 6,44% yang dapat membaca dan menulis. Seandainya anak di bawah umur sepuluh tahun tidak terhitung, angka keberaksaraan penduduk pada tahun itu hanya sebesar 30,83% (Van der Wal, 1961: 7).

Karena interaksi yang pancapihak (*multilateral*) sifatnya di antara berbagai ragam bahasa di dalam proses perkembangannya masing-masing, Schrieke dapat melaporkan pada tahun 1929 bahwa pemakaian bahasa pengantar Melayu-Riau di sekolah di pulau Jawa tidak banyak gunanya karena bahasa itu dalam bentuknya yang murni tidak dipakai di tempat mana pun di Jawa. Walaupun begitu, tidak ada jalan lain daripada mengajarkan bahasa Melayu-Riau karena semua bahan pelajaran disusun dalam bahasa itu. Tambahan pula, menurut hematnya, bahasa Melayu-Riau merupakan dasar yang kuat untuk memahami setiap ragam bahasa Melayu yang lain (Van der Wal, 1963: 491).

Di dalam laporan yang sama, jadi setahun sesudah ikrar Sumpah Pemuda, Schrieke menulis bahwa selama dasawarsa yang lampau sejenis bahasa-perhubungan Melayu sedang berkembang yang dibina oleh kantor Volkslectuur (Balai Poestaka) dan beberapa koran bumiputra dan yang dipropagandakan oleh beberapa pembicara yang berbakat di dalam rapat-rapat pertemuan.

Keterangan di atas sungguh-sungguh menunjukkan bahwa di Indonesia memang terdapat situasi diglosia di dalam pemakaian bahasa Indonesia. Akan sangat menarik jika diadakan penelitian yang lebih lanjut tentang masalah ragam bahasa Melayu yang mana yang di dalam hati pemuda 1928 dicanang-

kan menjadi bahasa Indonesia. Masalah itu lepas daripada kenyataan bahwa pengajaran bahasa di sekolah hingga kini bertumpu pada tradisi Melayu-Riau dan pada tata bahasa Van Ophujsen yang di dalam beberapa hal merupakan hasil pembakuan norma baru yang tidak terdapat di dalam ujaran Melayu-Riau secara merata (cf. Winstedt, 1913b; Teeuw, 1959).

Situasi diglosia itu pulalah yang menjelaskan mengapa setakat ini ada perbedaan yang cukup besar di antara pemakaian bahasa Indonesia ragam tulisan dan ragam lisan yang ada di pihak yang satu dan ragam lisan jelata di pihak yang lain. Jika penutur bahasa Indonesia dewasa ini berkata bahwa bahasa Indonesia termasuk golongan bahasa yang mudah, maka agaknya ia merujuk ke ragam pokok yang rendah (yang jelata) yang dimahirinya; jika ia berkata bahwa bahasa Indonesia itu sulit, maka yang dimaksudkannya agaknya ragam-pokok yang tinggi (yang adab) yang taraf pemahirannya tidak terlalu tinggi. Perujukan ke ragam bahasa yang sebenarnya berbeda rupa-rupanya menjelaskan adanya paradoks di dalam masyarakat bahwa bahasa Indonesia itu mudah dan sekaligus sukar dipelajari dan dipakai. Linguistik deskriptif yang bertujuan memerikan struktur intern bahasa sering melalaikan latar sosial budaya yang memberi peluang bagi pemakaian bahasa yang tidak "murni" dan yang beragam-ragam.

Selanjutnya, kediglosiaian di dalam masyarakat bahasa Indonesia berakibat bahwa ragam bahasa baku akan dipakai di bidang kehidupan yang juga merupakan wadah bagi ragam pokok yang tinggi. Kridalaksana (1976) menyebut empat situasi yang menuntut pemakaian bahasa baku: (1) komunikasi resmi; (2) wacana teknis; (3) pembicaraan di depan umum; (4) dan pembicaraan dengan orang yang dihormati. Jika perincian itu diklasifikasi menurut dua perangkat variabel sociolinguistik yang silang-menyilang (Stewart, 1962), (a) perilaku publik (tidak pribadi, wakil orang lain) lawan perilaku privat (pribadi, bukan wakil orang lain) dan (b) perilaku resmi (menurut aturan resmi) lawan perilaku tidak resmi (tidak menurut aturan resmi) akan diperoleh gambaran kapan pemakaian bahasa baku itu sifatnya bebas pilih.

**Bagan 1. Jenis Situasi dan Pemakaian Bahasa Baku**

	Resmi	Tidak Resmi
Publik	bahasa baku	bahasa baku atau bahasa tidak baku
Privat	bahasa baku atau bahasa tidak baku	bahasa tidak baku

Tawar-menawar di toko berlangsung dalam ragam subbaku, tetapi pembicaraan di muka umum, seperti ceramah dalam suasana yang tidak resmi mengizinkan pilihan antara ragam baku dan subbaku, atau pemakaian ragam baku dan subbaku secara berselang-seling. Hal yang sama terjadi di dalam situasi privat-resmi, seperti di dalam resepsi, percakapan dengan kenalan, percakapan dengan teman yang disaksikan oleh orang luar.

### 3. Pembakuan Bahasa

Dengan latar kerangka acuan kediglosiaan yang diuraikan di atas, masalah pembakuan bahasa Indonesia memperoleh dimensi tambahan yang hingga kini tidak sering dipersoalkan atau yang memang dianggap tidak perlu diperhitungkan bagi keberhasilan usaha pembakuan itu. Hal yang sehubungan dengan itu perlu dibahas, misalnya, ialah norma bahasa yang mana yang berlaku untuk bahasa Indonesia baku dan golongan penutur mana yang dapat dijadikan patokan bagi norma itu. Selanjutnya, dapat dipersoalkan apakah bahasa Indonesia baku kelak harus menjalankan segala jenis fungsi sosiolinguistik sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pengembang bahasa Ceko dan Norwegia (Haugen, 1966b). Pertanyaan itu akan diusahakan dijawab di dalam uraian di bawah ini.

Di dalam kepustakaan sosiolinguistik, pembakuan atau standardisasi sebagai proses, sering disamakan artinya dengan perencanaan bahasa. Sesuai dengan ancangan yang dipilih oleh penulis ini kebiasaan itu tidak akan diikuti. Telaah tentang pembakuan bahasa yang bertumpu pada konsep pengembangan sendi bahasa, akan diawali dengan penguraian norma dan dasar pilihannya; kemudian akan menyusul penjelasan tentang syarat kemantapan dan keseragaman kaidah bahasa. Setelah paparan umum tentang bahasa baku akan disajikan uraian tentang pembakuan di bidang fonologi, ejaan, lafal, dan akhirnya suatu ulasan terhadap beberapa masalah tata bahasa berdasarkan pengamatan buku tata bahasa sekolah yang beredar.

### 4. Norma Bahasa Baku

Sebagaimana diutarakan di atas, di dalam situasi diglosia ada tradisi keilmuan yang memilih ragam pokok yang tinggi sebagai dasar usaha pembakuan. Di Indonesia pun hal itu terjadi, bahkan dapat dikatakan bahwa ada kecenderungan untuk mendasarkan penyusunan tata bahasa itu pada ragam tinggi bahasa tulisan (cf. misalnya, Mees, 1951; Fokker, 1941, 1951). Jika dulu ada anggapan bahwa norma bahasa baku didasarkan pada ragam

tinggi Melayu-Riau (Van Ophujsen, 1915), perkembangan bahasa Indonesia dewasa ini menunjukkan bahwa pemilihan norma itu tidak monosentris lagi. Sambil merunut sejarah pemengaruhan kepustakaan Balai Pustaka, yang redaktornya banyak yang berbahasa ibu Minangkabau, bahasa pers dan bahasa persuratan kepegawaian sebelum perang, serta bahasa media massa dewasa ini yang didukung oleh penutur yang bermacam-macam bahasa ibunya, maka dapat dikatakan bahwa dasar penentuan norma bahasa Indonesia sudah majemuk sifatnya.

Haugen di dalam studinya tentang norma bahasa-bahasa Skandinavia (1968) mengatakan bahwa patokan yang bersifat tunggal (salah satu dialek) dan patokan yang majemuk (gabungan beberapa dialek) tidak perlu bertentangan. Namun, ditambahkannya bahwa pada saat norma itu dikodifikasi dan dimekarkan oleh penuturnya, dasarnya itu boleh dikatakan tidak dapat dikenali lagi asalnya. Hal yang sama dikemukakan oleh Ansre (1974) yang berpendapat bahwa bahasa Syona baku di Afrika berdasar pada gabungan beberapa dialek, dan oleh Byron (1976) tentang bahasa Albania baku.

Secara tentatif dapat dikemukakan bahwa dewasa ini ada dua perangkat norma bahasa yang bertumpang tindih. Yang satu berupa norma yang dikodifikasi dalam bentuk buku tata bahasa sekolah dan yang diajarkan kepada para siswanya. Yang lain ialah norma berdasarkan adat pemakaian (*usage*) yang belum dikodifikasi secara resmi dan yang antara lain dianut oleh kalangan media massa dan sastrawan muda. Keduanya bertumpang tindih karena di samping berbagai inti bersama ada norma yang berlaku di sekolah tetapi yang tidak diikuti oleh media dan sebaliknya.

Tarikan yang terdapat di antara kedua pasang norma itu dapat dicontohkan dengan bentuk *pengrusak*. Ketika timbul perbalahan di suatu sekolah tentang keberterimaan bentuk itu antara murid dan gurunya yang menuntut pemakaian bentuk *perusak*, murid itu berpendirian bahwa *pengrusak*-lah yang betul karena bentuk itu dapat dibaca di dalam surat kabar. Contoh lain ialah perbedaan pemakaian kata penggolong (*classifier*) nomina di dalam pembilangan. Ada norma yang sedang berkembang yang membatasi kata penggolong itu sampai tiga: *orang*, *ekor*, dan *buah*, yang antara lain dianut oleh penutur bahasa di kalangan media massa dan sastrawan. Norma yang dikaidahkan di dalam buku tata bahasa sekolah mencakupi perangkat yang lebih lengkap. Selain ketiga bentuk yang disebut di atas, termasuk juga *bidang*, *bilah*, *bentuk*, *butir*, *batang*, *helai*, *pucuk*, *sisir*, *utas*, dan sebagainya. Kedua norma itu dewasa ini nampaknya sedang bersaing. Sanches (1977) mengamati gejala persaingan yang sama dalam pemakaian kata penggolong di dalam bahasa Jepang.

Arah proses normatif yang sedang berjalan dan yang belum benar-benar terhablur, atau terkristalisasi, di bidang *orto-epi* (pelafalan baku), tata bahasa, dan kosa kata tampaknya bertolak dari ragam tinggi (yang adab), dan terutama ragam tulisannya, yang dipakai oleh penutur bahasa Indonesia di daerah perkotaan. Apakah akhirnya ragam tinggi bahasa yang dikembangkan di Jakarta, sebagai pusat pembangunan, yang menjadi tolok ukur bagi bahasa baku secara nasional, atautkah di sampingnya akan muncul pusat pekotaan lain yang menghasilkan pembakuan norma yang polisentris, pada saat ini tidak dapat dipastikan. Jika kita ikut mempertimbangkan kecenderungan umum di antara kalangan masyarakat luas untuk berorientasi ke kota Jakarta dalam perilaku kemasyarakatannya yang modern, maka berdasarkan pengalaman yang terjadi di Inggris, Perancis, Jepang, dan Republik Rakyat Cina, penulis ini condong pada anggapan bahwa selang satu dua generasi ragam bahasa kota Jakarta memang akan menjadi dasar bagi bahasa Indonesia baku yang mantap.

Bahwasanya ragam tinggi tulisan untuk sementara harus dipakai sebagai dasar patokan bukanlah hal yang tidak wajar. Di Jerman pun permulaan pemantapan norma bahasa baku bertalian dengan ragam tulisannya (*Schriftsprache*). Kesenjangan (*gap*) yang terdapat antara ragam tulis dan ragam lisannya teratasi lewat seleksi dan interferensi yang disengaja (Guxman, 1968). Hal itu lebih-lebih berlaku untuk bahasa Indonesia yang digunakan di dalam situasi diglosia. Pada kitalah dipikulkan beban untuk memprioritaskan penyusunan kaidah tata bahasa yang menggambarkan norma-norma bahasa adab dan yang menyatukan kedua perangkat norma yang bertumpang tindih yang disinggung di atas.

Karena pemahiran ragam tinggi itu diperoleh lewat pendidikan, kalangan penutur dan penulis teladan bahasa Indonesia tidak perlu dicari pada elite kekuasaan saja. Justru terhadap perilaku kebahasaan pejabat-pejabat penting dapat dicatat kritik di kalangan masyarakat yang menaruh minat pada pengembangan dan pembinaan bahasa. Kenyataan itu tentu tidak berarti bahwa mereka yang bukan pejabat, seperti golongan jurnalistik dan kesusastraan, lebih banyak dapat diteladan. Namun, secara potensial kedua-duanya dapat merupakan saluran yang amat baik bagi pemercepatan kemandirian norma bahasa baku. Dalam hubungan ini, dapat dibandingkan dua bahasa lain yang norma umumnya juga tidak bersumber pada pemakaian bahasa elite kekuasaan. Yang pertama ialah ragam *Demotike* (bahasa jelata) Yunani, yang pada tahun 1976 oleh Perdana Menteri Karamanlis diputuskan jadi bahasa resmi negara itu. Yang kedua ialah *Landsmal* di Norwegia yang sejak tahun 1929 diberi nama *Nynorsk* (bahasa Norwegia baru) sebagai tandingan *Riksmal*

(bahasa negara) atau *Bokmal* (bahasa baku). Keduanya bersandar pada dialek daerah pedalaman atau pada ujaran sehari-hari di daerah pekotaan (Haugen, 1966a).

Guxman (1968) mengutarakan bahwa di Rusia tokoh sastrawan seperti Pushkin, Lermontov, dan Gogol lewat karya-karyanya ikut memantapkan norma umum bahasanya. Hal yang sama terjadi di Cina dan Jepang berkat tulisan Lu-Sun dan Shimazaki Toson. Di Jerman penyeragaman norma bahasa pustaka dihubungkan dengan karya Lessing, Goethe, Schiller, dan Heine. Di Perancis peranan Corneille, Racine, dan Moliere sebagai pemberi saham bahasa pustaka nasional dapat diimbangkan dengan peranan Shakespeare untuk bahasa Inggris. Jika dari pengalaman itu diambil hikmatnya, pembakuan bahasa Indonesia harus didasarkan pada kesejajaran antara usaha para ahli teori bahasa yang normatif dan kegiatan para sastrawan yang selayaknya lebih sadar akan potensi pengaruhnya terhadap pengembangan bahasa.

Setakat ini, agaknya secara hati-hati harus dikatakan bahwa patokan norma ragam tulisan yang adab dapat ditemukan di dalam induk karangan dan makalah ahli profesi yang dimuat di dalam surat kabar dan majalah yang terkemuka dan yang secara terbuka menyatakan keikatan (*commitment*) dan dukungannya pada usaha pengembangan dan pembinaan bahasa. Modifikasi itu perlu ditambahkan karena ada pendapat di kalangan jurnalistik bahwa bahasa Indonesia harus dibiarkan bertumbuh atas kekuatannya sendiri. Di samping itu, buku yang dikeluarkan oleh penerbit yang mempekerjakan redaktur bahasa merupakan sumber patokan norma yang lain.

## 5. Pembakuan dan Keseragaman

Buku atau standar berpraanggapan adanya keseragaman. Proses pembakuan sampai ke taraf tertentu berarti penyeragaman norma dan kaidah. Keseragaman itu tentu tidak bersifat mutlak, baik menurut ukuran waktu maupun menurut ukuran tempat. Salah paham yang tersebar di kalangan awam berupa anggapan bahwa dengan pembakuan akan terjadi pembekuan. Ferguson (1968:31) merumuskan pembakuan itu sebagai " . . . process of one variety of a language becoming widely accepted throughout the speech community as a supradialectal norm—the "best" form of the language—rated above regional and social dialects, although these may be felt appropriate in some domains." Jadi, ragam baku ialah ragam yang diterima di kalangan masyarakat yang luas, dan yang mengizinkan modifikasi kecil di sana-sini.

Keseragaman itu berhubungan dengan ciri bahasa baku yang lain, yakni kemantapan atau kestabilan yang luwes (Havranek, 1932, 1938; Garvin, 1973).

Kemantapan itu sebenarnya berlaku untuk norma setiap bahasa; juga di dalam masyarakat bahasa primer. Kemantapan yang luwes diperlukan untuk bahasa baku demi keefisienannya karena kaidahnya jangan berubah-ubah setiap kali. Kodifikasi yang berupa pedoman ejaan, buku tata bahasa, kamus baku, atau kamus istilah membantu pemantapan kaidah dan norma bahasa.

Rubin (1977b) dalam karangannya tentang pembakuan bahasa di Indonesia menulis bahwa kodifikasi bukan satu-satunya jalan untuk menegaskan kesepakatan tentang norma. Kodifikasi tidak selalu perlu termasuk proses pembakuan karena persetujuan itu mungkin juga terdapat tanpa adanya kodifikasi. Pernyataannya itu memang benar jika dilihat bahwa kaidah pembentukan kalimat yang sekarang terdapat di dalam tulisan yang diterbitkan di Jakarta, ada yang belum terdapat di dalam buku tata bahasa. Walaupun begitu, tidak dapat diingkari bahwa barang apa yang dicetak bagi orang banyak memiliki wibawa—yang ada kalanya melebihi nilai intrinsiknya. Kemantapan itu harus bersifat luwes agar ada peluang untuk modifikasi kaidah bahasa (yang dikodifikasi) sesuai dengan perubahan kebudayaan dan bahasa.

Pembakuan atau penstandaran bahasa dapat diselenggarakan oleh badan pemerintah yang resmi atau oleh organisasi swasta. Di Amerika, misalnya, para penerbit mengeluarkan pedoman gaya tulis-menulis yang kemudian dianggap baku sehingga pengarang yang ingin menerbitkan karyanya, mau tidak mau, mengikuti petunjuk yang ditentukan oleh kaum penerbit. Di antara penerbit Indonesia tidak ada pegangan yang mantap. Ada yang mengizinkan perangkaian penulisan kata depan dengan kata nomina di belakangnya; ada yang mengizinkan penulisan angka (2) di dalam teks terbitan walaupun sudah ada pedoman umum ejaan yang resmi. Di Indonesia, badan pemerintah yang ditugasi kodifikasi pembakuan bahasa ialah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang namanya, statusnya, dan cakupan karyanya sudah lima kali berubah. Berkat anggaran yang lebih besar dan berkat perbanyakannya jenis kegiatannya, lembaga yang pernah disebut "kerdil" itu akhirnya ini sudah mendapat kepercayaan masyarakat ramai. Namanya yang setiap minggu sekali dapat dibaca di kaca pesawat televisi pada acara penyuluhan bahasa sudah dikenal di setiap kabupaten Indonesia.

## 6. Fonologi dan Ejaan Baku

Di dalam kepustakaan linguistik, fonologi bahasa Indonesia diperikan seakan-akan kita berhadapan dengan struktur yang lebih kurang sama di

mana-mana. Realisasi fonem secara fonetis yang berlainan diakui, tetapi ada kalanya status fonem /f/, /z/, /š/, dan /x/ diragukan, atau statusnya hanyalah sebagai varian kelanggaman (*stylistic variant*) fonem yang sejati (cf. misalnya Andreev, 1957), atau sebagai fonem pungutan (antara lain Lapoliwa 1977).

Berikut ini diajukan pandangan alternatif yang bertumpu pada konsep diasistem yang dapat menampung (1) semua varian fonetis sebagai pewujud fonem yang sama di dalam posisi yang sama; dan (2) gejala interferensi akibat masuknya unsur pungutan yang memperoleh tempat yang tetap, dan yang mengubah fonotaksis subsistem yang baku (cf. Jones, 1950; Weinreich, 1953; Byron, 1976).

Dengan menerima ancangan diasistem itu, perbedaan anggapan bahwa fonem vokal Indonesia itu delapan (antara lain Samsuri, 1960 dan Dardjowidjojo, 1966) atau enam jumlahnya (antara lain Alisjahbana, 1949-1950; Kahler, 1956; Andreev, 1957; Wolff, 1965; Halim, 1974a, 1974b) dapat disingkatkan karena ntara perangkat.

Bagan 2a

i		u
e	ə	o
ɛ	a	ɔ

dan

Bagan 2b

i		u
e	ə	o
	a	

pasangan [e] dan [ɛ], serta [o] dan [ɔ], yang setahu penulis ini tidak pernah berposisi, masing-masing dapat dimasukkan ke dalam diafon yang sama.

Demikian pula sistem konsonan dapat dianggap berdiri atas dua subsistem pokok yang berdampingan. Yang satu berlaku untuk ragam baku, yang lain untuk ragam yang subbaku. Jika diperhatikan dua bagan inventaris konsonan yang berikut akan tampak perbedaannya.

**Bagan 3. Subsistem konsonan ragam baku**

Letupan ts.	p	t	c	k	?
bs.	b	d	j	g	
Geletar		r			
Sengauan	m	n	ñ	ŋ	
Frikatif ts.	f	s	s	x	h
bs.		z			
Sampingan		l			
Luncuran	w		y		
	Labial	Dental Alveolar	Alveo- Palatal	Velar	Glotal

**Bagan 4. Subsistem konsonan ragam tak baku**

Letupan ts.	p	t	c	k	?
bs.	b	d	j	g	
Geletar		r			
Sengauan	m	n	ñ	ŋ	
Frikatif ts.	—	s	—	—	h
bs.		—			
Sampingan		l			
Luncuran	w		y		
	Labial	Dental Alveolar	Alveo- Palatal	Velar	Glotal

Bagan di sebelah atas melambangkan sistem fonologi ragam yang baku, yang jumlah frikatifnya lebih banyak: /f/, /s/, /z/, /š/, /x/, /h/, lawan /s/ dan /h/. Jika kedua subsistem pokok itu dianggap dua kutub pada suatu skala,

maka di antaranya terdapat sejumlah subsistem lain yang berbeda dari subsistem yang dilambangkan oleh bagan dalam jumlah frikatif yang berkisar di antara tiga dan lima, dan selalu termasuk di dalamnya /s/ dan /h/.

Penalaran yang sama dapat diajukan tentang perangkat diftong yang jumlahnya tiga: /ay/, /aw/, dan /oy/. Variasi perwujudan fonetiknya yang mungkin kedapatan, seperti [ai], [ɛi], [œi] atau [au] dan [ɔu], yang agaknya termasuk variasi dialektal, merupakan gejala tumpang tindih di antara diafon (cf. Jones, 1950).

Fonotaksis yang berhubungan dengan struktur suku kata mencerminkan lagi perbedaan di antara dua ragam bahasa yang bertumpu pada dua subsistem konsonan yang berbeda itu. Perhatikanlah bentuk kanonik suku kata yang di bawah ini.

- |        |         |           |             |
|--------|---------|-----------|-------------|
| 1. V   | a(nak)  | 6. KKVK   | trak(tor)   |
| 2. VK  | ar(ti)  | 7. VKK    | eks(kavasi) |
| 3. KV  | ra(kit) | 8. KVKK   | (kon)teks   |
| 4. KVK | pin(tu) | 9. KKVKK  | (kom)pleks  |
| 5. KKV | pra(ja) | 10. KKKV  | stra(tegi)  |
|        |         | 11. KKKVK | struk(tur)  |

Ragam bahasa baku mengenal kesebelas pola struktur suku kata yang mengizinkan berbagai jenis gugus konsonan (*consonant cluster*). Di sampingnya terdapat beberapa subsistem lain yang jumlah pola struktur suku katanya bervariasi di antara lima dan sepuluh, dan selalu termasuk di dalamnya pola 1, 2, 3, dan 4.

Ejaan bahasa Indonesia dengan huruf Latin untuk ketiga kali dibakukan secara resmi pada tahun 1972, setelah berlakunya ejaan Van Ophujsen pada tahun 1901 dan ejaan Soewandi pada tahun 1947. Uraian tentang asas dan sejarah pembakuan ejaan itu dapat ditemukan dalam Asmah (1967, 1979), Kridalaksana (1968, 1970, 1978), Samsuri (1960), dan Moeliono (1975), yang masing-masing memberikan pustaka rujukan yang lebih lanjut.

Pada tahun 1975 aturan ejaan yang baku dilengkapi dengan buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* yang secara terperinci menjelaskan kaidah tentang (1) pemakaian huruf, (2) penulisan huruf, (3) penulisan kata, (4) naskah kamus ejaan yang memuat daftar kata baku beserta penyukuannya yang ortografis dirampungkan pada tahun 1973. Naskah itu, yang akan menggantikan *Kitab Logat Melajoe*, karangan Van Ophujsen (1901) yang sudah kedaluwarsa, hingga kini masih menunggu penerbitannya. Pada tahun yang sama dikeluarkan buku *Pedoman Umum*

*Pembentukan Istilah* yang membakukan kaidah pengejaan istilah asing yang diserap ke dalam korpus bahasa Indonesia.

## 7. Masalah Lafal Baku

Pembakuan lafal bahasa Indonesia merupakan masalah yang rumit karena situasi keanekaragaman bahasa. Di samping perbedaan lafal orang seorang sebagai akibat interferensi fonologi bahasa daerah yang menjadi bahasa pertamanya, terdapat juga kesenjangan antara fonologi ragam yang baku dan yang tak baku. Ada pendapat bahwa harus ada keleluasaan dalam hal lafal selama lafal itu tidak mengganggu arus perhubungan kebahasaan di antara penuturnya. Bahasa Inggris yang dilafalkan penutur di Britania, Amerika Serikat, Australia, Kanada, India, dan Singapura, misalnya, juga tidak mengganggu pemahaman timbal balik. Anggapan lain dianut oleh seorang yang berpendapat bahwa lafal yang santun mutlak diperlukan. Kata mereka, "Dulu pun kami mempelajari lafal adab bahasa Belanda yang umum." (*algemeen beschaafde uitspraak*). Pengajaran bahasa Indonesia tanpa pembiasaan lafal baku merupakan pekerjaan yang setengah-setengah, demikian ulasan beberapa guru bahasa.

Andaikan keinginan akan membakukan lafal diwujudkan sekarang, maka masalah yang timbul ialah lafal siapa yang harus dijadikan tolok agar dapat disebut lafal baku bahasa Indonesia. Setakat ini, lafal baku itu dirumuskan dalam bentuk negatif: lafal yang tidak menunjukkan ciri-ciri kedaerahan (cf. Abercrombie, 1956, 1967). Rumusan itu mungkin berlaku sepenuhnya jika dengan kedaerahan itu dimaksudkan ciri-ciri lafal bahasa Jawa, Sunda, Bali, Batak Toba, Aceh, Madura, yang dikenali secara luas oleh penutur bahasa. Apakah lafal bahasa Indonesia yang dicoraki fonetik bahasa Lampung atau Banjar, yang tidak dikenal secara luas, tidak menunjukkan ciri-ciri kedaerahan? Agaknya di sini kita berhadapan dengan masalah yang berhubungan dengan ada tidaknya stigma sosial yang lekat pada lafal tertentu.

Seandainya lafal baku hendak diusahakan juga, maka sarana dan saluran yang terpenting ialah para penyiar dan pewara (*announcer*) pada jaringan radio dan televisi. Apa yang terjadi dengan lafal yang diperdengarkan oleh BBC di Inggris (*received pronunciation*) dan oleh jaringan radio dan televisi di Amerika Serikat (*network English*) mungkin juga akan berhasil di Indonesia. Agar maksud itu berhasil, diperlukan kerja sama yang erat antara Pusat Bahasa dan jawatan radio dan televisi yang bersangkutan.

## 8. Masalah Tata Bahasa

Walaupun tata bahasa Indonesia belum pernah dibakukan secara resmi, buku tata bahasa, baik yang berupa saduran karangan asli Belanda maupun yang berupa karya asli, yang banyak dipakai di perguruan kita, banyak pengaruhnya sebagai alat pembaku. Di sini layak diperbedakan dua paham yang kadang-kadang dikacaukan. Yang disebut tata bahasa itu mungkin dapat didefinisi sebagai berikut: "seperangkat norma yang memerikan pemakaian bahasa, baik keteraturannya maupun penyimpangan dari keteraturannya itu." Buku tata bahasa merupakan kodifikasi norma itu dalam bentuk tertulis yang disebut kaidah. Jadi, buku tata bahasa merupakan kumpulan kaidah tata bahasa yang kepadanya bergantung pada taraf kecermatan dan kecanggihannya (*sophistication*) penyusunannya.

Di antara buku tata bahasa yang pernah atau yang masih banyak pengaruhnya terhadap pandangan kebahasaan orang yang bergerak di bidang pengajaran yang dapat disebut ialah karangan Van Ophujsen (1915); Sarasoganda (1910) yang merupakan saduran Gerth van Wijk (1889); Zain (1942); Lubis (1946); Alisjahbana (1949, 1950); Mess (1951); Fokker (1951); Poedjawijatna dan Zoetmulder (1955); Slametmuljana (1956, 1957), dan Keraf (1970). Di samping jasanya sebagai sarana pembakuan, kadang-kadang memang satu-satunya, dalam pengajaran bahasa yang menjaga kesinambungan pemantapan kaidah tata bahasa, buku yang pernah dipakai secara luas itu, jika diukur dari segi kepadaan tidak sepenuhnya menggambarkan pemakaian bahasa masa kini lagi. Akibatnya, muncul ketidakserasian antara kaidah yang diperiksa dan kenyataan orang berbahasa. Karena kaidah dan praktek tidak sesuai, kemantapan lama mulai goyah sehingga di sana-sini timbul ketidakpastian. Berikut ini akan dibahas beberapa sebab yang mungkin melatari ketidakpastian itu.

Moeliono (1978) mengajukan tiga jenis ketidakpadaan yang menyebabkan keadaan yang mengambang-ngambang di dalam pemantapan kaidah tata bahasa. Ketakpadaan itu menyangkut (1) teori atau wawasan bahasa, (2) pelaksanaan wawasan itu; dan (3) produk pelaksanaan teori bahasa. Karena masalah pelaksanaan dan hasil-pelaksanaan teori bahasa tidak termasuk jangkauan makalah ini, maka di bawah ini sekadar diuraikan soal teori atau wawasan bahasa.

Teori bahasa diperlukan untuk menetapkan norma atau baku yang memadai dan yang secara merata dapat diterima dan dipatuhi (cf. Havranek, 1932). Teori fonologi hingga tahun lima puluhan yang mendasari uraian tata bunyi Indonesia jelas menunjukkan pengaruh fonologi Belanda. Itulah sebab-

nya, mengapa sampai sekarang dipertikaikan orang tempat tekanan kata walaupun tekanan di dalam bahasa Indonesia berbeda peranannya dengan tekanan di dalam bahasa Belanda sebagaimana dibuktikan oleh Halim (1974b). Demikian pula penamaan *tekanan dinamik*, *tekanan tinggi*, dan *tekanan waktu* (antara lain Alisjahbana, 1949) mengilaskan pandangan penulis Belanda yang mencampurkan gejala fonetik yang berbeda-beda, yakni tekanan, nada, dan jangka (bunyi) (cf. Moeliono, 1967).

Wawasan terhadap fonotaksis Indonesia yang tidak bertumpu pada perbedaan antara ragam baku dan yang takbaku menghasilkan uraian yang saling bertentangan. Alisjahbana, misalnya, sampai ke karangannya yang mutakhir (1978a; 1978b) membela kesederhanaan struktur suku kata—tanpa gugus konsonan—yang sedapat-dapatnya harus dipertahankan. Ahli bahasa lain, termasuk penulis ini, berpendapat bahwa kesederhanaan itu tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan keefisienan atau kemodernan bahasa.

Di bidang morfologi, buku tata bahasa Indonesia yang beredar kurang eksplisit dalam pembedaan kaidah yang produktif dan yang takproduktif; kaidah yang wajib dan yang manasuka; kaidah yang daya terapnya luas dan yang daya terapnya sempit. Berikut ini beberapa contoh. Mengapa *kebanjiran* mungkin, dan *ke-air-bah-an* tidak? Apakah bedanya di antara frasa *bunga putih* dan *bunga yang putih*? Mengapa bentuk *teruji* tidak dapat ditafsirkan 'diuji dengan tidak sengaja' atau 'diuji dengan tiba-tiba'.

Ketakadaan dalam pemerian itu agaknya juga merupakan salah satu sebab timbulnya "bahasa Indonesia orang asing" yang secara menarik dilukiskan oleh Richard (1978). Di dalam makalahnya itu, dikemukakannya strategi belajar individu dalam pemerolehan bahasa kedua yang menciptakan kembali bagi dirinya sistem kebahasaan yang bersangkutan. Di dalam proses pemelajaran itu ada kecenderungan umum ke arah penyederhanaan atau simplifikasi kaidah tata bahasa. Penyederhanaan itu berupa peningkatan taraf generalisasi kaidah dengan meluaskan daya terapnya dan dengan meninggalkan sebarang kaidah yang mempunyai daya terap yang terbatas. Dalam hal terjadi keragu-raguan, misalnya pemilihan antara *ber-* dan *meng-*, strategi yang paling aman ialah tidak menggunakan kedua-duanya. Berikut ini beberapa contoh yang diajukan oleh Richards. *Kami mencerita tentang keadaan ini. Kami pinjam dari orang lain yang sewa untuk enam bulan. Tetapi orang itu melari . . . . Saya juga masih kenal baik dan juga hubungan baik dengan dia. Saya umur 23 tahun.*

Di bidang sintaksis, benarkah hukum D-M yang menyatakan bahwa unsur yang "Diterangkan" mendahului unsur yang "Menerangkan" merupakan

kaidah pokok bangun frase? Jika frase *tiga orang, akan datang, masih harus menerima*, yang menggambarkan urutan sebaliknya, yakni M-D, harus dianggap perkecualian terhadap hukum D-M, tidakkah di sini terjadi pemiuhan atau distorsi pemerian struktur yang dimungkinkan di dalam bahasa? Tidakkah lebih sepadan mengakui kedua pola itu dipakai secara berdampingan? Bahkan urutan *sebuah kitab sejarah* menunjukkan pola M-D-M. Di sini pun, agaknya, terlihat kesenjangan antara wawasan "kesederhanaan bahasa" yang tidak adekuat dengan wawasan bahwa ragam baku bahasa Indonesia berbagi sejumlah semesta bahasa yang juga terdapat di dalam bahasa yang lazim dianggap lebih kompleks (cf. juga Moeliono, 1967 dan lebih lanjut Lehmann, 1972). Selanjutnya dapat diketengahkan bahwa uraian tentang tipe frasa, tipe klausa, dan tipe kalimat yang amat ringkas di dalam buku tata bahasa sekolah seakan-akan mencerminkan kenyataan bahwa sintaksis Indonesia tidak mengenal bangun kompleks yang bersusun-susun. Pencampuran ancangan diakronis dapat disaksikan pada pernyataan bahwa bangun parataksis merupakan bangun yang asli, sedangkan bangun hipotaksis harus dianggap hasil pengaruh sintaksis asing.

Akhirnya dapat dikemukakan dua masalah yang bertalian dengan kategori semantik yang menggambarkan ketakpadan teori bahasa juga. Oleh sebagian ahli tata bahasa pengulangan bentuk dianggap upaya penandaan kategori jumlah-banyak, tetapi mengapa kaidah itu dapat dijalankan dengan tidak bertaat asas? Agaknya dapat disetujui bahwa kalimat *Peraturan ini berlaku untuk badan-badan usaha pemerintah dan perusahaan swasta* termasuk kalimat yang gramatikal. Namun, mengapa kata *perusahaan* di situ tidak perlu diulang dan adakah perbedaan maknanya dengan kalimat *Peraturan ini berlaku untuk badan-badan usaha pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta*? Jika pengulangan bentuk dianggap salah satu upaya sintaksis, maka sekurang-kurangnya pernyataan itu perlu diberi modifikasi, baik dari sudut daya terapinya maupun dari sudut langgam wacana. Wawasan baru atas gejala pengulangan bentuk dalam bahasa Indonesia dapat dibaca, misalnya, dalam tulisan Rosen (1977) dan Simatupang (1979).

Demi pemantapan kebakuan bahasa, buku tata bahasa selayaknya memberikan pedoman bagi bentuk idiom yang hingga kini masih terlalu banyak bervariasi. Keleluasaan itu dapat dipandang indah dari jurusan langgam bahasa, tetapi keleluasaan itu dapat juga dianggap meningkatkan ketakpastian kaidah yang pada gilirannya mengganggu kemantapan. Agaknya sudah waktunya ditentukan pilihan di antara *sampai ke* dan *sampai dengan*; antara *bergantung (ke)-pada* dan *tergantung dari*; antara *terdiri atas* dan *terdiri (dari)*;

antara *pandangan atas* dan *pandangan terhadap*; dan antara *berbicara tentang* dan *membicarakan tentang*. Penulis ini sendiri beranggapan bahwa badan kodifikasi bahasa Indonesia berwenang menyarankan bentuk pilihannya agar kemantapannya dapat tercapai dengan lebih cepat.

Paparan yang disajikan di atas dapat menimbulkan pertanyaan apakah di dalam situasi ketidakmantapan diperlukan buku tata bahasa yang normatif. Jika konsep normatif ditautkan dengan norma yang dapat memantapkan kaidah tata bahasa, kata *normatif* tidak perlu berarti 'dogmatis', 'kolot', atau 'tidak ilmiah'. Sebaliknya, determinisme atau relativisme di dalam linguistik tidak perlu berarti 'ilmiah' karena sikap yang bertopang pada evolusi alamiah atau toleransi. Sikap ilmiah di sini ialah jika orang mengenali adanya masalah kebahasaan di Indonesia dan berhasrat mencari jalan bagaimana mengatasinya. Usaha pengembangan dan pembinaan bahasa memang melakukan intervensi terhadap evolusi alamiah bahasa dan pengembangan atau pembinaan bahasa dapat membedakan sikap toleransi di dunia akhlak—yang merupakan kebajikan—dari setiap toleransi yang merupakan kendala di dalam proses pembakuan bahasa.

Keprihatinan pengembang dan pembina bahasa mendorongnya berjalan di antara kaum yang berteriak, "*Leave your language alone.*" (Hall, 1950) dan golongan yang percaya bahwa kita berhadapan dengan "*the failure of modern linguistics in the face of linguistic problems of the twentieth century*" (Alisjahbana, 1965). Penelitian dan pemerian bahasa yang cermat dapat seiring dengan, bahkan merupakan prasyarat bagi, pengembangan dan pembinaan bahasa yang normatif. Linguistik aliran Praha menunjukkan bahwa hal itu dapat dilaksanakan (Fried, 1972).

Dengan mengesampingkan prasangka akan kemubaziran linguistik akibat kelalaian memperbedakan teori dan penerapannya serta dua ancangan kebahasaan yang bertalian, penulis ini mendukung cita-cita Alisjahbana (1976, 1978a, 1978b) yang sudah dicanangkannya sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu agar penyusunan tata bahasa yang menggambarkan norma bahasa dengan memadai memperoleh prioritas utama di dalam kegiatan pengembangan sandi bahasa. Sesudah itu, perlu dijabarkan berbagai tata bahasa pedagogis untuk tujuan pengajaran. Perbedaan di antara kedua jenis tata bahasa itu perlu ditegaskan karena tujuannya berlainan. Secara ideal, tata bahasa pedagogis itu, yang berdasarkan teori belajar yang adekuat, bersasaran kemampuan pemelajar bahasa agar ia mengenali kaidah bahasa dan kemudian mahir menghasilkan ujaran dan tulisan yang gramatikal (cf. Sporta, 1973). Buku tata bahasa yang normatif menurut arti yang disebutkan di atas bukanlah buku pegangan siswa sekolah.

## 9. Taraf Kebakuan Bahasa Indonesia

Garvin dan Mathiot (1968) menggambarkan perbedaan ragam baku bahasa Guarani di Paraguay dengan ragam bahasa jelata (*folkspeech*)-nya berdasarkan praanggapan bahwa konsep 'budaya-kota dan jelata yang diajukan oleh Redfield (1941) dapat diterapkan juga pada bahasa. Dengan menggunakan seperangkat kriteria yang dirumuskan oleh aliran linguistik Praha, antara lain oleh Havranek dan Mathesius, mereka beranggapan bahwa bahasa baku merupakan korelat kebahasaan kebudayaan kota (dengan mengandaikan adanya kota dalam masyarakat bahasa yang memakai, atau bercita-cita memakai, bahasa baku).

Gagasan ini sangat menarik dan karena penulis ini beranggapan bahwa pembakuan bahasa Indonesia juga merupakan gejala bahasa kekotaan, maka pada hemat penulis ini kriteria itu pun dapat dijadikan tolok banding untuk mengukur taraf kebakuan bahasa Indonesia kebudayaan kota. Penerapan kriteria itu, di samping itu, dapat juga menggambarkan taraf penyebaran bahasa baku di antara berbagai-bagai segmen masyarakat bahasa, sebagaimana juga dapat dilukiskan taraf penyusupan unsur kebudayaan kota ke dalam berjenis-jenis subkebudayaan yang membawahnya atau yang mengitarinya (cf. Fishman, 1975, khususnya pasal "The Urban Condition"). Tiga perangkat kriteria pembeda diajukan untuk bahasa baku yakni (1) sifat intrinsiknya, (2) fungsinya di dalam kebudayaan masyarakat bahasa, dan (3) sikap masyarakat bahasa terhadap bahasa baku.

Ada dua sifat intrinsik bahasa baku yang disarankan: (a) kemandapan yang luwes (*flexible stability*), gagasan yang semula dikemukakan oleh Mathesius, dan (b) kecendekiaan (*intellectualization*), gagasan yang semula diajukan oleh Havranek (1932). Karena pada hemat penulis ini sifat kecendekiaan lebih tepat dianggap ciri yang menandai kemodernan bahasa (Alisjahbana, 1970a), sifat kecendekiaan di dalam karangan ini digantikan oleh sifat keseragaman optimal di dalam kaidah dan bentuk. Sifat-sifat itu hendaknya dipandang sebagai taraf di dalam suatu proses sehingga memungkinkan perbandingan kuantitatif. Kita, misalnya, dapat mengatakan kaidah ejaan kata Indonesia lebih mantap dan seragam daripada kaidah penyerapan unsur pungutan.

Jika ditinjau dari sudut kemandapan dan keseragaman kaidah, uraian di atas memberikan alasan yang cukup untuk mengambil simpulan bahwa usaha pembakuan bahasa Indonesia belum mencapai tujuannya dengan sepenuhnya. Karena hal itu, agaknya, berhubungan erat dengan situasi diglosia di Indonesia, dengan taraf keberaksaraan yang belum cukup tinggi dan dengan peranan

ragam tulisan yang masih terbatas di dalam peri kehidupan kebanyakan orang, maka proses pemercepatan pembakuan itu pun bergantung pada proses pemercepatan faktor di luar bahasa yang disebutkan itu.

### Pustaka Acuan

- Abercrombie, David. 1956. *Problems and Principles: Studies in the Teaching of English as a Second Language*. London: Longmans, Green.
- Abercrombie, David. 1967. *Elements of General Phonetics*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Ali, Lukman dan Achadiati Ikram. 1967. *Bahasa dan Kesusastraan sebagai Tjermin Manusia Indonesia Baru*. Jakarta: Gunung Agung.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1933a. "Bahasa Indonesia". Di dalam *Poedjangga Baroe* 1: 129-178.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1949-50. *Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia*. 2 jilid. Djakarta: Pustaka Rakjat. (edisi ke-42, 1978).
- Alisjahbana, S. Takdir. 1956. *Sedjarah Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakjat.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1965. *The Failure of Modern Linguistics in the Face of Linguistic Problems of the Twentieth Century*. Kuala Lumpur: University of Malaya.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1970a. "The Writing of Normative Grammar for Indonesian Language". Di dalam Alisjahbana, ed. 1970:246-254.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1970b. *The Modernization of Languages in Asia*. Kuala Lumpur: The Malaysian Society of Asian Studies.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1976c. *Language Planning for Modernization: The Case of Indonesia and Malaysia*. The Hague: Mouton.
- Alisjahbana, S. Takdir. 1978a. "The Concept of Language Standardization and its Application to the Indonesian Language". Di dalam Perez, *et al.*, ed. 198:19-41.

- Alisjahbana, S. Takdir. 1978b. "Tujuan dan Sejarah Pembinaan dan Pembangunan Bahasa Indonesia". Di dalam Sumantri, *et al.*, ed. 1978: 1-11.
- Allen, J.P.B. dan S. Pitcorder, ed. 1973. *Readings for Applied Linguistics*, jilid 1. London: Oxford University Press.
- Andreev, N.D. 1957. "Some Problems of Bahasa Indonesia Phonology". *Studia Linguistica I. Lund*.
- Ansre, Gilbert. 1974. "Language Standardization in Sub-Saharan Africa" Di dalam Fishman, ed. 1974:369-389.
- Asmah Haji Omar. 1967. "Towards the Unification of Bahasa Malaya and Bahasa Indonesia: An Account of Efforts to Standardize the Spelling System of Malay in Malaysia and Indonesia". *Tenggara* 1: 112-115.
- Asmah Haji Omar. 1979. "Implementation of Language Status Planning: Procedures, Problems and Evaluation". Di dalam Asmah, *Language Planning for Unity and Efficiency: A Study of the Language Status and Corpus Planning of Malaysia*. Kuala Lumpur: University of Malaya. hlm. 32-48.
- Blount, Ben dan Mary Sanches, ed. 1977. *Sociocultural Dimensions of Language Change*. New York: Academic Press.
- Byron, Janet L. 1976. *Selection among Alternates in Language Standardization: The Case of Albanian*. The Hague: Mouton.
- Clercq, F.S.A. de. 1871. "Eene Bijdrage tot de Kennis van het Maleisch der Minahasa". *TNI* 3/5 (2): 403-423.
- Clercq, F.S.A. de, "Korte Bijdrage over het Maleisch van Timor". *Bijdr TLV* 3/9: 283-290.
- Clercq, F.S.A. de. 1876. *Het Maleisch der Molukken*. .Batavia.
- Crab, P. van der. 1878. "Geschiedenis van Ternate, in Ternataanschen en Maleischen Tekst Beschreven door den Ternataan Naidah, met Vertaling en Aanteekeningen". *BijdrTLV* 4/2: 381-493.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 1966. "Indonesian Syntax." Ph.D. thesis, Georgetown University, Washington, D.C.
- Eck, R. van. 1883. "De Talen van Indie". *De Indische Gids* 5/1:146-170.
- Ferguson, Charles A. 1962. "The language factors in natural development". Di dalam Frank A. Rice, ed. *Study of the role of second language in Asia, Africa, and Latin America*, 8-14. Washington: Center for Applied Linguistics.

- Ferguson, Charles A. 1959 "Diglossia". *Word*, 1959, 325–340.
- Ferguson, Charles A. 1968 "Language Development". Di dalam Fishman, Ferguson, dan Dasgupta, ed. 1968:27–35.
- Fishman, Joshua A. 1967. "Bilingualism with and without Diglossia; Diglossia with and without Bilingualism". *Journal of Social Issues* 23/2: 29–38.
- Foshman, Joshua A. 1968. *Reading in the Sociology of Language*. The Hague: Mouton.
- Fishman, Joshua A. 1973. *Language and Nationalism: Two Integrative Essays*. Rowley, Mass: Newbury House. (cetakan kedua: 1975).
- Fishman, Joshua A. 1974. *Advances in Language Planning*. The Hague: Mouton.
- Fishman, Joshua A., C.A. Ferguson dan J. Das Gupta, ed. 1968. *Language Problems in Developing Nations*. New York: Wiley.
- Fokker, A.A. 1941. *Beknopte Grammatica van de Bahasa Indonesia*. Groningen-Djakarta; J.B. Wolters. (edisi ke-4, 1950).
- Fokker, A.A. 1951 *Inleiding tot de Studie van de Indonesische Syntaxis*. Groningen: Wolters ("Terjemahan Indonesia: Pengantar ke Sintaksis Indonesia oleh Djonhar).
- Fried, V., ed. 1972. *The Prague School of Linguistics and Language Teaching*. London: Oxford University Press.
- Garvin, Paul L. 1973. "Some Comments on Language Planning". Di dalam Rubin and Shuy, ed. 1973: 24–33.
- Garvin, Paul L., ed. 1964. *A Prague School Reader on Esthetics, Literary Structure, and Style*. Washington: Georgetown University Press.
- Garvin, Paul L. dan Madeleine Mathiot. 1968. "The Urbanization of the Guarani Language: A Problem in Language and Culture". Di dalam Fishman, ed. 1968: 365–374.
- Gerth van Wijk, D. 1889. *Spraakleer der Maleische Taal*. Batavia: Kolf (edisi ke-3, 1909).
- Halim, Amran. 1974a. "Edjaan yang Disempurnakan dan Perkembangan Ilmu Bahasa". Di dalam Supra dan Lake, ed. 1974.
- Halim, Amran. 1974b. *Intonation in Relation to Syntax in Bahasa Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

- Halim, Amran, ed. 1976. *Politik Bahasa Nasional*. 2 jilid. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hall, Robert A., Jr. 1950. *Leave Your Language Alone*. Ithaca, M.Y.: Linguistica.
- Haugen, Einar. 1966b. "Dialect, Language, Nation". *American Anthropologist* 68/4: 922-935. (Juga dalam Haugen, 1972:237-254).
- Haugen, Einar. 1968. "The Scandinavian Languages as Cultural Artifacts". Di dalam Fishman, Ferguson, dan Das Gupta, ed. 1968:267-284.
- Havranek, Bohuslav. 1932. "Ukoly spisovneho jazyka a jeho Kultura". Di dalam Havranek dan Weingart, ed. 1932:32-84 (Lihat Havranek 1964).
- Havranek, Bohuslav. 1938. "Zum Problem der Norm in der Heutigen Sprachwissenschaft und Sprachkultur". *Actes du Quatrieme Congres Internationale de Linguistes*. (Juga dalam Vachek, 1964:413-420).
- Havranek, Bohuslav. 1964. "The Functional Differentiation of the Standard Language". Di dalam Garvin, ed. 1964:3-16.
- Joest, W. 1892. "Malayische Lieder und Tanze aus Ambon und den Uliase (Molukken)". *Internationales Archiv fur Ethnographie* 5: 1-34.
- Jones, Daniel. 1950. *The Phoneme: Its Nature and Use*. Cambridge: Heffer.
- Kahler, Hans. 1956. *Grammatik der Bahasa Indonesia*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
- Kats, J. 1934. *Warna Sari Melajoe*. Cetakan ke-6. Batavia, Bandung: Visser.
- Kennedy, Raymond. 1945. *Bibliography of Indonesian Peoples and Cultures*. New Haven: Yale University. (edisi ke-2, 1955, 1962).
- Keraf, Gorys. 1970. *Tatabahasa Indonesia untuk Sekolah Lanjutan Atas*. Ende: Nusa Indah.
- Kridalaksana, Harimurti. 1968. "The New Spelling for Bahasa Indonesia". Di dalam *Indonesian Journal of Cultural Studies* 3: 200-225.
- Kridalaksana, Harimurti. 1970. "Towards a Standardization of Phonologic and Morphologic Borrowed Elements in Bahasa Indonesia". Di dalam Alisjahbana, ed. 1970:211-232.
- Kridalaksana, Harimurti. 1976. "Tata Cara Standardisasi dan Pengembangan Bahasa Nasional". Di dalam Halim, ed. 1976, 2:35-44.

- Kridalaksana, Harimurti. 1978. "Spelling Reform 1972: A Stage in the Process of Standardization of Bahasa Indonesia". Di dalam Perez, *et al.*, ed. 1978:305-317.
- Lapoliwa, H. 1977. "A Generative Approach to the Phonology of Bahasa Indonesia". M.Phil, thesis, School of Oriental and Africa Studies, University of London.
- Lehmann, W.P. 1972. "Converging Theories in Linguistics". *Language* 48(3): 266-275.
- Lie Kimhok. 1884. *Malajoe Batawi . . . Batawi*.
- Lubis, Madong. 1948. *Paramasastera Landjut*. Amsterdam. (edisi ke-4, 1952).
- Mees, C.A. 1951. *Tatabahasa Indonesia*. Bandung: Visser.
- Moeliono, Anton M. 1967. "Suatu Reorientasi dalam Tatabahasa Indonesia". Di dalam Ali dan Ikram 1967.
- Moeliono, Anton M. 1975 "A Recent History of Spelling Reforms in Indonesia". Di dalam Verhaar, ed. 1975:1-5.
- Moeliono, Anton M. 1978 "Beberapa Segi Standardisasi Bahasa". Makalah Kongres Bahasa Indonesia III.
- Nio Joe Lan. 1939. "Het Chineesch-, Hollandsch- en Engelsch-Maleisch". *De Indische Gids* 61/1: 408-419.
- Ophuijsen, Ch. A. van. 1915. *Maleische Spraakkunst*. Leiden: Brill. (Edisi pertama, 1910).
- Perez, Alejandrino Q., Alfonso O. Santiago, dan Nguyen Dang Liem, ed. 1978. *Papers from the Conference on the Standardization of Asian Language*, Manila, Philippines, December 16-21, 1974. Pacific Linguistics. C-47.
- Pijnappel, Gz. J. 1865. "Laag-Malesich". *De Indische Gids* 29/4: 148-159.
- Poedjawijatna, I.R. dan P.J. Zoetmulder. 1955. *Tatabahasa Indonesia untuk Sekolah Lanjutan Atas*. 2 jilid. Jakarta: Obor.
- Poedjosoedarmo, Soepomo, ed. 1977. *Miscellaneous Studies in Indonesian and Languages in Indonesia* 3. Jakarta: NUSA.
- Redfield, Robert. 1941. *The Folk Cultures of Yucaten*. Chicago: University of Chicago Press.

- Rice, Frank A., ed. 1962. *Study of the Role of Second Languages in Asia, Africa, and Latin America*. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics.
- Richards, Jack C. 1978. "Simplification: A Strategy in the Adult Acquisition of a Foreign Language: An Example from Indonesian Malay". Di dalam Perez, *et al.*, ed. 1978:275-286.
- Rosen, Joan M. 1977. "Reduplication and Negation in Indonesian". Di dalam Poedjosoedarmo, ed. 1977:1-14.
- Rubin, Joan, 1977b. "Language Standardization in Indonesia". Di dalam Rubin, Jernudd, *et al.*, ed. 1977:157-178.
- Rubin, Joan, Bjorn H. Jernudd, Jyotirindra Das Gupta, Joshua A. Fishman, dan Charles A. Ferguson, ed. 1977. *Language Planning Processes*. The Hague: Mouton.
- Rubin, Joan dan Roger Shuy, ed. 1973. *Language Planning: Current Issues and Research*. Washington: Georgetown University Press.
- Samsuri. 1960. "Sistim Fonem Indonesia dan Suatu Penjusunan Edjaan Baru". *Medan Ilmu Pengetahuan* 1/4:323-341.
- Sanches, Mary. 1977. "Language Acquisition and Language Change: Japanese Numeral Classifiers". Di dalam Blount dan Sanches, ed. 1977:51-62.
- Saporta, Sol. 1973. "Scientific Grammar and Pedagogical Grammars". Di dalam Allen dan Corder, ed. 1973.
- Sasrasoeganda, K. 1910. *Kitab jang Menjatakan Djalan Bahasa Melajoe, Terkoetip dari Kitab Bahasa Belanda*. Djakarta.
- Schuchardt, Hugo. 1890. "Über das Malaioportugiesische von Batavia und Tugu". *Sitzungsberichte der phil-hist. classe der Kaiserl. Akad, der wiss. Wien* 122:1-256.
- Sebeok, Thomas A., ed. 1971. *Current Trends in Linguistics*, vol. 8: *Linguistics in Oceania*. The Hague: Mouton.
- Simatupang, Maurits D.S. 1979. "Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia". Disertasi doktor, Universitas Indonesia.
- Slametmuljana. 1956-57. *Kaidah Bahasa Indonesia*. 2 jilid. Djakarta: Djambatan.
- Stewart, William A. 1962. "An Outline of Linguistic Typology for Describing Multilingualism". Di dalam Rice, ed. 1962:15-25.

- Sumantri, Maman, *et al.*, ed. 1978. *Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, jilid 3. Jakarta: PPPB.
- Teeuw, A. 1959. "The History of the Malay Language: A Preliminary Survey". *BijdrTLV* 115:138–156.
- Teeuw, A. 1961. *A Critical Survey of Studies on Malay and Bahasa Indonesia*. With the assistance of H.W. Emmanuels. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Uhlenbeck, E.M. 1967. "Indonesia and Malaysia". Di dalam Sebeok, ed. *CTL* 8, 1971, 55–111.
- Verhaar, J.W.M. 1975. *Miscellaneous Studies in Indonesian and Languages in Indonesia*, I. Jakarta: NUSA.
- Voorhoeve, Petrus. 1955. *Critical Survey of Studies on the Languages of Sumatra*. The Hague: M. Nijhoff.
- Wal, S.L. van der. 1961. *Some Information on Education in Indonesia up to 1942*. . . The Hague: Netherlands Universities Foundation for International Cooperation (NUFFIC). (edisi ke-2).
- Wal, S.L. van der. 1963. *Het Onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940*. . . Groningen: Wolters.
- Weinreich, Uriel. 1953. *Languages in Contact: Findings and Problems*. New York: Linguistic Circle of New York. (edisi baru 1963 . . . 1974. The Hague: Mouton).
- Winstedt, Richard O. 1913. *Malay Grammar*. Oxford. (edisi ke-2, 1927).
- Wolff, John U. 1965. *Beginning Indonesian*. 2 jilid Ithaca: Cornell University.
- Zain, S. Muhammad. 1942. *Djalan Bahasa Indonesia*. Djakarta. (edisi ke-10, 1957).

## KATA: PEMBENTUKAN DAN PENGGOLONGANNYA

M. Ramlan

### 1. Pembentukan Kata

Kata dibentuk dari berbagai satuan gramatis melalui suatu proses. Menurut *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis (TBDBIS)* (Kridalaksana, et al. 1984: 26) proses pembentukan kata adalah proses terjadinya kata dari morfem dasar melalui perubahan morfem.

Istilah "kata" dijelaskan mempunyai dua ciri, yaitu kebebasan bergerak dengan tetap mempertahankan identitasnya dan keutuhan intern atau ketaktersipan; sedangkan istilah "morfem dasar" belum dijelaskan; tetapi, tentunya yang dimaksud ialah morfem atau satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil yang menjadi dasar pembentukan bentuk yang lebih besar (lihat Kridalaksana, 1982: 110).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap kata terbentuk dari morfem dasar. Timbul pertanyaan, apakah *DPR*, *KKN*, *takkan*, *rudal*, *berdikari*, *sikon* juga dibentuk dari morfem dasar? Bagaimana pula halnya kata-kata *ketidaksenonohan* yang dibentuk dari *tidak senonoh*, *keberhasilan* yang dibentuk dari *berhasil*, *kesinambungan-kesinambungan* yang dibentuk dari *kesinambungan*, dan sebagainya?

Pada hemat saya, istilah "morfem dasar" pada *proses pembentukan kata* adalah *proses terjadinya kata dari morfem dasar melalui perubahan morfemis* sebaiknya diganti dengan istilah "bentuk dasarnya". Bentuk dasar itu dapat

berupa morfem, kata, dan dapat pula berupa frasa. Yang bentuk dasarnya berupa morfem, misalnya, *mengalir, berjuang, bertemu, berkata*; yang bentuk dasarnya berupa kata, misalnya, *keberhasilan, kepemimpinan, kesinambungan, pertanggungjawaban, berpakaian, tulis-tulisan*; dan yang berupa frasa, misalnya *ketidaksenonohan, ketidakberhasilan*.

Kata *berpakaian* terbentuk dari pakaian dengan prefiks *ber-*, dan selanjutnya kata *pakaian* terbentuk dari morfem *pakai* dengan sufiks *-an*. Jadi proses terbentuknya kata *berpakaian* sebagai berikut: *pakai* → *pakaian* → *berpakaian*.

Dari contoh itu, dan juga dari contoh-contoh lain yang kiranya tidak perlu disebutkan di sini, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya kata melalui suatu hierarki. Terbentuknya kata *berkepemimpinan*, misalnya, melalui hierarki: *pimpin* → *pemimpin* → *kepemimpinan* → *berkepemimpinan*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kridalaksana bahwa satuan-satuan gramatikal membentuk suatu sistem sedemikian rupa sehingga satuan yang kecil menjadi konstituen atau bagian dari satuan yang lebih besar. Hubungan di antara satuan-satuan gramatikal itu membentuk suatu hierarki.

Jika kita berpegang pada prinsip adanya hierarki itu, maka pada hemat saya proses kombinasi afiks itu tidak perlu ada. Kata *mempercakakan* terbentuk dari bentuk dasar *percakakan* dengan prefiks *meN-*. Bentuk dasar *percakakan* ini selanjutnya dapat dibentuk menjadi *dipercakakan, terpercakakan*. Selanjutnya, *percakakan* dibentuk dari *percaya* dengan sufiks *-kan*. Demikianlah, hierarkinya sebagai berikut: *percaya* → *percakakan* → *mempercakakan*.

Kata *mempergunakan* dibentuk dari bentuk dasar *pergunakan* dengan dibubuhi *meN-*. *Pergunakan* dibentuk dari bentuk dasar *gunakan* dengan prefiks *per-*, dan *gunakan* dibentuk dari bentuk dasar *guna* dengan sufiks *-kan*. Jadi hierarkinya sebagai berikut: *guna* → *gunakan* → *pergunakan* → *mempergunakan*.

Dengan penjelasan di atas, jelaslah bahwa kombinasi afiks yang dijelaskan sebagai gabungan beberapa afiks yang mempunyai bentuk dan makna gramatikal tersendiri yang digabungkan secara simultan pada bentuk dasar tidak perlu ada.

Sehubungan dengan masalah hierarki, perlu juga di sini dibicarakan masalah gabungan proses, yaitu gabungan dua proses pembentukan kata atau lebih, yang digolongkan menjadi tujuh golongan, yakni:

- (1) reduplikasi bergabung dengan afiks, misalnya *berfoya-foya*;
- (2) afiks bergabung dengan reduplikasi, misalnya *berseri-seri*;
- (3) afiks bergabung dengan gabungan morfem dasar, misalnya *bersatu padu*;
- (4) afiks bergabung dengan kependekan, misalnya *dipreskan*;

- (5) gabungan morfem dasar bergabung dengan afiks, misalnya *berbulan madu*;
- (6) afiks bergabung dengan derivasi balik, misalnya *dipungkiri*;
- (7) reduplikasi terhadap gabungan, misalnya *rumah-rumah sakit*.

Sekali lagi, jika kita mengakui adanya hierarki, maka pada contoh-contoh di atas, tidak terdapat gabungan proses. Pada contoh *berfoya-foya* terjadi proses afiksasi, yaitu pembubuhan prefiks *ber-* pada bentuk dasar *foya-foya*. Selanjutnya pada *foya-foya* terjadi proses reduplikasi, jika *foya* dipandang sebagai bentuk dasarnya. Jadi hierarkinya sebagai berikut: *foya* → *foya-foya* → *berfoya-foya*.

Pada contoh *berseri-seri* terjadi reduplikasi sebagian, ialah perulangan kata *berseri*. Selanjutnya kata *berseri* dibentuk dari bentuk dasar *seri* dengan prefiks *ber-*. Hierarkinya: *seri* → *berseri* → *berseri-seri*. Pada contoh *bersatu padu* terjadi proses afiksasi, yaitu pembubuhan prefiks *ber-* pada bentuk dasar *satu padu* yang merupakan kata majemuk. Hierarkinya: *satu + padu* → *satu padu* → *bersatu padu*. Pada contoh *diinpreskan* terjadi pembubuhan prefiks *di-* pada bentuk dasar *inpreskan*. Pada *inpreskan* terjadi pembubuhan sufiks *-kan* pada bentuk dasar *inpres*, dan pada *inpres* terjadi proses pemendekan. Pada contoh *berbulan madu* terjadi proses afiksasi, yaitu pembubuhan *ber-* pada bentuk dasar *bulan madu* yang merupakan kata majemuk, gabungan morfem *bulan* dan *madu*. Pada contoh *dipungkiri* terjadi pembubuhan prefiks *di-* pada bentuk dasar *pungkiri*. Selanjutnya pada *pungkiri* terjadi pembubuhan sufiks *-i* pada bentuk dasar *pungkir*. Yang terakhir, pada kata *rumah-rumah sakit* terjadi proses perulangan sebagian pada bentuk dasar *rumah sakit*, dan *rumah sakit* merupakan kata majemuk, gabungan morfem *rumah* dan *sakit*.

Gabungan proses itu memang ada dalam bahasa Indonesia, ialah apabila dua proses pembentukan kata terjadi secara bersama-sama untuk membentuk suatu kata baru dan kedua proses itu bersama-sama menyatakan suatu makna. Misalnya pada contoh kata *tali-temali* yang di dalam TBDBIS dimasukkan dalam reduplikasi berinfiks. Pada hemat saya, kata *tali-temali* terbentuk dari bentuk dasar *tali* yang diulang dengan mendapat infiks *-em-*. Pada kata ini terjadi gabungan proses reduplikasi bersama dengan proses afiksasi.

Contoh lain, misalnya kata *kereta-keretaan*. Kata ini dibentuk dari bentuk dasar *kereta* yang diulang dengan mendapat sufiks *-an*. Jadi proses pembentukannya ialah *kereta* → *kereta-keretaan*. Di sini terjadi gabungan proses, yaitu proses reduplikasi bersama-sama dengan proses afiksasi. Kedua proses itu terjadi secara serempak dan menyatakan satu makna, yaitu 'tiruan' atau 'bukan benar-benar kereta'.

Masalah lain yang kiranya perlu diperbincangkan di sini ialah masalah penggolongan reduplikasi. TBDBIS mengelompokkan reduplikasi morfemis menjadi lima golongan, yaitu:

- (1) reduplikasi penuh, misalnya *rumah-rumah*;
- (2) reduplikasi berinfiks, misalnya *tali-temali*;
- (3) reduplikasi dengan variasi fonem, misalnya *bolak-balik*;
- (4) reduplikasi dengan pengulangan suku pertama dengan atau tanpa pelemahan vokal, misalnya *tetamu*;
- (5) reduplikasi antisipatoris, yaitu reduplikasi yang terjadi atas kata yang berprefiks dengan menyebutkan dasarnya lebih dahulu, misalnya *pukul-memukul*.

Pengelompokan di atas tampaknya berdasarkan proses terbentuknya kata ulang dari bentuk dasarnya. Kata ulang *rumah-rumah* dimasukkan golongan reduplikasi penuh karena bentuk dasarnya diulang seluruhnya. Kata ulang *tali-temali* dimasukkan golongan reduplikasi berinfiks karena bentuk dasar *tali* diulang dengan mendapat infiks, dalam hal ini infiks *-em-*. Kata ulang *bolak-balik* dimasukkan golongan reduplikasi dengan variasi fonem karena bentuk dasar *balik* diulang dengan perubahan fonem. Kata ulang *tetamu* dimasukkan reduplikasi dengan pengulangan suku pertama dengan atau tanpa pelemahan vokal karena bentuk dasar *tamu* diulang suku pertamanya dengan pelemahan vokal, dan kata ulang *pukul-memukul* dimasukkan reduplikasi antisipatoris karena bentuk dasar *memukul* diulang dengan perulangannya terletak di sebelah kiri.

Jika dasar pengelompokan itu digunakan secara konsisten, reduplikasi golongan kedua, yaitu reduplikasi berinfiks, sebaiknya diganti dengan reduplikasi berafiks, yaitu reduplikasi yang terjadi bersama-sama dengan proses afiksasi. Dengan perubahan ini, kata-kata ulang seperti *kereta-kertaan*, *anak-anakan*, *kehitam-hitaman* dapat dimasukkan golongan ini pula. Kata ulang *kereta-keretaan* dibentuk dari bentuk dasar *kereta* yang diulang dengan penambahan afiks *-an*, sedangkan kata ulang *kehitam-hitaman* dibentuk dari bentuk dasar *hitam* yang diulang dengan penambahan afiks *ke-an*.

Reduplikasi golongan keempat, yakni reduplikasi dengan pengulangan suku pertama dengan atau tanpa pelemahan vokal, saya usulkan diubah menjadi reduplikasi sebagian. Maksudnya, reduplikasi sebagian dari bentuk dasarnya: bentuk dasar *tamu* diulang menjadi *tetamu*. Jadi yang diulang hanya sebagian dari bentuk dasarnya.

Dengan begitu, kata-kata ulang seperti *menulis-nulis*, *menanya-nanyakan*,

*memperbesar-besarkan mengata-ngatai*, dan sebagainya lagi, dapat dimasukkan dalam golongan ini. Kata ulang *menulis-nulis* dibentuk dari bentuk dasar *menulis* dengan pengulangan hanya sebagiannya. Pada hemat saya, agak sukar apabila kata ulang *menulis-nulis* itu dijelaskan sebagai dibentuk dari bentuk dasar *tulis* yang diulang menjadi *tulis-tulis*, kemudian mendapat prefiks *meN-*. Kesulitannya disebabkan oleh munculnya nasal pada *tulis* yang kedua. Jadi kemungkinannya hanya morfem *tulis* mendapat prefiks *meN-* menjadi *menulis*, baru diulang sebagiannya menjadi *menulis-nulis*. Demikian pula dengan kata-kata ulang *menanya-nanyakan*, *mengata-ngatai*, dan sebagainya.

Reduplikasi golongan kelima, yakni reduplikasi antisipatoris, pada hemat saya termasuk reduplikasi golongan kedua, yakni reduplikasi berafiks. Kata ulang *pukul-memukul* dan *tembak-menembak* terbentuk dari bentuk dasar *pukul* dan *tembak* yang diulang dengan mendapat prefiks *meN-*.

Sebagai kesimpulan, reduplikasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yakni:

- (1) reduplikasi penuh atau seluruh, yaitu perulangan seluruh bentuk dasar, tanpa pembubuhan afiks, misalnya: *rumah-rumah*, *bersih-bersih*;
- (2) reduplikasi sebagian, yaitu perulangan sebagian dari bentuk dasarnya, misalnya: *tetamu*, *lelaki*, *leluhur*, *menulis-nulis*, *menanya-nanyakan*, *mengata-ngatai*;
- (3) reduplikasi yang berkombinasi dengan proses afiksasi atau reduplikasi berafiks, yaitu reduplikasi yang terjadi bersama-sama dengan proses pembubuhan afiks, misalnya: *tali-temali*, *turun-temurun*, *pukul-memukul*, *tembak-menembak*;
- (4) reduplikasi dengan perubahan fonem, misalnya: *bolak-balik*, *kerlap-kerlip*, *sayur-mayur*.

(Ramlan, 1985: 62–69).

## 2. Penggolongan Kata

Berdasarkan kriteria sintaksis, morfologis, dan semantis, Kridalaksana menggolongkan kata-kata bahasa Indonesia menjadi dua belas kelas, yakni: (1) nomina, (2) pronomina, (3) adjektiva, (4) numeralia, (5) verba, (6) adverbia, (7) preposisi, (8) interogativa, (9) demonstrativa, (10) konjungsi, (11) artikula, dan (12) interjeksi. Masing-masing kelas digolongkan pula menjadi subkelas-subkelas.

Di samping itu, pada kategori primer diadakan penggolongan atas kata dan partikel. Perbedaan antara kata dan partikel bersifat morfologis. Kata mem-

punyai potensi untuk diperluas dengan afiksasi dan reduplikasi, sedangkan partikel tidak memiliki potensi demikian.

Sayang sekali tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai partikel; tetapi dari uraian di atas jelaslah bahwa partikel tidak termasuk kata. Hal ini berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono bahwa kata dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kata partikel dan kata bukan partikel. Selanjutnya, partikel digolongkannya menjadi dua kelompok, yakni golongan preposisi dan golongan postposisi (Moeliono, 1976:107-108), dan berbeda pula dengan penjelasan dalam Kridalaksana (1982:121).

Masalah lain yang kiranya perlu dipertanyakan di sini ialah masalah transposisi dan masalah yang disebut sebagai *multiple class membership* (Allerton, 1979:146).

Dikemukakan dalam TBDBIS bahwa kata *mati* dalam kalimat *Sapi saya mati kemarin* termasuk golongan verba intransitif, dalam kalimat *Mati itu bukan akhir segalanya* termasuk golongan nomina, dan dalam kalimat *Ini harga mati* termasuk golongan adjektiva. Jadi kata *mati* termasuk golongan verba, nomina, dan adjektiva. Hal ini dapat dijelaskan sebagai *multiple class membership* dan mungkin juga dijelaskan sebagai transposisi. Kata *mati* sebagai verba merupakan kelas dasar dan kelas-kelas lainnya sebagai kelas turunan. Para penyusun TBDBIS memilih alternatif yang kedua.

Masalah *multiple class membership* atau keanggotaan ganda dan transposisi memang merupakan masalah yang rumit. Sukar dijelaskan batas antara keduanya. Misalnya kata *jalan*. Dalam kalimat *Rencananya tidak jalan* termasuk verba, sedangkan dalam kalimat *Jalan itu sangat sempit* termasuk nomina. Jadi, kata *jalan* termasuk kelas verba dan nomina.

Pertanyaan yang timbul ialah apakah ini merupakan keanggotaan ganda ataukah transposisi? Jika merupakan transposisi, timbul pula pertanyaan baru ialah kelas yang mana yang merupakan kelas dasar? Kelas verba atau nomina? Selanjutnya, pertanyaan lain timbul pula, posisi mana saja yang mengakibatkan adanya perubahan kelas kata? Apakah posisi seperti posisi kata *mati* dalam kalimat *Ini harga mati* juga mengubah kelas kata?

Masalah-masalah di atas kiranya perlu dijelaskan agar kita memperoleh pengertian yang jelas mengenai keanggotaan ganda dan transposisi.

Terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, yang tentu terdapat pada setiap karya, jelas bahwa para penulis TBDBIS telah menunjukkan usahanya yang sebaik-baiknya, dan jelaslah bahwa karya itu akan sangat berguna bagi perkembangan linguistik Indonesia dan bagi pengajaran bahasa Indonesia.

### **Pustaka Acuan**

- Allerton, D.J. 1979. *Essentials of Grammatical Theory*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Kridalaksana, Harimurti. 1982. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Moeliono, Anton M. 1976. "Penyusunan Tata Bahasa Struktural". Di dalam Rusyana dan Samsuri, ed. (1976).
- Ramlan, M. 1985. *Morfologi*. Yogyakarta: CV Karyono.
- Rusyana, Yus dan Samsuri, ed. 1976. *Pedoman Penulisan Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

## NOMINA DAN PRONOMINA: TINJAUAN TERHADAP TATA BAHASA DESKRIPTIF BAHASA INDONESIA

Bambang Kaswanti Purwo

### Pengantar

Makalah ini akan meninjau ihwal nomina dan pronomina di dalam bahasa Indonesia, yang diuraikan di dalam buku *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis* (TBDBIS), susunan Harimurti Kridalaksana dkk. (1984). Ada dua hal yang disoroti di dalam tinjauan ini: klasifikasi dan persoalan (data).

Klasifikasi di dalam pemerian suatu bahasa dibuat berdasarkan kenyataan atau fenomena yang terdapat pada bahasa yang bersangkutan. Fenomena suatu bahasa dapat terkuakkan melalui penelitian dan pengamatan terhadap data bahasa yang bersangkutan. Salah satu tujuan penelitian adalah mengolah dan menganalisis data (yang tampaknya rumit dan tak beraturan) dan menuangkan hasil analisis ke dalam suatu kerangka yang beraturan, yang disebut klasifikasi. Di dalam klasifikasi ini tertuangkan segala sesuatu mengenai bahasa yang dianalisis. Sebuah klasifikasi yang baik (idealnya) dapat menampung segala persoalan (data) dan seluk-beluk mengenai bahasa yang ditelaah. Melalui klasifikasi itu dapat pula terlihat kekhasan bahasa yang diteliti, di samping juga kesamaan bahasa tersebut dengan bahasa lain. Ihwal infleksi nomina (deklinsi), misalnya, tidak disebut-sebut di dalam klasifikasi nomina sebuah buku tata bahasa Inggris (periksa misalnya, Quirk *et. al.* 1972), tetapi persoalan seperti itu tidak dapat tidak dibahas di dalam klasifikasi nomina sebuah buku tata bahasa Latin.

## 1. Ihwal Klasifikasi

### 1.1 Nomina

Di dalam buku TBDBIS, Harimurti Kridalaksana dkk. mencoba memerikan nomina dari dua segi: pengelompokan subkategorial dan pemakaian nomina. Mengenai yang pertama ini disusun tiga subkategori, yakni,

1. Nomina Bernyawa dan Tak Bernyawa;
2. Nomina Terbilang dan Tak Terbilang;
3. Nomina Kolektif dan Bukan Kolektif

Saya tidak melihat gayutan (*relevance*) pengelompokan subkategorial nomina ini di dalam pemerian sintaksis bahasa Indonesia (kecuali barangkali subkategori 1), meskipun ketiga pasangan istilah itu dapat tetap dipakai untuk memberikan fenomena yang terdapat di dalam bahasa Indonesia. Untuk menerangkan perbedaan di antara *siapa* dan *apa*, misalnya, dapat dipakai istilah nomina insan dan nomina bukan insan. Demikian pula untuk memerikan *mereka* dan *para/kaum*: kata *mereka* hanya dapat mengacu pada nomina insan, kata *para/kaum* hanya dapat disusul nomina insan. Istilah nomina terbilang dapat dipakai, misalnya, untuk menerangkan kendala kata *beberapa*: kata ini hanya dapat disusul oleh nomina terbilang (misalnya: *beberapa buku/kursi/\*air/\*garam*). Istilah nomina kolektif dapat muncul. Misalnya, untuk menerangkan salah satu perbedaan di antara *semua* dan *seluruh*; kata *semua* dapat menjadi atribut baik bagi nomina kolektif maupun tak kolektif, sedangkan kata *seluruh* tidak dapat menjadi atribut bagi nomina tak kolektif (misalnya: *semua/seluruh bangsa; semua/\*seluruh anak*).

Di dalam buku TBDBIS nomina bernyawa dibagi atas (a) nomina persona (insan) dan (b) nomina flora dan fauna. Yang tergolong dalam nomina insan, menurut buku ini, adalah:

- (i) nama diri (*Martha, Hermin, Sis*);
- (ii) nomina yang menyatakan kekerabatan (*nenek, kakek, ibu, adik*);
- (iii) nomina yang menyatakan orang atau yang diperlakukan seperti orang (*tuan, nyonya, nona, raksasa, hantu, malaikat*);
- (iv) nama kelompok manusia (*Jepang, Melayu, Minangkabau*);
- (v) nomina tak bernyawa yang dipersofnifikasikan (*Inggris* (nama bangsa), *DPR* (nama lembaga)).

Klasifikasi secara semantis seperti ini membuka peluang bagi pemberian nama yang lebih banyak lagi. Kelima penggolongan ini saja belum cukup

menampung seluruh nomina insan. Dengan hanya menyediakan lima macam pengelompokan, nomina seperti *guru*, *presiden*, *dokter* (nama jabatan), *pria/wanita*, *pemuda/pemudi* (nomina yang menyatakan jenis kelamin) akan dimasukkan ke dalam kelompok yang mana? Barangkali nomina jabatan dan nomina jenis kelamin akan dimasukkan ke dalam kelompok (iii) karena nomina jabatan itu termasuk nomina yang menyatakan orang. Akan tetapi, nomina kekerabatan pun (kelompok (ii)) dapat pula dikatakan sebagai nomina yang menyatakan orang (batasan untuk kelompok (iii)).

Contoh-contoh yang disebutkan pada kelima kelompok di atas semuanya merupakan nomina yang monomorfemis. Bagaimana dengan nomina polimorfemis seperti *pencopet*, *jutawan*, *terdakwa*, *pesuruh*, *ketua*?

Di dalam buku TBDBIS mengenai nomina flora dan fauna hanya diberikan catatan ciri sintaksisnya; nomina jenis ini tidak dikelompok-kelompokkan lebih lanjut. Berbeda halnya dengan nomina tak bernyawa, yang digolong-golongkan atas:

- (i) nama lembaga (*DPR, MPR, UUD*);
- (ii) nama geografis (*Bali, Jawa, utara, selatan, hilir, mudik, hulu*);
- (iii) waktu (*Senin, Januari, Oktober, 1988, pukul 8, sekarang, duhu*);
- (iv) nama bahasa (*bahasa Indonesia, bahasa Sunda*);
- (v) ukuran (*karung, goni, pikul, gram, kilometer, kali*).

Seerti pengelompokan nomina insan, penggolongan nomina tak bernyawa ini pun tidak tuntas. Nomina seperti *rumah*, *kursi*, *pasar*, *air* akan dimasukkan ke dalam kelompok yang mana di antara kelima nama ini? Pada kelompok keempat disebutkan contoh nomina perifrastis, tetapi di dalam kelima kelompok itu tak satu pun nomina polimorfemis (seperti *kehendak*, *perserikatan*, *pemberitahuan*, *bacaan*) disebut-sebut; dimasukkan ke dalam kelompok yang manakah nomina polimorfemis ini?

Di dalam buku tata bahasa MacDonald dan Soenjono (1967:126–127) juga disebutkan pengelompokan nomina atas yang terbilang dan yang tak terbilang, meskipun dengan latar belakang pembagian yang sedikit berbeda dengan yang dicantumkan di dalam TBDBIS. Mengenai nomina terbilang, MacDonald dan Soenjono memberikan batasan seperti berikut: jika kata bilangan dapat langsung mengenai nomina tanpa diselipi oleh "penggolong nomina" (atau, istilah mereka *a counter noun*), maka nomina tersebut adalah nomina terbilang (misalnya: *dua meja*, *dua anak*). Nomina yang tidak dapat secara langsung dikenai oleh kata bilangan adalah nomina tak terbilang (misalnya: *dua liter air*, *dua kilo beras*).

Menurut buku TBDBIS, yang dimaksud dengan nomina terbilang ialah nomina yang dapat dihitung (dapat bergabung dengan numeralia), seperti *kantor, kampung, kandang, buku, wakil, sepeda, meja, kursi, pensil, orang*. Nomina tak terbilang ialah nomina yang tak dapat dihitung, seperti *udara, kebersihan, kesucian, kemanusiaan*, serta nama diri dan nama geografis. MacDonald dan Soenjono memakai penggolong bilangan sebagai patokan bagi pemisahan kedua jenis nomina itu: KETIDAKHADIRAN penggolong nomina (nomina terbilang) dan KEHARUSHADIRAN penggolong nomina (nomina tak terbilang). Buku TBDBIS menggunakan numeralia sebagai patokan, dan tidak menyebut-nyebut ihwal penggolong nomina. Jika dapat bergabung dengan numeralia (misalnya: *dua kantor/kampung*), maka nomina yang bersangkutan adalah nomina terbilang. Jika tidak dapat bergabung dengan numeralia (misalnya: *tiga \*udara/\*kebersihan*) maka nomina tersebut adalah nomina tak terbilang.

Nomina terbilang yang disebut sebagai contoh di dalam buku TBDBIS adalah nomina yang monomorfemis, sedangkan contoh yang disebutkan pada nomina tak terbilang adalah nomina yang monomorfemis dan yang plurimorfemis. Apakah ciri morfemis ini menjadi bahan pertimbangan bagi pembagian atas dua kelompok itu? Atau, apakah ada pertimbangan lain yang belum terungkap secara jelas, seperti misalnya, ihwal abstrak dan konkret? Dengan dua buah pertanyaan ini saya hanya ingin mereka-reka dasar apa sebenarnya contoh-contoh yang tercantum itu dipilih untuk mewakili nomina terbilang dan nomina tak terbilang, suatu alasan pemisahan yang belum jelas terungkap pada pemerian.

Menanggapi persoalan yang dicoba dikupas oleh MacDonald dan Soenjono dan Harimurti Kridalaksana dkk. di atas, saya melihat bahwa ada pertimbangan lain yang lebih kuat untuk tidak memakai dikotomi "terbilang" dan "tak terbilang", suatu dikotomi yang cocok untuk memerikan seluk-beluk di dalam bahasa seperti bahasa Inggris. Penutur bahasa Indonesia yang sedang belajar bahasa Inggris cenderung untuk mengalami kesukaran di dalam memahami ihwal penempelan morfem jamak *-s* pada nomina, yang menurut kaidah yang berlaku di dalam bahasa Inggris, morfem *-s* itu hanya dapat dilekatkan pada nomina terbilang. Pertimbangkanlah contoh-contoh berikut.

- (1) a. two books;
- b. two \*papers [dalam arti 'kertas', bukan 'makalah'];
- c. two \*chalks;
- d. two \*waters.

Lebih mudah bagi penutur bahasa Indonesia untuk memahami mengapa -s boleh dipakai pada konstruksi (a) daripada untuk memahami mengapa -s tidak boleh dipakai pada konstruksi (b) dan (c). Kesalahan tipe (b) dan (c) lebih cenderung untuk dibuat daripada kesalahan tipe (d).

Barangkali pengertian 'terbilang' dan 'tak terbilang' bagi penutur bahasa Inggris berbeda dengan pengertian yang ada di benak penutur bahasa Indonesia. Atau, barangkali penutur bahasa Indonesia tidak melihat fenomena itu dari segi terbilang/tak terbilang, tetapi dari segi lain. Di antara kedua "barangkali" ini saya cenderung untuk berpihak pada "barangkali" yang kedua. Perimbangkanlah contoh-contoh berikut.

- (2) a. dua (ekor) ayam;  
b. dua \*(keranjang) ayam.
- (3) a. tiga (butir) telur;  
b. tiga \*(kilo) telur.
- (4) a. empat (helai) kertas (folio);  
b. empat \*(rim) kertas (folio).
- (5) a. lima (batang) kapur;  
b. lima \*(kotak) kapur.

Bagi penutur bahasa Inggris nomina pada (2) dan (3) adalah nomina terbilang, sedangkan nomina pada (4) dan (5) adalah nomina tak terbilang. Kedua macam nomina ini diperlakukan secara berbeda pula dari segi penggramatikalannya. Di dalam bahasa Indonesia nomina pada (2)–(5) diperlakukan secara sama; kaidah yang berlaku untuk nomina-nomina tersebut semuanya sama.

Barangkali kata-kata yang langsung menyusul kata bilangan pada (a) perlu diberi nama yang berbeda dengan kata-kata yang langsung mengikuti kata bilangan pada (b). Istilah "penggolong nomina" lebih lazim dipakai sebagai nama bagi yang disebutkan pertama itu. Oleh karena itu, istilah itu tidak akan saya gunakan di dalam pembahasan berikut ini. Akan saya ambil istilah yang "netral", yang dapat mencakup kedua-duanya, yakni "keterangan bilangan", karena untuk pemaparan yang berikut ini perbedaan yang ada (secara semantis) antara (a) di satu pihak dan (b) di pihak yang lain untuk sementara di-kesampingkan.

Jika kita simak kendala sintaksis konstruksi (2)–(5) di atas, kehadiran keterangan bilangan pada (a) bersifat manasuka (*opsional*) sedangkan kehadiran bilangan pada (b) mutlak wajib. Bagi nomina *ayam* keterangan bilangan *ekor* adalah hal yang secara konvensional atau secara bawaan (*inherent*) ber-

kaitan; *ekor* secara "khas" berkolokasi dengan *ayam*. Demikian pula untuk yang berikut ini: *butir* secara "khas" berkolokasi dengan *telur*, *helai* secara "khas" berkolokasi dengan *kertas*, *batang* secara "kas" berkolokasi dengan *kapur*.

Keterangan bilangan pada (2a) selain berkolokasi dengan *ayam* dapat pula berkolokasi dengan *kambing*, *kerbau*, *burung*, dan hewan yang lain, keterangan bilangan (2a) terbatas hanya dapat berdampingan dengan nomina tertentu, yakni jenis hewan. Tidak demikian halnya dengan keterangan bilangan (2b); keterangan bilangan jenis ini dapat pula berdampingan dengan nomina yang tidak berkenaan dengan hewan. Keterangan bilangan yang secara "khas" berkaitan dengan nomina tertentu (yakni jenis yang (a)) tidak wajib hadir mengikuti kata bilangan, tetapi keterangan bilangan yang "bukan monopoli" nomina jenis tertentu (maksudnya, keterangan bilangan ini dapat berdampingan dengan lebih banyak jenis nomina) wajib muncul menyusul kata bilangan.

Jadi, pengertian terbilang/tak terbilang seperti yang dikenal di dalam bahasa Inggris tadi tidak dapat diterapkan untuk menerangkan hadir tidaknya keterangan bilangan, menyertai kata bilangan, di dalam bahasa Indonesia. Ada dua hal yang menjadi bahan pertimbangan bagi pemunculan tidaknya keterangan bilangan menyertai kata bilangan. Pertama, jika keterangan bilangan itu sudah dimengerti di dalam konteks (sama-sama dipahami baik oleh si pembicara maupun si lawan bicara) dengan konvensional, maka keterangan bilangan itu dapat dilesapkan. Contoh lain untuk menjelaskan hal ini adalah situasi di dalam restoran; keterangan bilangan seperti *botol* (untuk bir), *gelas* (untuk es kopyor), dan *piring* (untuk *bakmi goreng*) di dalam konteks yang jelas dapat dilesapkan:

(6) Minta  $\left. \begin{array}{l} \text{dua bir} \\ \text{dua es kopyor} \\ \text{dua bakmi goreng} \end{array} \right\}$  lagi.

Kendala yang kedua berkenaan dengan apakah nomina yang bersangkutan berwujud tetap atau tidak, apakah wujud nomina yang bersangkutan dapat berubah-ubah (tergantung pada wadahnya) atau tidak. Jika sesuatu memiliki wujud tetap dan tidak berubah-ubah (mengikuti wadahnya, misalnya), maka kata bilangan yang menyertai nomina seperti itu tidak wajib disusul dengan keterangan bilangan yang konvensional/bawaan); contoh nomina seperti ini adalah *ayam*, *telur*, *kertas*, *kapur*. Nomina yang tidak berwujud tetap (yang

dapat berganti wujud tergantung pada wadahnya), misalnya *air*, *tinta*, mewajibkan kehadiran keterangan bilangan jenis apa pun menyertai kata bilangan (misalnya: *dua \*(teguk) air*, *dua\*(botol) air*). *Tali* termasuk kelompok nomina tak berwujud tetap karena dapat berupa gulung atau julur (yang terpotong-potong) (misalnya: *dua \*(utas) tali*, *tiga \*(meter) tali*, *empat \*(gulung) tali*).

Atas dasar inilah maka untuk menerangkan ihwal keterangan bilangan di dalam bahasa Indonesia dikotomi nominal berwujud tetap/berwujud tak tetap agaknya lebih mengena jika dibandingkan dengan dikotomi nomina terbilang/tak terbilang.

Buku TBDBIS memberikan batasan nomina kolektif seperti berikut: nomina kolektif mempunyai ciri dapat disubstitusikan dengan *mereka* atau dapat diperinci atas anggota atau atas bagian-bagian. Contoh nomina kolektif adalah *tentara*, *keluarga* (nomina dasar), *wangi-wangian*, *tepung-tepungan*, *minuman* (nomina turunan). Mengenai nomina bukan kolektif tidak disajikan contoh; hanya disajikan batasan; nomina bukan kolektif adalah nomina yang tidak dapat disubstitusi dengan *mereka* atau tidak dapat diperinci bagian-bagiannya.

Saya tidak melihat manfaat pengelompokan nomina di dalam bahasa Indonesia atas nomina kolektif dan nomina bukan kolektif. Batasan yang dicanangkan oleh penyusun buku TBDBIS di atas dapat diberi timpaan contoh lawan berikut ini. Kata *tentara* dan *keluarga*, yang secara semantis dapat memiliki pengertian 'kolektif', secara sintaktis dapat berada pada konstruksi yang tidak dapat "disubstitusikan dengan *mereka*". Amatilah (7) dan (8).

(7) Ratu merasa malu karena ada *seorang keluarga* kerajaan yang bertingkah tidak terpuji.

(8) *Seorang tentara* Indonesia mendapat Bintang Mahaputra Kelas Satu.

Barangkali sebenarnya ada kata *anggota* sesudah kata *seorang*, tetapi kata *anggota* itu mengalami pelesapan karena alasan tertentu. Namun demikian, ada kata bermakna kolektif (yang tidak berkolokasi dengan *anggota*) yang dapat diperlakukan secara tak kolektif.

- |   |                |
|---|----------------|
| (9) <i>umat</i> Islam                       | [kolektif]     |
| Ada seorang <i>umat</i> yang [ . . . ]      | [tak kolektif] |
| (10) <i>perkakas</i> (dapur)                | [kolektif]     |
| Ada satu <i>perkakas</i> dapur yang hilang. | [tak kolektif] |

Mengenai pemakaian nomina, penyusun buku TBDBIS mencantumkan butir-butir pembahasan sebagai berikut.

1. Penggolongan Nomina;
2. Nomina Tempat, Arah, dan Jarak;
3. Tiruan Bunyi;
4. Makian;
5. Sapaan;
6. Takaran;
7. Nomina Waktu.

Pada beberapa halaman pertama bagian pembicaraan mengenai nomina, belum ada pembahasan secara sintaktis (uraian yang disajikan bersifat semantis); baru kemudian, pada butir mengenai nomina tempat, arah, dan jarak, ada sedikit pembahasan secara sintaktis.

Pada butir pembahasan mengenai penggolongan nomina dicantumkan uraian bahwa kata *seorang* pada *seorang manusia* adalah penggolongan untuk manusia. Uraian hanya berhenti sampai di sini, tidak dilanjutkan dengan upaya mengaitkan pembahasan butir ini dengan pembicaraan yang sudah dimulai pada halaman-halaman sebelumnya, yakni mengenai pengelompokan nomina insan, nomina bernyawa, dan nomina tak bernyawa. Ihwal "kekhususan nomina" yang disebut-sebut di dalam butir pembahasan ini sebenarnya dapat dikembangkan dengan uraian mengenai *seorang* untuk nomina insan, *seekor* untuk nomina bernyawa, dan *sebuah* untuk nomina tak bernyawa. Mengenai nomina tak bernyawa perlu diberi keterangan lebih lanjut karena nomina jenis ini memiliki berbagai macam bentuk penggolongan nomina, tergantung pada wujud nomina yang bersangkutan. Misalnya, *sebutir* untuk benda yang berwujud bundar (seperti *telur*, *biji*, *jagung*, *mangga*); *sebilah* untuk benda yang tajam (seperti *pisau*, *pedang*, *jarum*). Daftar penggolong nomina yang dibuat dalam TBDBIS masih kurang lengkap; karena daftar ini merupakan daftar tertutup (*closed list*) sebaiknya disusun selengkap mungkin.

Pada butir pembahasan nomor enam (mengenai takaran) didaftar sejumlah kata yang dipakai untuk takaran (seperti *teguk*, *kecap*, *kecup*, *bentuk*, *kapur*, *gelas*) tanpa disajikan uraian apa-apa. Sebagian dari kata-kata yang direntetkan pada butir enam ini disebutkan lagi pada daftar penjodoh bilangan pada halaman 44, tanpa diberi penjelasan apa-apa. Sama sekali tidak ada keterangan apa-apa mengenai perbedaan di antara penggolong nomina (penjodoh bilangan) yang dibahas sebagai butir pertama dan nomina takaran yang didaftar pada butir keenam.

Pada butir pembahasan nomor dua (mengenai nomina tempat, arah, dan jarak) disebutkan bahwa konsep tempat, arah, dan jarak di dalam bahasa Indonesia harus dihubungkan dengan *di*, *ke*, dan *dari*. Lalu disebutkan sejumlah kata yang digunakan tanpa partikel itu.

- (pulang) kantor/kandang/kampung/mudik/sekolah;
- (masuk) kuliah/penjara/kelas/kamar;
- (naik) darat/gunung;
- (belok) kanan/kiri;
- (hadap) muka;
- (balik) kanan/belakang;
- (menuju) utara/selatan/timur/barat.

Pembahasan hanya berhenti sampai di sini saja, tidak dilanjutkan dengan keterangan lebih lanjut. Tidak dipersoalkan, misalnya, bahwa yang dimaksudkan dengan "tanpa partikel" itu sebenarnya bukan "tanpa *di/ke/dari*" melainkan "tanpa *ke/dari*". Pelepasan preposisi *dari* sebenarnya hanya menyangkut nomina *kantor* dan *sekolah* saja: *pulang (dari) kantor/sekolah*. Nomina sisanya yang terdaftar itu berada pada konstruksi yang mengalami pelepasan preposisi *ke*. Lalu apakah benar bahwa preposisi *di* (tidak seperti halnya dengan preposisi *ke* dan *dari* pada contoh di atas) memang tidak pernah dilesapkan di dalam rangkaiannya dengan nomina? Persoalan seperti ini tidak diotak-atik lebih jauh di dalam butir pembahasan nomor dua ini.

Persoalan ini sebenarnya masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menelusuri, misalnya, kendala mengenai rangkaian *ke* dengan nomina; ada yang kehadirannya manasuka (a), ada yang wajib (b), dan ada yang dilarang (c). Amatilah contoh berikut.

- (11) a. pulang (ke) kampung;
- b. pulang \*(ke) rumah;
- c. pulang (\*ke) mudik

Jika ditelaah lebih dalam lagi, ihwal kehadiran *ke* yang manasuka itu masih dapat dipersoalkan apakah hadir dan tidaknya *ke* itu membawakan makna yang sama saja? Bandingkan (a) dan (b) berikut ini. Kalimat (a) dapat dijumpai sebagai tulisan di salah satu papan pengumuman, tetapi kalimat (b) akan mengundang tawa untuk dibaca.

- (12) a. Dilarang masuk ke penjara selain petugas.
- b. Dilarang masuk penjara selain petugas.

Perbedaan di antara (a) dan (b) itu mirip dengan perbedaan di antara konstruksi bahasa Inggris *go to the school* dan *go to school*.

Butir nomor tiga (mengenai tiruan bunyi) dan nomor empat (mengenai makian) hanya memuat pencantuman beberapa kata sebagai contoh, tanpa pembahasan apa-apa. Kedua butir ini berkenaan dengan ihwal semantik, dan tidak mempunyai gayutan sintaktis.

Butir nomor lima membahas ihwal sapaan, tetapi contoh kalimat yang disebutkan tidak memperhatikan tanda baca (seperti koma); hanya contoh pada (e) (buku TBDBIS) yang mencantumkan tanda koma setelah kata sapaan. Tidak adanya tanda koma menyertai kata sapaan menyebabkan penafsiran secara lain. Perhatikanlah contoh (13a) dan (14a), yang tanpa tanda koma (seperti yang tercetak pada (f), dan contoh (13b) dan (14b), yang dengan tanda koma.

- (13) a. Yang Mulia mau ke mana?  
 b. Yang Mulia, mau ke mana?
- (14) a. Ini topi tuan.  
 b. Ini topi, tuan.

Butir nomor tujuh membahas ihwal nomina waktu, dengan menyajikan contoh *pagi, petang, malam, sore, minggu, tahun, zaman*. Mengenai nomina waktu ini, oleh penyusun buku TBDBIS ditambahkan keterangan bahwa nomina waktu tergolong nomina tak terbilang. Tidak jelas apa yang dimaksudkan dengan pernyataan itu. Kata *pagi* memang tidak dapat dirangkaikan dengan numeralia: *tiga \*pagi*. Akan tetapi, kata seperti *malam, tahun, zaman* dapat berdampingan dengan numeralia: *dua malam, tiga tahun, empat zaman*.

Di dalam TBDBIS terdapat bagan nomina dasar dan nomina turunan. Bagan ini dibagi atas tiga kolom besar, yakni (1) Dasar, (ii) Turunan, (iii) Turunan Pindahan Kelas. Tidak ada penjelasan, hal apakah yang membedakan kolom (ii) dengan kolom (iii). Barangkali kolom (ii) berkenaan dengan turunan yang tidak mengalami pindahan kelas. Akan tetapi, di bawah kolom (ii) ada subkolom dengan nama "Berafiks". Pada subkolom ini didaftar serentetan kata berafiks, yang hampir semuanya mengalami pindahan kelas kata. Di bawah kolom (iii) disebutkan subkolom "Transposisi", "Deverbal", "Deadjektival", "Denumeralia", "Depronominata". Tidak jelas apa yang membedakan subkolom "Berafiks" dari subkolom "Deverbal", "Deadjektival", "Denumeralia", "Depronominata", dan memang hal itu tidak dijelaskan oleh penyusun buku TBDBIS. Contoh yang dicantumkan pada subkolom "Deverbal" belum lengkap; pada subkolom ini belum disebutkan nomina berprefiks *pe-* yang

deverbal, misalnya *peminum*. Contoh yang didaftar pada subkolom "Deadjektival" belum lengkap; belum tercantum pada subkolom ini nomina ber-sufiks *-an* dan berprefiks *pe-* yang deadjektival, misalnya *kotoran*, *pembesar*. Pada subkolom "Transposisi" disebutkan contoh bentuk *membaca* yang berstatus nomina. Uraian mengenai pandangan yang berbeda dengan pendapat bahwa bentuk verbal *membaca* dapat mengalami pelintasan ke-kategorialan (transposisi) dapat dilihat pada Kaswanti dan Moeliono (1985).

## 1.2 Pronomina

Klasifikasi yang dibuat mengenai pronomina mengikuti pola yang ditempuh pada pemerian nomina; pertama-tama ditinjau dari segi pengelompokan subkategorial, lalu dilihat segi pemakaian pronomina. Yang pertama ini diteropong dari dua arah, lalu masing-masing arah dijabarkan lagi atas dua pembagian.

1. Dilihat dari hubungannya dengan nomina
  - a. Pronomina Intratekstual
  - b. Pronomina Ekstratekstual
2. Dilihat dari jelas atau tidaknya referennya
  - a. Pronomina Takrif
  - b. Pronomina Tak Takrif

Klasifikasi ini memperlihatkan kerancuan pemakaian istilah dan kerancuan pengertian yang dikandung oleh istilah yang dipakai di dalam klasifikasi. Istilah "*intratekstual*" berkenaan dengan sesuatu yang "di dalam teks" atau "di dalam bahasa". Untuk pengertian ini Verhaar (periksa Kaswanti, 1982) memakai istilah "*dalam-tuturan*" (*utterance-internal*); untuk pengertian yang sama pula, tetapi khusus dipakai untuk membahas deiksis, Brect (1974) menggunakan istilah "endofora" (*endophore*). Istilah *ekstratekstual* berkenaan dengan sesuatu yang "di luar teks" atau "diluar bahasa". Untuk pengertian ini Verhaar memakai istilah "luar-tuturan" (*utterance-external*), Brecht menggunakan istilah "eksofora" (*exophora*).

Kerancuan pemakaian istilah dan kerancuan pengertian yang dikandung oleh istilah yang dipakai dapat dilihat pada kalimat-kalimat berikut (yang saya kutip dari TBDIS).

- (i) Dilihat dari hubungannya dengan nomina, yaitu ada atau tidaknya dalam wacana/bahasa.
- (ii) Pronomina ini [intratekstual] menggantikan nomina yang terdapat dalam wacana.

(iii) Pronomina ini [ekstratekstual] menggantikan nomina yang terdapat di luar wacana atau bahasa. Ia bersifat deiktis.

Atas dasar pernyataan (i) itu penyusunan buku TBDBIS membagi pronomina atas pronomina intratekstual dan pronomina ekstratekstual. Ada tiga hal yang dapat disimpulkan dari pernyataan (i), termasuk juga dari pernyataan (ii) dan (iii). Pertama, menurut penyusun buku TBDBIS ada nomina yang berada di DALAM wacana/bahasa, dan ada pula nomina yang berada Di LUAR wacana/bahasa. Kedua, fungsi pronomina adalah MENGGANTIKAN. Ketiga, yang digantikan oleh pronomina adalah NOMINA.

Pengertian "luar bahasa" dan "dalam bahasa" dapat dijelaskan dengan kedua contoh berikut (yang saya kutip dari Brecht, 1974 : 491).

(19) a. Dick is certainly in love with Jane.

b. Dick assumes that he certainly is in love with Jane.

Pada kalimat (19a) *certainly* mencerminkan pendapat si pembicara, yakni orang yang mengucapkan kalimat itu. Pada kalimat (19b) *certainly* membawakan pendapat subjek induk kalimat, yakni *Dick* bukan si pembicara (yang mengucapkan kalimat (19b) itu). *Si pembicara* adalah sesuatu yang di luar bahasa, sedangkan *subjek* adalah sesuatu yang di dalam bahasa. Yang disebut *subjek*, *objek*, *nomina*, *verba* adalah sesuatu yang di dalam bahasa, dan tidak memiliki referen (di luar bahasa).

Ucapan yang mengatakan bahwa fungsi pronomina (hanya) menggantikan nomina adalah menyesatkan. Timbulnya kesalahkaprahan ini dapat dilacak jika ditinjau sejarah penamaan pronomina. Ihwal kesalahkaprahan sebagai akibat pengertian tradisional itu dibahas, antara lain, oleh Lyons (1977:636–637). Persona pertama dan persona kedua (yang juga disebut pronomina) tidak dapat menggantikan nomina (keduanya menunjuk pada si pembicara dan si lawan bicara). Hanya persona ketiga yang dapat menggantikan nomina (walaupun persona ketiga tidak hanya berfungsi sebagai pengganti nomina saja (periksa Brecht, 1974:514). Kedua macam fungsi pronomina persona itu oleh Benveniste (1966:256) diberi nama *la fonction des substitués* dan *la fonction des indicateurs de personne*. Kedua macam fungsi pronomina dan ihwal bahwa tidak semua pronomina persona menggantikan nomina diuraikan pula oleh Burks (1949:678).

Kerancuan lain yang dibuat oleh penyusun buku TBDBIS terlihat pada kalimat-kalimat berikut.

(i) Dilihat dari jelas atau tidaknya referennya.

(ii) Pronomina ini [takrif] menggantikan nomina yang referennya jelas.

- (iii) [Pronomina tak takrif ialah] pronomina yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu.

Tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh penyusun buku TBDBIS dengan pernyataan "referen yang jelas dan referen yang tidak jelas". Pengertian "jelas/tidak jelas" di sini disangkutpautkan dengan "takrif/tak takrif" (yang merupakan terjemahan dari istilah *definite/indefinite*). Pada pernyataan (ii) dipakai perkataan "MENGGANTIKAN nomina", sedangkan pada pernyataan (ii) digunakan perkataan "MENUNJUK pada orang [. . .]". Pada pernyataan (ii) itu tersirat penjelasan mengenai ihwal kedefinitan (*definiteness*), meskipun contoh-contoh yang dicantumkan sesudah pernyataan ini tidak semuanya "menggantikan nomina". Pada pernyataan (iii) bukan soal kedefinitan yang dibahas melainkan soal kereferensialan.

Di dalam klasifikasi ini terlihat pemerian penyusun TBDBIS yang mencampuradukkan ihwal definit/tidak definit dan ihwal referensial/tak referensial (persoalan ini dibahas, antara lain, oleh Givón; (1978:291–330)). Berikut ini saya kutipkan contoh (di dalam bahasa Inggris) yang dipakai oleh Givón untuk menjelaskan kedua pengertian di atas; selain bahasa Inggris, Givón memakai pula contoh dari bahasa-bahasa lain.

- (20) a. REF – INDEF : He bought *a book* yesterday.  
 b. REF – DEF : He bought *the book he wanted* yesterday.  
 c. NON – REF : *Humans* are mammals.  
                   The elephant *is a mammal*.  
                   He *is a teacher*.  
                   He didn't buy *any book*  
                   He's looking for *a new house* to buy.  
 d. NON – DEF : He bought *shirts*.  
                   He went to *the movies*

Pada pembahasan mengenai pronomina ini hampir seluruh persoalan yang dibicarakan adalah pronomina persona. Bidang pembahasan berkisar di sekitar soal semantis, hanya sedikit sekali porsi sintaksisnya. Pemerian yang disajikan sepotong-potong saja, kurang tuntas. Contoh lain mengenai kurang tuntasnya penguraian dapat dilihat pada bagian akhir pembicaraan mengenai pemakaian pronomina. Di situ disebutkan pernyataan sebagai berikut:

"Kenyataan, walaupun terbatas, *ia* dapat menggantikan nomina tak bernyawa.

Contoh: Masa taman kanak-kanak sering dianggap tidak penting oleh banyak orang. *Ia* dianggap sebagai tempat anak-anak bermain-main saja." Sesudah pernyataan ini tidak dicantumkan penjelasan apa-apa mengenai apa yang dimaksudkan dengan "terbatas". Jika fenomena ini ditelusuri lebih jauh, akan tampak bahwa pemakaian bentuk *ia* untuk nomina tak bernyawa ini mempunyai keterbatasan dari segi sintaktis maupun dari segi wacana. Bentuk *ia* yang dipakai untuk nomina tak bernyawa ini hanya dapat digunakan pada gatra subjek, dan tidak dapat berada pada gatra objek, (periksa Kaswanti, 1982). Bandingkan contoh-contoh berikut; *dia* pada contoh (22) tidak dapat ditafsirkan sebagai nomina tak bernyawa, dan *dia* pada contoh (23) tidak gramatikal karena jika yang dimaksud adalah nomina tak bernyawa maka pada gatra objek kata *ia/dia* tidak dapat digunakan.

- (21) Bilamana ilmu tidak terikat terhadap suatu rasa tanggung jawab maka *dia* akan mengarah kepada suatu scientisme palsu dan [ . . . ] (Prisma, Januari 1980, 2).
- (22) membeli *dia*
- (23) mengalami \**dia*

Keterbatasan lain bagi pemakaian *ia/dia* seperti pada contoh (21) itu berkenaan dengan jenis wacana. Wacana jenis (21), yang pemunculannya di dalam bahasa Indonesia termasuk baru (belum terdapat pada bahasa Melayu, dan belum pula pada bahasa Indonesia sebelum tahun 1960-an), dijumpai pada ragam bahasa Indonesia tulis yang formal; terutama bahasa cendekiawan.

Pembahasan mengenai pronomina dapat diperluas sehingga tidak hanya menyangkut persoalan pronomina persona. Bahasa Indonesia memang tidak memiliki pronomina sebanyak jenis yang ada pada bahasa seperti bahasa Inggris. Selain pronomina persona, dapat pula dipaparkan pronomina demonstratif, pronomina interogatif (seperti *apa, siapa, mana*; yang tidak termasuk pronomina adalah adverbial interogatif seperti *bagaimana, bilamana*). Meskipun bahasa Indonesia tidak memiliki pronomina relatif, namun kata *yang* (yang di dalam kebanyakan buku tata bahasa Indonesia dianggap sebagai pronomina relatif) perlu diikuti sertakan di dalam pembahasan mengenai pronomina, terutama mengenai mengapa kata *yang* di dalam bahasa Indonesia bukan pronomina relatif (Verhaar, 1983). Bahasa Indonesia tidak memiliki pronomina refleksi, tetapi dalam kaitan ini kata *diri* perlu dikemukakan karena kata ini dapat dirangkaikan dengan bentuk persona.

## 2. Jangkauan Persoalan (Data)

### 2.1 Nomina

Jenis-jenis nomina yang berafiks tidak dibahas sama sekali pada uraian mengenai nomina, walaupun pada uraian mengenai adjektiva dan mengenai verba ihwal pengafiksian diikutsertakan di dalam pembahasan. Afiks nominal seperti *-an* (*tulisan, didikan, lautan*), *pe-* (*pesuruh*), *peN-* (*pembeli*), *ter-* (*terdakwa*), *ke-* (*ketua, kekasih, kehendak*), *ke-/an* (*kerajaan*), *per-/an* (*peraturan*), *peN-/an* (*pendapatan*), pada tempatnyalah dibahas di bagian ini secara global. Pembicaraan ihwal pengafiksian yang lebih terinci dapat dicantumkan pada 3.2.3 (uraian mengenai pengafiksian pada 3.2.3 masih belum tuntas). Ihwal pengafiksian lain yang dapat dibahas di bagian ini, misalnya, keterkaitan jenis afiks yang satu dengan jenis afiks yang lain: tipe *pembaca* versus *bacaan*, tipe *pendakwa* versus *terdakwa*, tipe *pemimpin* versus *pimpinan*, tipe *penyuruh* versus *pesuruh*, tipe *pesuruh* versus *suruhan*. Infiks nominal *-el-* juga pada tempatnya disebutkan di sini: *teknjuk, pelatuk*,

Ihwal reduplikasi, meskipun sudah dibahas secara umum pada 3.2.4 (yang pembahasannya juga belum tuntas; tipe reduplikasi secara umum pada 3.2.4 (yang pembahasannya juga belum tuntas; tipe reduplikasi seperti *buah-buahan, anak-anakan*, misalnya, belum tercantumkan), pada tempatnya pula dipaparkan di bagian ini. Demikian pula ihwal kata majemuk (yang diuraikan pada 4.7), selayaknya dikemukakan pada pembahasan mengenai nomina ini.

Dalam TBDBIS terdapat daftar penggolong nomina (penjodoh bilangan). Pencantuman contoh-contoh tidak mengikuti suatu sistem, misalnya, penyusunan menurut alfabet. Contoh yang disebutkan juga belum lengkap; karena ini merupakan daftar tertutup, selayaknyalah dikumpulkan contoh yang selengkap mungkin.

Dalam TBDBIS terdapat pula daftar nomina kolektif. Jika pemuatan daftar ini dianggap perlu, sebaiknya contoh-contoh yang disebutkan diatur secara alfabetis. Mengenai kata turunan, adabainya dibuat semacam pengelompokan, misalnya, atas kata yang berafiks (*minuman, kawan-an*), kata yang berupa reduplikasi dan berafiks (*padi-padian*), kata yang berupa kata majemuk (*puspa ragam*).

Di dalam TBDBIS terdapat pula bagan nomina dasar dan nomina turunan. Bagan ini tidak disebut-sebut di dalam uraian mengenai nomina pada halaman sebelumnya, dan tiba-tiba muncul bagan ini tanpa diberi keterangan apa-apa. Di samping pembagian kolom dan penamaannya yang tidak mudah

diikuti maksudnya, data yang dicantumkan pada kolom-kolom itu juga belum lengkap. Pada kolom deverbial belum dicantumkan kata yang berprefiks *pe-* (*peminum*). Pada kolom deadjektival belum disebutkan kata yang bersufiks *-an* (*kotoran*), berprefiks *peN-* (*pembesar*).

## 2.2 Pronomina

Masih cukup banyak persoalan yang belum dikemukakan pada pembahasan mengenai pronomina. Selain pronomina persona, pada tempatnyalah dipaparkan pronomina-pronomina lain pada 3.3.3 ini. Mengenai pronomina persona, dapat ditambahkan penjabaran, misalnya, mengenai perbedaan *ia* dan *dia* secara struktural (*membujuk dia* dapat diterima, tetapi *membujuk \*ia* tidak dapat; begitu pula *buku dia/\*ia*, *kepada dia/\*ia*), mengenai perbedaan distribusi struktural bentuk bebas dan bentuk terikat (*Jangan memukul dia!* dapat diterima, tetapi *Jangan \*memukulnya!* tidak, begitu pula *dengan dia/-nya* versus *tanpa dia/\*-nya*). Kekhasan bentuk persona di dalam bahasa Indonesia perlu dicantumkan. Selain bahwa bentuk persona dapat direduplikasikan, bentuk persona dapat pula berdampingan dengan pronomina demonstratif (*saya ini*, *dia itu*), bentuk pronomina dapat bersebelahan dengan kata sandang (*si dia*). Mengenai pronomina persona yang perifrastis, kendala strukturalnya sepantasnya dicatat pada bagian pembahasan ini, yakni bahwa bentuk persona yang perifrastis itu tidak dapat dipakai pada konstruksi posesif (bandingkan *mereka semua* dan *rumah mereka \*semua*; *kamu sekalian* dan *urusan kamu \*sekalian*; tetapi *kalian* pada *urusan kalian* dapat diterima).

Mengenai pronomina demonstratif *itu*, dapat diuraikan, misalnya, ihwal *itu* yang berciri intratekstual dan *itu* yang berciri ekstratekstual. Perbedaan ciri ini dapat kelihatan pada tatanan strukturalnya. Bandingkan (24) dan (25). Bentuk (24) dapat ditafsirkan baik secara intratekstual maupun secara ekstratekstual, sedangkan (25) hanya dapat ditafsirkan secara ekstratekstual. Bentuk (25) tidak dapat dipakai di dalam wacana seperti (26) (periksa Kaswanti, 1982).

(24) mobil itu

(25) mobil yang itu

(26) [...] datanglah tuan bupati dari Rembang dengan mobil. Waktu *mobil itu* masuk ke halaman sekolah [...]

Sehubungan dengan pronomina refleksif, dapat dicatat konstruksi yang mengandung kata *diri* dengan tiga macam kemungkinan kendala pelekatan

*-nya*: ada yang tidak pernah dapat dilekati *-nya* (27), ada yang dapat dilekati *-nya* (28), ada yang harus dilekati *-nya* (29).

- (27) (mem) bunuh diri  
berdiam diri  
melarikan diri
- (28) membela diri (nya)  
melindungi diri (nya)  
merendahkan diri (nya)
- (29) tentang diri \*(nya)  
terhadap diri \*(nya)

### 3. Penutup

Ada dua hal yang masih perlu dibenahi pada bagian pembahasan mengenai nomina dan pronomina. Klasifikasi yang dipakai perlu ditata kembali, baik menyangkut peristilahan maupun kerangka pengelompok-kelompokan. Persoalan yang diuraikan belum tuntas, baik dari segi penguraiannya maupun dari segi cakupan datanya. Sebagai buku yang deskriptif, buku ini (sekurang-kurangnya pada bagian mengenai nomina dan pronomina) kurang deskriptif. Sebagai buku yang mencurahkan perhatian pada ihwal sintaksis, penelusuran sintaktisnya masih kurang memadai.

### Pustaka Acuan

- Benveniste, Emile 1966. *Problèmes de linguistique générale*. Paris: Gallimard.
- Brecht, Richard D. 1974, "Deixis in embedded structure", di dalam *Foundations of Language* 11; 489 – 518.
- Burks, A.W. 1949. "Icon, index, and symbol", di dalam *Philosophy and Phenomenological* 9 : 673 – 689.
- Givón, Talmy. 1978, "Definiteness and referentiality; di dalam Greenberg ed. 1978: 291 – 330.
- Greenberg, Joseph A. ed. 1978. *Universals of Human Language*. Stanford: Stanford University Press.
- Kaswanti Purwo, Bambang. 1982. *Deiksis dalam Bahasa Indonesia*. Disertasi Universitas Indonesia.
- Kaswari Purwo, Bambang. 1984. *Deiksis dalam Bahasa Indonesia*. [Seri ILDEP] Jakarta: Balai Pustaka.
- Kaswanti Purwo, Bambang dan Anton M. Moeliono (1985). "Analisis fungsi subjek dan objek: sebuah tinjauan", Makalah Konferensi Nasional IV Masyarakat Linguistik Indonesia.
- Lyons, John. 1977. *Semantics* 2. Cambridge: Cambridge University Press.
- MacDonald, R. Ross dan Soenjono Dardjowidjojo. 1967. *A Student's Reference Grammar of Modern Formal Inonesian*. Washington, D.C: Georgetwn University Press.
- Quirk, Randolph *et al.* 1972. *A Grammar of Contemporary English*. London: Longman Group Ltd.
- Verhaar, John W.M. 1983. "On the syntax of yang", di dalam *Pacific Linguistics*, C-77, 43–70.

## NUMERALIA DAN ADJEKTIVA DALAM BAHASA INDONESIA

Henry Guntur Tarigan

### O. Pengantar

Panitia Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia dengan persetujuan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa meminta kesediaan saya untuk menulis sebuah makalah yang berjudul *Numeralia dan Adjektiva dalam Bahasa Indonesia* ini.

Isi makalah ini memang saya usahakan berupa tanggapan terhadap uraian yang terdapat pada naskah *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Siktaksis* yang disusun oleh Harimurti Kridalaksana dkk. yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Walaupun demikian tidaklah berarti bahwa dalam makalah ini gagasan saya sendiri akan terkesampingkan. Jauh sebelum Panitia mengemukakan ajakan itu, saya pun telah menyetengahkan gagasan mengenai topik itu, bahkan mengenai tata bahasa dalam beberapa karya saya, khususnya dalam bidang pengajarannya.

Saya berharap semoga makalah ini dapat memberi sekelumit saham dalam penyusunan naskah Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang telah lama dinanti-nantikan oleh masyarakat terutama oleh para pengajar dan pelajar, di tanah air kita ini.

### 1. Numeralia

#### 1.1 Batasan

Numeralia atau kata bilangan adalah kata yang dapat dipakai membilang atau menghitung banyak orang, binatang, barang, kejadian, hal atau konsep.

Karena orang, binatang, tumbuhan, barang, kejadian, hal, atau konsep sudah biasa kita sebut sebagai benda, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa, numeralia adalah kata yang dapat dipakai membilang banyaknya benda. Hal inilah yang menyebabkan numeralia dapat bergabung dengan nomina, seperti *satu orang, dua guru, tiga anjing, empat pepaya, lima meja, enam pembunuhan, tujuh gagasan*.

## 1.2 Kategorisasi

Numeralia dapat dikategorisasikan dengan berbagai cara, bergantung kepada sudut pandangan kita. Bila ditinjau dari segi dapat atau tidaknya berdiri sendiri atau mandiri, maka numeralia dapat dikategorisasikan atas (1) *numeralia mandiri* dan (2) *numeralia tidak mandiri*.

Bila ditinjau dari segi pembentukannya maka numeralia dapat dikategorisasikan atas (1) *numeralia dasar* dan (2) *numeralia turunan*.

### 1.2.1 Numeralia Mandiri

Numeralia mandiri dapat pula dibedakan atas (1) *numeralia utama*, (2) *numeralia tingkat*, dan (3) *numeralia kolektif*.

Ciri utama numeralia mandiri ialah dapatnya dipakai sebagai jawaban atas pertanyaan "*berapa?*"

Contoh:

Berapa orang anakmu?	<i>Tiga.</i>
Berapa hasil perkalian itu?	<i>Empat persembilan</i>
Berapa jumlah buku itu?	<i>Dua lusin.</i>
Cetakan keberapa buku ini?	<i>Ketiga.</i>
Berapa banyak penonton yang hadir?	<i>Beratur-ratus.</i> <i>Ratusan.</i>

#### 1.2.1.1 Numeralia Utama

Ke dalam kelompok numeralia utama termasuk: (1). *bilangan utuh*, (2). *bilangan pecahan*, dan (3). *bilangan gugus*.

##### a. Bilangan Utuh

Bilangan utuh adalah sejenis numeralia utama yang menyatakan jumlah

Misalnya:

tulis —————> bertulis

buka —————> terbuka

- (4) *Komparatif* : proses yang mengubah KEADAAN menjadi EKUATIF atau SUPERLATIF. Proses ini ditandai oleh se- atau ter-.

Misalnya:

putih —————> seputih

besar —————> terbesar

Masing-masing jenis utama derivasi di atas masih terbagi atas beberapa subjenis sesuai dengan kedua belas verba tersebut terdahulu. Namun, tidak semua jenis verba yang berciri KEADAAN dapat diubah menjadi PROSES atau AKSI, dan tidak semua verba berciri AKSI dapat diubah menjadi KEADAAN atau PROSES. Proses derivasi ini ada kendalanya. Sekedar ilustrasi, perhatikanlah yang berikut.

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| a. bosan  | membosan (X)    |
| tahu      | menahu (X)      |
| b. timbul | menimbulkan (X) |
| tenggelam | menenggelam (X) |
| c. menang | bermenang (X)   |
| kuat      | berkuat (X)     |
| terbit    | terterbit (X)   |
| d. cantik | mencantiki (?)  |
| pukul     | berpukul (?)    |

Verba di depan tanda (X) tidak terterima. Verba pada *a* adalah verba keadaan-pengalaman. Verba ini tidak dapat diubah menjadi verba proses. Verba pada *b* adalah verba proses. Pada verba ini tak boleh terjadi derivasi inkoatif karena derivasi ini adalah untuk membuat KEADAAN menjadi PROSES. Verba pada *c* masing-masing adalah verba proses-benefaktif, verba keadaan, dan verba proses-lokatif. Derivasi resultatif tak dapat terjadi pada verba jenis ini. Verba pada *d* masing-masing adalah verba keadaan dan verba aksi. Verba *mencantiki* dan *berpukul* adalah hasil derivasi kausatif dan resultatif, tetapi belum terdapat dalam pemakaian. Unsur-unsur seperti ini termasuk verba potensial sebagaimana disebut pada bagian Pendahuluan.

Dari contoh-contoh di atas dapat dilihat adanya kendala atas terjadinya derivasi pada verba tertentu. Pembicaraan lebih lanjut tentang hal ini dapat dibaca dalam buku yang disebut pada bagian Pendahuluan (Tampubolon, 1983).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat verba derivasi yang terbagi atas empat jenis utama, yaitu:

- (1) *verba inkoatif*, termasuk verba proses.  
menguning, mengental, kepanasan
- (2) *verba kausatif*, termasuk verba aksi.  
melebarkan, membasahi, mempertajam
- (3) *verba resultatif*, termasuk verba keadaan.  
berjahit, berukir, terikat
- (4) *verba komparatif*, termasuk verba keadaan.  
sepandai, seputih, tercantik

### 4.3 Verba Inkorporatif

Dalam bahasa Indonesia, sebagaimana juga dalam berbagai bahasa lain, kasus dapat berubah menjadi verba melalui proses yang disebut *inkorporasi*. Dalam proses ini ciri selektif verba hasil inkorporasi sama dengan ciri selektif verba semula pada proposisi. Dalam bahasa Indonesia proses ini ditandai secara teratur oleh *meN-*, *meN-kan*, *meN-i*, *meN+per-*, *ber-*, atau *se-*. Sekedar ilustrasi, marilah kita perhatikan kalimat-kalimat berikut.

- (21) *Wanita itu telah menjanda.*  
O V
- (22) *Mereka berdagang*  
P V
- (23) *Pak Surya mengandangkan kambingnya.*  
P V O
- (24) *Dia bersepeda ke sekolah.*  
P=O V L
- (25) *Ibu menyisiki ikan itu.*  
P V O

Kalimat-kalimat itu dapat diparafrasekan sebagai berikut:

- (21a) *Wanita itu telah menjadi janda.*  
O V O
- (22a) *Mereka mengusahai dagang.*  
P V O
- (23a) *Pak Surya memasukkan kambingnya ke dalam kandang.*  
P V O L

Numeralia 2,5; 3,5; 3,1; 3,3; 4,01; dan 5,15 ini disebut *numeralia desimal*.

**c. Bilangan Gugus**

Bilangan gugus adalah numeralia yang menyatakan sekelompok bilangan.

Contoh:

**belas:** bilangan antara 10 dan 20, atau bilangan 11 *sampai dengan* 19.

11	=	<i>sebelas</i>
12	=	<i>dua belas</i>
13	=	<i>tiga belas</i>
14	=	<i>empat belas</i>
15	=	<i>lima belas</i>
16	=	<i>enam belas</i>
17	=	<i>tujuh belas</i>
18	=	<i>delapan belas</i>
19	=	<i>sembilan belas</i>

**likur:** bilangan antara 20 dan 30, atau bilangan 21 *sampai dengan* 29.

21	=	<i>selikur</i>
22	=	<i>dua likur</i>
23	=	<i>tiga likur</i>
24	=	<i>empat likur</i>
25	=	<i>lima likur</i>
26	=	<i>enam likur</i>
27	=	<i>tujuh likur</i>
28	=	<i>delapan likur</i>
29	=	<i>sembilan likur</i>

**lusin:** 12 atau dua belas

12	=	<i>sehusin, satu lusin</i>
24	=	<i>dua lusin</i>
36	=	<i>tiga lusin</i>
48	=	<i>empat lusin</i>

**kodi:** 20 atau dua puluh

20	=	<i>sekodi, satu kodi</i>
40	=	<i>dua kodi</i>
60	=	<i>tiga kodi</i>
80	=	<i>empat kodi</i>
100	=	<i>lima kodi</i>

**gros:** 144 atau 12 lusin

144 = *satu gros, segros*

288 = *dua gros*

432 = *tiga gros*

puluh : 10

ribu : 1000

juta : 1.000.000.

laksa : 10.000

keti : 100.000

milyun : 1.000.000

milyar : 1.000.000.000

### 1.2.1.2 Numeralia Tingkat

Numeralia tingkat adalah sejenis numeralia mandiri yang melambangkan urutan atau tingkatan dalam jumlah. Numeralia tingkat selalu mengikuti nomina dalam frasa atau kalimat, dan berstruktur *ke-+BU* (*ke-* adalah *prefiks*; *BU* adalah *bilangan utuh*). Numeralia tingkat *kesatu* dapat dan biasanya ditukar dengan *pertama*.

Contoh:

Cetakan *pertama* buku 'Psikolinguistik' berjumlah 5000 eksemplar.

Saya mengetahui bahwa kamu orang *kedua* yang dicalonkan melanjutkan ke Universitas Leiden.

Apa benar kami anak *ketiga* dalam keluarga Pak Tarigan.

Orang *keempat* yang dicurigai oleh pihak keamanan atas penggarongan itu bernama Mat Garong.

'Pengajaran Kosakata' adalah buku *kesembilan* dari karya Henry Guntur Tarigan yang diterbitkan oleh Penerbit Angasa Bandung.

Bilamana akan diedarkan cetakan *kelima* buku 'Membaca' itu?

Ini rumah *ketiga* yang telah dibeli oleh Pak Burhan di Bandung.

### 1.2.1.3 Numeralia Kolektif

Numeralia kolektif adalah sejenis numeralia mandiri yang melambangkan jumlah dalam kumpulan. Struktur numeralia kolektif ini dapat berupa:

a. ke- + BU

c. BG + -an

b. ber- + BG (R)

d. BU ber- + N

Numeralia kolektif yang berstruktur ke-+BU selalu mendahului nomina dalam distribusinya pada kalimat.

Contoh:

Ibu merawat *ketiga* anak itu dengan penuh kasih sayang.  
*Kelima* gadis itu berasal dari suku Karo.  
 Kami telah menyelesaikan *kedua* masalah itu.  
 Kembalikanlah *keempat* buku itu segera!

Numeralia kolektif yang berstruktur *ber- + BG (R)* selalu mendahului nomina dalam distribusinya pada kalimat. (*ber-* adalah prefiks; *BG* adalah *bilangan gugus*; *R* adalah *reduplikasi*; dan tanda menyatakan *fakultatif*).

Contoh:

*Beribu-ribu* siswa mengikuti ujian Sipenmaru.  
*Beribu* siswa mengikuti ujian Sipenmaru.  
*Berpuluh-puluh* orang meninggal di daerah itu.  
*Berpuluh* orang meninggal di daerah itu.  
*Berjuta-juta* uang rakyat dipakai buat pembangunan.  
*Berjuta* uang rakyat dipakai buat pembangunan.

Numeralia kolektif yang berstruktur *BG + -an (BG* adalah *bilangan gugus*; dan *-an* adalah sufiks) biasanya mendahului nomina dalam distribusinya pada kalimat.

Contoh:

*Puluhan* domba yang disembelih pada pesta itu.  
*Ratusan* pengemis beraksi di kota Bandung dalam bulan puasa ini.  
*Jutaan* manusia menderita kelaparan di benua Afrika dalam dekade ini.

Numeralia kolektif yang berstruktur *BU ber+N (BU* adalah *bilangan utuh*; *ber-* adalah *prefiks*; *N* adalah *nomina*) dipakai dalam kalimat seperti:  
*Suami-istri tujuh beranak* itu hidup rukun dan damai.  
 Mereka *lima bersaudara* telah menyelesaikan kuliahnya dengan baik di Universitas Sumatra Utara Medan.  
 Kami *empat bersahabat* bergotong-royong membangun rumah ini.

### 1.2.2. Numeralia Tidak Mandiri

Numeralia tidak mandiri adalah numeralia yang menyatakan jumlah yang tidak tentu. Ciri utama numeralia tidak mandiri ialah tidak wajarnya dipakai sebagai jawaban atas pertanyaan "berapa?" secara mandiri. Contohnya adalah *berapa*; *berbagai*, *pelbagai*, (*ber*)-*aneka*; *sebagian*; *tiap-tiap*, *tiap*, *setiap*, *saban*; *sekalian*, *semua*; *seuruh*; *segala*; *segenap*.

Contoh dalam kalimat :

Saya masih mengenal *beberapa* orang dari para undangan ini.  
Dia telah menjalankan *berbagai* upaya untuk memecahkan masalah tersebut.

Juallah *sebagian* pusaka ayahmu buat biaya pendidikan adik-adikmu.

*Setiap* orang mendapat semangkuk bubur buat sarapan pagi.

*Semua* siswa di sekolah memperoleh beasiswa.

*seluruh* tubuhnya berbintik-bintik hitam.

*Segala* bangsa di dunia berhak memperoleh kemerdekaan.

Kemerdekaan adalah hak *segenap* bangsa.

### 1.2.3 Numeralia Dasar

Numeralia dasar dapat pula dibedakan atas:

- (1) *numeralia dasar bebas*
- (2) *numeralia dasar terikat*

#### 1.2.3.1 Numeralia Dasar Bebas

Numeralia dasar bebas adalah numeralia yang merupakan bilangan utuh, bantuan kata lain. Misalnya, *satu, asa, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan*.

Contoh:

Saya dengan dia diam dalam *satu* asrama.

*Esa* hilang *dua* terbilang.

Paman saya mempunyai *dua* istri.

*Tiga* ditambah *empat* sama dengan *tujuh*.

Berapakah *delapan* dikurangi *enam*?

*Sembilan* sama dengan *lima* ditambah *empat*.

#### 1.2.3.2 Numeralia Dasar Tingkat

Numeralia dasar tingkat adalah numeralia yang maknanya merupakan bilangan utuh tetapi di dalam pemakaiannya terikat dengan kata lain. Misalnya, *eka-, dwi-, tri, catur-, panca-, sapta-, asta-, dasa-*, dan *se-*

Contoh:

*Ekamatra* berarti 'mempunyai satu dimensi'

Ayahku mengerjakan tugas *dwifungsi* di kantor.

Soekarno dan Hatta merupakan *dwitunggal*.

Dalam *triwulan* pertama ini tugas kami terasa amat berat.

Menyimak, berbicara, membaca, dan menulis merupakan *caturtunggal* di dalam keterampilan berbahasa.

*Pancasila* adalah asas tunggal Negara Republik Indonesia.

Setiap prajurit ABRI harus menghafal luar kepala *saptamarga* dan juga menghayatinya.

Cabang-cabang olahraga apa saja yang termasuk *dasalomba*?

#### 1.2.4 Numeralia Turunan

Numeralia turunan dapat dibagi lagi atas (1) *numeralia turunan berafiks*, (2) *numeralia turunan bereduplikasi*, dan (3) *numeralia turunan gabungan*

##### 1.2.4.1 Numeralia Turunan Berafiks

Numeralia turunan yang berafiks ialah numeralia yang diturunkan dari bilangan utuh dengan membubuhnya dengan afiks.

Contoh:

<i>seperdua</i>	<i>berdua</i>
<i>sepertiga</i>	<i>bertiga</i>
<i>seperempat</i>	<i>berempat</i>
<i>seperlima</i>	<i>berlima</i>

*Seperdua* dari hartanya itu adalah pusaka ayahnya.

Saya rela membayar *sepertiga* dari utangnya itu.

*Seperempat* dikalikan *seperdua* sama dengan *seperdelapan*.

Mereka *bertiga* telah berangkat ke Medan.

Kami *berlima* diberi tugas menjaga gudang ini.

Pergilah kalian *berempat* mengangkat lemari itu.

##### 1.2.4.2 Numeralia Turunan Bereduplikasi

Numeralia turunan bereduplikasi adalah numeralia yang diturunkan dari bilangan utuh dengan cara mengulangnya.

Contoh:

<i>satu-satu</i>	<i>tujuh-tujuh</i>
<i>dua-dua</i>	<i>delapan-delapan</i>
<i>tiga-tiga</i>	<i>sembilan-sembilan</i>
<i>empat-empat</i>	<i>sepuluh-sepuluh</i>

Masuklah kalian *satu-satu* dengan tertib agar diwawancarai oleh petugas kami!

Domba itu kami jual *dua-dua* ekor ke setiap desa di kecamatan itu.

Para siswa yang mengikuti latihan olahraga itu ditempatkan *tiga-tiga* orang dalam satu kamar.

Buah kelapa yang baru dipetik itu kami buat *empat-empat* seikat agar mudah dijinjing.

Kami berjalan maju ke depan *lima-lima* orang dalam satu kelompok. Pekerjaan rumah itu kami kerjakan *tujuh-tujuh* butir soal seorang; baru kemudian kami periksa bersama-sama semuanya.

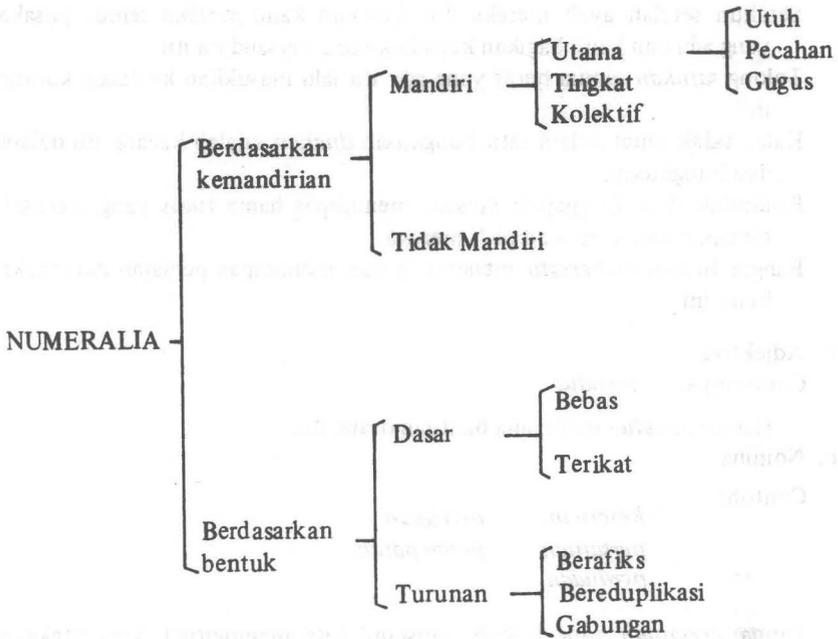
### 1.2.4.3 Numeralia Turunan Gabungan

Numeralia turunan gabungan adalah numeralia yang diturunkan dari numeralia dasar dengan cara menggabungkannya, baik dengan membubuhi afiks ataupun mengulanginya sekaligus.

Contoh:

<i>dua puluh</i>	<i>triwulan-triwulan</i>
<i>tiga puluh delapan</i>	<i>ekamatra-ekamatra</i>
<i>empat ratus</i>	<i>seratus-seratus</i>
<i>empat ratus dua belas</i>	<i>sepuluh-sepuluh</i>
<i>seribu lima ratus tiga puluh tujuh</i>	<i>puluhan-puluhan</i>
<i>berpuluh-puluh</i>	<i>ribuan-ribuan</i>
<i>beratus-ratus</i>	<i>ketiga-ketiganya</i>
<i>beribu-ribu</i>	<i>kelima-limanya</i>
<i>berjuta-juta</i>	<i>persepuluhan-persepuluhan</i>
<i>berdua-dua</i>	<i>perseratusan-perseratusan</i>
<i>setengah-setengah</i>	<i>satu dua persepuluh</i>
<i>seperempat-seperempat</i>	<i>lima tiga perempat</i>

Demikianlah uraian mengenai numeralia mandiri, numeralia tidak mandiri, numeralia dasar, dan numeralia turunan dalam bahasa Indonesia. Agar kita mendapat gambaran yang menyeluruh mengenai numeralia itu, marilah kita perhatikan bagan berikut ini.



Bagan 1 : Kategorisasi Numeralia

### 1.3 Konversi

Numeralia dapat diubah atau *dikonversikan* menjadi:

#### a. Verba

Contoh:

<i>perdua</i>	<i>satukan</i>
<i>pertiga</i>	<i>duakan</i>
<i>perempat</i>	<i>bersatu</i>
<i>perlima</i>	

Sebelum kita berangkat marilah kita *perdua* dulu beban ini supaya jangan terlalu berat.

Setahun setelah ayah mereka dimakamkan kami *perlima* semua pusaka yang ada dan kami bagikan kepada kelima bersaudara itu.

Tolong *satukan* semua beras yang ada itu lalu masukkan ke dalam karung ini!

Kalau tidak muat dalam satu bungkus *duakan* sajalah kacang itu dalam dua bungkus.

Penduduk desa Linggajulu *bersatu* menumpas hama tikus yang merusak tanaman dan memakan padi mereka.

Bangsa Indonesia *bersatu* menentang dan menumpas penjajah dari muka bumi ini.

### c. Adjektiva

Contohnya, *mendua*:

Hatiku *mendua* menerima bantuan orang itu.

### c. Nomina

Contoh:

<i>kesatuan,</i>	<i>pertigaan</i>
<i>persatuan</i>	<i>perempatan</i>
<i>perduaan,</i>	

Tanpa *persatuan* yang kokoh, mustahil kita memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945.

Setelah lulus tes, saya dimasukkan oleh komandan ke dalam *kesatuan* ini.

Dari *perduaan* hasil sawah itu kami memperoleh lima kuintal beras setiap panen.

Di tengah-tengah *perempatan* jalan itu berdiri seorang polisi mengatur lalu lintas.

Saya tidak habis pikir kalau dari kebun jeruk seluas lima hektar itu, kita hanya menerima *perempatan* sebanyak Rp. 50.000,00 saja.

Walaupun sangat terbatas, numeralia pun ada yang berupa pindahan atau konversi dari kategori lain, terutama dari *nomina* dan *verba*

Contoh:

<i>sekarung</i>	<i>setetes</i>
<i>selembar</i>	<i>sekerat</i>
<i>sebuah</i>	<i>sepotong</i>
<i>sehelai</i>	<i>setenggol</i>
<i>sebatang</i>	<i>seikat</i>

<i>sekaleng</i>	<i>segenggam</i>
<i>sebiju</i>	<i>sejempit</i>
<i>seekor</i>	<i>sebetuk</i>
<i>secangkir</i>	

Berapa harga *sehelai* ulos Batak dewasa ini?

Sarapan ayah terdiri dari *secangkir* kopi susu, *sepotong* roti dan *sebuah* telur setengah matang.

Harga *seikat* rambutan di Medan hanya dua ratus rupiah.

*Setetes* darah anda berarti kehidupan bagi orang lain.

*Seekor* burung perkutut dapat berharga jutaan rupiah di Jakarta.

## 2 Adjektiva

### 2.1 Batasan

Adjektiva atau kata keadaan adalah kata yang dapat dipakai mengungkapkan makna keadaan suatu benda.

Seperti yang telah dikemukakan pada 1.1 perlu diingatkan kembali bahwa ke dalam *benda* sudah termasuk *orang*, *binatang*, *tumbuhan*, *barang*, *kejadian*, *hal*, atau *konsep*. Hal inilah yang menyebabkan adjektiva dapat bergabung mengikuti nomina, untuk mengungkapkan keadaan nomina tersebut seperti:

<i>orang pintar</i>	<i>meja baru</i>
<i>guru muda</i>	<i>pembunuhan ngeri</i>
<i>anjing galak</i>	<i>gagasan cemerlang</i>
<i>pepaya masak</i>	

Adjektiva adalah kategori kata yang ditandai oleh:

- (1) kemungkinannya didampingi *partikel*, seperti *agak*, *rada*, *lebih*, *sangat*, *amat*, *paling*, *terlalu*.
- (2) ciri-ciri morfologis, seperti *-er*, *-i*, dan *-if* (*honorer*, *alami*, *sensitif*).

### 2.2 Kategorisasi

Adjektiva dapat dikategorisasikan dengan berbagai cara, bergantung dari sudut pandangan kita.

Bila ditinjau dari segi *bentuk*, maka adjektiva dapat dikategorisasikan (1) *adjektiva dasar*, dan (2) *adjektiva turunan*.

Bila ditinjau dari segi *fungsi*, maka adjektiva dapat dibedakan atas (1) *adjektiva predikatif*, dan (2) *adjektiva atributif*.

Bila ditinjau dari segi *pemakaian*, maka adjektiva dapat pula dibedakan atas (1) *adjektiva bertaraf*, dan (2) *adjektiva tidak bertaraf*.

## 2.2.1 Adjektiva Dasar

Bila ditinjau dari segi dapat atau tidaknya berdiri sendiri, maka adjektiva dasar ini dapat pula dibedakan atas (1) *adjektiva dasar mandiri* dan (2) *adjektiva dasar tidak mandiri*".

### 2.2.1.1 Adjektiva Dasar Mandiri

Ciri utama adjektiva dasar mandiri ialah:

- a. Dapat dipakai sebagai jawaban atas pertanyaan "*bagaimana (keadaan/sifat nomina itu)?*"

Contoh:

Bagaimana sifat orang itu? *Jujur.*  
 Bagaimana keadaan rumah itu? *Bersih.*  
 Bagaimana sifat pembunuhan itu? *Ngeri.*  
 Bagaimana sifat gagasannya itu? *Cemerlang.*

- b. Dapat diuji dengan kata-kata *agak, rada, lebih, sangat, amat, paling, terlalu.*

Contoh:

*agak muda (asin, boros, haus)*  
*rada muda*  
*lebih muda*  
*sangat muda*  
*amat muda*  
*paling muda*  
*terlalu muda*

Usia gadis itu *agak muda*

Saya *lebih muda* daripada ayahmu.

Kekasihmu itu *sangat muda*.

Dari semua yang hadir di sini kamulah yang *paling muda*.

Gadis ini *terlalu muda* untuk dikawinkan.

### 2.2.1.2 Adjektiva Dasar Tidak Mandiri

Ciri utama adjektiva dasar tidak mandiri adalah:

- a. Tidak dapat dipakai sebagai jawaban atas pertanyaan "*bagaimana (keadaan, sifat nomina itu)?*"

Contoh:

Bagaiman sifat api itu? *\*Padam.*

Bagaimana keadaan pasangan tenis itu? *\*Ganda.*

Bagaimana sifat bilangan ini? \**Genap*.

Bagaimana keadaan udara kini? \**Niskala*.

- b. Tidak dapat diuji dengan kata-kata *agak, rada, lebih, sangat, amat, paling, terlalu*.

Contoh:

- \* *agak ganda* (genap, niskala)
- \* *lebih ganda*
- \* *amat ganda*
- \* *paling ganda*
- \* *terlalu ganda*

## 2.2.2 Adjektiva Turunan

Adjektiva turunan dapat dibagi lagi atas:

- (1) *adjektiva turunan bereduplikasi*
- (2) *adjektiva turunan berafiks*
- (3) *adjektiva turunan gabungan*

### 2.2.2.1 Adjektiva Turunan Bereduplikasi

Adjektiva turunan bereduplikasi adalah adjektiva yang diturunkan dari dasar dengan cara mengulanginya.

Contoh:

<i>muda-muda</i>	<i>tinggi-tinggi</i>
<i>pintar-pintar</i>	<i>sehat-sehat</i>
<i>cantik-cantik</i>	<i>gagah-gagah</i>
<i>baru-baru</i>	<i>murah-murah</i>
<i>ngeri-ngeri</i>	<i>besar-besar</i>
<i>galak-galak</i>	<i>manis-manis</i>

### 2.2.2.2. Adjektiva Turunan Berafiks

Adjektiva turunan berafiks adalah adjektiva yang diturunkan dari dasar dengan cara membubuhnya dengan afiks, terutama afiks *-i* (ataupun alomorfnya).

Contoh:

<i>abadi</i>	<i>ilmiah</i>
<i>alami, alamiah</i>	<i>kodrati</i>
<i>badani</i>	<i>lahiriah</i>
<i>duniawi</i>	<i>manusiawi</i>
<i>falsafi</i>	<i>nabati</i>

<i>gerejani</i>	<i>surgawi</i>
<i>hewani</i>	<i>tabii</i>
<i>insani</i>	<i>unsuri</i>
<i>jasmaniah</i>	<i>wahdaniah</i>
<i>rohani</i>	

### 2.2.2.3 Adjektiva Turunan Gabungan

Adjektiva turunan gabungan adalah adjektiva yang diturunkan dari adjektiva dasar dengan cara membubuhi afiks ataupun mengulanginya sekaligus.  
Contoh:

<i>kepanasan</i>	<i>kekuning-kuningan</i>
<i>kehausan</i>	<i>kebarat-baratan</i>
<i>kesakitan</i>	<i>kemalu-mahuan</i>
<i>kebanyakan</i>	<i>kecina-cinaan</i>
<i>kelembutan</i>	<i>kekanan-kanakan</i>

### 2.2.3 Adjektiva Predikatif

Adjektiva predikatif adalah adjektiva yang berfungsi sebagai predikat pada klausa nominal.  
Contoh:

<i>pamannya</i>	<i>kaya</i>
<i>anjingku</i>	<i>hitam</i>
<i>rumahmu</i>	<i>baru</i>
<i>budi bahasanya</i>	<i>baik</i>
<i>kampung kami</i>	<i>jauh</i>
<i>ibu kami</i>	<i>sehat</i>
<i>uang saya</i>	<i>sedikit</i>
<i>air ini</i>	<i>hangat</i>
<i>kehidupannya</i>	<i>sulit</i>
<i>durian ini</i>	<i>mahal</i>

### 2.2.4 Adjektiva Atributif

Adjektiva atributif adalah adjektiva yang berfungsi sebagai atribut (atau sifat) pada frasa nominal.

Contoh:

<i>bahasa</i>	<i>nasional</i>
<i>dunia</i>	<i>internasional</i>
<i>ujian</i>	<i>lokal</i>

keamanan	<i>regional</i>
gaji	<i>ekstra</i>
pasangan	<i>ganda</i>
angka	<i>ganjil</i>
siaran	<i>langsung</i>

Perlu dicatat bahwa adjektiva predikatif dapat berfungsi secara atributif, sedangkan adjektiva atributif tidak dapat berfungsi secara predikatif.

Contoh:

<i>anjingku hitam</i>	<i>anjing hitam</i>
<i>rumahmu baru</i>	<i>rumah baru</i>
<i>bahasa nasional</i>	* <i>bahasa itu nasional</i>
<i>dunia internasional</i>	* <i>dunia ini internasional</i>

### 2.2.5 Adjektiva Bertaraf

Adjektiva bertaraf adalah adjektiva yang dapat diterapkan dalam bentuk perbandingan (atau komparasi). Perbandingan atau komparasi itu dapat dibagi atas lima tingkat, yaitu (1) *tingkat kurang*, (2) *tingkat biasa*, (3) *tingkat lebih*, (4) *tingkat paling*, dan (5) *tingkat terlalu*.

#### 2.2.5.1 Tingkat Kurang

Tingkat kurang (negatif) adalah adjektiva yang menerangkan bahwa nomina dalam keadaan kurang dari keadaan biasa. Adjektiva ini dapat bergabung dengan *kurang*, *agak*, *rada*.

Contoh:

*kurang manis*  
*agak pedas*  
*rada malas*

Kopi ini *kurang manis*, tolong tambahi gula sedikit lagi.  
 Sayur ini *agak pedas*, saya kira dapat dimakan oleh nenek.  
 Mengapa kamu *rada malas* hari ini, padahal biasanya tidak begitu?

#### 2.2.5.2 Tingkat Biasa

Tingkat biasa (positif) ialah adjektiva yang menerangkan bahwa nomina dalam keadaan biasa.

Contoh:

<i>bersih</i>	<i>jernis</i>
<i>besar, sama besar</i>	<i>pintar</i>

Rumah ini *bersih*  
 Rumah si Ali *besar*.  
 Rumah si Ali *sama besar* dengan rumah si Dadi.  
 Biasakanlah meminum air *jernih*.  
 Mereka bangga benar karena kamu *pintar*.

### 2.2.5.3 Tingkat Lebih

Tingkat lebih (komparatif) ialah adjektiva yang menerangkan bahwa keadaan nomina melebihi keadaan nomina lain.

Contoh:

*lebih jauh*  
*lebih murah*  
*lebih pandai*  
*lebih dingin*  
*lebih kecil*

Jakarta *lebih jauh* daripada Bogor.  
 Harga rambutan *lebih murah* daripada durian.  
 Semua tahu bahwa Ani *lebih pandai* daripada Ina.  
 Udara Lembang *lebih dingin* daripada udara Bandung.  
 Anakku *lebih kecil* daripada anakmu.

### 2.2.5.4 Tingkat Paling

Tingkat paling (superlatif) ialah adjektiva yang menerangkan bahwa keadaan nomina berada paling atas, melebihi keadaan semua nomina lain-lain yang dibandingkan itu.

Contoh:

<i>paling kuat</i>	<i>terkuat</i>
<i>paling besar</i>	<i>terbesar</i>
<i>paling kurus</i>	<i>terkurus</i>
<i>paling kaya</i>	<i>terkaya</i>
<i>paling tinggi</i>	<i>tertinggi</i>

Di antara semua pemuda itu, si Amatlah yang *paling kuat*.  
 Si Amat pemuda *terkuat* di antara semua pemuda itu.  
 Kota apa yang *paling besar* di dunia?  
 Benarkah Mount Everest gunung *tertinggi* di dunia?  
 Ayah si Mina adalah orang *terkaya* di desa kami.

### 2.2.5.5 Tingkat Terlalu

Tingkat terlalu (eksesif) ialah adjektiva yang menerangkan bahwa keadaan nomina berlebih-lebihan atau keterlaluan.

Contoh:

<i>terlalu mahal</i>	<i>kemahalan</i>
<i>terlalu kenyang</i>	<i>kekenyangan</i>
<i>terlalu sabar</i>	
<i>terlalu kikir</i>	
<i>terlalu sukar</i>	

Harga radio itu *terlalu mahal* bagi kami.

Harga radio itu *kemahalan* bagi kami.

Perutnya sakit karena *terlalu kenyang* makan durian.

Perutnya sakit karena *kekenyangan* makan durian.

Bagi kami si Ati *terlalu sabar* menghadapi suaminya yang berandal itu.

Apa gunanya kaya kalau *terlalu kikir!*

Soal ujian ini jelas *terlalu sukar* buat siswa SD dan *terlalu mudah* bagi siswa SMA.

Semoga usaha kita ini diberkati oleh Tuhan Yang *Mahakuasa*

Anak ini *terlalu amat sangat nakal*.

Desa ini dilanda oleh angin topan yang *bukan kepalang kuatnya*.

### 2.2.6 Adjektiva Tidak Bertaraf

Adjektiva tidak bertaraf adalah adjektiva yang tidak dapat mengambil bentuk perbandingan. Jadi tidak dapat berdampingan dengan kata-kata *kurang, agak, rada, lebih, paling, dan terlalu*.

Contoh:

*nasional*  
*internasional*  
*lokal*  
*regional*  
*ekstra*  
*ganda*

\* kurang nasional

\* agak nasional

\* rada nasional

\* lebih nasional

\* kurang ganda

\* agak ganda

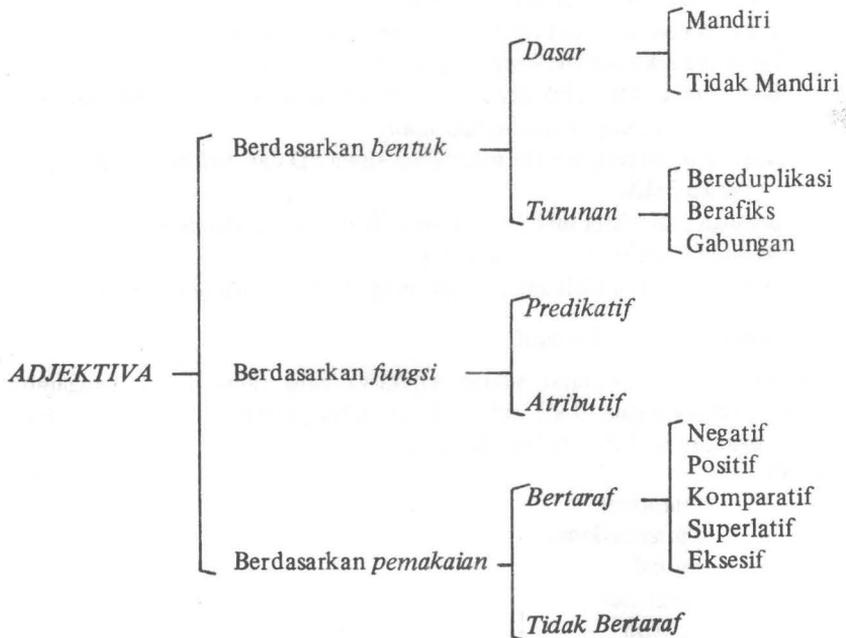
\* rada ganda

\* lebih ganda

- \* paling nasional
- \* terlalu nasional
- \* kurang ekstra
- \* agak ekstra
- \* rada ekstra

- \* paling ganda
- \* terlalu ganda
- \* lebih ekstra
- \* paling ekstra
- \* terlalu ekstra

Demikianlah uraian mengenai adjektiva dasar, adjektiva turunan, adjektiva predikatif, adjektiva atributif, adjektiva bertaraf, adjektiva tidak bertaraf dalam bahasa Indonesia. Agar kita memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai adjektiva itu, marilah kita perhatikan bagan berikut ini.



Bagan 2 : Kategorisasi Adjektiva

### 2.3 Konvensi

Adjektiva dapat diubah atau dikonversikan menjadi verba atau nomina

#### a. adjektiva menjadi verba:

<i>padatkan</i>	<i>panasi</i>
<i>pasifkan</i>	<i>penuhi</i>
<i>muliakan</i>	<i>adili</i>
<i>nyatakan</i>	<i>awasi</i>
	<i>gelapi</i>

#### b. adjektiva menjadi nomina:

<i>keinginan</i>	<i>pendian</i>
<i>kesenangan</i>	<i>penggemar</i>
<i>kemaluan</i>	<i>penjahat</i>
<i>kegugupan</i>	<i>pemuda</i>
<i>keindahan</i>	<i>pemasak</i>

Adjektiva pun ada pula menerima pindahan atau konversi dari kategori-kategori lain, seperti nomina, numeralia, verba, dan interjeksi.

#### a. adjektiva dari nomina:

<i>abadi</i>	<i>membatu</i>
<i>insani</i>	<i>menggunung</i>
<i>hewani</i>	<i>berbuih</i>
<i>kodrati</i>	<i>berguna</i>
<i>manusiasi</i>	<i>membudaya</i>
<i>surgawi</i>	<i>melembaga</i>
<i>duniawi</i>	<i>berbakat</i>
<i>rohaniah</i>	<i>bermanfaat</i>
<i>jasmaniah</i>	<i>berakar</i>
<i>alamiah</i>	<i>merakyat</i>
<i>ilimiah</i>	<i>meradang</i>

#### b. adjektiva dari numeralia:

<i>manunggal</i>
<i>mendua</i>
<i>menyeluruh</i>

**c. adjektiva dari verbal:**

*terbuka*  
*terpandang*  
*mengganggu*  
*menggoda*  
*merangsang*

*menyengat*  
*terhibur*  
*terpaksa*  
*tertekan*

**d. adjektiva dari interjeksi:**

*sip*  
*asoi*

*aduhai*  
*yahud*

## PUSTAKA ACUAN

- Keraf; Gorys. 1980. *Tatabahasa Indonesia*. Ende-Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Kridalaksana, Harimurti *et al.* 1984. *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Poerwadarminta; W.J.S. 1976. *Kamus Umum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Ramlan, M. 1983 *Morfologi: Suatu Tinjauan Deskriptif*. Yogyakarta: CV Karyono.
- Tarigan, Henry Guntur: 1975. "Morfologi Bahasa Simalungun". Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia. (disertai).
- Tarigan, Henry Guntur. 1983. *Peranan Kosakata Dalam Buku Pelajaran Bahasa Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (makalah).
- Tarigan, Henry Guntur. 1984. *Prinsip-prinsip Dasar Sintaksis*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Tarigan, H.G. *Pengajaran Kosakata*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Tarigan, H.G. 1985. *Pengajaran Sintaksis*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Tarigan, H.G. 1985. *Pengajaran Ejaan Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Tarigan, H.G. 1985. *Pengajaran Morfologi*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Tarigan, H.G. 1985. *Aneka Dimensi dalam Kurikulum Bahasa Indonesia*. Bandung: IKIP & Penerbit Angkasa (Orasi Pengukuhan Guru Besar).

## VERBA BAHASA INDONESIA DITINJAU DARI SEGI PROPOSISI

D.P. Tampubolon

### 1. Pendahuluan

Dilihat dari segi kriteria yang dipergunakan oleh para tata bahasawan untuk menentukan jenis kata, secara umum dapat dikatakan bahwa ada tiga model klasifikasi kata, yaitu: (a) model tradisional, (b) model struktural, dan (c) model eklektif. Kriteria yang dipergunakan dalam model tradisional umumnya ialah kriteria formal (morfologi dan sintaksis) dan kriteria semantik (referensial). Model struktural umumnya mempergunakan kriteria formal. Model eklektif berusaha memanfaatkan kriteria formal dan semantik seperlunya. Kriteria terakhir ini bukan lagi hanya semantik referensial, tetapi juga semantik proposisional. Masuknya semantik proposisional terutama adalah karena pengaruh semantik generatif. Karena dalam model eklektif semua kriteria tersebut dipakai hanya yang perlu atau cocok, maka kekuatan (juga kelemahan) sesungguhnya dan sepenuhnya dari kriteria itu masing-masing, terutama kriteria semantik proposisional, kurang kelihatan.

Tanpa melupakan kekuatan masing-masing model tersebut dalam klasifikasi kata umumnya, terutama dalam mendefinisikan dan mengklasifikasi verba dalam bahasa Indonesia, saya ingin mengemukakan tiga hal fundamental yang umumnya menimbulkan setidaknya kekurangan akan model-model tersebut. Ketiga hal itu ialah: (a) kurangnya koherensi, (b) kurangnya kemampuan menjelaskan (*explanatory power*), dan (c) kurangnya penunjukan (penampilan) potensialitas bahasa.

Yang dimaksud dengan kurangnya kekohorensi ialah kurangnya keutuhan hubungan pemerian antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya, atau

antara satu jenis kata dengan jenis kata lainnya. Marilah kita perhatikan kedua contoh di bawah ini:

- (1) Verba *pergi* biasanya didefinisikan sebagai verba intransitif, atau kadang-kadang disebut verba aktif. Namun, setiap pengajar mahir bahasa Indonesia dapat merasakan bahwa kalimat (1) kurang sempurna, dan yang sempurna ialah kalimat (2)

- (1) Ibu pergi.  
 (2) Ibu pergi ke pasar.

Verba *pergi* secara intrinsik mengharuskan adanya nomina yang menyatakan lokasi, di samping nomina yang biasa disebut berfungsi subjek (*Ibu*). Dengan kata lain, ada hubungan intrinsik antara verba *pergi* dengan nomina yang menyatakan lokasi.

- (2) Kata *kuning* umumnya diklasifikasi sebagai adjektiva (ada juga yang mengklasifikasinya sebagai verba). Secara terpisah kata *menguning* diklasifikasi pula sebagai verba intransitif, dan *menguningkan* sebagai verba transitif. Dengan demikian, hubungan intrinsik antara ketiga kata itu, sebagaimana dapat dirasakan pada ketiga kalimat berikut, tidak kelihatan.
- (3) Padi itu *kuning-kuning*.  
 (4) Padi itu sedang *menguning*.  
 (5) Ahmad *menguningkan* kain itu.

*Kuning* pada (3) menyatakan keadaan padi. *Menguning* pada (4) menyatakan suatu proses yang terjadi pada padi, dan *menguningkan* pada (5) menyatakan suatu aksi (perbuatan) yang dilakukan oleh *Ahmad* terhadap *kain*. Dapat dirasakan bahwa ada hubungan intrinsik antara ketiga kata itu, yaitu, keadaan dapat berubah menjadi proses, dan seterusnya dapat berubah menjadi aksi. Proses perubahan tersebut ditandai oleh afiksasi *meN-* dan *meN-kan*, sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan sintaksis. Fenomena seperti ini memegang peranan yang sangat penting dalam bahasa Indonesia.

Yang dimaksud dengan kurangnya kemampuan menerangkan ialah bahwa sebab terjadinya sesuatu fenomena kebahasaan kurang atau tidak dapat dijelaskan secara bernalar. Misalnya, dengan mudah dapat dipikirkan bahwa prefiks *meN-* dapat ditambahkan pada adjektiva seperti *baik membaik*. Tetapi, pada adjektiva seperti *sakit* afiksasi itu tidak terjadi. Bentuk *menyakit* tidak ada. Fenomena seperti ini tidak atau kurang dapat dijelaskan; biasanya ha-

nya dicatat sebagai "tidak dapat" atau "kecuali". Fenomena seperti ini banyak terdapat dalam bahasa Indonesia, dan sangat membingungkan orang yang sedang mempelajari bahasa Indonesia, terutama orang asing.

Yang dimaksud dengan kurangnya penunjukan potensialitas bahasa ialah kurang ditampilkannya fenomena yang tidak berterima pada suatu masa tertentu, tetapi kemungkinan besar akan terpakai. Misalnya, kata *berterima* pada (6) terdapat dalam pemakaian, tetapi *berminum* (7) tidak

(6) Permohonan Tuti *berterima*.

(7) Kopi Tuti *berminum*.

Kedua bentuk itu sama-sama berkata dasar verba aktif, jadi keduanya menuruti kaidah yang sama. Oleh sebab itu, besar kemungkinan bahwa suatu ketika kata *berminum* yang berarti 'telah sebagian diminum sedikit atau sebagian' dapat timbul dalam pemakaian. Dalam bahasa Indonesia, kurang diteliti fenomena seperti itu, sehingga kita banyak meminjam dari bahasa asing, yang sesungguhnya barangkali tidak perlu. Seingat saya kata *membalik* tidak begitu dikenal pada tahun 60-an, tetapi sekarang sudah umum dipakai.

Didorong oleh kenyataan-kenyataan seperti di atas, dalam makalah ini saya ingin membicarakan verba bahasa Indonesia dari segi proposisi, karena, menurut penelitian saya, dengan dasar semantik proposisional, masalah-masalah tersebut akan dapat dijawab secara bernalar. Perlu saya tambahkan bahwa sebahagian dari hal-hal yang akan saya kemukakan dalam makalah ini telah saya bicarakan dalam disertasi saya (1977), yang telah diterbitkan oleh Pacific Linguistics (1983), dan dalam buku *Tipe-tipe Semantik Kata Kerja Bahasa Indonesia Kontemporer* (1979) yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa.

## 2. Proposisi

Secara empiris dapat diketahui bahwa dalam alam semesta terdapat wujud-wujud (kongkret dan abstrak) dan keadaan, proses, serta aksi berkenaan dengan wujud-wujud itu. Seseorang, misalnya, melihat anjing menggonggong. Setelah memperoleh pengalaman-pengalaman seperti itu, proses penalaran terjadi dalam pikirannya, dan kemudian sampai pada suatu kesimpulan bahwa semua anjing menggonggong. Jika fakta-fakta empiris itu dinyatakan secara formal dalam bahasa, maka diperoleh bentuk berikut :

Anjing (pertama) menggonggong.

Anjing (kedua) menggonggong.

Dst.

Jadi : Semua anjing menggonggong.

Dalam logika, masing-masing kalimat di atas disebut proposisi, yaitu kerangka abstrak yang merupakan suatu pengertian tentang hubungan perbuatan (aksi) yang dinyatakan oleh kata *menggonggong* dengan wujud (anjing) sebagaimana diamati secara empiris. Semua pernyataan itu sampai kepada kesimpulan yang disebut *argumen*, yaitu, gambaran proses penalaran dalam pikiran. Proses penalaran demikian, yang mulai dari fakta-fakta empiris sampai kepada kesimpulan, disebut penalaran induktif, sebagai kebalikan dari penalaran deduktif. Sebagaimana dapat dilihat, sesuai dengan fakta-fakta empiris, suatu proposisi terdiri atas *predikat* (menyatakan sesuatu keadaan, proses, atau aksi) dan *subjek*, sesuatu yang dinyatakan (oleh predikat).

Sebagaimana umumnya diketahui, konsep logika di atas telah diterapkan ke dalam tata bahasa sejak zaman Yunani (Aristoteles, Dionysius Thrax, dll.). Aliran-aliran linguistik mutakhir, terutama semantik generatif, juga mempergunakannya, terutama nosi proposisi. Namun, dalam hal ini perlu diperhatikan perbedaan penggunaan nosi tersebut oleh masing-masing aliran itu. Perbedaan pokok ialah bahwa aliran tradisional tidak membicarakan hubungan intrinsik antara verba dan nomina pada taraf proposisi, sedangkan pada aliran semantik generatif inilah salah satu prinsip pokok. Dengan demikian, sebagaimana telah disinggung pada permulaan, aspek semantik yang dipergunakan oleh aliran tradisional pada dasarnya adalah aspek referensial. Inilah salah satu kelemahan aliran ini.

Penerapan konsep proposisi dalam bahasa berimplikasi bahwa proposisi kebahasaan dan proposisi logika tidaklah sama. Perbedaan pertama ialah bahwa dalam proposisi logika permasalahan pokok ialah benar-tidaknya proposisi, sedangkan dalam proposisi kebahasaan hal ini merupakan urusan. Yang menjadi urusan ialah kerangka hubungan bagian-bagian proposisi yang membentuk suatu pengertian dan proses realisasinya dalam bahasa. Perbedaan kedua ialah bahwa dalam logika kebahasaan biasanya dipergunakan istilah *argumen* (Lakoff, 1971; Mc. Cawley, 1968; 1971), yaitu bagian dari proposisi yang menyertai predikat, jadi bukan dalam arti *argumen* logika. Istilah lain yang dipergunakan dalam proposisi kebahasaan ialah "kasus" (*case*) (Fillmore, 1968; 1969). Istilah inilah yang dipergunakan dalam makalah ini.

Untuk mengenali dan menentukan proposisi dalam bahasa, yang digunakan ialah klausa deklaratif. Dalam setiap klausa deklaratif terdapat satu proposisi, yang terdiri dari satu predikat dan satu atau lebih kasus. Predikat adalah unsur sentral dalam proposisi karena predikatlah yang menyatakan sesuatu dan menentukan kehadiran kasus. Dalam proposisi, unsur-unsur

modalitas (aspek, waktu, dan sebagainya) adalah unsur-unsur periferan.

Jika dikatakan bahwa bahasa adalah suatu sistem yang memadukan dunia makna (pikiran) dan dunia bunyi, pada hakikatnya ini berarti bahwa bahasa adalah alat untuk berpikir, merumuskan pikiran, dan memahami pikiran. Dalam pengertian bahasa demikian ini dapat dilihat bagaimana pentingnya konsep proposisi kebahasaan sebagai dikemukakan di atas. Pada masa-masa belakangan ini semakin banyak penelitian yang membuktikan bahwa dalam memahami bahasa (lisan dan tulisan), pikiran bekerja terutama untuk menemukan proposisi, dan integrasi proposisi-proposisi itulah yang disimpan dalam ingatan jangka panjang sebagai pengetahuan. Dalam menyatakan pikiran juga, baik secara lisan maupun tulisan, pikiran bekerja terlebih dahulu menyusun pengertian-pengertian dalam bentuk proposisi sebelum direalisasikan dalam bahasa. Proposisilah yang mendasari kalimat; dan proposisilah yang merupakan representasi kalimat dalam pikiran. (Foss dan Hakes, 1978; Clark dan Clark, 1977; Steinberg, 1982). Dalam suatu penelitian permulaan tentang kemampuan membaca siswa-siswa kelas III SMA Negeri yang saya lakukan di Medan, saya temukan bahwa kekurangmampuan para siswa umumnya menangkap pikiran pokok paragraf dan teks keseluruhan adalah karena mereka kurang cekatan menemukan proposisi-proposisi dan menangkap hubungan integral proposisi-proposisi itu. Konsep proposisi sangat berguna bukan saja dalam analisis bahasa, tetapi juga dalam pendidikan bahasa dan komputerisasi informasi (Woods, 1975; Nash-Webler, 1975).

### 3. Verba dan Kasus dalam Bahasa Indonesia

Kerangka teori yang mendasari pembicaraan tentang verba dari segi proposisi dalam makalah ini adalah kerangka teori yang telah saya bicarakan dalam buku-buku yang saya sebut pada bagian Pendahuluan, yang terutama didasarkan pada pendapat Fillmore (1968; 1969), Chafe (1970), dan Cook (1979). Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian 2, suatu proposisi terdiri atas satu predikat dan satu atau lebih kasus. Dalam analisis bahasa umumnya istilah "predikat" diganti dengan "verba".

Berkaitan dengan pandangan tentang alam semesta, sebagaimana disebut terdahulu, verba pada dasarnya menyatakan KEADAAN, PROSES, atau AKSI. Ini dapat dilihat, misalnya, dalam kalimat-kalimat berikut:

- (8) Gadis itu *cantik*.
- (9) Gunung itu *longsor*.
- (10) Mereka sedang *minum* kopi.

*Cantik* pada (8) menyatakan bagaimana keadaan *gadis*, *longsor* menyatakan

apa yang terjadi pada *gunung*, dan *minum* menyatakan apa yang dilakukan oleh *mereka* terhadap *kopi*. KEADAAN, PROSES, dan AKSI merupakan ciri semantik utama yang intrinsik dan selektif dari verba. Dikatakan selektif, karena masing-masing ciri itu menyeleksi kasus yang diperlukannya.

Sekarang, marilah kita perhatikan kalimat-kalimat berikut:

- a. (11) *Murid-murid bosan* pada *pelajaran* itu  
           Pi          V          Ok
- (12) *Ia* sudah *punya mobil*.  
           B          V      Ok
- (13) *Pak Giri hadir* dalam *rapat* itu.  
           Ok      V          L
- (14) *Mereka cemas* akan *ancaman* itu  
           Pi      V          O
- (15) *Pak Surya menang* *sepuluh juta rupiah*.  
           B          V          L
- (16) *Kapal itu tenggelam* ke *dasar laut*.  
           O          V          L
- c. (17) *Polisi tanya* tentang *kejadian* itu kepada *kami*.  
           P      V          O          Pi
- (18) *Toni beli mobil* dari *Pak Burhan*.  
           P      V      O          B
- (19) *Orang asing itu baru tiba* dari *Singapur*.  
           P=O          V          L

Ketiga verba dalam kalimat-kalimat kelompok *a* menyatakan keadaan yang berbeda-beda, yaitu pengalaman yang bersifat emosi atau perasaan (*bosan*), pemilikan (*punya*), dan lokasi (*hadir*). Ketiga verba pada kelompok *b* menyatakan proses yang berbeda-beda, yaitu, pengalaman yang bersifat emosi (*cemas*), perubahan pemilikan (*menang*), dan perubahan lokasi (*tenggelam*). Pada kelompok *c* ketiga verba menyatakan aksi yang berbeda-beda, yaitu, aksi yang dialami secara kognitif (*tanya*), aksi yang mengenai pemilikan (*beli*), dan aksi berkenaan dengan perpindahan lokasi (*tiba*). Dengan demikian ciri-ciri intrinsik verba pada (8)–(19) ialah: KEADAAN (*cantik*), PROSES (*longsor*), AKSI (*minum*), KEADAAN-PENGALAMAN (*bosan*), KEADAAN-BENEFAKTIF (*punya*), KEADAAN-LOKATIF (*rapat*), PROSES-PENGALAMAN (*cemas*), PROSES-BENEFAKTIF (*menang*), PROSES-LOKATIF (*tenggelam*), AKSI-PENGALAMAN (*tanya*), AKSI-BENEFAKTIF (*beli*), dan AKSI-LOKATIF (*tiba*).

Ciri-ciri selektif tersebut menentukan hadirnya kasus-kasus tertentu sebagaimana terlihat pada kalimat-kalimat itu, yaitu: kasus objek (Ok) untuk verba berciri KEADAAN, objek (O) untuk verba berciri PROSES, pengalaman (Pi) untuk verba yang mengandung ciri PENGALAMAN, benefaktif (B) untuk verba yang mengandung ciri BENEFAKTIF, lokasi (L) untuk verba yang mengandung ciri LOKATIF, dan pelaku (P) bagi verba yang berciri AKSI. Perlu diperhatikan bahwa perbedaan Ok dengan O hanya perbedaan simbol saja sehubungan dengan kehadirannya pada verba KEADAAN dan PROSES. Keduanya adalah kasus yang sama.

Dengan uraian di atas, kiranya jelas bahwa ada lima kasus inti proposisi, yang mempunyai peran-peran sebagai berikut:

- (1) *Pelaku (P)* : menyatakan sesuatu wujud yang menjadi pelaku aksi yang dinyatakan oleh verba. Pelaku dimaksud ini umumnya adalah wujud bernyawa (*animate*), tetapi mungkin juga tak bernyawa. Pelaku adalah penggerak atau pemula (*instigator*) dari aksi. Pengertian bernyawa juga meliputi wujud yang dipersonifikasikan.
- (2) *Pengalaman (Pi)* : menyatakan sesuatu wujud yang mengalami apa yang dinyatakan oleh verba. Pengalaman dimaksud dapat bersifat kognitif, emosional, atau sensasional. Pengalaman adalah wujud bernyawa.
- (3) *Benefaktor (B)* : menyatakan wujud yang memiliki, mendapat, kehilangan, atau tidak memiliki sesuatu, sebagai dinyatakan oleh verba. Benefaktor umumnya adalah wujud bernyawa.
- (4) *Objek (O)* : menyatakan:
  - (a) wujud yang berada dalam suatu keadaan (sifat, kualitas, kuantitas, dan pengalaman, kepemilikan, lokasi);
  - (b) wujud yang berada dalam suatu proses atau perubahan;
  - (c) wujud yang kena pengaruh suatu aksi atau merupakan hasil aksi itu;
  - (d) wujud yang merupakan isi pengalaman (kognitif, emosional, sensasional);
  - (e) wujud yang berada dalam kepemilikan, pindah kepemilikan atau hilang, dan yang pindah lokasi.

- (5) *Lokasi* (L) : menyatakan tempat atau lokasi dari suatu wujud. Lokasi dimaksud dapat bersifat statis atau direktif (lokasi asal, lintasan, terminal atau tujuan).

Sebagaimana telah disinggung di atas, hadirnya satu atau lebih dari kelima kasus tadi dalam struktur proposisi ditentukan oleh ciri atau ciri-ciri selektif verba bersangkutan. Setiap pengajar bahasa Indonesia yang mahir dapat merasakan hal ini dalam kalimat (8)–(19). Di samping kelima kasus proposisi tersebut, terdapat juga kasus-kasus modalitas yang antara lain menyatakan waktu, cara, instrumen, sebab, maksud, dan akibat. Hadirnya kasus-kasus modalitas ini tidak ditentukan oleh ciri-ciri selektif verba. Dalam kalimat (20), misalnya, *kemarin* adalah realisasi kasus waktu.

(20) *Pak Surya menang sepuluh juta rupiah kemarin.*

B                    V                    O                    W

Hadirnya W (waktu) tidak ditentukan oleh ciri selektif *menang*. Kehadirannya adalah bersifat opsional.

#### 4. Jenis-Jenis Verba Bahasa Indonesia

Berdasarkan ciri-ciri selektif verba sebagai dikemukakan di atas, jenis-jenis verba dapat ditentukan. Dengan kata lain, verba pada struktur luar (yang direalisasikan) diklasifikasi berdasarkan ciri-ciri selektifnya.

##### 4.1 Verba Dasar

Dari ciri-ciri selektif yang dibicarakan di atas dapat dilihat bahwa dalam bahasa Indonesia verba meliputi apa yang biasa disebut kata kerja dan kata sifat. Berdasarkan ciri-ciri itu terdapat dua belas jenis verba dasar, yaitu:

- (1) *Verba Keadaan* (-Ok)  
cantik, putih, kuning,
- (2) *Verba Keadaan-Pengalaman* (-Pi, Ok)  
bosan, tahu, sukar.
- (3) *Verba Keadaan-Benefaktif* (-B, Ok)  
punya, ada
- (4) *Verba Keadaan-Lokatif* (-Ok, L)  
hadir, ada, diam
- (5) *Verba Proses* (-O)  
longsor, tumbuh, retak
- (6) *Verba Proses-Pengalaman* (-Pi, O)  
cemas, bimbang, waswas
- (7) *Verba Proses-Benefaktif* (-B, O)  
menang, kalah, dapat

- (8) *Verba Proses-Lokatif* (-O, L)  
tenggelam, timbul, terbit
- (9) *Verba Aksi* (-P, O)  
minum, makan, tangkap
- (10) *Verba Aksi-Pengalaman* (-P, Pi, O)  
tanya, jawab, bilang
- (11) *Verba Aksi-Benefaktif* (-P, B, O)  
beli, jual, bantu
- (12) *Verba Aksi-Lokatif* (-P, O, L)  
tiba, pergi, datang

Yang di dalam kurung di belakang masing-masing verba adalah susunan hierarki kasus atau kasus-kasus yang diperlukan oleh verba bersangkutan dalam struktur proposisi.

#### 4.2 Verba Derivatif

Dalam bahasa Indonesia, sebagaimana juga dalam berbagai bahasa di dunia, ciri selektif KEADAAN dapat berubah menjadi PROSES, dan KEADAAN atau PROSES dapat berubah menjadi AKSI. Proses perubahan seperti ini disebut derivasi. Dalam bahasa Indonesia, derivasi ditandai secara teratur oleh afiksasi. Derivasi terbagi atas empat jenis utama, yaitu:

- (1) *Inkoatif* : proses yang mengubah ciri KEADAAN menjadi PROSES. Proses ini ditandai oleh afiksasi *meN-* atau *ke-an*.

Misalnya:

kuning —————> menguning  
bingung —————> kebingungan

- (2) *Kausatif* : proses yang mengubah KEADAAN atau PROSES menjadi AKSI. Proses ini ditandai oleh afiksasi *meNkan*, *meN-i*, atau *meN + per-*

Misalnya:

lebar —————> melebarkan  
merah —————> memerah  
rendah —————> merendah  
tenggelam —————> menenggelamkan

- (3) *Resultatif* : proses yang mengubah AKSI menjadi KEADAAN. Proses ini ditandai oleh *ber-* atau *ter-*.

tertentu, yang dapat berdiri sendiri tanpa bantuan kata lain. Bilangan utuh dapat dihubungkan langsung dengan satuan waktu, harga uang, ukuran, panjang, berat, isi, dan sebagainya.

Contoh:

<i>satu</i>	malam
<i>dua</i>	rupiah
<i>tiga</i>	meter
<i>empat</i>	liter
<i>lima</i>	karung
<i>enam</i>	kuintal
<i>tujuh</i>	hektar
<i>delapan</i>	kilometer
<i>sembilan</i>	kilogram

Penjelasan di atas akan dapat memperbaiki salah kaprah yang telah men-darah daging dalam tata bahasa Indonesia selama ini yang memasukkan kata-kata *puluh, ribu, juta, laksa, milyon, milyar* ke dalam kata bilangan pokok atau bilangan penuh yang dapat berdiri tanpa bantuan kata lain. Dalam tulisan ini kita memasukkannya ke dalam bilangan gugus.

Dalam bahasa Indonesia yang wajar serta 'alamiah' tidak pernah kita temui acuan seperti berikut ini:

Saya menerima hadiah \**ribu rupiah* dari paman saya.

Sawahnya \**puluh hektar* di Sumatra Utara.

Berapa pinjaman di BNI? \**juta rupiah*.

Umur fosil ini kira-kira \**milyar tahun*.

Gajinya \**keti rupiah* sebulan.

Berapa piutangmu pada perusahaan itu? \**Laksa rupiah* banyaknya.

Butuh uang berapa? \**Milyun rupiah*.

#### b. Bilangan Pecahan

Bilangan pecahan adalah sejenis numeralia utama yang terdiri dari *pembilang* dan *penyebut* yang dibubuhi *afiks per-*

Contoh:

$\frac{2}{3}$  = dua pertiga

$\frac{3}{4}$  = tiga perempat

$\frac{4}{5}$  = empat perlima

$$\frac{5}{6} = \text{lima perenam}$$

$$\frac{1}{2} = \text{satu perdua, seperdua, setengah, separuh}$$

Bilangan pecahan dapat bergabung dengan atau mengikuti bilangan utuh.  
Contoh:

$$2 \frac{1}{2} = \text{dua setengah}$$

$$3 \frac{2}{3} = \text{tiga dua pertiga}$$

$$4 \frac{3}{4} = \text{empat tiga perempat}$$

$$5 \frac{4}{5} = \text{lima empat perlima}$$

$$6 \frac{1}{7} = \text{enam septujuh}$$

$$7 \frac{1}{6} = \text{tujuh seperenam}$$

$$8 \frac{3}{5} = \text{delapan tiga perlima}$$

Bagi numeralia  $2 \frac{1}{2}$  dikenal juga istilah *tengah tiga* dan bagi numeralia

$\frac{1}{4}$ ,  $\frac{3}{4}$  dikenal juga istilah *sesuku, tiga suku*.

Secara ortografis numeralia-numeralia

$$2 \frac{1}{2} \text{ dapat juga ditulis } 2,5$$

$$3 \frac{1}{2} \text{ dapat juga ditulis } 3,5$$

$$3 \frac{1}{10} \text{ dapat juga ditulis } 3,1$$

$$3 \frac{3}{10} \text{ dapat juga ditulis } 4,3$$

$$4 \frac{1}{100} \text{ dapat juga ditulis } 4,01$$

$$5 \frac{15}{100} \text{ dapat juga ditulis } 5,15$$

(24a) *Dia pergi ke sekolah dengan sepeda.*

P=O V L I

(25a) *Ibu membuang sisik dari (bagian) ikan itu.*

P V O L

Dapat dilihat bahwa verba *menjanda* (21) adalah hasil inkorporasi *janda* (02) pada (21a) dengan verba *menjadi*. Verba ini adalah verba proses, dan *menjanda* juga verba proses. Perlu dijelaskan bahwa verba *menjadi* memerlukan dua kasus objek. Oleh karena itu *janda* diberi tanda 02. Verba *berdagang* (22) adalah hasil inkorporasi *dagang* (O) pada (22a) dengan *mengusahai*. Verba ini adalah verba aksi, dan begitu juga verba *berdagang*. Verba *mengandungkan* (23) adalah hasil inkorporasi *kandang* (L) pada (23a) dengan verba *memasukkan*. Verba ini adalah verba aksi-lokatif, dan begitu juga *mengandungkan*. Verba *bersepeda* adalah hasil inkorporasi *sepeda* (I) pada (24a) dengan verba *pergi*. Verba ini adalah verba aksi-lokatif, dan begitu juga *bersepeda*. Verba *menyisik* (25) adalah hasil inkorporasi *sisik* (O) pada (25a) dengan verba *membuang*. Verba ini adalah verba aksi-lokatif, dan demikian juga *menyisiki*.

Dari contoh-contoh di atas dapat dilihat bahwa kasus objek (O)-lah yang paling biasa diinkorporasikan. Kemudian menyusul kasus lokasi (L). Kasus yang ketiga yang dapat diinkorporasikan ialah instrumen (I). Sebagaimana telah dikemukakan di atas, ini adalah suatu kasus modalitas. Dalam bahasa Indonesia, kasus ini dapat diinkorporasikan. Tetapi tidak semua kasus O, L, atau A dapat diinkorporasikan. Ada kendala tertentu atas terjadinya proses-proses itu (lihat Tampubolon, 1983).

Berdasarkan pembicaraan di atas, dapat disimpulkan bahwa verba-verba inkorporatif terbagi atas tiga jenis utama, yaitu:

- (1) *Verba Inkorporasi-Objektif*, hasil inkorporasi kasus O.

Misalnya:

janda	—————>	menjanda
sayur	—————>	menyayur
raja	—————>	merajakan
korban	—————>	mengorbankan
selimut	—————>	memperselimut
uang	—————>	beruang
telur	—————>	bertelur
sawah	—————>	bersawah

(2) *Verba Inkorporasi Lokatif*, hasil inkorporasi kasus L.

- laut → melaut  
 pinggir → meminggir  
 kandang → mengandangkan  
 kampung → sekampung

(3) *Verba Inkorporasi-Instrumen*, hasil inkorporasi kasus modalitas I.

Misalnya:

- gergaji → menggergaji  
 cangkul → mencangkul  
 sepeda → bersepeda

Sebagaimana dapat dilihat dalam kalimat-kalimat di atas, verba inkorporatif juga terbagi atas verba keadaan, verba proses, dan verba aksi serta beberapa subjenis verba-verba ini.

#### 4.4 Verba Inflektif

Di atas telah dibicarakan ciri-ciri intrinsik-selektif berbagai verba. Ciri-ciri itu menentukan hadirnya kasus tertentu dalam struktur proposisi. Selain ciri-ciri tersebut, dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dalam berbagai bahasa di dunia, juga terdapat ciri-ciri yang dapat ditambahkan pada berbagai verba. Pertambahan dimaksud tidak mengubah ciri-ciri selektif verba bersangkutan, tetapi verba itu memperoleh tambahan makna. Proses pertambahan dimaksud disebut *infleksi*. Dalam bahasa Indonesia, proses-proses inflektif secara teratur ditandai oleh afiksasi *meN-i*, *ber-an*, *ke-an*, *ber-*, *di-*, *ter-*, atau reduplikasi. Sekedar ilustrasi, marilah kita perhatikan kalimat-kalimat berikut:

(26) *Bonar melempari mangga itu.*

P        V        O

(27) *Jam saya kecepatan.*

Ok

(28) *Toni dan Tuti berciuman.*

P & O        V

(29) *Kedua anak itu berkelahi.*

P & O        V

(30) *Kopi itu diminum oleh Toni*

O        V        P

(31) *Koper besar itu terangkat oleh Sudin.*

O        V        P

- (32) *Pasien itu terduduk di kursi*  
 P = O            V            L
- (33) *Tuti sedang berjemur,*  
 P = O            V
- (34) *Mereka sedang duduk-duduk di taman.*  
 P = O            V            L
- (35) *Anak itu basah-kuyup.*  
 Ok            V

Verba *melempari* (26) adalah verba aksi sebagaimana verba dasarnya *lempar*. Tetapi *melempari* telah mendapat tambahan arti iteratif (berulang-ulang), dan ini tidak mengubah ciri selektif *lempar*. Verba *kecepatan* (27) adalah verba keadaan sebagaimana *cepat*. Makna yang bertambah di sini ialah EKSESSIF. Verba *berciuman* adalah verba aksi sebagaimana *cium*. Makna yang bertambah adalah akibat perubahan posisi kasus P dan Q, dan ini disebut PASIF. Hal yang sama juga terdapat pada *terangkat* di samping adanya makna KAPABILITAS (kemampuan). Verba *terduduk* adalah verba aksi lokatif sebagaimana *duduk*. Makna yang bertambah ialah AKSIDENTAL (tak sengaja). Verba *berjemur* (33) adalah verba aksi sebagaimana *jemur*. Makna yang bertambah ialah REFLEKSIF. Verba *duduk-duduk* (34) adalah verba aksi lokatif sebagaimana *duduk*. Makna yang bertambah ialah KESENANGAN DURATIF. Verba *basah-kuyup* (35) adalah verba keadaan sebagaimana *basah*. Makna yang bertambah ialah INTENSIF. (Tentang verba reduplikatif, lihat Simatupang, 1981:93-97). Semua ciri inflektif hanya menambah makna, dan tidak mengubah kehadiran kasus.

Berdasarkan contoh-contoh di atas dapat disimpulkan bahwa verba-inflektif terbagi atas tujuh jenis utama, yaitu:

- (1) Verba Inplektif-Iteratif  
*melempari, memukuli, menjual*
- (2) Verba Inflektif-Eksessif  
*kehijauan, kecepatan, kebesaran*
- (3) Verba Infleksi-Resiprokatif  
*bersalaman, berpelukan, bergumul*
- (4) Verba Infleksi-Pasif  
*diminum, diambil, terbeli*
- (5) Verba Infleksi-Aksidental  
*terduduk, tersirap, terbangun*
- (6) Verba Infleksi-Reflektif  
*berjemur, bercukur, berhias*

- (7) Verba Infleksi-Reduplikatif  
*duduk-duduk, hancur-lebur, basah-kuyup, kemerah-merahan, dibesar-  
 besarkan, pukul-memukul, bersembur-semburan.*

Tidak pada semua verba dapat terjadi infleksi. Ada kendala tertentu berdasarkan ciri (-ciri) intrinsik-selektif verba bersangkutan yang menyebabkan demikian. Kendala-kendala yang dimaksudkan menyebabkan mengapa afiksasi atau reduplikasi tidak dapat terjadi pada verba dasar tertentu. (Lebih lanjut lihat Tampubolon, 1983; Simatupang, 1983).

#### 4.5 Verba Predikatif

Di muka telah dikemukakan bahwa verba (predikat) meliputi apa yang biasa dikenal sebagai kata kerja dan kata sifat, dan kasus proposisi direalisasi sebagai kata benda (nominal). Namun, dalam bahasa Indonesia, sebagaimana juga dalam berbagai bahasa di dunia, nomina atau numeralia dapat juga menjadi realisasi verba (predikat) struktur proposisi, sebagaimana dapat dilihat dalam kalimat-kalimat berikut.

- (36) *Bapaknya* (seorang) *jenderal*.

O V

- (37) *Kakinya empat*.

O V

Pada (36) dan (37) *jenderal* dan *empat* adalah verba. Dalam hubungan ini, yang menjadi pertanyaan ialah: Apakah ciri selektif verba itu? Saya sependapat dengan Chafe (1970:143) bahwa verba seperti ini adalah verba keadaan. Dalam bahasa Indonesia ini dapat diterima karena secara intuitif dapat juga dirasakan bahwa *jenderal* pada (36) dan *empat* pada (37), misalnya, pada hakikatnya adalah menyatakan keadaan (ciri atau sifat kualitatif *jenderal* dan ciri kuantitatif *empat*).

Karena verba seperti itu berasal dari nomina atau numeralia, maka untuk kemudahan klasifikasi jenis verba demikian dapat disebut verba predikatif (karena menjadi predikat dalam struktur proposisi) dan proses perubahan itu disebut *predikativasi*.

#### 5. Nosi Refleksivitas

Nosi refleksivitas terdapat pada berbagai jenis verba yang telah dibicarakan pada bagian-bagian terdahulu. Untuk kejelasan, ada baiknya nosi ini dibicarakan tersendiri. Secara umum dapat dikatakannya bahwa nosi refleksivitas terdapat pada verba aksi dalam proposisi yang pelaku dan objeknya merupa-

kan wujud (bernyawa) yang sama, sehingga pengaruh (akibat) aksi yang dinyatakan oleh verba itu kena pada pelakunya sendiri. (Bandingkan Lyons, 1971:361-362; Anderson, 1971:49-50). Dalam berbagai bahasa di dunia, nosi ini direalisasi dalam berbagai bentuk. Dalam bahasa Indonesia, nosi refleksivitas direalisasi sebagai berikut.

(36) *Ibu pergi ke pasar.*

P = O    V                    L

(37) *Laki-laki itu bunuh diri.*

P                    V            O

(38) *Ayah sedang bercukur.*

P = O                                    V

(39) *Rini sedang berpakaian.*

P                                    V

(40) *Ayam itu sudah bertelur.*

P                                    V

Pada (36) kasus pelaku (*Ibu*) sama dengan objek. Ini memang diperlukan oleh verba aksi-lokatif *pergi* yang menyatakan 'Ibu menggerakkan diri sendiri (badannya) ke . . . ! Dalam kalimat itu kasus objek tidak direalisasi, tetapi dalam struktur proposisi yang mendasari kalimat tersebut kasus itu ada, ditandai dengan P = O (Pelaku dan Objek koreferensial). Jadi sesungguhnya verba *pergi*, di samping ciri selektif AKSI-LOKATIF, juga mempunyai ciri REFLEKTIF. Ciri ini adalah inflektif karena tidak mempengaruhi ciri selektif, sehingga tidak mengubah kehadiran kasus. Verba lain yang seperti ini ialah *datang*, *tiba*, *turun*, dll. Pada kalimat yang mengandung verba seperti ini, objek tidak direalisasi (*totally covert*).

Pada (37), pelaku (*laki-laki*) dan objek (*diri*) terpisah. Namun, pada hakikatnya keduanya adalah wujud yang sama. Jadi *bunuh* dalam hal ini mengandung nosi refleksivitas. Pada (38) pelaku adalah sama dengan objek, dan ba dasar *cukur* mendapat prefiks *ber-*. Kalimat ini dapat diparafrase menjadi:

(38a) *Ayah sedang mencukur diri* (janggut sendiri)

P                    V            O

dengan pelaku dan objek terpisah. Dapat disimpulkan bahwa timbulnya prefiks *ber-* adalah akibat dari penambahan ciri REFLEKTIF pada verba aksi *cukur*, dan ini sekaligus mengakibatkan tidak adanya realisasi objek (*diri*). Dalam kalimat yang terbentuk dari verba seperti *bercukur*, kasus objek adalah koreferensial dengan kasus pelaku (P = O), oleh karena itu tidak direalisasi.



- (5) Verba Proses (-O)  
*longsor, tumbuh, retak*
- (6) Verba Proses-Pengalaman (-Pi, O)  
*cemas, bimbang, waswas*
- (7) Verba Proses-Benefaktif (-B, O)  
*menang, kalah, dapat*
- (8) Verba Aksi (-P, O)  
*minum, makan, tangkap*
- (9) Verba Proses-Lokatif (-O, L)  
*tenggelam, timbul, terbit*
- (10) Verba Aksi-Pengalaman (-P, Pi, O)  
*tanya, bilang, jawab*
- (11) Verba Aksi-Benefaktif (-P, B, O)  
*beli, jual, bantu*
- (12) Verba Aksi-Lokatif (-P, O, L)  
*tiba, pergi, datang*

#### B. Verba Derivatif

- (1) Verba Derivasi-Inkoatif, termasuk verba proses.  
*menguning, mengental, kepanasan*
- (2) Verba Derivasi-Kausatif, termasuk verba aksi.  
*melebarkan, membasahi, mempertajam*
- (3) Verba Derivasi-Resultatif, termasuk verba keadaan  
*berjahit, berukir, terikat*
- (4) Verba Derivasi-Komparatif, termasuk verba keadaan.  
*spandai, seputih, tercantik.*

#### C. Verba Inkorporatif

- (1) Verba Inkorporatif-Objektif, hasil inkorporasi kasus O.  
Verba-verba ini terdiri dari Verba Keadaan-Benefaktif: *bermobil, menjanda, menyayur, menyisiki*
- (2) Verba-Inkorporasi-Lokatif, hasil inkorporasi kasus L.  
Verba-verba ini terdiri atas verba proses-lokatif, dan verba aksi-lokatif: *melaut, mengandangkan.*
- (3) Verba Inkorporasi-Instrumental, hasil inkorporasi kasus modalitas-I.  
Verba-verba ini adalah verba aksi dan verba aksi-lokatif: *menggergaji, bersepeda.*

#### D. Verba Inflektif

Verba yang merupakan hasil proses penambahan ciri inflektif juga terdiri dari verba keadaan, verba proses, dan verba aksi, serta beberapa subjenis ketiga verba ini.

- (1) Verba Infleksi-Iteratif  
*melempari, memukuli, menjual*
- (2) Verba Infleksi-Eksessif  
*kehijauan, kecepatan, kebesaran*
- (3) Verba Infleksi-Resiprokatif  
*bersalaman, berpelukan, bergumul*
- (4) Verba Infleksi-Pasif  
*diminum, diambil, terbeli*
- (5) Verba Infleksi-Aksidental  
*terduduk, tertiarap, terbangun*
- (6) Verba Infleksi-Reflektif  
*berjemur, bercukur, berhias*
- (7) Verba Infleksi-Reduplikatif  
*duduk-duduk, hancur-huluh, pukul-memukul*

#### E. Verba Predikatif

Verba ini merupakan hasil proses predikativasi.

*Jenderal dalam Bapaknya seorang jenderal.*

*Empat dalam kakinya empat.*

Verba-verba ini mempunyai ciri selektif KEADAAN.

Dari klasifikasi di atas kiranya jelas bahwa jenis-jenis verba yang pokok dan paling utama dalam bahasa Indonesia adalah kedua belas verba dasar pada A karena semua jenis verba lainnya juga terdiri atas verba-verba itu, di samping menjadi dasar subklasifikasi.

#### 7. Simpulan

Klasifikasi verba bahasa Indonesia berdasarkan struktur proposisi, sebagaimana telah dibicarakan dalam makalah ini mempunyai beberapa keuntungan. Keuntungan-keuntungan dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Hubungan antara berbagai jenis verba lebih kelihatan, dan, yang lebih penting lagi, hubungan antara semantik (makna), morfologi, dan sintaksis lebih jelas. Dengan demikian, pemerian terpecah-pecah

- (ditinjau dari berbagai segi yang tidak atau hampir tidak berhubungan) dapat dihindarkan. Koherensi analisis tercapai.
- (2) Masalah afiksasi yang sangat membingungkan, seperti mengapa suatu afiks dapat ditambahkan pada kata dasar tertentu dan tidak dapat pada kata dasar lainnya yang kelihatan sejenis, setidaknya sebahagian besar, dapat dijelaskan secara bernalar.
  - (3) Unsur-unsur potensial bahasa Indonesia, yaitu unsur-unsur yang belum timbul dalam pemakaian tetapi memenuhi kaidah, dapat ditunjukkan. Unsur-unsur potensial ini kiranya yang lebih baik dipergunakan daripada meminjam dari bahasa asing.
  - (4) Dengan model klasifikasi ini, klasifikasi kata dalam bahasa Indonesia mungkin dapat dibuat lebih sederhana. Satu alternatif, misalnya, adalah yang berikut.
    - (a) nomina
    - (b) verba
    - (c) numeralia
    - (d) fungsionalia (kata tugas)
  - (5) Dengan model ini bahasa Indonesia dapat memberi sumbangan efektif dalam berbagai penelitian kebahasaan, termasuk membaca dan mengarang (komposisi), psikholinguistik, psikologi, kebudayaan, dan teknologi informasi. Model ini dapat dipergunakan untuk mengukur keterbacaan.

Sebagai informasi tambahan, model ini telah kami pergunakan meneliti perbandingan berbagai verba dalam teks cerpen dan novel. Kami temukan bahwa yang terbanyak dipakai ialah verba aksi (51.3%), dan yang kedua ialah verba keadaan (15.3%) (Tampubolon, 1979). Apakah ada hubungannya penggunaan verba dengan topik ceritera, atau gaya penulisan, atau dengan kebudayaan masyarakat yang diceriterakan, masih perlu diteliti. Model ini mungkin dapat membantu dalam hal ini.

Satu kelemahan dasar model ini yang sering dikemukakan ialah yang berkenaan dengan kriteria untuk membedakan verba keadaan dari verba proses, dan verba proses dari verba aksi. Untuk bahasa Indonesia, tiga kriteria yang dapat dipergunakan, yaitu: (1) kriteria semantik-sintaksis, (2) kriteria sintaksis, dan (3) kriteria intuitif. Kriteria semantik-sintaksis ialah pertanyaan: (a) Bagaimana (keadaan) W(wujud)? (b) Apa yang terjadi pada W? (3) Apa yang dilakukan oleh W? Pertanyaan (a) adalah untuk mengidentifikasi verba ke-

adaan, pertanyaan (b) untuk verba proses, dan pertanyaan (c) untuk verba aksi. Tes sintaksis dapat juga dipergunakan, yaitu verba keadaan tak dapat didahului oleh *sedang* dan tidak dapat membentuk kalimat perintah. Verba proses dapat didahului oleh *sedang*, tetapi tidak dapat membentuk kalimat perintah. Verba aksi dapat didahului oleh *sedang* dan dapat membentuk kalimat perintah. Akhirnya, kedua kriteria di atas akan dapat didukung secara signifikan oleh intuisi pengujar mahir bahasa Indonesia.

### PUSTAKA ACUAN

- Anderson, John M. 1971. *The Grammar of Case: Towards a Localistic Theory*. London: Cambridge University Press.
- Atkinson, Kilby & Roca. 1982. *Foundations of General Linguistics*. London: George Allen & Unwin.
- Bach, E. & R.T. Harms, ed. 1968. *Universals in Linguistic Theory*. New York: Holt, Rinehart and Co.
- Cook, Walter A.S.J. 1979. *Case Grammar: Development of the Matrix Model (1970 – 1978)*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Chafe, Wallace L. 1970. *Meaning and the Structure of Language*. Chicago: University of Chicago Press.
- Clark, Herbert H. & Clark, Eve V. 1977. *An Introduction to Psycholinguistics*. New York: Harcourt Brace Jovanovich Inc.
- Fillmore, Charles J. 1968. "The Case for Case". Di dalam Emmon, Bach & Robert I. Harms. ed. *Universals in Linguistic Theory*. New York: Rinehart & Winston.
- Fillmore, Charles J. 1969. "Towards a Modern Theory of Case". In David A. Reibel & Sanford A. Schane, eds. *Modern Studies in English*. Englewood Cliffs New Jersey: Prentice-Hall.
- Foss, Donald J. & Hakes, David I. 1978. *Psycholinguistics: An Introduction to the Psychology of Language*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Kerap, Gorys. 1984. *Tatabahasa Indonesia*. Jakarta: Nusa Indah.
- Lakeff, George. 1971. "On Generative Semantics". Didalam Steinberg dan Jakobovits, ed. (1971).
- Lyons, John. 1971. *Introduction to Theoretical Linguistics*. London: Cambridge University Press.

- Mc. Cawley. 1968. "The Role of Semantics in a Grammar." Di dalam Bach dan Harms, ed. (1968).
- Mc. Cawley. 1971. "Where do Noun Phrases Come from?" Di dalam Steinberg dan Jakobovits, ed. (1971).
- Nash, Bonnie & Webber. "The Role of Semantics in Automatic Speech Understanding". Di dalam Daniel G. Bobrow & Allen Collins. eds. *Representation and Understanding: Studies in Cognitive Science*. New York Academic Press Inc., 1975.
- Ramlan, M. 1980. 1983. *Morfologi: Satu Tinjauan Deskriptif*. Jogjakarta: CV Karyono, Cetakan 5, 1983.
- Ramlan, M. 1983. *Sintaksis*. Yogyakarta: CV Karyono, Cetakan 3.
- Simatupang, M.D.S. 1983. *Reduplikasi Morfemis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Jambatan. (Disertasi pada Universitas Indonesia th. 1979).
- Steinberg, Danny D. 1982. *Psycholinguistics: Language, Mind, and World*. London: Longman.
- Stockwell. Robert P. 1977. *Foundations of Syntactic Theory*. Englewood Cliffs New Jersey: Prentice Hall.
- Tampubolon, D.P. 1983. "Verbal Affixation in Indonesian: A Semantic Exploration". Canberra: dalam *Pacific Linguistic Series D-48*, ed. W.A.L. Stockhoff Australian National University. (Disertasi Ph.D. 1977).
- Tampubolon. D.P. 1979. *Tipe-Tipe Semantik Kata Kerja Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Woods, William A. 1975. "Foundations for Semantic Networks". Di dalam Daniel G. Bobrow & Allen Collins. ed. *Representation and Understanding: Studies in Cognitive Science*. New York: Academic Press Inc.

**SUDUT PANDANGAN KEPENDIDIKAN TENTANG  
PREPOSISI DAN KONJUNGSI DALAM PEMBAHASAN  
TATA BAHASA INDONESIA BAKU**

Soenardji

**1. Pendahuluan**

Salam dan hormat amat layak disampaikan kepada Saudara Harimurti Kridalaksana beserta kerabat penelitian dalam Lembaga Linguistik Fakultas Sastra Universitas Indonesia, yang telah menghasilkan karya dengan judul *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis (TBDBIS)*. Naskah yang selesai ditulis pada tahun 1984 itu dibahas dalam seminar ini dengan tujuan untuk diperoleh kemandapan atas temuan-temuan yang dilaporkan sebagai hasil penelitian.

Kemandapan burhan yang akan digunakan sebagai penopang bagi kemampuan tata bahasa Indonesia sangat diharapkan. Jika tata bahasa Indonesia baku berhasil dikodifikasi, maka upaya pembakuan adalah karya nyata yang menghasilkan prestasi gemilang yang dicapai dalam masa pengembangan bahasa Indonesia pada akhir Abad XX. Hasil yang gemilang itu bertambah mantap lagi bobotnya manakala dilihat dari proses penggarapannya yang dilakukan secara bermusyawarah dan bergotong-royong. Lain daripada itu, hasil karya tim Lembaga Linguistik Fakultas Sastra Universitas Indonesia itu mempunyai arti sebagai jawab atas tantangan yang sudah dirumuskan secara rasional dalam Politik Bahasa Nasional mengenai perencanaan bahasa Indonesia. Dalam perencanaan bahasa Indonesia yang menjadi acuan program kebahasaan yang dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia masalah upaya

pembakuan tata bahasa Indonesia sudah digariskan dengan jelas. Hal itu dapat diketahui dari buku *Repelita IV*.

Harapan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang didokumentasikan sebagai TAP MPR Nomor II/MPR/1983, agar dihasilkan tata bahasa Indonesia yang baku, menunjukkan bahwa pembangunan dalam bidang kebahasaan memiliki kedudukan yang penting. Dari sana jelas pula bahwa aspirasi masyarakat Indonesia mengenai pembangunan bahasa nasionalnya telah mempunyai posisi yang kuat secara politik; bahkan posisi itu tidak tergoyahkan sebab sudah dengan tegas dan mantap di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal yang eksplisit mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Harapan bangsa Indonesia itu hampir terpenuhi jika TBDIS lulus dalam seminar ini.

Jika tata bahasa Indonesia yang baku dapat dihasilkan kodifikasinya pada saat menjelang berakhirnya Abad XX, maka pendidikan kebahasaan nasional memiliki pegangan hukum dan pegangan teoretis yang mampu menjelaskan fenomena kebahasaan sekaligus dapat mengarahkan dan memprediksikan terciptanya masyarakat pemakai bahasa Indonesia yang berkualitas menurut tuntutan perencanaan bahasa yang berlalu dewasa ini.

Bertolak dari praanggapan bahwa pegangan hukum dan teoretis tentang bahasa Indonesia yang baku belum tuntas pemrosesannya dan bahwa pendidikan kebahasaan Indonesia belum memiliki panduan yang siap-lepas-landas (yang tidak bersifat meta-teori), maka dicobalah dalam kesempatan ini untuk memberikan tanggapan terhadap TBDIS. Pemberian tanggapan berikut ini terbatas pada hal-hwal mengenai preposisi dan konjungsi. Hal itu pun masih hendak disempitkan lagi menjadi suatu telaah dari sudut pandangan kependidikan. Oleh karena itu, tidaklah mustahil apabila simpulan-simpulan dalam pemberian tanggapan ini belum menjadi "kata akhir" yang mantap.

## 2. Permasalahan

Permasalahan dalam pemberian tanggapan ini diarahkan untuk mengungkap masalah pendekatan; dengan membatasi pengungkapan masalah pendekatan itu diharapkan diperoleh penunjang bagi (1) pemerian mengenai preposisi dan konjungsi dalam bahasa Indonesia dan (2) pembangunan kaidah yang bersifat deduktif-nomologis untuk kepentingan pendidikan bahasa Indonesia. Dengan demikian masalahnya ialah pendekatan apakah yang dapat disarankan bagi TBDIS untuk masuk dalam rangka memasyarakatkan karya itu menjadi salah satu tata bahasa pedagogik untuk bahasa Indonesia, yaitu

tata bahasa yang deskriptif dengan kaidah pemandu pemakaian bahasa yang baik dan benar.

### 3. Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk menyusun paparan mengenai burhan pada tingkat permulaan dalam rangka melangkah menuju kodifikasi bagi preposisi dan konjungsi; di samping itu, tujuan yang diinginkan dicapai untuk mengawali mencari sudut pendekatan epistemologis dalam rangka melangkah ke arah perumusan panduan yang bersifat pedagogik.

Untuk mencapai tujuan itu, pembahasan berikut dikelompokkan menjadi (1) pembahasan umum, yang melihat TBDBIS itu dari segi konsepsionalnya, dan (2) pembahasan khusus, yang melihat TBDBIS itu dari segi pengoperasian konsepsi itu pada preposisi dan konjungsi.

### 4. Pembahasan Umum

Salah satu asas yang diterapkan dalam TBDBIS ialah pendekatan eklektik yang strategisnya dilakukan dengan jalan memanfaatkan sumbangan hasil penelitian linguistik yang berdasarkan aliran-aliran yang memerikan tata bahasa aliran-aliran linguistik yang pernah ada itu memerikan tata bahasa dengan cara yang berlain-lain dan bahkan ada yang saling berlawanan (Kridalaksana *et al.*, 1984:21). Keanekaragaman itu telah banyak menyumbangkan kekayaan akan wawasan tentang bahasa yang bermacam-macam. Meskipun begitu, jalan yang ditempuh ialah dengan mengambil segi-segi positif hasil-hasil penelitian pelbagai aliran tersebut. Pendekatan eklektik yang dikembangkan dalam TBDBIS itu agaknya cenderung seperti yang dilakukan oleh Samsuri (1982) yang menggunakan kriteria kesederhanaan, kehematan, dan ketuntasan analisis, serta ketuntasan pemerian. Hasil-hasil penelitian yang menghasilkan teori-teori kebahasaan tidak seluruhnya disaturagakan, melainkan ditapis demi diperolehnya teori analisis dan pemerian yang memenuhi kriteria itu. Misalnya, teori N.T. Tarr dan teori Boudouin de Courtenay tidak diambil; begitu pula teori Hjelmslev, teori Firthian, teori tagmetik, dan dikotomi de Saussure. Teori yang paling dominan yang disaturagakan menjadi pendekatan eklektik oleh Samsuri (1982:42—44) kiranya adalah mengarah kepada teori transformasi generatif dalam perkembangannya yang terakhir.

Jika aliran-aliran yang dimanfaatkan itu semata-mata dipakai untuk membuat pemerian tentang fenomena bahasa Indonesia, maka hasil penerapan pendekatan eklektik itu adalah pemerian dan analisis mengenai fenomena

bahasa Indonesia dari beberapa sudut pandangan. Karya TBDBIS adalah tata basa Indonesia deskriptif; hal itu berarti bahwa pendekatan eklektik yang dikembangkan dalam TBDBIS adalah pendekatan yang dioperasikan untuk mendapatkan dekripsi bahasa. Dalam TBDBIS dideskripsikan ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Di samping ciri-ciri bahasa baku yang umum, yaitu bahasa yang dipakai dalam pembicaraan di depan umum, dalam situasi resmi, dalam wacana teknis, dan dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati, ditambah dengan ciri-ciri yang khas untuk bahasa Indonesia baku, yang meliputi sembilan ciri. Kesembilan ciri itu ialah penggunaan secara eksplisit dan konsisten mengenai konjungsi, partikel *kah* dan *pun*, fungsi gramatikal, *menN-* dan *ber-*, pola frasa verbal yang terdiri dari *Aspek + Agen + V*, konstruksi sintesis, penggunaan yang terbatas untuk sejumlah unsur leksikal dan gramatikal yang berasal dari dialek regional dan bahasa daerah, penggunaan polaritas tutur, dan penggunaan unsur-unsur leksikal secara konsisten dan eksplisit seperti: *silakan*, *harap*, *kepadanya*, *pada + Persona*, *pada + Waktu*, dan *dengan* (Kridalaksana *et al.*, 1984:5—6).

Bagi kepentingan tata bahasa pedagogik, ciri-ciri yang berkenaan dengan bahasa Indonesia baku itu perlu ditambah dengan ciri yang lain. Dalam hal ini kiranya yang perlu ditambahkan ialah bahwa tata bahasa bukanlah sesuatu yang dirumuskan kemudian, melainkan justru sebelum dihasilkannya suatu pemakaian bahasa; tata bahasa yang mendasari pemakaian bahasa dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak bahasa itu setepat-tepatnya (van Peursen, 1985:18). Dengan mengemukakan pendapat ahli filsafat itu tidak berarti bahwa ciri preskriptif sebagaimana yang dimiliki oleh tata bahasa tradisional hendak ditempatkan pada posisi yang penting. Dengan menyampaikan pendapat filosof itu ingin diperlihatkan adanya isyarat bahwa tata bahasa mempunyai peranan sebagai pemandu pemakaian bahasa yang baik dan benar. Ciri sebagaimana dinukil dari pernyataan van Peursen itulah kiranya yang dapat dipertimbangkan menjadi pangkal bertolak untuk mengembangkan konsep-konsep tentang kepedagogikan tata bahasa. Pengembangan konsep-konsep kepedagogikan dalam tata bahasa Indonesia yang baku diharapkan menghasilkan kaidah-kaidah yang menjelaskan dengan tuntas bentuk, arti, dan fungsi tata bahasa Indonesia secara esoterik, dan yang memuat pula panduan pemakaian bahasa yang tidak metateorik, melainkan yang berperan secara *tut wuri handayani*.

Segi metateorik dalam tata bahasa Indonesia baku yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah segi yang menunjukkan penyaturagaan sari pati teori linguistik berdasarkan pendekatan eklektik. Sari pati teori linguistik

yang disaturagakan itu memuat asas-asas behaviorisme dan mentalisme sebagaimana teori linguistik strukturalisme dan transformasi, yang selanjutnya disaturagakan lagi menjadi metodologi pemerian bahasa. Adapun segi pedagogiknya ialah segi yang menunjukkan penerapan teori belajar yang dikembangkan melalui pendekatan eklektik pula; bagi pendidikan bahasa nasional di Indonesia pendekatan eklektik pengajaran bahasa itu masih ditambah lagi dengan aspirasi pengembangan bahasa nasional Politik Bahasa Nasional dan GBHN. Segi pedagogik yang disaturagakan dengan tata bahasa deskriptif itu sesuai dengan pandangan Widdowson (1979:215) sebagai *mediating area of inquiry which will interpret the results of theoretical and descriptive studies* dalam studi kebahasaan.

Ada lagi satu hal yang perlu diperhatikan dalam aspek pedagogik tata bahasa Indonesia, yaitu peran dan kedudukan teori belajar. Teori belajar sebagai pengembangan psikologi terapan adalah hasil penerapan pendekatan eklektik juga. Ke-elektik-an yang menghasilkan teori belajar yang mutakhir menyaturagakan konsep-konsep yang berdasarkan psikologi behavioristik dan psikologi Gestalt. Perkembangan proses penyaturagaan aneka aliran psikologi itu diikhtisarkan oleh M.L. Nigge; ikhtisar itu meliputi perkembangan teori belajar beserta implikasinya yang terjadi dalam Abad XX. Pada garis besarnya yang disaturagakan ialah (1) *mental discipline theories of mind substance family*, (2) *Stimulus-Response conditioning theories of behavioristic family*, dan (3) *Cognitive theories of Gestaltfield family*. Gugus yang pertama menghasilkan teori belajar yang mengutamakan pengembangan budi kemanusiaan (*humaniora*), gugus yang kedua mengutamakan pengembangan teknologi pemberian latihan keterampilan dan pembiasaan, sedangkan gugus yang ketiga menghasilkan teori belajar yang mengutamakan pengembangan pengetahuan (kemampuan) kognitif peningkatan cakrawala kehidupan yang lebih baik (Bigge, 1982:9—14).

Teori belajar yang eklektik itu mempunyai sejumlah istilah baku, di antaranya adalah: *organism* yang berarti *si-belajar*, *physical environment* yang berarti *lingkungan psikologis* yang menjadi rangsangan (penambah pengalaman belajar), dan *interaction* yang berarti *kemampuan bereaksi dari si-belajar*. Jika teori belajar itu dikembangkan untuk menyusun tata bahasa pedagogik, maka aspek tata bahasa yang mana yang dimasukkan ke dalam gugus lingkungan psikologis dan kemampuan yang bagaimana yang diharapkan dapat dimasukkan ke dalam gugus *interaction* masih perlu diteliti secermat-cermatnya. Kiranya sosok teori tata bahasa pedagogik yang mempunyai potensi sebagai hukum dan teori yang deduktif-nomologis dapat

diwujudkan, dengan burhan bahwa pendekatan eklektik untuk pemerian bahasa mempunyai kesejajaran dengan pendekatan eklektik untuk penyusunan teori belajar. Dalam hubungannya dengan Poilitik Bahasa Nasional dan GBHN aspek pemilihan bahan untuk contoh-contoh pemakaian bahasanya perlu ditapis benar-benar yang semata-mata berdasarkan kriteria pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai contoh pemakaian bahasa sebagaimana disajikan oleh John U. Wolf tidak seluruhnya tepat dan sesuai dengan aspirasi dalam Politik Bahasa Nasional dan GBHN itu. Sajian John U. Wolf yang dimaksud adalah sebagaimana terdapat dalam bukunya yang berjudul *Beginning Indonesian*, Cornel University, 1979.

Pembahasan umum yang telah disampaikan itu kiranya dapat disingkat menjadi simpulan sebagai berikut. Karya TBDBIS adalah upaya untuk menjawab tantangan yang sudah dimantapkan sebagai masalah pembangunan dalam bidang kebudayaan. Upaya yang sudah menghasilkan karya itu berlandaskan pendekatan eklektik; dengan pendekatan itu bahasa Indonesia dideskripsikan sehingga diperoleh seperangkat kaidah tata bahasa deskriptif pula. Kajian untuk menyusun kaidah generatif sudah dikerjakan pula, sehingga terdapat peluang untuk memberikan tempat bagi penambahan pendekatan yang kiranya dapat disaturagakan. Jika pendekatan eklektik yang berkenaan dengan pengembangan teori belajar disaturagakan dengan deskripsi yang telah dihasilkan berupa kaidah tata bahasa, maka tata bahasa pedagogik untuk bahasa Indonesia bakal dapat disusun. Jika aspek-aspek yang bersangkutan-paut dengan kepribadian nasional Indonesia disaturagakan pula, maka sosok teori pendidikan tata bahasa Indonesia mendapat sumbangan yang sangat penting dari karya TBDBIS itu.

### 5. Pembahasan Khusus

Kriteria yang digunakan dalam karya TBDBIS adalah kriteria sintaksis, yang selanjutnya ditopang oleh kriteria morfologis dan kriteria semantis, yang ditempuh dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, penentuan kategori satuan gramatikal ditempuh berdasarkan kriteria fungsi. Kedua, penentuan kategori satuan gramatikal ditempuh melalui kriteria bentuk yang berupa afiks, jika kriteria fungsi belum dapat menentukan kategori. Ketiga, jika kriteria bentuk belum juga dapat menentukan kategori, maka ditempuhlah penentuan kategori itu berdasarkan makna (Kridalaksana, *et al.*, 1984:38).

Dengan prosedur itu pembagian kategori menghasilkan kategori primer, subkategori, dan kategori yang diakibatkan oleh perpindahan kategori. Walau-

pun dikemukakan dalam karya TBDBIS bahwa dasar pandangan yang dipakai untuk memerikan bahasa Indonesia adalah sinkronis, ternyata untuk penentuan kategori satuan gramatikal masih diperlukan bantuan dasar pandangan diakronis; pandangan diakronis ini agaknya memang tidak mungkin ditinggalkan sama sekali, sebagaimana dinyatakan oleh Lepschy (1972:45) bahwa konsep diakronis tidak usah selalu disamakan dengan studi kesejarahan. Hal itu mengingat bahwa pemakaian bahasa (lisan) senantiasa berkaitan dengan perkembangan waktu (pada awal dan akhir).

Berdasarkan kategori primer, satuan gramatikal digolongkan menjadi (1) kata dan (2) partikel. Pembagian itu mirip dengan pembagian Samsuri; dinyatakan mirip, karena agaknya terdapat perbedaan (sekalipun barangkali perbedaan itu tidak banyak) antara prosedur dalam karya TBDBIS dan yang dilakukan oleh Samsuri (1982:49-99), menetapkan kategori suatu kata berdasarkan pengertian penuh yang dibawa oleh kata itu sendiri. Kata yang termasuk kategori ini disebut *kata utama* yang sifatnya terbuka. Kategori kata yang kedua dinamakan *kata sarana* yang merupakan pembawa pengertian sintaksik. Keanggotaan atau jumlah kata sarana itu tertutup; hampir-hampir jumlah kata sarana tidak mengalami penambahan.

Mengenai penentuan kategori satuan gramatikal menjadi kata dan partikel atau menjadi kata utama dan kata sarana, dalam pembahasan ini tidak diadakan pembicaraan secara mendalam. Meskipun demikian, kiranya cukup dinyatakan bahwa dalam karya TBDBIS langkah penentuan kategori untuk satuan gramatikal dalam bahasa Indonesia telah dilakukan dengan taat asas. Ketaatasan itu terlihat dari dua langkah yang ditempuh, ialah (1) langkah deskriptif dan (2) langkah taksonomis. Dengan langkah itu sengaja dipersiapkan landasan bagi kajian yang lebih mendalam mengenai kata dan partikel itu. Lain daripada itu dipersiapkan pula suatu landasan bagi penyusunan kaidah generatif dalam kaitannya dengan pembentukan kalimat. Mengenai hal ini agaknya TBDBIS sudah menampakkan isyarat pada judul karya, yaitu: sintaksis.

Kajian dalam rangka penentuan kategori satuan gramatikal agaknya TBDBIS lebih jauh daripada apa yang dilakukan oleh Ramelan yang menyertakan kriteria makna dalam pembicaraan mengenai kata depan (Ramlan, 1980: 1-19); namun Samsuri (1982:38) menggunakan prinsip yang disebut komposisi bentuk-makna, yaitu prinsip yang dengan tegas dipakai untuk mengidentifikasi morfem, yaitu prinsip yang di dalam TBDBIS digunakan sebagai kriteria "cadangan" apabila kriteria bentuk dalam berhasil menentukan identitas sesuatu satuan gramatikal. TBDBIS, sekalipun tidak menggunakan komposit bentuk makna, tetap memberikan tempat kepada kriteria makna

yang dikaitkan dengan perspektif historis, sosiologis, dan yuridis (Kridalksana, 1984:2); lain daripada itu adanya varian-varian dalam pemakaian bahasa Indonesia menjadi sebab digunakannya pandangan diasistem (Kridalaksana, *et al.*, 1984:6).

Data bahasa yang diselidiki dalam TBDBIS adalah data bahasa yang dikatakan sebagai yang berlaku dalam Abad XX; dinyatakan dalam karya itu bahwa tinjauan yang digunakan adalah tinjauan sinkronis atau tinjauan deskriptif. Anggapan yang mendasari tinjauan deskriptif itu adalah bahwa dalam kurun waktu yang hampir satu abad itu tidak menyebabkan terjadinya perkembangan atau perubahan sistem. Dalam hubungan ini Ramlan (1980:3) lebih berhati-hati dengan ketegasannya membatasi kurun waktu yang dijadikan rujukan, yaitu kurun waktu yang bermula dari tahun 70-an. Perihal keterkaitan tinjauan sinkronis dan diakronis dalam situasi kebahasaan sudah disinggung di depan.

Berkenaan dengan sasaran utama pembahasan ini adalah dalam hal preposisi dan konjungsi, maka penerapan kriteria dalam rangka penentuan kategori bagi jenis satuan-satuan gramatikal yang lain tidak dikemukakan dalam makalah ini. Oleh sebab itu, berikut ini adalah upaya untuk membahas preposisi dan konjungsi dalam TBDBIS.

## 6. Preposisi

Kerangka penentuan partikel ke dalam kategori preposisi menggunakan kriteria fungsi dan bentuk. Hal itu dapat dilihat dari pendefinisian tentang preposisi yang dinyatakan sebagai partikel yang berfungsi menghubungkan kata asas frasa sehingga terbentuk frasa eksosentris. Langkah pendefinisian itu dilanjutkan dengan langkah penggunaan kriteria bentuk yang menghasilkan pembagian preposisi menjadi dua jenis preposisi, yaitu (1) preposisi dasar dan (2) preposisi turunan. Langkah yang kedua itu masih digunakan lagi untuk memerinci preposisi turunan menjadi preposisi hasil transposisi, preposisi turunan berafiks, dan preposisi gabungan. Preposisi gabungan masih diperinci lagi menjadi (a) gabungan preposisi + preposisi dan (b) gabungan preposisi + nonpreposisi yang jumlahnya terbatas.

Selanjutnya, di dalam TBDBIS dimuat daftar preposisi yang berisi 120 buah preposisi, lebih banyak lima buah preposisi daripada yang didaftar oleh Ramlan. Di samping itu, disajikan contoh pemakaian preposisi dalam kalimat. Visualisasi bagan preposisi yang menggambarkan ikhtiar mengenai bentuk dan fungsi preposisi dicantumkan pada bagian penghabisan bab tentang preposisi. Bagan itu dapat dilihat sebagai unsur ciri kependidikan

(pedagogik) kaidah ketatabahasaan untuk preposisi yang dideskripsikan dalam TBDBIS.

Karena TBDBIS menggunakan varian-varian sebagai sumber rujukan, maka dalam daftar preposisi terdapat sejumlah preposisi yang agaknya memiliki corak sebagai unsur varian, misalnya: *tinimbang* dan *sama*. Di samping itu terdapat contoh lain yang agaknya memerlukan penjelasan lagi, yaitu: *a*, *wa*, dan *menyangkut*, jika bentuk-bentuk itu hendak dimasukkan ke dalam kategori preposisi.

Jika kaidah tentang preposisi itu hendak dikembangkan menjadi kaidah tata bahasa yang pedagogik, maka pengurutan kaidah-kaidahnya perlu dijalin dengan teori belajar yang secara psikologis dapat menunjang penyusunan hierarki kerumitannya. Pada bagian akhir makalah ini akan dicoba untuk menyajikan bahan masukan bagi kepentingan penyusunan hierarki kerumitan itu menurut salah satu teori belajar.

## 7. Konjungsi

Penentuan kategori satuan gramatikal ke dalam konjungsi menggunakan prosedur sebagaimana yang dilakukan untuk penentuan preposisi. Definisi tentang konjungsi yang ditentukan berdasarkan kriteria fungsi diikuti oleh penentuan yang berdasarkan kriteria struktur. Selanjutnya, contoh mengenai konjungsi agaknya diambil dari data bahasa yang bersumber pelbagai varian. Hal itu terlihat dari adanya beberapa kata yang berkategori konjungsi (menurut fungsi dan strukturnya), misalnya: *mentang-mentang*, *boro-boro*, *lamun*, *tapi*. Ada lagi sejumlah contoh yang dimasukkan ke dalam daftar yang menarik perhatian karena contoh itu sebenarnya sudah tidak lazim digunakan dalam bahasa Indonesia, misalnya: *alkisah*, *hubaya-hubaya*, *sebermula*, dan *syahdan*.

Agaknya sesuai dengan kosntruksi hipotaktis yang dibentuk dengan konjungsi, maka dalam TBDBIS itu dijelaskan pula tugas-tugas konjungsi yang dibedakan menjadi delapan belas jenis tugas seperti berikut:

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| (1). penambahan   | (10). syarat            |
| (2). urutan       | (11). tak bersyarat     |
| (3). pilihan      | (12). pengendalian      |
| (4). gabungan     | (13). harapan           |
| (5). perlawanan   | (14). perluasan         |
| (6). temporal     | (15). pengantar objek   |
| (7). perbandingan | (16). cara              |
| (8). sebab        | (17). perkecualian      |
| (9). akibat       | (18). pengantar wacana. |

Konjungsi yang disebut dengan istilah perapat atau kata penghubung oleh Samsuri (1982:382) adalah yang digunakan secara lahiriah untuk membentuk frasa gabungan atau klausa gabungan menjadi konstruksi hipotaktis (Kridalaksana, *et al.*, 1984:128). Menurut TBDBIS terdapat konjungsi yang sulit dibedakan dari preposisi, misalnya *karena* dalam *Ia pergi karena saya* berkategori preposisi, sedangkan dalam *Ia pergi karena saya mengusirnya* berkategori konjungsi. Sebenarnya, kata *karena* dalam kedua kalimat contoh itu sama kategorinya, jika kata *karena* dilihat sebagai operator untuk mentransformasikan dua kalimat dasar menjadi satu kalimat rapatan (menurut cara yang dilakukan dalam buku Samsuri).

Jika ciri pedagogik hendak disaturagakan ke dalam deskripsi konjungsi dalam TBDBIS, maka teori belajar kiranya perlu digunakan untuk menyusun hierarki bahan (yang berupa konjungsi itu) menjadi urutan dari yang mudah kepada yang rumit. Teori belajar yang dikembangkan dari konsep tentang belajar oleh Robert M. Gagne, yang termasuk teori belajar eklektik, kiranya dapat digunakan untuk menyusun hierarki bahan. Menurut R.M. Gagne itu dikutip Bigge (1982:10—11) dalam implikasi penggunaan teori belajar itu antara lain berupa ... *successive, systematic changes in organisms' environment to increase the probability of desired responses*. Tahapan kegiatan belajar yang implikasinya tercermin pada hierarki urutan bahan adalah (1) tahapan mempelajari isyarat (sentuhan baru), (2) tahapan mempelajari ketepatan reaksi atas stimulus tertentu, (3) tahapan menyusun perangkat stimulus-respons dalam untaian pembiasaan, (4) tahapan asosiasi verbal, (5) tahapan diskriminasi ganda, (6) tahapan mempelajari konsep, (7) tahapan mempelajari asas, dan (8) tahapan mempelajari pemecahan masalah (Gagne dalam Brown, 1980:80—81).

Berkenaan dengan penerapan teori belajar yang disarankan dalam penyusunan hierarki bahan itu, maka pembicaraan mengenai kesulitan perbedaan antara preposisi dan konjungsi dalam TBDBIS sebaiknya ditempatkan pada bagian yang paling penghabisan dalam bab yang bersangkutan. Penerapan teori belajar itu kiranya tidak hanya perlu diterapkan untuk mengatur susunan hierarki bahan saja, melainkan dapat pula kiranya digunakan untuk menapis data kebahasaan yang disajikan sebagai contoh atau model. Model dalam pembahasan ini sama maksudnya dengan apa yang dimaksudkan oleh Lepschy (1972). Dikemukakannya bahwa model dalam studi kebahasaan adalah model sebagaimana yang dipakai sebagai model matematika dan model fisika dalam membentuk nosi dasar dalam linguistik struktural. Atas dasar model itu dapatlah dikembangkan dengan dasar analogi bagaimana fenomena

kehidupan kebahasaan senyatanya. Dengan demikian, model bagi kepentingan penjelasan tentang preposisi dan konjungsi dalam tata bahasa Indonesia yang pedagogis dapatlah ditetapkan dengan jalan menapisnya dari segi sosiolinguistik dan dari segi analisis kegalatan (*error analysis*). Perihal analisis kegalatan ini James Hendrickson memberikan petunjuk yang penting bagi guru bahasa dalam karya tulisannya yang berjudul *Error Analysis and Error Correction in Language Teaching (Occasional Papers No. 10, 1979, SEAMEO RELC, Singapore)*. Demimianlah, preposisi *sama*, *timbang* dan sebangsanya, dan konjungsi *boro-boro*, *mentang-mentang*, *lamun*, *tapi*, dan sejenisnya, sebaiknya ditapis untuk tidak dimasukkan ke dalam model tata bahasa Indonesia baku.

Dalam pembahasan khusus ini hendak disampaikan bahan pertimbangan yang diharapkan menjadi masukan bagi penyusunan tata bahasa pedagogik. Khusus mengenai preposisi, alangkah tuntasnya apabila temuan-temuan Sudaryanto dalam hal *konstruksi penguasa-pembatas tataran subklausa*, terutama *konstruksi preposisional*, digunakan untuk menyempurnakan TBDBIS.

## 8. Penutup

Pembahasan mengenai preposisi dan kongjungsi dari sudut pandangan kependidikan ini belum tuntas. Untuk memperoleh kemantapan simpulan masih diperlukan penelitian eksperimental untuk menguji sejumlah hipotesis tentang hukum dan teori ketatabahasa. Jika kaidah-kaidah tata bahasa baku sudah memiliki kekuatan sebagai hukum dan teori yang bersifat deduktif nomologis, maka sarana yang penting untuk menyukkseskan pembangunan dalam bidang pengembangan bahasa sudah siap dioperasikan.

## PUSTAKA ACUAN

- Bigge, L. Morris. 1982. *Learning Theories for Teachers*. New York: Harper & Row Publishers.
- Brown, H. Douglas. 1980. *Principles of Language Learning and Teaching*. London: Prectice Hall, Inc.
- Brumfit, Cristopher J. 1981. *Problems and Principles in English Teaching*. Oxford: Pergamon Press.
- Hendrickson, James. 1979. *Error Analysis and Error Correction in Language Teaching*. Singapore: SEMEO RELC.
- Kridalaksana, Harimurti dkk. *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. 1984.
- Lepschy, Giulio C. 1972. *A Survey of Structural Linguistics*. London: Faber and Faber.
- Ramlan, M. 1980. *Kata Depan atau Preposisi dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: U P Karyono.
- Samsuri, 1982. *Tata Kalimat Bahasa Indonesia*. Malang (naskah siap dicetak).
- Sudaryanto. 1983. *Predikat Objek dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- van Peursen, C.A. 1985. *Susunan Ilmu Pengetahuan* (Terjemahan oleh J. Drost). Jakarta: Gramedia.
- Widdowson, H.G.. 1979. *Exploration in Applied Linguistics*. Oxford: Oxford University Press.

# INTEROGATIVE DAN DEMONSTRATIVA DALAM BAHASA INDONESIA

Stephanus Djawanai

## 1. Pengantar.

Pembahasan singkat tentang kategori interogativa dan demonstrativa dalam bahasa Indonesia yang disajikan dalam makalah ini adalah tanggapan terhadap uraian mengenai interogativa dan demonstrativa yang terdapat pada naskah TATA BAHASA DESKRIPTIF BAHASA INDONESIA: SINTAKSIS (TBDBIS) yang disusun oleh Harimurti Kridalaksana, dkk. Kisaran pembahasan ini sangat terbatas karena perhatian ditujukan terutama kepada perihal kategori. Yang akan disoroti adalah soal kategorisasi dan subkategorisasi interogativa dan demonstrativa; selain itu, akan dilontarkan pula satu dua gagasan mengenai partikel *kah* dan *tah* dan hal-hal yang belum disinggung, yang mungkin sekali dengan sengaja tidak disinggung seperti bentuk-bentuk *adakan*, *adakah*, *ya* dan *apa* yang sejajar pemakaiannya dengan *bukan* pada uraian mengenai interogativa dan *ana* dan *semacam* pada pembahasan mengenai demonstrativa.

## 2. Pembahasan

### 2.1 Interogativa

Uraian tentang interogativa dalam naskah laporan sudah mencakup aspek-aspek utamanya, yaitu dengan memperhitungkan kategori gramatikal dalam

membagi-bagi interogativa menurut bentuk, jenis, dan pemakaiannya. Namun, kiranya dapat diajukan pertanyaan mengenai subkategorisasi interogativa berdasarkan bentuk menjadi *tunggal* dan *turunan*, yaitu apakah pembagian itu menambah pemahaman mengenai jenis interogativa yang ada dalam bahasa Indonesia? Pertanyaan ini diajukan mengingat sulitnya memperhadapkan soal *tunggal* dan *turunan* sebagai mewakili dua titik yang bertentangan yang dapat membuka jalan ke arah memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai pola hubungan antara interogativa yang ada dan pembentukan kalimat tanya.

Subkategorisasi interogativa *turunan* juga menuntut diberikannya penjelasan yang cukup secara diakronis tentang proses terjadinya bentuk-bentuk *turunan* itu. Dan mengenai hal ini bisa ditemukan kesulitan dalam pembuktian: menerangkan terjadinya bentuk-bentuk seperti *apabila*, *apakah* dan *yang mana* mungkin agak mudah, tetapi menerangkan bentuk-bentuk seperti *siapa*, *kenapa* dan *apaan* beserta pembuktiannya secara diakronis pasti lebih sulit.

Terhadap keberatan yang dikemukakan di atas dapat diajukan alasan bahwa uraian yang terdapat di dalam TBDBIS itu bersifat deskriptif, jadi belum mengarah atau sampai pada tahap menyusun kaidah-kaidah yang bersifat normatif. Terlepas dari benarnya alasan semacam ini, keterbatasan pembagian menurut bentuk interogativa dan kesan bahwa karena uraian yang terdapat pada naskah itu bersifat deskriptif – jadi tidak dibutuhkan keterangan yang memadai mengenai pembagian menurut bentuk menjadi *tunggal* dan *turunan* dan pembagian menurut jenis terasa kuat. Hal ini mungkin disebabkan oleh penyajian yang tidak mencerminkan hubungan antara bentuk, jenis, dan pemakaian interogativa. Selain itu tidak dikemukakan rumusan atau batasan mengenai jenis interogativa. Yang disajikan hanyalah setiap interogativa dengan keterangan singkat mengenai penggunaannya dan contoh dalam pemakaian; urutan pembahasannya pun menimbulkan pertanyaan karena tidak disusun menurut abjad dan tidak pula menyiratkan suatu sistematika penyajian yang dapat mempermudah pelacakan atau yang mencerminkan pola hubungan yang lebih luas. Yang dimaksudkan dengan pola hubungan yang lebih luas di sini ialah hubungan antara pengelompokan atau subkategorisasi interogativa berdasarkan bentuk dengan pengelompokan berdasarkan jenis dan pemakaiannya. Deskripsi sering mengandung sifat acak atau arbitrer namun ia merupakan langkah awal yang penting menuju penjelasan atau eksplanasi; bahkan kita dapat mengatakan bahwa penjelasan harus dimulai dengan pemerian. Oleh sebab itu dibutuhkan keterangan singkat dan sederhana yang menguraikan alasan pemilihan cara pengelompokan dilakukan.

Lalu adakah cara atau model lain yang dapat dipergunakan untuk mengelompokkan interogativa sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran pola hubungan yang lebih mendasar dan lebih mencakup? Penulis mencoba menemukan semacam arahan dari karangan para ahli yang membahas masalah interogativa dan kalimat tanya dalam bahasa Indonesia. Tiga pembahasan yang menurut penulis saling melengkapi sehingga dapat memberi gambaran yang cukup jelas tentang interogativa dan kalimat interogatif dalam bahasa Indonesia adalah uraian oleh Samsuri (1984), Keraf (1970), dan Sudaryanto (1983). Berikut ini dikutip pokok-pokok pendapat mereka satu per satu.

Pertama, Samsuri (1984: 253) menekankan perlunya membedakan *kata ganti tanya* dari *kata tanya*. *Kata ganti tanya* ialah kata yang menggantikan kata lain, sedangkan *kata tanya* ialah kata yang menyebabkan kalimat berita menjadi kalimat tanya. Dengan mengikuti rumusan ini, setidaknya-tidaknya semua interogativa dalam bahasa Indonesia dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu berdasarkan adanya kata ganti tanya atau pronomina tanya yang berfungsi menggantikan pepadu-pepadu yang ditanyakan (Samsuri, 1984:286), dan yang kedua adanya kata tanya yang menanyakan positif/tidaknya suatu kalimat berita (Samsuri, 1984:254). Samsuri juga membahas kelompok kalimat tanya yang menggunakan intonasi sebagai penandanya, namun di sini dikesampingkan karena perhatian lebih ditujukan kepada penanda interogatif yang berwujud satuan segmental. Sebagai contoh ilustrasi Samsuri mengemukakan kata *apa* sebagai kata ganti tanya yang berfungsi menanyakan dengan tegas salah satu pepadu kalimat dasar, seperti *Apa di atas lemari itu?*, dan sebagai kata tanya yang berfungsi menanyakan positif/tidaknya suatu kalimat berita, seperti *Apa kau sebaiknya pergi besok pagi saja?*

Kedua, Keraf (1970:157-159), membahas ciri-ciri kalimat tanya, penggolongan kata-kata tanya berdasarkan sifat dan maksud pertanyaan, jenis kalimat tanya (biasa, retorik, dan yang senilai dengan perintah), dan pembagian menurut cakupan isi pertanyaan (pertanyaan total dan parsial). Secara ringkas sekali Keraf mengemukakan semua aspek kalimat tanya dan pengelompokan interogativa berdasarkan sifat dan maksud pertanyaan menjadi delapan jenis.

Ketiga, Sudaryanto (1983:162-169) membahas secara terperinci jenis-jenis penunjuk interogatif, yaitu yang mengisi fungsi tertentu dalam tataran klausa maupun subklausa dan ditandai oleh kata ganti tanya atau pronomina tanya seperti *bagaimana*, *mengapa*, dst., yang ditandai oleh formatif penunjuk interogatif yang terpisah dari klausa, sehingga terbentuk struktur kalimat

beruas, seperti *bukan, kan, apa* dan *ya*, dan yang ditandai oleh formatif interogatif yang masuk terpadu ke dalam klausa, seperti *apakah, bukankah*, dll. Sudaryanto (1983:198), juga menguraikan jenis-jenis kalimat tanya dalam bahasa Indonesia.

Dengan memanfaatkan model-model penggolongan di atas dapat kiranya disusun subkategori interogativa secara lebih sistematis. Pertama, subkategorisasi berdasarkan bentuk *dasar* dan *turunan* seperti yang telah dipaparkan dalam TBDIS. Istilah *dasar* mungkin lebih cocok untuk melabeli bentuk-bentuk *apa, bila, kah, kapan, mana* dan *tah* karena bentuk-bentuk ini dapat berdiri sendiri dalam membentuk kalimat tanya, dan dari bentuk-bentuk ini diturunkan bentuk-bentuk interogativa yang lain (bentuk turunan) yang dapat berupa penggabungan atau perluasan bentuk. *Kah* dan *tah* dengan sengaja dituliskan tanpa tanda hubung yang menandainya sebagai bentuk terikat karena *kah* dan *tah* pada hakikatnya merupakan partikel yang berstatus morfem bebas sejajar dengan partikel *pun*, jadi mungkin sepatutnya juga dituliskan terpisah seperti partikel *pun*.

Kedua, subkategorisasi berdasarkan fungsi yang dapat diisi oleh interogativa:

- (1) yang menanyakan tentang orang dan nama orang: *siapa*;
- (2) yang menanyakan tentang benda atau hal, juga hubungan kekerabatan: *apa; Apanukah orang itu?* (menanyakan tentang hubungan kekerabatan);
- (3) yang menanyakan tentang jumlah: *berapa*; bentuk ini dapat diperluas menjadi *seberapa* atau ditambah dengan perincian apa yang ditanyakan seperti jangka waktu, ukuran berat atau jarak: *berapa lama, berapa jauh, berapa gram*;
- (4) yang menanyakan tentang pilihan: *yang mana, mana*;
- (5) yang menanyakan tentang waktu: *bila, kapan, bilamana, apabila*;
- (6) yang menanyakan tentang tempat: *di mana, ke mana, dari mana*; juga digunakan *mana* saja untuk menanyakan tentang tempat asal, seperti pada *Orang mana dia?*;
- (7) yang menanyakan tentang keadaan: *bagaimana, betapa*;
- (8) yang menanyakan tentang sebab atau alasan: *kenapa, mengapa, apa sebab, ngapain*;
- (9) yang menanyakan tentang tindakan: *mengapa*.

Ketiga, subkategorisasi berdasarkan struktur kalimat beruas yang ditandai oleh jeda wajib: *bukan, kan, apa, ya* seperti contoh yang dikemukakan

Sudaryanto (1983:163), *Dia mandi, bukan/kan/apa/ya?*

Keempat, subkategorisasi berdasarkan terpadunya interogativa ke dalam klausa sehingga mencakup seluruh klausa: *apakah, bukannya, kah, tah*.

Kelima, kelompok khusus penggolongan berdasarkan maksud kalimat:

- (a) yang menyatakan ketidakpercayaan: *masakan, masa, masa iya, adakan;*
- (b) yang bersifat retorik: *tah, apatah, apa-apaan;*
- (c) yang bersifat meremehkan: *apa, apaan (Sopir apa/apaan?);*
- (d) yang bersifat menegaskan: *bukannya.*

Demi lengkapnya, tentu saja harus diberikan contoh lain untuk semua interogativa dan untuk setiap kelompok, terutama bila ada bentuk yang sama tetapi berbeda cakupannya. Khusus mengenai *adakah*, interogativa ini sering digunakan dengan pengertian *apakah*; namun demikian kita ketahui bahwa yang merupakan penanda interogatif adalah unsur *kah* saja (Contoh yang diberikan Poerwadarminta ialah *Adakah Saudara mendengar kabar itu?*).

Apa yang telah dikemukakan di atas menunjukkan betapa sulitnya memisahkan pembahasan mengenai bentuk dari fungsi dan bahkan isi pertanyaan. Seperti telah dikatakan di muka, para peneliti telah memperhitungkan perihalan bentuk, jenis, dan pemakaian interogativa dan dengan demikian terhindar dari sekedar pemberian batasan yang pisah-pisah atas bentuk saja. Penulis teringat akan kecaman pedas yang dilontarkan oleh Beteson (1979:16-17), sehubungan dengan ini: "Professional linguists ....may know what's, but children in school are still taught nonsense. They are told that a 'noun' is the name of a person, place, or thing, 'that a verb' is 'an action word', and so on. That is, they are taught at a tender age that way to define something is by what it supposedly IS in itself, out by its relation to other things".

Pandangan ini yang telah menuntun penulis dalam berusaha menemukan pola yang lebih besar yang menghubungkan dan mencakup interogativa.

## 2.2 Demonstrativa

Uraian tentang demonstrativa yang terdapat dalam naskah laporan oleh Harimurti Kridalaksana, dkk. sudah lengkap dan mencakup semua aspek penting demonstrativa. Keberatan penulis sebagai pembahas hanyalah yang menyangkut istilah *tunggal* dan *turunan* untuk melabeli kelompok demonstrativa yang dibagi berdasarkan bentuk. Sebagaimana yang telah dikemukakan mengenai interogativa menerangkan dan memberikan pembuktian tentang bentuk-bentuk turunan pasti sulit, seperti *berikut* dan *sekitar*. Di-

butuhkan pembuktian secara diakronis untuk menerangkan proses terjadinya bentuk-bentuk itu dari suatu bentuk dasar yang diandaikan adanya.

Keberatan lain yang dapat dikemukakan ialah mengenai contoh demonstrativa dalam pemakaian. Mungkin para peneliti dengan sengaja menghindari pemberian contoh karena contoh-contoh itu pasti panjang dan akan membuat laporan menjadi panjang. Namun, demi kejelasan seharusnya contoh-contoh dicantumkan pada bagian bahasan mengenai masing-masing demonstrativa.

Bentuk-bentuk yang mungkin dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam kelompok demonstrativa ialah *semacam*, *serupa*, *sebangsa*, *sejenis* yang sering digunakan secara anaforis intratekstual. Satu-satunya contoh yang dapat dikutip meskipun tidak lengkap ialah: . . . *Pertunjukan semacam kabarnya akan dipergelarkan di Jakarta*. Selain itu mungkin juga baik dipikirkan untuk menambahkan kata baru *ana*, sebagai bagian dari usaha mengembangkan bahasa Indonesia, untuk melengkapi unsur dalam sistem demonstratif inti, yaitu *ini*, *itu ana*; *sini*, *situ*, *sana*; *di/ke/dari sini*, *situ*, *sana*.

### 3. Penutup

Pembahasan yang sederhana di atas dikemukakan sebagai bahan untuk bertukar pendapat. Mungkin ada pernyataan atau keberatan yang tidak mengenai sasaran atau yang menunjukkan salah tangkap akan maksud peneliti oleh penulis ini. Walaupun demikian, mudah-mudahan salah tangkap atau salah pengertian ini membawa kebaikan, yakni dengan menambahkan keterangan, misalnya, penyajian uraian mengenai interogativa dan demonstrativa dalam bahasa Indonesia dapat lebih lengkap, mudah diikuti dan informatif.

### PUSTAKA ACUAN

- Bateson, Gregory. 1979. *Mind and Nature*. New York: E.P. Dutton.
- Beneveniste, E. 1971. *Problems in General Linguistics*. Gables: University of Miami Press.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 1983. *Beberapa Aspek Linguistik Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Greenberg, J. ed. 1978. *Universals of Human Language* Vol. 4: *Syntax*. Stanford: Stanford University Press.
- Keraf, Gorys. 1979. *Tatabahasa Indonesia*. Cetakan ke-10-Ende: Nusa Indah. tahun 1984.
- Moeliono, Anton M. 1984. *Santun Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Ophuijsen, Ch. A. van 1983. *Tata Bahasa Melayu*. Jakarta: Djambatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramlan. M. 1981. *Sintaksis*. Yogya: UP Karyono.
- Samsuri. 1984. *Tata Kalimat Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sastra Hudaya.
- Sudaryanto. 1983. *Predikat-objek dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Ulan, Russel. 1978. "Some General Characteristics of Interrogative Systems?" Di dalam J. Greenberg (ed.) 1978.
- Verhaar, J.W.M. 1977. *Pengantar Linguistik Jilid I*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

## JENIS-JENIS INFORMASI DALAM KALIMAT

### Konsep dasar dan permasalahannya

Abbas Achmad Badib

Menilik isi analisis Bagian 6.4, *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis* (TBDBIS), maka dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahannya ialah bagaimana seorang pembicara dapat menyusun kalimatnya secara strategis setelah dia membaca situasi serta memperhitungkan kemampuannya. Analisis bahasa semacam ini jatuh pada apa yang dinamakan analisis wacana (*discourse analysis*). Namun, perlu diingat bahwa analisis ini terdiri atas serentetan tatanan: wacana, paragraf, kalimat, klausa, frasa, kata, morfem, fonem, paragraf, kalimat, klausa, frasa, kata, morfem, fonem, dan fon (Longacre, 1986). Salah satu ciri pendekatan ini adalah penggunaan istilah-istilah dikotomis seperti yang dipakai dalam bab ini, yakni *topic* dan *comment*, *theme* dan *rheme*, *focus* dan *presupposition*, *subject* dan *predicate*, *old* dan *new* atau *given* dan *new*.

Patut dikemukakan di sini bahwa analisis semacam ini relatif masih baru dalam pembicaraan tata bahasa bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sudah seyakinya kalau kita menyampaikan penghargaan kepada tim penulis buku ini. Walaupun begitu, isi analisis Bagian 6.4 perlu dibahas dengan seksama.

Uraian berikut akan meliputi tiga segi, yakni:

- (i) pengertian konsep-konsep dasar istilah-istilah yang digunakan seperti *topik* dan *komen*, *fokus* dan *latar* (*presupposition*), *thema* dan *rema*.

- (ii) sudut pandangan pendekatan: *internal sentential construction* dengan *inter-sentential construction* (kalimat tunggal >< hubungan antarkalimat).
- (iii) data: kalimat-kalimat yang baku 100% dengan kalimat-kalimat yang dipergunakan sehari-hari oleh penutur asli (mungkin hanya 90% yang dapat dianggap baku dan mungkin pula kurang dari itu).

### 1. Konsep-Konsep Dasar Informasi Kalimat

Konsep-konsep dasar informasi kalimat mencakup pengertian *subjek* dan *predikat*, *topik* dan *komen*, *fokus* dan *latar*, *tema* dan *rema* sering tumpang tindih dan kabur, walaupun sering digunakan oleh ahli-ahli bahasa. Pada umumnya mereka menyadari akan kekurangan pengertian istilah-istilah tersebut. Oleh karenanya penggunaannya pun dipertegas agar tidak membingungkan.

Salah satu jalan yang mereka tempuh ialah dengan jalan menunjukkan kriteria yang mereka pakai, misalnya proses linearisasi (pengedepanan dalam contoh yang digunakan dalam TBDBIS), posisi konstituen (*word order*), hadirnya morfem-morfem tertentu sebagai penanda subjek atau fokus umpamanya, jeda, tanda-tanda semantis (seperti kedefinitan dan kebernyawaan, dan intonasi. Walaupun demikian, kita masih sering menemukan kesulitan, misalnya apa yang dinamakan topik atau fokus. Demikian juga dengan apa yang dinamakan subjek dan apa kriterianya; bahasa-bahasa Filipina pada umumnya tidak mengenal subjek, tetapi mereka lebih terkenal sebagai bahasa yang menyetengahkan istilah "fokus". Jadi kriteria tersebut hanya berlaku untuk bahasa-bahasa tertentu. Sebagai contoh dapat kita lihat pada kalimat (3) dan bagaimana menguraikannya.

- (3) Pak Akbar      istrinya baik sekali.  
      Tema                      Rema

*Tema* diberi batasan sebagai apa yang dibicarakan; sedangkan *rema* memberi informasi tentang apa yang dikatakan oleh tema. Batasan *tema* di sini tidak ubahnya seperti batasan subjek dalam tata bahasa tradisional, sedangkan *rema* sebagai predikat. Menurut Brown dan Yule (1983:126-127), pengertian tema sama dengan pengertian yang dipakai oleh Kridalaksana.

We shall use term *theme* to refer to a formal category, the left-most constituent of the sentence. Each simple sentence has a *theme* 'the starting point of utterance' and a *rheme*, everything that follows in

the sentence which consists of 'what speaker states about, or in regard to, the starting point of utterance'. (Mathesius, 1942).

Selanjutnya Brown dan Yule (1983:127) mengatakan:

In many cases (often considered to be the unmarked or neutral cases) the theme of declarative sentences will be a noun phrase (the grammatical subject), that of interrogatives the interrogative word, and that of imperatives the imperative form of verb.

Batasan yang dikemukakan oleh Brown dan Yule di atas menegaskan bahwa apapun yang dikedepankan selalu menjadi tema tanpa kecuali. Jadi tema selalu berada pada posisi awal. Namun, apa yang kita jumpai dalam kalimat (7) dalam Bagian 6.4 tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam kutipan di atas.

- (7) *Kalau mereka sih sudah biasa*  
*Pergilah dia.*
- |      |      |
|------|------|
| Rema | Tema |
|------|------|

Penyimpangan penempatan rema dan tema di sini tidak dapat saya mengerti penalaran serta penjelasannya.

Pengertian tema yang diperluas juga diberikan oleh Brown dan Yule (1983:137). Perhatikan contoh berikut.

*Jack* goes up the beanstalk again.

*He* comes to the giant's house and *he* sees the giant's wife.

Menurut mereka uraian kalimat-kalimat tersebut sebagai berikut.

- |                          |     |                   |                               |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------------------|
| Tema <sub>1</sub> (Jack) | --- | Rema <sub>1</sub> | (goes up the beanstalk again) |
| Tema <sub>2</sub> (He)   | --- | Rema <sub>2</sub> | (comes to the giant's house)  |
| Tema <sub>3</sub> (he)   | --- | Rema <sub>3</sub> | (sees the giant's wife)       |

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tema untuk kalimat-kalimat tersebut sama sedangkan rema dari kalimat-kalimat tersebut ada tiga. Jadi tema di sini dapat disimpulkan sebagai 'pelaku utama' dan sekaligus sebagai subjek karena dalam posisi awal (*the left-most constituent*). Dengan demikian konsep tema telah berkembang dari pengertian tunggal dari kalimat tunggal menjadi pengertian tunggal mencakup dua kalimat atau mungkin le-

bih. Jelas bahwa pengertian tema dapat membingungkan.

Mari kita jenguk kembali kalimat (3) di atas. Kalimat ini dapat pula ditinjau dari dikotomi topik dan komen..

(3) Pak Akbar                      istrinya baik sekali  
       Topik (T)    Komen (K)

Kesulitan dalam menjelaskan konsep *topik* telah diungkapkan oleh Brown dan Yule. Mereka mengajukan konsep *topik* yang dapat mengacu kepada topik kalimat (*sentential topic*), topik wacana (*discourse topic*) kerangka topik (*topic framework*) dan *topik* yang disamakan dengan tajuk (*title*).

Ulasan *topik* dan *komen* yang lebih jelas, walaupun ditunjukkan adanya perbedaan konsep, ialah uraian John Lyons (1963 – 1977 volume 2). Di sini Lyons (1977: 501) mengutip pendapat Hockett yang mengatakan:

It is sometimes referred to by means of the distinction between topic and the comment: "The speaker announces a topic and then says something about it . . . ."

Contoh yang diberikan ialah:

J o h n     r a n     a w a y .

dimana *John* kebetulan juga sebagai *subject* dan *ran away* sebagai *komen*.

Tetapi *topik* tidak selamanya *subjek* seperti kalimat di bawah ini.

That new book by Thomas Guernsey / I haven't read yet.

T o p i k    Komen

Jadi *topik* di sini identik dengan *subject of discourse* (Lyons, 1968: 335).

Menurut Gloria Poedjosoedarmo *et al.* (1978:31) *topik* dalam bahasa Jawa tidak selalu berada dalam posisi awal melainkan terletak pada akhir kalimat, bahkan dalam teks bahasa Jawa, topik yang sudah diketahui sering tidak disebut.

(*Dumadakan*) *keprungu swarane macan.*

'Tiba-tiba terdengar suaranya harimau.'

*swarane macan* 'suaranya harimau' menjadi topik.

Menurut pendapat saya kalimat (3) dapat pula diuraikan seperti berikut.

(3) Pak Akbar                      istrinya baik sekali  
       Topik    Komen

di mana *istrinya baik sekali* diuraikan lagi menjadi:

istrinya baik sekali  
Subjek Predikat

Atau saya usulkan bahwa kalimat semacam ini dan juga kalimat (15) dianggap sebagai kalimat subjek ganda.

(3) Pak Akbar istrinya baik sekali  
Subjek 1 Subjek 2 Predikat

(15) Orang itu anaknya lima  
Subjek 1 Subjek 2 Predikat

Perangai *subyek ganda* dalam bahasa Indonesia cukup menimbulkan polemik sebab apabila kalimat (3) termasuk kalimat baku, maka kalimat (3a) dan (15a) di bawah ini dipertanyakan baku tidaknya. Alasannya ialah bahwa hadirnya *-nya* akibat pengaruh bahasa Jawa. Namun apabila kita membicarakan bahasa-bahasa Austronesia, morfem *-nya* atau *-(n)e* dalam bahasa Jawa, *na* dalam bahasa Toba Batak, Tagalog, Tolai, dan Wolio, *na* dalam bahasa bahasa Proto Austronesia, maka hadirnya kalimat (3a) yang dianggap adanya pengaruh bahasa Jawa perlu dipertanyakan kebenarannya.

(3a) Istrinya pak Akbar baik sekali  
Subjek (S) Predikat (P)

(15a) Anaknya orang itu lima  
S P

Hadirnya morfem *-nya*, yang disebut *ligatur (ligature)* (William Foley, 1976), dalam konteks bahasa-bahasa Austronesia berfungsi sebagai perekat antara kata benda pertama dengan kedua. Dengan absennya ligatur ini subjek/referen kalimat

Ibu Ali Sadikin sedang sakit  
S P

bisa (i) istri Ali Sadikin atau (ii) Ibu Bapak Ali Sadikin. Dengan hadirnya *-nya* maknanya menjadi jelas.

Tampaknya permasalahan ini perlu diteliti kembali, teristimewa dalam rangka pembakuan tata bahasa baku bahasa Indonesia.

## 2. Fokus dan Latar

Pengertian konsep fokus tidak ubahnya seperti konsep tema dalam hal longgarnya kriteria. Hal ini terbukti adanya perbedaan antara seorang ahli

bahasa dengan ahli bahasa yang lain.

Gloria Poedjosoedarmo (1974, 1981) berpendapat bahwa fokus selalu jatuh pada unsur terakhir. Dalam disertasinya yang berjudul *Role Structure In Javanese* (1974: 227) dia mengatakan:

The term Information Focus refers to that element of information which the speaker wishes to have the listener regard as the most informative. In Javanese the information focus is always in the second part of an utterance. It never occurs first.

Selanjutnya, dalam bukunya *Beberapa Masalah Sintaksis Bahasa Jawa* (1981), dia mengutamakan bahwa di dalam kesatuan informasi fokusnya selalu pada unsur terakhir.

Ahli bahasa yang lain, Soemarmo (1970: 3 – 5) berpendapat lain tentang fokus. Dia memberikan contoh kalimat (3) di bawah ini (untuk mudahnya saya beri nomor (S3) untuk membedakan kalimat (3) Kridalaksana).

(S3) Anak itu *yang* membeli sepatu kemarin.

Yang disebut fokus, menurut dia, ialah frasa nomina yang berada di depan perkataan *yang*.

The NP which precedes the JANG- phrase in sentence.

(3) is referred to as the focus of the sentence.

Sedangkan ahli bahasa yang lain, William Foley (1976:86), mengatakan:

Actor Focus refers to the inflection of a verb in a clause in which the semantic role of Actor is Topic, while Patient Focus refers to the inflection of a verb in which the role of Patient is Topic.

Di sini jelas bahwa penekanan frasa nomina tertentu akan ditandai hadirnya morfem-morfem yang sesuai dalam kata kerja.

Dengan mengetengahkan pendapat ketiga ahli bahasa tersebut, kita akan lebih berhati-hati dan cermat serta tepat dalam penentuan kriteria fokus.

Sehubungan dengan latar, Brown dan Yule (1983:29) mengambil sikap pragmatis. Mereka mengatakan, dengan mengutip Givón (1979:50) bahwa *presupposition*:

is defined in terms of assumptions the speaker makes about what the hearer it likely to accept without challenge.

Jadi prinsipnya antara pembicara dan pendengar harus memiliki *common ground* agar ujaran-ujaran dapat dimengerti.

### 3. Masalah Pendekatan dari Data Ahli Tata Bahasa dan Ahli Wacana

Ahli tata bahasa pada galibnya mengkhususkan dirinya dalam analisis hubungan kata-kata dalam kalimat (*internal-sentential construction*). Contoh-contoh kalimat yang dia ambil seringkali didasarkan pada atau disesuaikan dengan kehendaknya, teristimewa kalimat-kalimat yang dianggap baku. Sedangkan seorang ahli analisis wacana cenderung meneropong kalimat-kalimat dari segi fungsinya, artinya kalimat-kalimat tersebut diangkat dari kehidupan sehari-hari. Konsekuensinya ialah bahwa data yang terekam mencerminkan ujaran-ujaran sehari-hari dalam situasi nyata (*psychologically real*). Oleh karena itu, kemungkinan besar bahwa data tersebut berisi juga kalimat-kalimat yang tidak baku. Seyogianya juga dicoba menganalisis struktur puisi ditinjau dari analisis wacana, sehingga bahasa seorang penyair dapat pula dimasukkan dalam teori kebahasaan. Di sinilah letak perpaduan antara teori bahasa, semantik dan sastra (pendekatan terpadu).

### 3. Simpulan

Kita telah memperhatikan bersama bahwa *topik – komen – tema – rema, fokus – latar* dan *subjek – predikat* adalah istilah-istilah yang sering dihubungkan dengan jenis-jenis informasi dalam kalimat dimana konsepnya berpijak pada teori-teori yang berlainan. Masing-masing mengajukan dalih sendiri-sendiri guna mempertahankan serta menunjukkan keunggulan dan ketepatan teorinya. Lahirnya teori-teori ini antara lain karena timbulnya bermacam-macam aliran tata bahasa: dari aliran *Generative Transformational Grammar* sampai dengan *Generative Semantics* dan *Grammatical Relations*. Munculnya aliran-aliran ini didorong oleh adanya keinginan mereka untuk memasukkan arti dalam linguistik. Keanekaragaman ini mengundang kritikan dan ada sementara ahli bahasa yang menamakan praktik semacam ini dengan *gymnastic semantics*.

Kesimpulan lain yang dapat kita tarik dari persoalan data ialah, walaupun perbedaan kedua pandangan tersebut terhadapnya sangat mencolok, kedua macam data itu tidak perlu dipertentangkan, kecuali kalau kita mengambil sikap yang ekstrim. Di samping itu kita harus menyadari bahwa memang ada bahaya yang mungkin timbul bila kita memperhatikan ciri-ciri kedua data tersebut. Misalnya saja seorang ahli analisis wacana akan menyangkal atau menolak data yang disusun oleh seorang ahli tata bahasa.

Terlepas dari adanya segala macam kesulitan pendekatan dan data, apa yang telah dirintis oleh Kridalaksana dan teman-teman perlu dikembangkan

dan diperdalam teorinya. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan suatu konsep yang ajeg dan tepat untuk dipakai sebagai salah satu pegangan dalam menyusun tata bahasa baku bahasa Indonesia dan sekaligus kita dapat mengembangkan cakrawala baru, terutama dalam penelitian. Misalnya, mungkin kita memadukan teori tata bahasa dengan teori analisis wacana. Paling tidak kita dapat menggali teori wacana dalam membantu pembakuan tata bahasa baku bahasa Indonesia.

### PUSTAKA ACUAN

- Badib, Abbas Achmad. 1980 "Some Major Construction in Javanese: A lexicon Approach." Disertasi Ph.D.: Monash University, Melbourne.
- Brown, Gillian and Yule, George. 1983. *Discourse Analysis*. London: Cambridge University Press.
- Foley, William. 1967. *Comparative Syntax in Austronesian*. Disertasi Ph.D. Berkeley: University of California.
- Jespersen, O. 1924. *The Philosophy of Grammar*. London: Allen dan Unwin.
- Kridalaksana, Harimurti dkk. 1984. *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia Sintaksis*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lyons, John. 1968. *Theoretical Linguistics*. Cambridge: University Press.
- Lyons, John. 1977. *Semantics*. Volume 2. Cambridge: University Press.
- Poedjosoedarmo, Gloria Riser. 1974. *Role Structure in Javanese*. Disertasi Ph.D., Cornell University.
- Soemarno, M. 1970. "Subject-Predicate, Focus-Presupposition, and Topic-Comment in Bahasa Indonesia and Javanese". Disertasi Ph.D. Los Angeles: Universitas of California.

## BEBERAPA CATATAN MENGENAI PEMERIAN KALIMAT BAHASA INDONESIA

Sudaryanto

### A. Pendahuluan

Dengan judul itu setidaknya-tidaknya ada dua konsep dasar mengenai bahasa Indonesia (b I) yang melibatkan, yaitu konsep "pemerian" dan "kalimat". Karena catatan ini merupakan tanggapan terhadap *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia Sintaksis* TBDBIS, maka sudah selayaknya arahnya berpedoman pada apa yang ditanggapi, yaitu pandangan Harimurti Kridalaksana dkk. (seterusnya disingkat HK) mengenai kalimat b I. Dalam pada itu, berhubung catatan ini juga diharapkan membantu dalam upaya mencari kesepakatan mengenai garis besar tata bahasa baku b I, maka hal yang terakhir ini pun dijadikan pedoman pembicaraan pula.

### B. Butir-butir Pokok Pandangan HK mengenai Kalimat B I

Dalam rangka penelitian mengenai TBDBIS HK (1984) berusaha memaparkan perihal kalimat dalam bab tersendiri (Bab VI) pada 27 halaman dari 271 halaman uraian yang ada.

HK berpandangan bahwa kalimat itu:

- 1) adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri;
- 2) mempunyai pola intonasi final;
- 3) terdiri dari klausa baik secara aktual maupun secara potensial;
- 4) hanyalah merupakan salah satu satuan yang tetap terikat pada satuan yang lebih besar atau berdiri sendiri hanya secara relatif;
- 5) dapat ditandai batasnya baik oleh peneliti maupun secara intuitif oleh bahasawan;

- 6) dalam ragam tulis sebagian besar ditandai oleh huruf kapital di pangkalnya dan oleh tanda-tanda akhir seperti titik, tanda seru, tanda tanya, atau tidak ditandai apa-apa di belakangnya;
- 7) harus dibedakan dari ujaran, yaitu regangan wicara bermakna yang dibatasi oleh kesenyapan.

Bertolak dari pandangan itu, dibedakan berbagai jenis kalimat. Dalam hal ini, jenis-jenis kalimat dapat ditandai oleh :

- 1) jumlah klausa di dalamnya (kalimat tunggal-bersusun-majemuk);
- 2) struktur klausanya (kalimat lengkap-tak lengkap);
- 3) amanat wacananya (kalimat deklaratif-interogatif-imperatif-dan yang lain).

Selanjutnya, dalam pasal tersendiri dibicarakan perihal intonasi. Dikatakan antara lain:

- 1) intonasi itu ciri utama kalimat yang membedakan secara mutlak dengan klausa;
- 2) dapat diuraikan atas ciri-ciri prosodinya, yaitu titi-nada (rendah-sedang-tinggi), tekanan (keras-lentur), dan tempo (lama-sebentarnya waktu) dalam ujaran;
- 3) satuan lain dalam intonasi ialah kontur, yaitu urutan ciri-ciri suprasegmental yang meliputi sebagian atau seluruh ujaran tertentu.

Pada dua pasal terakhir dipaparkan:

- (1) jenis-jenis informasi dalam kalimat; dan
- (2) pola-pola kalimat.

Tentang jenis-jenis informasi dibedakan adanya tema (apa yang dibicarakan) dan rema (apa yang dikatakan tentang tema), fokus (aspek paling penting yang dibicarakan) dan latar, fokus kontras (satuan informasi yang mengandung unsur positif dan negatif), dan penegasan (bagian yang ditonjolkan dengan memberi penekanan).

Tentang pola-pola kalimat dikatakan "terungkap dari jumlah klausa, struktur klausa, dan amanat".

### C. Sekilas Pertimbangan Umum

Dari yang terpapar dalam Bab VI itu, HK tampaknya telah berusaha menyajikan secara menyeluruh berbagai aspek pokok kalimat BI. Bahwa hanya dengan 27 halaman dari 271 halaman yang ada aspek-aspek pokok itu dapat disajikan, hal itu patutlah dihargai, mengingat masalah kalimat dalam rangka sintaksis, seperti umum diketahui, masih merupakan masalah yang cukup

rawan; terlebih-lebih untuk bl. Di satu pihak, teori yang ada cukup beraneka (lihat misalnya E.A. Moravcsik & J.R. Wirth (ed.) 1980); di pihak lain, perian yang monografis tidak memadai jumlahnya.

Tentulah dapat dimaklumi bahwa uraian yang menyeluruh tidak berarti – dan sering memang tidak perlu – uraian yang mendalam. Dengan demikian, kelirulah orang sekiranya mengharapkan mendapatkan uraian yang mendalam untuk perian kalimat b I hanya dengan menggunakan 27 halaman itu. Namun, uraian yang baik – tidak peduli mendalam atau tidak dan menyeluruh atau tidak – selalulah uraian yang beralaskan pada konsep-konsep dasar yang jelas-tegas. Sebagian ini masalah teori dan sebagian lagi – akan tetapi sebagian yang lebih besar – adalah masalah metodologi. Mengenai hal yang terakhir ini beberapa catatan perlu diberikan. Namun, sebelum sampai kepada catatan yang bagaimanapun juga bersifat khusus itu, sebuah catatan umum perlu diberikan dahulu. Catatan umum yang dimaksud adalah mengenai konsep "pemerian".

#### D. Pemerian

Istilah lain yang umum dikenal untuk *pemerian* adalah *pendeskripsian* yang tentu saja berarti 'hal memerikan' atau 'hal mendeskripsikan'. Dalam hal ini, yang diperikan atau dideskripsikan adalah bahasa beserta satuannya, antara lain kalimat. Pandangan umum di kalangan para peneliti bahasa mengatakan bahwa memerikan atau mendeskripsikan tidak lain adalah menggambarkan (bahasa) sebagaimana adanya (cf. Sudaryanto, 1985:7). Dalam hubungannya dengan hal ini, linguistik sebagai ilmu bahasa yang bersifat memerikan itu disebut "linguistik deskriptif" dan memiliki imbangannya: "linguistik preskriptif", yaitu linguistik yang tidak memerikan bahasa sebagaimana adanya, melainkan memerikan bahasa sebagaimana seharusnya sesuai dengan ukuran yang diperkenankan untuk peristiwa kebahasaan tertentu yang dipandang baik dan benar. (cf. D. Crystal, 1980:107; 272; O. Jespersen, 1956: 19 – 20).

Walaupun konsep "sebagaimana adanya" itu sudah umum dikenal dan diterima, namun bukan berarti hal itu jelas dan tanpa persoalan apa-apa yang cukup mendasar. Pandangan filosofis tertentu yang tanpa disadari dianut oleh peneliti bahasa menentukan batasan "sebagaimana adanya" itu (cf. J.W.M. Verhaar, 1970). Orang dapat membayangkan, misalnya, bahwa perian bahasa itu seperti layaknya gambar potret bagi benda tertentu; dan memerikan bahasa menjadi semacam mengidentifikasi gambar potret itu lewat bagian-bagian yang kelihatan mengelompokkan dalam satu kelompok

bagian-bagian yang memiliki kesamaan atau kemiripan. Akan tetapi, bayangan semacam itu tidak sepenuhnya benar. Bahasa tidak hanya sekadar seperti potret, akan tetapi lebih dari itu. Bahasa bersifat dinamis dan bersifat seperti organisme sebagaimana pemiliknya, yaitu manusia (cf. T. Givón, 1984: 29-30). Dengan demikian, perian bahasa tidak terbatas pada memaparkan apa dan bagaimananya bahasa, akan tetapi juga memaparkan mengapanya bahasa. Dalam rangka pembicaraan sekarang ini "bahasa" tentu saja dapat dan layak dibaca "kalimat".

Sambil mengandaikan dapat memahami dan mengatasi perbedaan pandangan filosofis serta tanpa memperhitungkan kelemahan pribadi masing-masing peneliti bahasa, kiranya dapat disepakati bahwa pemerian terhadap bahasa, dan lebih sempit lagi terhadap kalimat, berarti pemerian terhadap unsur-unsur pokok yang menjadikan bahasa atau kalimat sebagaimana adanya, menjadikan bahasa atau kalimat mempunyai identitas. Unsur pokok yang dimaksud adalah unsur yang adanya mutlak. Dalam hal ini apa yang terdapat dalam ilmu ukur dapat dijadikan pembanding. Jajaran genjang, misalnya, dapat disebut jajaran genjang karena ada panjang, lebar, dan tingginya. Bagi jajaran genjang, panjang dan lebar itu unsur pokok; bagi kubus, kecuali panjang dan lebar juga tinggi yang merupakan unsur pokoknya. Unsur yang bersangkutan berdiri sendiri tidak dijabarkan dari yang lain. Unsur pokok itu dapat disebut dimensi atau matra. Dengan demikian, memerikan bahasa (atau kalimat) tidak lain berarti memerikan matra-matranya.

Dalam hal ini konsep matra yang diajukan oleh filsuf D.C. Mulder (1966) kiranya dapat digunakan. Konsep matra itu mengenai realitas atau kenyataan apa pun, termasuk bahasa; sehingga konsep itu dapat disebut matra kenyataan atau menurut dia dimensi kenyataan. Sesuatu itu dapat diidentifikasi atau diberi ketentuan sebagai suatu kenyataan kalau memang memiliki matra-matra tertentu. Menurut Mulder, matra yang harus ada berjumlah empat, yaitu universalitas atau keumuman atau modalitas atau kebeginian, individualitas atau kekhususan atau keininan, kausalitas atau sebabakibat, dan temporalitas atau kewaktuwan. Dengan demikian, pemerian kalimat dalam rangka sintaksis dapat dipandang lengkap kalau keempat matra kalimat dapat dipaparkan semua. Dapat ditentukan secara deduktif demikian: kalau kalimat itu dapat diakui identitasnya, yaitu sebagai kalimat, maka dia memiliki matra keumuman, kekhususan, sebabakibat, dan kewaktuwan, yang kesemuanya tentu saja bersifat kalimat.

Keterangan singkat dapat dikemukakan di sini. Matra keumuman (universalitas, modalitas) adalah matra yang memungkinkan wujud satuan kalimat

yang berbeda-beda itu dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok jenis tertentu karena bagaimanapun juga wujud yang berbeda-beda itu memiliki sifat umum atau keumuman yang sama. Tutaran *Dia duduk, Kemarin ada di sini mereka, Anjingnya galak sekali, Orang-orang berkumpul di balai desa, dan Saya diberi hadiah olehnya banyak sekali*, misalnya, dapat disatukelompokkan sebagai kalimat tunggal, karena kesemuanya memiliki satu klausa dengan unsur fungsi sintaktik yang sama, yaitu sebuah subjek dan sebuah predikat.

Matra kekhususan (individualitas) adalah matra yang memungkinkan satu kalimat itu dapat dibedakan dengan satuan lingual yang lain, misalnya kata dan frasa. Kalimat disebut kalimat karena dia memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh satuan lingual yang lain. Hal ini juga berlaku untuk bagian-bagian kalimat itu sendiri. Bagian kalimat yang satu dapat diidentifikasi sebagai bagian dan disebut dengan istilah tertentu karena bagian itu memiliki kekhususan yang berbeda dengan bagian yang lain pula.

Dalam sejarah filsafat sering matra keumuman dan kekhususan itu dipertentangkan atau dihubungkan sedemikian sehingga yang satu seakan-akan bergantung pada yang lain; jadi, yang satu otonominya sebagai matra hilang tenggelam dalam otonomi matra yang lain. Akan tetapi, dengan perenungan yang lebih menitik dalam ditunjukkan bahwa masing-masing adalah benar-benar matra bagi setiap kenyataan (lihat lebih luas dalam D.C. Mulder, 1966:42-48).

Adapun matra sebabakibat (kausalitas) adalah matra yang memungkinkan dihubungkannya wujud kalimat yang satu dengan wujud kalimat yang lain atau dengan wujud satuan lingual yang lain karena memang setiap wujud kalimat tertentu ditentukan kekhasan atau karakteristiknya oleh yang lain. Istilah-istilah semacam *transformasi, derivasi, elipsis, dan santiran pronominal*, misalnya, berhubungan langsung dengan matra sebabakibat itu.

Akhirnya, matra kewaktuian adalah matra yang juga memungkinkan dihubungkannya wujud kalimat atau bagian kalimat yang satu dengan yang lain. Hanya, hubungan itu bukan hubungan penentuan wujud, melainkan hubungan kelebihdahuluan adanya.

Ada tiga catatan yang dapat ditambahkan di sini. Pertama, khusus tentang matra kewaktuian; kedua, tentang hubungan matra kewaktuian dengan matra sebabakibat; dan ketiga, sifat matra-matra itu bila diperbandingkan satu sama lain.

Sebagaimana tercermin dari nama kewaktuian (temporalitas), matra itu mengenai waktu, yaitu waktu adanya. Dalam linguistik, umum dikenal ada-

nya linguistik diakronik disamping linguistik sinkronik. Dikatakan bahwa linguistik diakronik adalah linguistik yang menyelidiki "perkembangan bahasa"; sedangkan linguistik sinkronik adalah linguistik yang menyelidiki setiap bahasa "tanpa memperhatikan perkembangan yang terjadi pada masa lampau" (lihat J.W.M. Verhaar, 1977:6-7). Apakah dengan memperhitungkan matra temporalitas berarti pemberian kalimat harus bersifat diakronik? Jawabnya adalah tidak. Perlu diketahui bahwa waktu ada bermacam-macam (lihat S.A. Goudsmit & R. Claiborne, 1983). Dua di antaranya ialah waktu yang kita kenal dengan sangat baik, yaitu waktu kosmik dan waktu biologis. *Dahulu (kemarin, tadi), sekarang (kini), kelak (besuk, nanti)* adalah waktu kosmik dan *masa bayi, bocah, remaja, dewasa, tua* adalah waktu biologis. Dikotomi diakronik sinkronik adalah mengenai waktu kosmik bagi kehidupan bahasa tertentu. Adapun linguistik ontogeni yang menyelidiki perolehan bahasa di sepanjang perkembangan usia seorang manusia adalah mengenai waktu biologis. Matra kewaktuwan yang dimaksudkan di sini bukan bersifat kosmik atau biologis, melainkan bersifat lingual; jadi, waktu lingual. Sesuai dengan sifat bahasa yang diartikulasikan itu linear, maka waktu lingual adalah terlihat adanya pada urutan unsur-unsur (atau bagian-bagian atau konstituen-konstituen) kalimat. Pemyataan auditif "konstituen yang satu diucapkan lebih dahulu daripada yang lain" yang sering diubah sebagai pernyataan visual "konstituen yang satu berada di depan yang lain" adalah pernyataan yang langsung mengenai matra kewaktuwan itu.

Sering matra kewaktuwan dikacaukan dengan matra sebabakibat. Yang ada lebih dahulu dipandang merupakan asal atau sebab dari yang ada lebih kemudian. Hal itu tidaklah benar. Konsep anafora-katafora, perulangan progresif-regresif, dan kalimat majemuk akibat-sebab, misalnya, membuktikan bahwa kedua matra itu memiliki identitas sendiri-sendiri.

Matra keumuman dan kekhususan menunjukkan bahwa kalimat itu bersifat statis, sedangkan matra sebabakibat dan matra kewaktuwan menunjukkan bahwa kalimat itu bersifat dinamis. Dengan kedua matra pertama orang tidak dapat melihat hubungan-hubungan, kecuali hal ada serta otonominya; dan baru dengan kedua matra yang terakhirlah hubungan tertentu dapat terlihat.

Bila konsep mengenai matra kenyataan itu dapat diterima kebenarannya, maka apa yang diperikan oleh HK mengenai kalibat BI dapat dipertimbangkan kebaikannya. Ada dua hal yang dapat dipertimbangkan. Pertama, kelengkapan perian matranya; dan kedua, kesaksamaan perian setiap matranya. Yang pertama bersangkutan dengan pertanyaan: adakah keempat matra itu

diperikan? Yang kedua bersangkutan dengan pertanyaan: adakah setiap mata itu dijelaskan seluk-beluknya secara mendasar (meskipun hanya secara singkat)?

Hanya, sebelum pertimbangan itu diberikan, masih ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu orientasi pemerian – orientasi yang semestinya didasarkan pada fakta kehidupan bahasa yang diperikan itu. Orientasi itu akan menentukan titik berat dan fokus penelitian setiap mata yang dimaksud. Apakah orientasi pemerian itu semata-mata pada pembuatan semacam potret atau rekaman peristiwa sentensial BI dewasa ini? Ataukah pada penyusunan generalisasi teori mengenai bagaimana pemerian kalimat dapat dilakukan? Ataukah pemberian keringanan bagi upaya mencari semesta sentensial kalimat bahasa manusia? Ketiganya adanya sah dalam linguistik. Orientasi yang pertama sudah ada sejak linguistik masih mencari bentuknya; orientasi yang kedua muncul sekitar tahun 50-an; dan orientasi yang ketiga muncul pada awal tahun 60-an dan kemudian makin kuat sejak tahun 1967 dengan adanya proyek pencarian semesta bahasa (*language universals*) yang dilaksanakan sekitar 9 tahun oleh Universitas Stanford, USA, dengan pemimpin proyek Profesor J.H. Greenberg (lihat Greenberg (ed.), 1978). Bila orientasi yang pertama dan kedua munculnya akibat dari kesadaran peneliti bahasa sendiri dalam menghadapi objek penelitiannya, maka orientasi yang ketiga munculnya akibat kontak para peneliti bahasa dengan ahli psikologi. Charles Osgood, seorang ahli psikologi, sangatlah terkesan pada apa-apa yang dikemukakan oleh para linguis pada Seminar Psikolinguistik yang diselenggarakan di Bloomington pada musim panas tahun 1951 karena metode kerja para linguis itu hebat dan hasilnya memang sangat baik. Dia mengomentari dengan suatu pertanyaan yang cukup menyentak; "Dapatkah linguis dewasa ini (tahun 1951) – menceritakan sesuatu tentang *semua* bahasa? Hal itu dapat menjadi perhatian tertinggi bagi psikolog." Terhadap hal itu, linguistik dari periode itu tidak mempunyai jawaban yang nyata.

Suara psikolog Osgood itu sebenarnya suara setiap orang yang ingin melihat manfaat yang paling besar dan mendasar hasil jerih payah para ahli bahasa bagi umat manusia pemilik bahasa. Suara itu memperingatkan para ahli bahasa bahwa kerja penelitian habis-habisan terhadap data yang berlimpah dengan menggunakan metodologi yang tajam serta teori yang kukuh berwibawa belumlah cukup. Orientasi yang tepat haruslah diperhitungkan pula dan mestilah menjiwa penelitian bahasa.

Dalam rangka pemerian kalimat BI khususnya dan satuan-satuan lingual BI pada umumnya, orientasi yang memberikan kemungkinan sebesar-besarnya

bagi pemanfaatan hasil pemerian itu bagi bangsa Indonesia khususnya dan bagi kemanusiaan pada umumnya kiranya layak bahkan wajib dipilih.

Identitas bahasa dengan satuan-satuan lingualnya dapat dilihat dengan dua cara, yaitu dengan melihat hubungannya dengan akal-budi yang "memikirkan" segalanya itu dan dengan melihat hubungannya dengan penyampaian hasil kerja akal budi (dari hubungan antaranggota keluarga *somah* sampai dengan antar-anggota masyarakat suatu bangsa bahkan antarbangsa). Cara yang pertama menjadikan bahasa dapat disebut "sistem referensial", cara yang kedua menjadikan bahasa dapat disebut "alat komunikasi" (cf. Sudaryanto, 1983: 168). Dalam rangka semangat membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai suatu bangsa yang memiliki wawasan Nusantara, pemerian BI beserta dengan satuan-satuan lingualnya, khususnya kalimatnya, mestilah dibimbing oleh kesadaran mengenai bahasa sebagai sistem referensial dan alat komunikasi itu. Dalam rangka semangat itu pula terimplikasikan betapa pentingnya dalam kerja penelitian yang memerikan itu si peneliti menitikberatkan dan memfokuskan penelitiannya pada bagian-bagian yang memungkinkan semangat pembangunan itu diwujudkan. Dengan kata lain, dengan dan dalam hasil pemerianya peneliti harus mampu menunjukkan bagaimana BI berlaku sebagai penghadir dan pengembang akal budi manusia Indonesia — manusia Indonesia yang mau tidak mau mesti harus meningkatkan kerja sama antarmereka sendiri demi cita-citanya.

Dengan demikian, pemerian bahasa yang kelihatannya objektif itu sebenarnya tidaklah pernah netral. Secara etis, dia terikat pada kepentingan-kepentingan yang tentu saja harus mulia dan luhur sesuai dengan kepentingan bangsa yang memiliki bahasa itu serta kepentingan kemanusiaan. Keterikatan itu semakin kuat manakala pemerian itu dilakukan oleh ahli bahasa yang memiliki bahasa yang diteliti dan diperikan itu. Disadari atau tidak oleh penelitiannya, pemerian bahasa — memakai istilah van Peursen (1976) — tidaklah pernah substansial; pemerian itu selalu fungsional.

Sehubungan dengan itu, sebelum pemerian dilakukan, kita melihat terlebih dahulu secara kritis kehidupan BI di tengah-tengah bahasa lain yang juga digunakan dan dikenal oleh para pemakai BI, kiranya mutlak perlu. Mengapa? Karena bahasa-bahasa lain itu (sekian bahasa daerah tertentu dan beberapa bahasa asing modern tertentu) juga menentukan wujud kehadiran dan perkembangan akal-budi manusia Indonesia, yang selanjutnya juga menentukan kadar peningkatan kerja sama antarmereka.

Konsekuensinya ialah: perian tentang BI itu harus memiliki kemungkinan sebesar-besarnya untuk diperbandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain itu.

Ini berarti bahwa dalam pemerian, pandangan-pandangan semesta dan corakan bahasa yang biasa dibicarakan dalam rangka tipologi (*language typology, typological linguistics*) haruslah digunakan pula. Pandangan semesta dan corakan bahasa akan mampu membimbing peneliti ke pemilihan aspek penelitian dalam skala prioritas dan porsi penelitian yang cukup dapat dipertanggungjawabkan.

Demikianlah, kiranya dapat disimpulkan, untuk memerikan bl beserta satuan-satuan lingualnya, khususnya kalimatnya, perlu diperhatikan tiga asas berikut:

- (1) asas kematraan atau asas dimensionalitas;
- (2) asas kemanfaatan atau asas fungsionalitas; dan
- (3) asas kecorakan atau asas tipologikalitas.

Berdasarkan ketiga asas itu, berikut akan dipaparkan tanggapan atas hasil penelitian HK tentang kalimat bl.

### E. Tanggapan Kritis Konsep Kekalimatan HK

Pada bagian B makalah ini telah dikemukakan butir-butir pokok pandangan HK mengenai kalimat bl. Urutan penyajiannya membayangkan penalaran yang umum berlaku, yaitu:

- (1) identifikasi objek penelitiannya (dalam hal ini kalimat);
- (2) pembagian jenis dan subjenisnya; dan
- (3) hal-hal tertentu yang khas mengenai dan atau bersangkutan dengan objek penelitian itu (dalam hal ini intonasi, jenis-jenis informasi dalam kalimat dan pola-pola kalimat).

Sesuai dengan ketentuan yang tercermin pada judul makalah, tanggapan ini hanya akan mengenai butir 1 dan 2.

#### 1. Identifikasi Kalimat

Dalam upaya mengidentifikasi kalimat, HK melakukannya dengan melihat ciri-cirinya. Dan sebagaimana ditunjukkan pada halaman 2 makalah ini, HK mengemukakan 7 buah ciri. Perlu dicatat bahwa ke-7 ciri itu dirumuskan dalam satu kebulatan pernyataan definisi. Kesan selintas menunjukkan tidak ada ciri yang utama dan yang kurang utama, kecuali bahwa hanya dalam keber-samaanlah ciri-ciri itu berperan sebagai ciri. Sambil menunjuk kembali kepada ciri-ciri itu dan sebagai titik tolak pembicaraan selanjutnya, dapat dikutipkan keseluruhan pernyataan definisi itu.

Kalimat adalah (1) satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, (2) mempunyai pola intonasi final, dan (3) baik secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa. Dalam pandangan gramatikal yang menganggap tata bahasa sebagai subsistem yang hierarkis, kalimat hanyalah (4) merupakan salah satu satuan yang tetap terikat pada satuan yang lebih besar, atau hanya berdiri sendiri secara relatif, tetapi (5) dapat ditandai batasnya baik oleh peneliti maupun secara intuitif oleh bahasawan. Dalam ragam tulis kalimat itu (6) sebagian besar ditandai oleh huruf kapital dipangkalnya dan oleh tanda-tanda akhir seperti titik, tanda seru, tanda tanya atau tidak ditandai apa-apa (misalnya, pada kalimat tak lengkap) di belakangnya.

Kalimat (7) harus dibedakan dari ujaran dan yang dimaksud dengan ujaran adalah regangan wicara bermakna yang dibatasi oleh kesenyapan.

Ciri (4) boleh dikatakan rumusan lain bagi ciri (1); dan kecuali ciri (6) kesemuanya untuk kalimat yang terdapat dalam ragam bukan tulis. Walaupun kesan selintas tidak ada ciri yang utama, namun dari rumusan di atas kelihatan ciri yang paling penting agaknya (1), (2), dan (3); jadi, keberdiriannya sendiri, pola intonasinya yang final, serta unsurnya yang berupa klausa.

Sayang, pernyataan itu tidak didahului dan atau diikuti oleh penjelasan yang memadai. Pernyataan itu berdasarkan sekian pengandaian yang ketentuannya diserahkan pada kecerdasan para pembaca untuk menebak maksudnya.

Mengenai keberdian sendiri yang relatif, misalnya, hanya dikatakan dengan rumusan lain "tetap terikat pada satuan yang lebih besar". Tidak dijelaskan keterikatan itu keterikatan yang bagaimana dan satuan yang lebih besar itu satuan apa. Apalagi dinyatakan bahwa kalimat hanyalah merupakan salah satu satuan lingual. Apa bedanya dengan satuan-satuan lain yang juga dapat berdiri sendiri secara relatif? Penentuan "berdiri sendiri" semakin dibutuhkan mengingat bahwa dipandang dari sudut pandang tertentu setiap pengakuan bahwa sesuatu itu satuan bahasa (satuan lingual, istilah saya) pastilah memiliki status berdiri sendiri secara relatif; artinya, memiliki otonomi sedemikian sehingga dapat diakui identitasnya sebagai satuan lingual tersendiri.

Mengenai pola intonasi final tidak ada penjelasan. Pernyataan itu menimbulkan kesan kepada orang bahwa mestilah ada pula pola intonasi yang tidak final. Sayang, mengenai kefinalan itu tidak ada penjelasan lebih lanjut. Pada pasal mengenai intonasi, hal itu tidak dibicarakan; padahal dikatakan intonasi merupakan pembeda mutlak antara kalimat dengan klausa.

Pernyataan yang terakhir ini pun mengundang pertanyaan yang kelihatan

agak konyol tetapi sebenarnya cukup penting dan sah; yaitu: "Apakah kalimat adalah klausa yang berintonasi atau klausa adalah kalimat yang tanpa intonasi?" dan "Apakah setiap kalimat yang dihilangkan intonasinya adalah klausa?" Bila jawabannya "ya", segi kuantitas masih tidak terungkap. Jawaban semacam itu bila diberikan serta-merta akan menuntun ke kesimpulan bahwa sebuah kalimat harus terdiri atas sebuah klausa — apa pun jenis klausa itu — dengan segala akibatnya.

Selanjutnya mengenai maksud "secara potensial" dalam hubungannya dengan analisis unsur kalimat yang berupa klausa itu? Sejauh mana pula kepotensialan itu secara metodologis dapat diterima sebagai dasar bagi identifikasi kalimat? Bukankah pengertian "potensial" dapat dipandang bahwa yang memiliki sifat itu tidak berada dalam peristiwa yang nyata; padahal, kalimat adalah betul-betul satuan lingual yang nyata, terjadi, dan secara empiris dapat (dan memang) dihayati?

Adapun mengenai intuisi, timbul tanda tanya besar tentang maksud penunjukan intuisi bahasawan (penutur, istilah operasional saya) untuk menentukan batas kalimat, mengingat bahwa memang intuisi penutur mampu mengetahui batas setiap satuan lingual. Bukankah tanpa pengetahuan intuitif penutur tidak akan pernah dapat menyusun unsur-unsur tuturan (yang pada hakikatnya satuan lingual itu) menjadi tuturan (yang pada hakikatnya satuan lingual itu) menjadi tuturan bermakna (yang pada hakikatnya satuan lingual yang lebih besar itu) sesuai dengan maksud penuturannya?

Di samping itu, disebut pula "kesenyapan" sebagai ciri ujaran. Sementara itu, ujaran dikatakan, dengan agak bersifat wanti-wanti, harus dibedakan dari kalimat. Pada pasal tentang intonasi dibedakan antara "kesenyapan awal" dengan "kesenyapan akhir" di satu pihak dan antara "kesenyapan total" dengan "kesenyapan sementara" di pihak lainnya. Lalu, tak peduli apa kesenyapannya, asal ujaran itu terletak di antara dua kesenyapan maka dia disebut kontur. Kata HK: "Arus ujaran yang didahului dan diakhiri oleh kesenyapan . . . disebut kontur" (HK, 1984:233). Sementara itu, pada halaman sebelumnya kontur didefinisikan sebagai "urutan ciri-ciri suprasegmental yang meliputi sebagian atau seluruh ujaran tertentu". (Jadi, menurut penalaran definisi itu arus ujaran sama dengan urutan ciri-ciri suprasegmental [sic!])

Lepas dari dua definisi kontur yang agak membingungkan, hal "kesenyapan" itu sendiri patut mendapatkan perhatian. Pertama, batasan mengenai ke-totalan dan kesementaraan kesenyapan; kedua, kemiripan kesenyapan dengan akhir dari intonasi final. Sayang, kedua hal itu tidak ada penjelasannya sedikit pun. Padahal wanti-wanti keharusan pembedaan antara ujaran dengan

kalimat dalam rangka pembicaraan kalimat baru berarti bila kedua hal itu dijelaskan secukupnya. Orang mungkin dapat diharapkan memahami kedua hal itu lewat uraian tentang empat jenis pola kontur utama, yang pada pokoknya dapat ditebak bahwa kontur tidak sama dengan kalimat. Akan tetapi, hal itu kurang meyakinkan, setidaknya-tidaknya bagi orang yang menganggap bahwa mungkin ada kesenyapan tertentu yang pasti adalah juga akhir dari intonasi final. Ataukah mungkin dapat dikatakan analisis kesenyapan dengan konturnya berbeda total dengan analisis intonasi final dengan kalimatnya karena titik tolak yang berbeda? Dengan meminjam istilah K.L. Pike (1982), analisis yang pertama lebih bersifat etik dan yang kedua lebih bersifat emik? Akan tetapi, kalau demikian halnya, maka justru wanti-wanti itu tidak relevan. Daripada wanti-wanti agar membedakan, lebih tepat agaknya justru wanti-wanti agar menghubungkan; dan dalam hal ini barangkali penghubungan itu adalah penghubungan pendasaran.

Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena pernyataan yang ada tidak didahului dan atau diikuti oleh penjelasan yang memadai; bahkan, ada yang tidak disertai penjelasan sama sekali.

Bila kita dapat bersetuju bahwa uraian hasil penelitian ilmiah yang deskriptif itu tidak kurang dan tidak lebih adalah laporan apa adanya yang "tidak ditujukan kepada pribadi-pribadi yang bernama" (konsep terakhir ini saya ambil dari van Peursen, 1985: 18), maka kejelasan istilah-istilah kunci sudah selayaknya mewarnai setiap bagian laporan itu.

Kesan simpulan saya, laporan itu dibuat dengan ketergesaan dalam kerja tim yang belum sempat melakukan penyuntingan.

Namun, lepas dari semua pertanyaan itu, satu hal lagi dapat disimpulkan ialah bahwa titik berat batasan kalimat pada HK itu adalah pada segi formal, mengenai bentuk yang "tampak" dan dapat diuji. Perhatikanlah ciri (1) atau (4) berdiri sendiri secara relatif, (2) pola intonasi final, dan (3) terdiri dari klausa. Bahkan ciri lain yang juga dikemukakan, yaitu ciri (6) dan (7), berdasarkan pada segi formal itu pula. Segi yang lain — katakanlah secara mudah segi semantik — yang menunjukkan peranan kalimat (selaku unsur dan sekaligus juga wujud bahasa) yaitu peranan sebagai subsistem referensial dan subalat komunikasi tidak terungkap. Padahal, mengenai ketiga ciri yang pertama itu dapat dihubungkan dan bahkan memang disebabkan oleh peranannya itu. Tentulah ini soal orientasi. Namun, justru orientasi itulah yang akan menentukan isi definisi dan luas uraian bagi objek penelitiannya. Isi definisi dan luas uraian itu akan menentukan pula kadar kemanfaatan hasil pemerian itu.

Saya usulkan ketentuan mengenai kalimat itu dirumuskan kembali dengan pengamatan yang lebih menitik dan dengan orientasi yang lebih relevan dengan apa yang dikemukakan pada pasal D alinea-alinea terakhir.

Mungkin ada baiknya disadari dua hal berikut.

1. Kalimat bagaimanapun juga adalah satuan lingual yang bersifat situasional seperti halnya kata dan frasa (istilah saya perkataan). itulah sebabnya kalimat dapat dikatakan konkret sebagaimana diakui pula oleh HK (cf. HK, 1984: 222) bila kekonkretan itu ditentukan baik oleh adanya penghayatan intuitif penutur-penuturnya maupun oleh kedekatannya dengan situasi. Perlu diketahui, dalam hal ini konsep "situasional" (dan "situasi" untuk nominanya) dipakai dalam imbangannya dengan konsep "mental" dan "fonik", yaitu menunjukkan bahwa satuan lingual kalimat itu pertama-tama dan terutama terikat pada situasi, pada substansi yang semata-mata lingual, pada isi tuturan, pada segala sesuatu yang dilambangkan oleh bahasa, atau pada segala sesuatu yang hadir, berada, dan mengada di saat bentuk bahasa diucapkan atau digunakan (lihat Sudaryanto, 1983: 221-224).
2. Kalimat sebagai satuan lingual berwajah ganda. Di satu pihak dia merupakan komponen (atau bagian) bahasa, di pihak lain sebagai eksponen (atau wujud, contoh) bahasa. Pengakuan akan hal ini secara metodologis dan operasional akan menguntungkan untuk analisis Bahasa Pengakuan sebagai komponen mengendalikan kita untuk tidak memencilkan kalimat dari satuan lingual yang lain (biasanya dengan yang lebih besar); pengakuan sebagai eksponen meringankan kita dalam menentukan strategi analisis dan memilih prioritas bahan penelitian, entah itu menyangkut bahasa yang sudah dikuasai secara baik oleh si peneliti, entah itu menyangkut bahasa yang belum, tetapi mungkin untuk dikuasai oleh si peneliti, entah itu menyangkut bahasa yang belum, tetapi mungkin untuk dikuasai oleh si peneliti, atau itu menyangkut bahasa yang tidak mungkin lagi dikuasai oleh si peneliti (lihat Sudaryanto, 1983:267-268).

Dua hal itu telah saya usahakan saya pikirkan secara mendasar; dan hasilnya telah dipaparkan pada bab khusus dalam *Linguistik* (1983) yang bersifat esai. Demi pembicaraan yang sesuai dengan tujuan pertemuan sekarang ini esai itu tentu saja tidak perlu kita terima seluruhnya, bahkan dapat kita pertanyakan kembali sebagaimana pula halnya saya pun mempertanyakan kembali apa-apa yang telah saya tuliskan itu. Hanya, yang penting, manakala kita mau mempertimbangkan kedua hal itu dalam rangka pemerian kalimat BI, maka

pada hemat saya kita tidak akan tersesat ke sikap substansialistis yang memencil atau sebaliknya tenggelam ke pandangan operasionalistis yang melenyapkan identitas. (Istilah *substansialistis* dan *operasionalistis* diambil dari van Peursen (1976) dengan pengertian yang diterapkan pada status kalimat dalam bahasa). Kalimat tidak harus diperlakukan sebagai satuan lingual yang berotonomi penuh, tetapi juga sebaliknya dia tidak harus diperlakukan sebagai unsur formal belaka bagi satuan lingual yang lebih besar. Pertimbangan ini dapat dilakukan sebagaimana seharusnya, bila paham "sebagai sistem (atau lebih tepatnya subsistem) referensial" dan "sebagai alat (atau lebih tepatnya subalat) komunikasi" terhadap kalimat ada pada kesadaran peneliti-peneliti-nya.

Menyangkut kedua hal terakhir itu, saya melihat uraian HK sedikit banyak telah mencerminkannya, meskipun dalam beberapa hal cerminan itu tidak cukup jelas karena sistematika dan cara klasifikasi yang digunakannya. Uraian berikut diharapkan dapat menjelaskan hal itu meskipun titik beratnya pada hal lain.

## 2. Pembagian Jenis dan Subjenis Kalimat

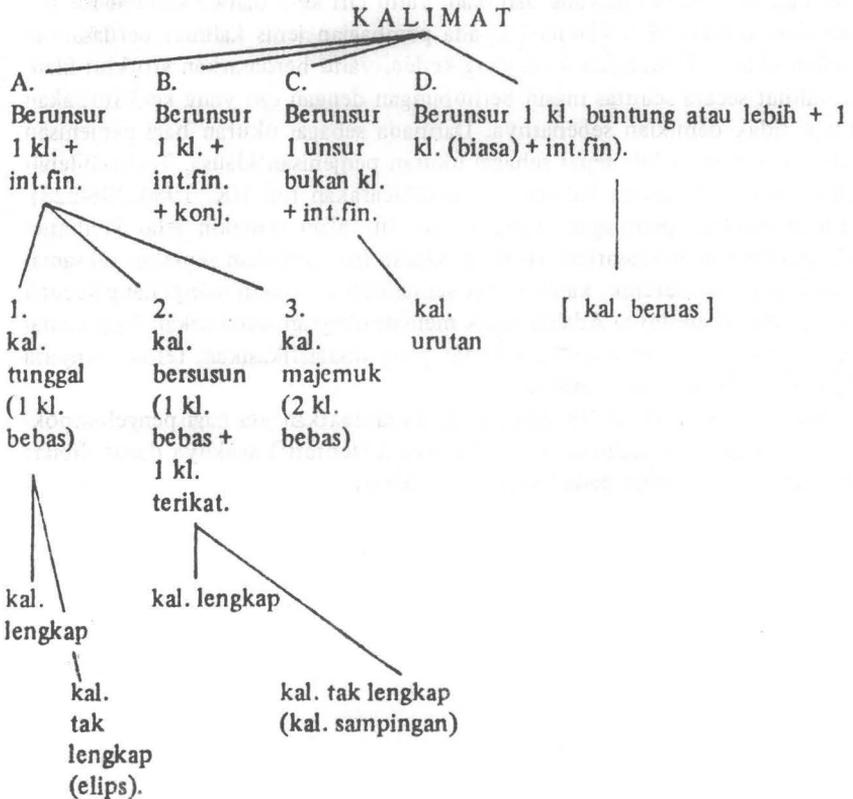
Bila masalah identitas kalimat lebih berhubungan dengan matra kekhususan atau dimensi individualitas yang sentensial (kalimat adalah satuan lingual situasional "ini" yang berbeda dengan satuan lingual situasional yang lain), maka jenis-jenis dan subjenis-subjenis kalimat lebih berhubungan dengan matra keumuman, universalitas, atau modalitas yang sentensial.

Bagaimana kiranya membuat pengelompokan yang baik atas jenis dan subjenis itu? Dalam hal ini, betapa pentingnya kejelasan identifikasi kalimat. Identifikasi kalimat yang jelas sangat penting justru bila harus menjawab pertanyaan semacam itu. Pada hemat saya, penjenisan dan pensubjenisan yang baik minimal haruslah bertolak dari sifat dasar atau ciri khas kalimat itu. Banyaknya cara dan ukuran penjenisan bergantung sepenuhnya pada banyaknya ciri khas yang dikenal (atau diperkenalkan). Katakanlah kita bersetuju bahwa kalimat itu (1) satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, (2) mempunyai pola intonasi final, dan (3) baik secara aktual maupun secara potensial terdiri dari klausa, sebagaimana dikemukakan oleh HK, maka cara dan ukuran penjenisan setidaknya-tidaknya ada tiga macam; sedangkan pembagian subjenis selanjutnya berdasarkan masing-masing ciri itu: sejauh mana keberdian sendiri, kefinalan intonasi, dan unsur klausalnya itu dibedakan satu sama lain di antara sesamanya. Dalam hal ini, lalu masing-masing ciri itu benar-benar sebagai modalitas sentensial atau matra keumuman kekalimatan yang harus diperhitungkan.

Bila diperhatikan penjenisan kalimat HK dalam hubungannya dengan identifikasinya, maka penjenisan itu merupakan penjabaran dari sebuah ciri saja dari ke-7 buah ciri yang diajukan, yaitu ciri ke-3 bahwa kalimat itu terdiri dari klausa. Oleh karena itu, ada pembagian jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa. Pembagian jenis yang kedua, yaitu berdasarkan struktur klausa, dilihat secara selintas masih berhubungan dengan ciri yang ke-3 itu; akan tetapi tidak demikian sebenarnya. Daripada sebagai ukuran bagi penjenisan kalimat, hal itu lebih tepat sebagai ukuran penjenisan klausa. Terlebih-lebih kalau pada bab klausa hal itu belum dibicarakan (cf. HK, 1984:208-223). Ketidaktepatan pembagian yang kedua itu akan semakin jelas kelihatan bila pembagian berdasarkan struktur klausa itu dilakukan semakin saksama, mendalam, dan berenik, karena sifat sentensialnya makin menghilang kecuali hanya sifat klausalnya. Adalah tidak menguntungkan sama sekali bagi pemahaman kalimat kalau maunya kalimat yang diklasifikasikan, tetapi ternyata klausalah yang terklasifikasikan.

Namun, bila konsep HK hendak kita manfaatkan jua bagi pengelompokan atau penjenisan kalimat itu, maka secara (tentatif) agaknya dapat dibuat sebagaimana tercermin pada Diagram – I berikut.

Diagram - 1



**Keterangan:** kl. = klausa; int. = intonasi; fin. = final; konj. = konjungsi; kal. = kalimat. Kurung persegi pada jenis D menunjukkan bahwa jenis itu di luar kerangka pembagian berdasarkan konsep HK, namun ditambahkan di sini karena dipandang dari segi unsur klausal cukup relevan. Adapun istilah "kl. buntung" mengikuti J.W.M. Verhaar (1977).

Adapun penjenisan yang ketiga, yang berdasarkan amanat wacananya, bila dilihat sepintas tampak tidak dalam hubungannya dengan identitas. (Seperti terlihat di atas, identifikasi HK terhadap kalimat BI bertolak dari segi formal, sedangkan penjenisan yang ketiga ini lebih bersifat semantik). Akan tetapi, bila dilihat penjelasannya ternyata ciri ke-2, yaitu intonasi, dilibatkan juga. Dengan demikian, lalu tidak ada kesesuaian antara judul dengan uraiannya (lihat halaman 230 dst.), khususnya untuk penjelasan kalimat deklaratif, interogatif, dan imperatif. Sementara itu, dalam uraian mengenai ketiga macam kalimat itu sendiri tidak ada penjelasan sama sekali mengenai apa yang dimaksudkan dengan intonasi deklaratif, intonasi interogatif, dan intonasi imperatif. Ciri-ciri pun tidak dikemukakan, kecuali hanya dikatakan bahwa dalam ragam tulis ada pemberian tanda (.), (?), dan (!). Uraian untuk subjenis selanjutnya agaknya akan diusahakan disesuaikan dengan judul lagi yaitu ketika berbicara mengenai kalimat aditif, responsif, dan interjektif; akan tetapi, usaha itu rupanya tidak berhasil karena tidak ada kejelasan mengenai amanat wacana. Alih-alih amanat wacana adalah struktur (!) karena yang diperhatikan adalah hubungannya dengan bagian yang lain yang sifatnya linear.

Dapat dikatakan secara singkat, pembagian ketiga itu tidak didasari oleh konsep semantik yang jelas sehingga uraiannya sulit untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Gagasan membuat pembagian kalimat berdasarkan segi maknawi tentulah patut didukung karena secara metodologis dan menurut teori bahasa adalah memang sah. Akan tetapi, sebelum pembagian itu dilakukan dituntut adanya konsep yang jelas. Tentu saja ini dalam lingkup bahasa sebagai sistem referensial dan kalimat sebagai subsistem referensial.

Sehubungan dengan itu, ada tiga hal yang kiranya patut diperhatikan, yaitu: (1) makna kalimat, (2) penerapan makna kalimat, dan (3) perbedaan antara kalimat sebagai subsistem referensial dengan kalimat sebagai subalat komunikasi.

Ketiganya itu masih merupakan telur dalam rahim teori bahasa, masih merupakan bangunan *ab ovo*, khususnya untuk BI. Untuk 1 dan 2, penalarannya sama dengan yang ada pada konsep kata yang juga merupakan satuan lingual situasional itu. Makna kalimat adalah pikiran yang bersifat sentensial; jadi, pikiran yang lingual. Dia adalah pikiran yang ada *dalam* kalimat di saat kalimat itu diucapkan (jadi, tidak mendahului atau mengikuti). Adapun penerapan makna kalimat adalah penggunaan makna itu dalam komunikasi menurut kehendak atau maksud si penuturnya. Dengan demikian — ini me-

nyangkut yang 3 – makna kalimat lebih berkaitan dengan kalimat sebagai subsistem referensial; dan penerapannya lebih berkaitan dengan kalimat sebagai sub-alat komunikasi. Makna kalimat *Perutku sakit* adalah 'Perutku sakit'; akan tetapi, maksudnya dapat 'Perutku sakit', 'Aku tidak berselera makan', 'Aku mau istirahat', 'Silakan engkau pulang', atau yang lain sesuai dengan keinginan penuturnya yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Mengingat bahwa bahasa sehari-hari sebagai bahan mentah penelitian kalimat itu penuh dengan maksud (bersifat evaluatif, menurut rumusan van Peursen, 1985), maka untuk dasar klasifikasi kalimat itu dibutuhkan teori-penerapan yang cukup menyeluruh, meliputi segala macam penuturan. Pada tahapan sekarang hal itu kiranya sulit dipenuhi sebab kaidah-kaidah penerapan makna kalimat sejauh yang saya ketahui belum diperkenalkan dalam kerangka linguistik, khususnya linguistik Indonesia. Apalagi mengenai penerapan maknanya, sedangkan mengenai maknanya itu sendiri saja agaknya belum menarik minat para ahli untuk dicari kaidahnya.

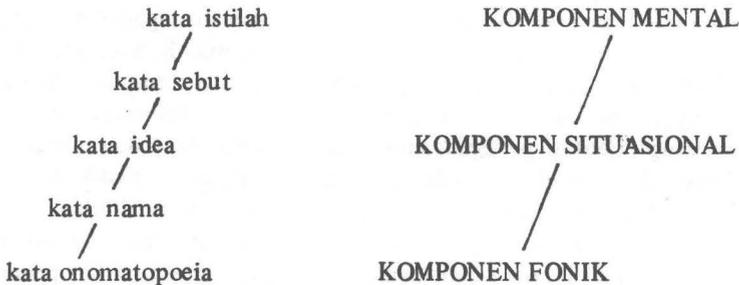
Dalam rangka pembicaran ini, makna kalimat atau makna sentensial tentu saja tidak sama dengan makna sintaktik atau peran sintaktik seperti pelaku, penderita, dsb. yang mengenai konstituen klausa yang telah banyak diperhatikan secara linguistik itu. Kalau makna sintaktik itu intraklausal, ada dalam klausa, maka makna sentensial adalah ekstra-klausal, ada di luar klausa, atau bahkan lebih tepat transklausal, karena melampaui batas klausa yang manapun. Analogi dengan kata yang bermakna leksikal yang jumlahnya tak terbilang, sebanyak kalimat yang ada; bahkan, bukan hanya sekadar tak terbilang, barangkali tak terhingga sesuai dengan watak bahasa yang kreatif, merupakan daftar terbuka, dan selalu dapat dibuat lagi yang baru yang berbeda dengan yang pernah terucapkan orang sebelumnya.

Mengingat itu semua, maka penjenisan kalimat secara maknawi benar-benar harus didasari oleh teori bahasa yang cukup menyeluruh, kukuh, dan jelas. Dan kalau kita berbicara sampai di situ, kita merambah pembicaraan di daerah yang cukup rawan, karena di daerah itu mudah disulut diskusi tanpa akhir dengan hasil yang belum jelas manfaatnya.

Di atas dasar pengakuan bahwa komponen pembentuk bahasa itu fona (bunyi), mental (pikiran, akal budi), dan situasi (jagad yang berhadapan dengan kesadaran manusia), telah saya usahakan menjeniskan kalimat itu secara maknawi. Dasar pedomannya adalah pembagian jenis kata yang diperkenalkan oleh J.W.M. Verhaar dalam disertasinya (1963) yang bersifat kefilosofatan. Usaha itu dimuat dalam *Linguistik* (1983: 296-297). Sesuai dengan sifatnya apakah lebih dekat dengan komponen fonik ataukah dengan komponen situ-

asional ataukah dengan komponen mental, maka dalam buku itu kata-kata dapat dibedakan satu sama lain atas lima macam, yaitu kata onomatopoeia (kata tiruan bunyi), kata nama, kata pembawa angan-angan atau kata ide, kata biasa atau kata sebut, dan kata istilah atau terminologi. Kata onomatopoeia adalah kata yang paling dekat dengan komponen fonik, sedangkan kata istilah adalah kata yang paling dekat dengan komponen mental, dan kata ide adalah kata yang paling dekat dengan komponen situasional. Diagram II berikut memperlihatkan hal itu.

DIAGRAM - II



Bila keabstrakan dan kekonkretan itu dasarnya adalah jauh dekatnya dengan komponen mental di satu pihak (makin jauh makin abstrak), dan dengan komponen situasional serta fonik di pihak lainnya (makin dekat makin konkret), maka dapat terlihat adanya semacam hierarki, sehingga ada hierarki kekatanaan: dari kata onomatopoeia yang paling konkret, lalu kata nama, kata ide, kata sebut, dan sampai kepada kata istilah yang paling abstrak.

Beranalogi dengan itu, kalimat pun agaknya dapat dijeniskan menjadi lima, dan jenis-jenis itu juga membentuk semacam hierarki, yaitu hierarki kekalimatan. Lepas dari soal penyebutan setiap jenisnya yang tidak harus disamakan dengan penyebutan jenis kata, analogi ini dapat dipandang sah secara teori bahasa sejauh dapat diakui bahwa kalimat itu juga memiliki kaitan yang erat dengan situasi (di samping, tentu saja, dengan komponen mental dan fonik).

Pembagian atas lima jenis itu tentu saja bukan pembagian satu-satunya dan yang paling pasti. Dengan adanya penelitian mengenai seluk-beluk keikonan (*iconicity*) dalam bahasa (Sudaryanto & C. Soebakdi Soemanto 1983 untuk BI; Sudaryanto 1985b untuk bahasa Jawa; J. Haiman 1980 dan T. Givon 1984 untuk sintaksis bahasa pada umumnya) agaknya penyebutan dan

jumlah itu perlu disesuaikan dengan hal-hal baru yang diketahui. Akan tetapi, yang penting di sini ialah prinsipnya. Bila penjenisan secara maknawi itu akan dilakukan, maka ukuran penjenisan itu haruslah sesuai dengan komponen-komponen yang mendukung adanya segi kemaknaan itu. Mengenal hal ini, sintaksis BI belum dapat berbuat banyak.

Apa yang dikemukakan di atas, sejauh yang dapat dipahami dan diduga, dapat membuka kemungkinan luas untuk dimanfaatkan hasilnya, khususnya untuk membantu usaha pembinaan dan pengembangan BI. Pada hemat saya, untuk pembinaan dan pengembangan BI sasaran yang dapat dipandang paling strategis ialah ragam bahasa keilmuan, ragam bahasa jurnalistik, dan ragam bahasa kesastraan atau literer karena ketiga ragam itu digunakan paling luas dalam rangka pengembangan kebudayaan Indonesia. Kelima jenis kalimat (dan kata) yang disebutkan di depan cenderung mencerminkan secara baik ragam-ragam itu. Seperti diketahui, ragam bahasa keilmuan ialah ragam bahasa yang orientasi penggunaannya untuk menampung dan mengembangkan bangunan teori, ilmiah; sedangkan ragam bahasa jurnalistik ialah ragam yang orientasi penggunaannya untuk penemuan dan pemberian informasi faktual yang benar dan segar. Adapun orientasi penggunaan ragam bahasa literer untuk memaparkan dan menawarkan dunia alternatif (cf. pandangan Umar Kayam (1983) dalam *The Liang Gie* (1984:15) mengenai orientasi penulisan karya ilmu sosial, karya jurnalistik, dan karya sastra). Ragam yang pertama itu mempunyai korelasi yang kuat dengan jenis kalimat "istilah", ragam yang kedua dengan jenis kalimat "ide", dan ragam yang ketiga dengan jenis kalimat "onomatopoeia (atau ikonik)". Sengaja dikatakan "korelasi yang kuat", karena korelasi yang lain kadarnya pun masih ada pula; akan tetapi, korelasi yang lain itu tidak menunjukkan ciri khasnya. Bila pemahaman mengenai jenis-jenis kalimat itu dapat dilakukan secara baik, maka usaha pembinaan dan pengembangan ragam bahasa keilmuan, jurnalistik, dan literer akan dapat dilakukan secara mantap, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum pasal ini diakhiri, ada dua catatan yang patut diperhatikan. Pertama, mengenai sasaran strategis pembinaan bahasa pada ragam bahasa tertentu; kedua, mengenai keabsahan dan ketepatan pembagian jenis kalimat secara maknawi dalam rangka pemerian kalimat.

Mengenai yang pertama, hal itu tentu saja dapat dibicarakan lebih luas; akan tetapi, mengingat relevansinya, justru tidak diuraikan lebih jauh di sini. Sasaran strategis pembinaan dan pengembangan bahasa ada di luar lingkup pembicaraan kalimat sekarang ini.

Mengenai yang kedua, pembagian jenis kalimat secara maknawi memang baru dapat dipandang sah dan tepat sejauh arah pembicaraan itu terpusatkan pada masalahnya (jadi, *problem-oriented*), yaitu kalimat, dan bukan pada disiplin ilmiahnya, yaitu (ilmu) sintaksis (jadi, bukan *discipline-oriented*). Pada hemat saya, dalam rangka usaha memerikan tata bahasa BI, harus ada kesepakatan dahulu apakah pusat pembicaraan akan dibatasi dan dikendali oleh ilmu tata bahasa yang jangkauan pembicaraannya pada umumnya sudah diketahui itu (dengan banyak model yang dapat dipilih) ataukah diarahkan dan dituntun oleh persoalan "penataan" unsur-unsur bahasa yang sering tidak terduga wujud dan perilakunya. Dalam bidang kekataan, apakah kalau berbicara mengenai tata kata, hal itu identik dengan morfologi semata yang bahan dasar penelitiannya kata polimorfemik ataukah identik dengan segala aspek kekataan yang memang memiliki wujud yang ditentukan oleh "asas pengatur" tertentu (misalnya dalam BI adanya bentuk akronim dan ikonik yang imagik). Dalam bidang kekalimatan, apakah kalau berbicara mengenai tata kalimat, hal itu pun identik dengan jenis sintaksis tertentu semata yang bahan dasarnya kalimat poliklausal ataukah identik dengan segala aspek kekalimatan yang memang memiliki wujud yang ditentukan oleh "asas pengatur" tertentu (misalnya dalam BI adanya bentuk ungkapan tertentu dan bentuk ikonik yang diagramatik).

#### F. Catatan Kesimpulan.

Pemerian kalimat BI tampaknya saja dapat dilakukan dengan mudah. Akan tetapi, sebagaimana halnya dengan pemerian aspek-aspek lingual yang lain, ternyata membutuhkan syarat-syarat yang menentukan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah:

- (1) menyeluruh, meliputi segala matra sentensial yang ada;
- (2) mendasar, mengenai hal hakiki yang menjadikan kalimat itu dapat disebut kalimat (dalam hal ini sebagai subsistem referensial dan subalat komunikasi);
- (3) memiliki daya banding, sehingga hasil itu dapat diperbandingkan dengan bahasa lain yang relevan, yaitu dengan bahasa yang juga digunakan oleh penutur bahasa yang bahasanya diperikan.

Tanpa diperhatikannya syarat itu perian kalimat menjadi semacam gambar tanpa fokus dan tanpa perspektif. Dan perian itu makin celaka lagi, menjadi semacam gambar tanpa fokus dan tanpa perspektif yang buram manakala prinsip-prinsip metodologi penyajian (yang sebagian tergantung pada penggunaan istilah-istilah) kurang diindahkan.

### PUSTAKA ACUAN

- Crystal, David. 1980. *A First Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Boulder, Colorado: Westview Press.
- Givón, Talmy. 1984. *Syntax: A Functional Typological Introduction*, Volume-I. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
- Goudsmit, Samuel A. & Robert Claiborne. 1983. *Waktu*. Edisi Kedua. Jakarta: Tira Pustaka.
- Greenberg, Joseph H. 1978. *Universals of Human Language*, Volume 1. Stanford: Stanford University Press.
- Haiman, John, 1980. "The Iconicity of Grammar: Isomorphism and Motivation" dalam *Language*, Volume 56, Number 3, pp. 515-540.
- Jespersen, Otto. 1956. *Essentials of English Grammar*. London: George Allen & Unwin Ltd.
- Kayam, Umar. 1983. "Penulisan Karya Sastra", dalam The Liang Gie (ed.): *Dunia Karang Mengarang Seri III*. Yogyakarta: Akademi Kepengarangan. hlm. 15-16.
- Kridalaksana, Harimurti et.al., 1984. *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moravcsik, Edith A. & Jessica R. Wirth. 1980. *Syntax and Semantics Volume 13: Current Approaches to Syntax*, New York: Academic Press.
- Mulder, D.C. 1966. *Pembimbing kedalam Ilmu Filsafat*. Djakarta: Badan Penerbit Kristen.

- van Peursen, C.A. 1976. *Strategi Kebudayaan*, Cetakan Pertama, diindonesiakan oleh Dick Hartoko. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- van Peursen, C.A. 1985. *Susunan Ilmu Pengetahuan: Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*. Diterjemahkan oleh J. Drost. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Sudaryanto. 1983. *Linguistik: Esai tentang Bahasa dan Pengantar ke dalam Ilmu Bahasa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sudaryanto. 1985a. "Aneka Jenis Metode Linguistik: Tinjauan Selayang", *Bacaan Linguistik*, Nomor 27, Januari 1985, disunting oleh Masyarakat Linguistik Indonesia, Komisariat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sudaryanto, 1985b. "Aspek Ikonik Bahasa Jawa: Sebuah Penelitian Awal", diceramahkan pada Lembaga Javanologi, Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan "Panunggalan", Jalan Sidobali 10, Muja Muju, Yogyakarta, 7 Juni 1985.
- Sudaryanto & C. Soebakdi Soemanto. 1983. "Pelambangan Bunyi dalam Bahasa Indonesia", Laporan Penelitian untuk Lembaga Penelitian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Verhaar, John W.M. 1963. *Some Relation between Perception, Speech and Thought: A Contribution towards the Phenomenology of Speech*. van Gorcum & Comp. N.V., Assen.
- Verhaar, John W.M. 1970. *Teori Linguistik dan Hubungannya dengan Pendekatan Ilmiah Berdasarkan Bahasa Jang Tertentu*. Jogjakarta: Penerbit Jajasan Kanisius, [Cetak ulang tahun 1980 dalam *Teori Linguistik dan Bahasa Indonesia*].
- Verhaar, John W.M. 1977. *Pengantar Linguistik Umum*, Jilid I. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

# DASAR-DASAR KLASIFIKASI KATA

Gorys Keraf

## 1. Pendahuluan

Aristoteles telah dijadikan kambing hitam mengenai pembagian kata-kata menjadi sepuluh kelas kata, walaupun ia sendiri tidak pernah mengajukan kelas itu secara eksplisit. Dasar-dasar falsafi dan sistematika logika dalam menggunakan bahasa sebagai alat, membuatnya dikenal sebagai Bapak peletak dasar klasifikasi tersebut. Para pengikutnya menerima dasar-dasar itu, kemudian menyesuaikannya dengan keadaan dalam pelbagai bahasa Eropa, lalu mewariskan suatu formulasi kelas kata yang sepuluh jumlahnya itu. Aristoteles, andaikata pembagian itu harus dipertanggungjawabkannya, pasti tidak akan mengajukan sepuluh kelas kata karena dalam bahasa ibunya sendiri tidak dikenal kata yang disebut artikula. Pembagian kata atas sepuluh kelas itu, menurut tradisi Eropa, akhirnya diterapkan dalam bahasa-bahasa lain, termasuk juga bahasa Indonesia.

Ilmu bahasa modern mengeritik pembagian di atas karena dasar klasifikasinya tidak jelas. Ada dasar morfologis, ada dasar semantik, dan ada dasar fungsi. Dasar morfologis menghasilkan kelas kata seperti: nomina, verba, dan adjektiva. Dasar semantik membagi-bagi kata atas nomina, verba, adjektiva, pronomina, numeralia. Dasar pembagian berdasarkan fungsi memasukkan kata-kata: preposisi, advebia, konjungsi, artikula, di samping nomina dan sebagainya. Kata seru atau interjeksi pada dasarnya bukanlah kata, tetapi sudah merupakan kalimat, yaitu kalimat minor, karena sudah "berpakaian lengkap" pada waktu digunakan, selalu diikuti oleh unsur suprasegmental. Artikula ternyata tidak bersifat universal; dalam bahasa Yunani dan Latin tidak ada jenis kata itu, sementara dalam bahasa Barat lainnya dan bahasa-bahasa Semit

kelas itu ada. Dalam bahasa Indonesia perlu dipersoalkan, sekurang-kurangnya harus diperjelas mengenai fungsi atau kriterianya.

Baik ditinjau dari sudut bentuk maupun dari fungsi kata, pembagian kata menjadi sepuluh kelas tampaknya terlalu banyak. Sebaliknya bila dilihat dari sudut semantik mungkin sepuluh kelas itu terlalu sedikit. Semua kelas semantik yang selama ini tidak mendapat perhatian, mungkin harus dimunculkan ke permukaan, seperti halnya penulis tata bahasa tradisional menarik ke permukaan kelas kata ganti (pronomina), preposisi, numeralia, dan sebagainya. Kita barangkali harus menarik ke permukaan kata seperti kata kerabat, kata warna, kata anggota tubuh, dan sebagainya. Sebab itu, dalam menentukan kelas kata harus jelas dasar dan kriterianya, serta bidang gerakanya.

## 2. Dasar Klasifikasi

Sebelum mengadakan klasifikasi harus ditetapkan prinsip dan bidang gerak klasifikasi itu. Menurut hemat saya, bidang gerak yang dapat dipakai sebagai landasan klasifikasi itu adalah *bentuk* dan *fungsi*. Persoalannya adalah apakah kita dapat memadukan kedua bidang gerak itu untuk menghasilkan satu klasifikasi yang memenuhi prinsip klasifikasi. Prinsip klasifikasi, sebagai umum diterima adalah harus ada suatu prinsip yang jelas, berdasarkan prinsip tadi harus diadakan pembagian yang logis dan konsisten, dan pembagian itu harus bersifat lengkap (Keraf, 1982: 38-39).

Berdasarkan bidang gerak dan prinsip klasifikasi sebagai dikemukakan di atas, maka pembagian kata atas sepuluh kelas kata melanggar kriteria karena prinsip yang tidak jelas, tidak logis dan konsisten, sedangkan bidang gerakanya tidak memperlihatkan keselarasan antara satu bidang dan bidang yang lain. Bila klasifikasi tata bahasa tradisional sudah melanggar kaidah-kaidah itu, maka *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis* (TBDBIS) lebih tidak jelas dasar klasifikasinya, tidak logis dan konsisten, dan bidang gerakanya menjadi lebih luas dari yang digunakan tata bahasa tradisional. Bila pembagian kata atas sepuluh kelas dianggap sudah terlalu banyak, maka tata bahasa ini menganggap perlu mengajukan 13 kelas kata: nomina, pronomina, adjektiva, numeralia, verba, adverbialia, preposisi, interogativa, demonstrativa, konjungsi, artikula, interjeksi, dan kategori fatis.

Dari apa yang dikemukakan di atas, tampak jelas bahwa bila tata bahasa tradisional memasukkan demonstrativa dan interogativa dalam pronomina (ada pronomina personalia, pronomina posesiva, pronomina demonstrativa, pronomina relativa, pronomina interogativa, pronomina determinativa, dan pronomina indeterminativa), maka buku TBDBIS mengangkat kedua subkelas

ini ke permukaan, sederajat dengan pronomina. Bila dalam tata bahasa tradisional orang tidak bermimpi dengan kelas kata yang disebut "kategori fatis", maka dalam buku TBDIS ini muncul suatu anggota baru yang diberi nama "kategori fatis".

Bukanlah kesalahan B. Malinowski yang mengajukan konsep *phatic Communication* yang kemudian diambil alih dalam bidang semantik dengan istilah *phatic function* (Leech, 1981: 41-42, 52-56; Lyons, 1968: 417). Malinowski menggunakan istilah dan konsepnya menyangkut fungsi bahasa (di samping fungsi informasional, ekspresif, direktif, dan estetis) bukan untuk menyebut kelas kata. Tetapi dalam buku tata bahasa ini, istilah itu diadopsi menjadi 'anggota' dari keluarga besar 'kelas kata'. Ia didudukkan sama rendah dengan kelas kata lain, padahal kedudukannya lebih tinggi daripada kelas kata, lebih abstrak daripada tataran-tataran dalam bahasa. Ia hanya berbicara mengenai fungsi bahasa.

Sebagai telah dikemukakan di atas, bidang gerak yang mempunyai peluang untuk dipakai sebagai landasan klasifikasi adalah bidang morfologi, fungsi sintaksis, dan semantik. Bidang semantik dalam hal ini diabaikan karena memberi peluang yang terlalu banyak. Sebab itu akan dicoba dengan menggunakan bidang morfologi dan fungsi sintaksis.

Dari sudut morfologi menurut hemat saya ada empat kelas bentuk kata yaitu

- a. kelas kata nominal,
- b. kelas kata dialektival,
- c. kelas kata verbal, dan
- d. kelas kata yang tidak memiliki bentuk dan perubahan bentuk seperti ketiga kelas lainnya.

Sebaliknya dari sudut fungsi sintaksis, kata-kata dapat dibagi atas:

- a. Kata-kata yang menduduki fungsi nuklei yang dapat dibagi atas :

- (1) kelas kata nominal,
- (2) kelas kata dialektival, dan
- (3) kelas kata verbal.

- b. Kata-kata yang menduduki fungsi periferal atau disebut kata tugas.

Karena fungsi-fungsi nuklei merupakan fungsi yang utama dalam sebuah kalimat, yang merupakan prasyarat bagi sebuah kalimat mayor, kalimat tunggal, kalimat majemuk, dan sebagainya, maka ketiga kelas yang berada di bawah kelompok pertama diberi status yang penting pula. Dengan demikian dari sudut fungsi sintaksis kita membagi kata-kata atas:

- a. kelas kata nominal,
- b. kelas kata dialektival,
- c. kelas kata verbal, dan
- d. kelas kata tugas.

Pembagian kata berdasarkan bentuk dan fungsi sintaksis dengan demikian memperlihatkan kesamaan dan kesejajaran, sehingga usaha mengadakan pengelompokan kata menghasilkan empat kategori utama yaitu:

- a. kelas kata nominal,
- b. kelas kata dialektival,
- c. kelas kata verbal, dan
- d. kelas kata tugas.

Di bawah keempat kelas utama ini masih dapat diadakan perincian atau subkategori lebih lanjut sesuai dengan ciri-ciri yang khusus dimiliki anggota-anggotanya. Perincian itu jangan sampai menarik anggota bawahan ke permukaan, sebagai anggota yang sederajat dengan kelas induknya. Atau jangan sampai menurunkan fungsi atau tataran yang lebih tinggi ke tataran kata, seperti halnya dengan interjeksi dan kategori fatis. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa klasifikasi kelas kata dalam buku tata bahasa ini tidak jelas kriteria dan prinsipnya, serta pembagiannya, tidak logis dan konsisten.

Dalam uraian berikut ini, akan diadakan sorotan secara khusus pada tiga kelas kata yang dikemukakan oleh penyusun, yaitu kelas kata artikula, interjeksi dan kategori fatis.

### 3. Artikula

Pengertian umum yang diterima mengenai artikula adalah seperangkat kata yang digunakan bersama kata benda (nomina) untuk membatasi atau menentukan kata-kata benda tersebut. Batasan ini juga kabur karena ada juga sejumlah kata lain di luar artikula yang dapat berfungsi untuk membatasi atau menentukan kata-kata benda. Dalam TBDBIS tidak diberikan batasan formal, namun penyusun memberi suatu penjelasan singkat bahwa "Tugas kategori artikula dalam bahasa Indonesia adalah mendampingi kategori-kategori:". Walaupun hanya merupakan penjelasan biasa, penggunaan kata '*mendampingi*' tetap menimbulkan pertanyaan. Apakah semua kata yang mendampingi kelas kata tertentu (dalam hal ini kata benda) selalu merupakan artikula? Apakah kata *ekor*, *buah*, *lembar*, dan sebagainya yang selalu mendampingi kata benda seperti tampak dalam frasa: *seekor burung*, *sebuah perahu*, *se-*

*lembar kertas*, juga merupakan artikula? Kata-kata itu jelas mendampingi kata-kata benda itu, namun tidak ada yang mengatakan bahwa kata-kata tersebut adalah artikula.

Batasan-batasan tradisional maupun penjelasan yang digunakan dalam buku ini tidak dapat dijadikan pegangan yang meyakinkan untuk menerima konsep artikula secara operasional. Artikula dianggap sebagai kata, tetapi ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kata benda yang diterangkannya atau yang "mendampingi"-nya itu. Menurut hemat saya, istilah yang dipakai dalam bahasa Indonesia yaitu *kata sandang* lebih mengena untuk pengertian artikula itu. Ia memang bukan "manusia"-nya, tetapi ia merupakan sandang dari "manusia"-nya itu. Di sinilah letak perbedaan pertama antara artikula dalam bahasa Inggris, Jerman, Arab, dan sebagainya bila dibandingkan dengan kata-kata yang secara tradisional-konvensional disebut sebagai artikula dalam bahasa Indonesia: *si, sang, hang*, dan sebagainya. Artikula dalam bahasa Barat dan Semit merupakan bagian dari kata itu, sebaliknya dalam bahasa Indonesia ia tidak terlalu terikat, andaikata diikatkan pada kata bendanya, maka sifatnya mana suka, lebih longgar, boleh digunakan kalau mau, kalau tidak juga tidak apa.

Perbedaan kedua antara artikula Barat dan Semit dengan artikula dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai pembentuk kata benda, misalnya dari kata kerja ke kata benda, dari kata sifat ke kata benda. Bila sebuah kata fungsinya sekedar "mendampingi" sebuah kata lain sebagai dikemukakan para penyusun, seharusnya ia tidak mengubah kelas dari kata yang didampinginya. Kata yang didampinginya seharusnya tetap berada dalam kelas kata aslinya, entah sebagai kata kerja, atau sebagai kata sifat. Ternyata di sini kita melihat bahwa *si, sang* itu mengubah kelas kata. Dengan demikian artikula dalam bahasa Barat/Semit tidak identik dengan artikula sebagai yang diterima dalam bahasa Indonesia. Dalam hubungan ini perlu kiranya dicatat bahwa penjelasan yang berupa catatan bahwa *terdakwa* adalah nomina deverbal tidak sepenuhnya dapat diterima. Penyusun agaknya terjebak karena konteks yang digunakannya untuk mempertahankan pendapatnya itu. Menurut hemat saya, *terdakwa* pertama-tama adalah kata kerja pasif, baru kemudian berdasarkan transposisi yang diperkuat oleh frekuensi pemakaian yang tinggi, khususnya di bidang pengadilan, bentuk itu lalu diterima sebagai kata benda. Bahwa kata itu pertama-tama adalah kata kerja dapat dilihat dalam contoh berikut.

- (1) Ia terdakwa sebagai pelaku utama dalam kejahatan itu.
- (2) Dalam keadaan terdakwa kami tidak dapat berbuat apa-apa.

Bahwa bentuk *ter-* itu pertama-tama adalah kata kerja, ditegaskan oleh para penyusun dengan contohnya *tertindas*. Penyusun menegaskan bahwa *tertindas* bukan deverbalisasi *tertindas* melainkan perubahan kelas yang terjadi dalam gabungan dengan *si - tertindas*. Kenyataan memang menunjukkan bahwa prefiks *ter-* pertama-tama adalah afiks pembentuk kata kerja pasif, yang mengandung makna aspek perfektif, aspek kontinuatif, aspek spontanitas, kesanggupan, atau menyatakan intensitas (Keraf, 1984:106).

Perbedaan ketiga yang perlu dicatat antara artikula bahasa Barat dan bahasa Indonesia adalah menyangkut makna konotatif. Dalam bahasa Indonesia penggunaan *si*, *sang*, dan *sri* dapat mengandung makna konotatif tertentu, bisa mengandung arti sindiran, mengagungkan atau menghormati. Kalau saya menyebut nama *Jojon* dengan *si Jojon* akan mempunyai makna konotatif yang lain dari *sang Jojon*. Ungkapan *Sang Dewa* mengandung makna yang lain dari *Dewa* saja. Hal-hal semacam ini tidak ada dalam artikula bahasa Barat dan Semit.

Ada satu catatan lagi yang perlu dikemukakan secara khusus yaitu mengenai catatan tentang gabungan artikula dan adjektiva. Menurut penyusun TBDBIS gabungan antara artikula dan adjektiva, dan artikula dengan verba pasif membentuk nomina, tetapi contoh yang diberikan tak ada penggabungan antara artikula dan adjektiva.

Catatan-catatan di atas membawa kita kepada suatu kesimpulan lain bahwa di samping menentukan dan membatasi sebuah kata benda, artikula dalam bahasa Indonesia berfungsi juga untuk membendakan sebuah kata kerja yang menghasilkan kata benda deverbali serta membendakan sebuah kata sifat menjadi kata benda deadjektival (tidak ada dalam tata bahasa ini); artikula dalam bahasa Indonesia juga berfungsi untuk menyindir atau mengagungkan sesuatu.

Perlu tidaknya mengadakan sub-kategorisasi merupakan masalah lain. Berapa banyak kata yang dimasukkan dalam kelas artikula? Apakah jumlah dan kriterianya mengharuskan kita mengadakan sub-kategorisasi? Menurut pendapat saya, tidak perlu diadakan subkategorisasi. Artikula sangat terbatas jumlahnya, yang menurut para penyusun hanya terdiri atas delapan kata: *si*, *sang*, *hang*, *dang*, *sri*, *para*, *kaum*, dan *umat*. Dari kedelapan kata itu, dua di antaranya dianggap sudah bersifat arkaik (*hang* dan *dang*), serta dua lagi perlu dipersoalkan statusnya (*kaum* dan *umat*). Sub-kategorisasi yang dilakukan para penyusun lebih bersifat semantik, yaitu *si*, *sang*, dan *sri* untuk menyatakan benda tunggal, serta *para*, (*kaum* dan *umat*) untuk menyatakan jamak. Tunggal atau jamak sebenarnya sudah berada dalam struktur kata itu sendiri, yaitu struktur maknanya. Dengan demikian tidak perlu merepotkan

para pemakai dengan suatu subkategorisasi yang dipaksakan.

Masalah yang terakhir yang perlu dipersoalkan adalah apakah semua kata di atas adalah artikula? Kata *kaum* dan *umat* saya ragukan kedudukannya sebagai artikula. Kata *kaum* dan *umat* adalah kata bebas, kata yang dapat berdiri sendiri, masing-masingnya memiliki makna denotatif yang jelas. Kata *kaum* menurut KUBI W.J.S. Poerwadarminta hal. 452 mengandung makna: 1. suku bangsa; 2. sanak saudara; 3. golongan (orang yang sekerja, sepaham, sepankat, dsb.). Sementara itu kata *kaum* menurut kamus yang sama hal 1123, mengandung makna: 1. para penganut suatu agama; 2. orang banyak, khayalak ramai, publik; 3. (-manusia) sekalian bangsa manusia. Dengan demikian penggabungannya dengan kata-kata lain adalah penggabungan biasa yang bersifat frasis, bukan karena sifatnya seperti *si*, *sang*, dan *hang*.

#### 4. Interjeksi

Sudah lama disadari bahwa wujud interjeksi sebenarnya bukan kata. Kelompok ini tidak berada dalam tataran kata, tetapi berada dalam tataran kalimat atau wacana. Ia merupakan ungkapan kebahasaan yang dianggap sudah muncul pada awal prabahasa, merupakan unsur yang primordial dalam kehidupan kebahasaan. Karena itu, interjeksi diakui sebagai bahasa afektif.

Rasanya lebih baik kalau kita merombak cara berpikir lama yang memasukkan unsur bahasa ini dalam kelas kata. Lebih baik kalau kita memasukkannya dalam pembicaraan mengenai kalimat, khususnya dalam pembicaraan mengenai *kalimat minor*. Bahwa interjeksi bentuknya singkat kuasi-kata itu benar, tetapi ia selalu harus diikuti intonasi. Unsur segmentalnya tidak dapat dipisahkan dari unsur suprasegmentalnya.

Dengan menerima pendirian ini, pengalihan sejumlah kata benda atau frasa ke interjeksi sebagai kalimat minor tidak akan menimbulkan kesulitan analisis. Pada suatu saat kata itu disebut sebagai kata benda, atau kata sifat, atau sebagai frasa, tetapi pada saat yang lain ia merupakan interjeksi, yaitu sebagai kalimat minor. Misalnya, kita tahu bahwa kata-kata seperti *bangsat*, *binatang*, *babi* adalah kata benda. Tetapi, kalau berbentuk: *Babi! Binatang! Bangsat!*, ia adalah kalimat yang tergolong interjeksi. Demikian pula halnya dengan frasa seperti: *Alhamdulillah! Astagfirullah! Setan alas!*, dan sebagainya.

#### 5. Kategori Fatis

Memasukkan kategori fatis sebagai kelas kata merupakan suatu tindakan yang paling lemah dalam semua pertimbangan mengenai pengelompokan kata. Sebagai kelas kata, kategori fatis tidak diacu dengan istilah "kata fatis"

Penggunaan istilah "kategori fatis" sebenarnya secara implisit memperlihatkan keragu-raguan penulis, apakah kelompok ini merupakan satu kelas kata atau tidak. Kita dapat saja terpujau dengan konsep-konsep baru yang dicetuskan oleh para sarjana di luar sana. Namun, hendaknya kita jangan ter-gopoh-gopoh memasukkan konsep ini dalam uraian mengenai kelas kata.

Di atas telah disinggung atau dipersoalkan mengapa penyusun tidak menggunakan istilah "kata fatis" untuk kelas ini. Tetapi dalam uraian mengenai jenis-jenis kategori fatis disebutkan bahwa jenis kategori fatis yang pertama adalah partikel dan kata fatis. Ada tiga keberatan mengenai hal ini. Se-jauh ini, dalam seluruh buku tidak dijelaskan apa itu "partikel". Tiba-tiba saja istilah itu digunakan tanpa penjelasan. Keberatan yang kedua adalah bahwa penulis juga menggunakan istilah "kata fatis" padahal kategori fatis merupakan kelas kata juga. Keberatan ketiga adalah bahwa walaupun dibeda-kan partikel fatis dan kata fatis, namun dalam contoh-contoh yang diguna-kan tidak dijelaskan mana yang partikel fatis dan mana yang kata fatis.

Keberatan terakhir adalah memasukkan frasa sebagai kelas kata. Sebagai tampak dari jenis kedua dari kategori fatis, menurut penyusun, adalah "frasa fatis". Apakah sebuah kata adalah frasa? Betapapun bentuknya, panjang atau pendek, sebuah frasa adalah frasa, sebuah tataran yang lebih dari kata, yang dibentuk dari dua kata atau lebih tanpa identitas subjek dan predikat.

Sesuai dengan alasan-alasan di atas, maka kategori fatis harus dikeluarkan dari kelas kata.

## 6. Simpulan

Akhirnya secara singkat dapat dikemukakan beberapa simpulan umum mengenai buku *TBDBIS*, dan kategori fatis, sebagai berikut.

- (1) Dasar klasifikasi kata dan kriteria yang digunakan tidak jelas dan tidak logis dan konsisten.
- (2) Bidang gerak klasifikasi kelas kata atau dipilih dari bentuk kata atau fungsi kata.
- (3) Bentuk dan fungsi kata tampaknya mengandung kesejajaran untuk mencapai hasil yang sama dalam klasifikasi.
- (4) Artikula, interjeksi, dan kategori fatis bukan merupakan kelas kata yang mempunyai kedudukan yang sederajat, baik antara ketiganya, maupun dengan kelas kata lain.
- (5) Batasan atau penjelasan mengenai artikula tidak dapat dijadikan

pegangan yang bersifat operasional untuk mengidentifikasi kelas atau kelompok kata ini.

- (6) Ada perbedaan yang jelas antara: artikula bahasa Barat dan Semit di satu pihak, dan artikula bahasa Indonesia di pihak lain.
- (7) Artikula dalam bahasa Indonesia:
  - a) Tidak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kata bendanya; dalam bahasa Barat dan Semit merupakan bagian tak terpisahkan dari kata benda;
  - b) Artikula dalam bahasa Indonesia, di samping berfungsi sebagai penentu, juga berfungsi mengubah kelas kata;
  - c) Artikula dalam bahasa Indonesia juga dapat mengandung makna konotatif.
- (8) Usaha untuk mengadakan subkategorisasi kelas kata ini tidak mempunyai dasar yang dapat diandalkan.
- (9) Kata *kaum* dan *umat* bukanlah artikula tetapi kata benda biasa.
- (10) Interjeksi pada hakikatnya bukanlah sebuah kelas kata, tetapi merupakan sejumlah kalimat minor.
- (11) Kategori fatis yang dikemukakan sebagai sebuah kelas kata merupakan salah satu dari fungsi bahasa.

### PUSTAKA ACUAN

- Keraf, Gorys. 1982. *Eksposisi dan Deskripsi*. Ende: Nusa Indah.
- Keraf, Gorys. 1984. *Tatabahasa Indonesia*. Ende: Nusa Indah.
- Leech, Geoffrey. 1981. *Semantics: The Study of Meaning*. New York: Penguin Books.
- Lyons, John. 1972. *Introduction to Theoretical Linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.

## POLA-POLA KALIMAT DALAM BAHASA INDONESIA

Samsuri

### 1. Pengantar

Pada akhir tahun 40-an dan dalam tahun 50-an dihasilkan penulisan tata bahasa Indonesia, seperti *Tatabahasa Baru Bahasa Indonesia* (1949) oleh S. Takdir Alisjahbana, *Tatabahasa Indonesia* (1949) oleh Dr. C.A. Mees, *Inleiding tot de Studie van de Indonesische Syntaxis* (1951) oleh Dr. A.A. Fokker, *Jalan Bahasa Indonesia* (1954) oleh Sutan Mohammad Zain, *Tatabahasa Indonesia* (1955) oleh I.R. Poedjawijatna dan Dr. P.J. Zoetmulder, *Dasar-Dasar Tatabahasa Indonesia* (1956) oleh S. Zainuddin G. Png. Batuah, dan *Kaidah Bahasa Indonesia* (1957) oleh Dr. Slametmuljana. Mungkin kecuali tata bahasa Dr. Slametmuljana, semua tata bahasa Indonesia yang lain itu memakai kerangka acuan ilmu bahasa tradisional Yunani-Latin.

Pada waktu yang kira-kira sama dihasilkan penulisan tata bahasa Inggris (Amerika) seperti *The Structure of English* (1952) oleh C.C. Fries, *The Structure of American English* (1954) oleh W. Nelson Francis, *Structural Essentials of English* (1956), dan *Patterns of English* (1959) oleh Paul Roberts. Apabila ketiga yang pertama boleh dikatakan tata bahasa acuan, yang terakhir merupakan tata bahasa pedagogi, sedangkan keempatnya memakai kerangka acuan ilmu bahasa deskriptif atau struktural.

Setelah lebih kurang tiga puluh tahun, kita sekarang menyaksikan hasil penulisan tata bahasa Indonesia yang memakai kerangka acuan eklektik, dari ilmu bahasa tradisional sampai dengan ilmu bahasa deskriptif atau struktural, yaitu *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis (TBDBIS)* oleh Harimurti Kridalaksana dan kawan-kawan, yang di sana-sini menyinggung pula hasil-hasil penelitian dalam ilmu bahasa semantik generatif dan analisis wa-

cana. Umpamanya, praanggapan kewacanaan konstruksi-konstruksi sintaktik disinggung dalam mengantar bab mengenai kalimat, tetapi kemudian pernyataan itu tidak dikembangkan untuk menerangkan konstruksi-konstruksi sintaktik dalam tata bahasa itu, khususnya tidak di dalam pembicaraan mengenai pola-pola kalimat bahasa Indonesia. Kita mesti bergembira, bahwa kita telah maju dalam penulisan tata bahasa nasional kita dengan karya Kridalaksana dan kawan-kawannya ini, biarpun mungkin kita masih tetap ketinggalan juga dibandingkan dengan penulisan tata bahasa di luar negeri. Ketinggalan ini dalam bidang kita maupun dalam bidang-bidang lain, memang merupakan suatu keprihatinan ahli-ahli dalam bidang apapun di Indonesia. Bagaimana sikap dan tindakan para sarjana Indonesia menghadapi ketinggalan dalam bidang ilmu dan teknologi ini tentulah di luar jangkauan makalah yang sederhana ini.

Saya tidak akan menyajikan pikiran saya tentang pola-pola kalimat bahasa Indonesia. Jika ada pembaca yang ingin juga mengetahuinya, saya persilakan membaca buku saya. *Tata Kalimat Bahasa Indonesia*, yang baru dapat diterbitkan tahun lalu. Alih-alih saya akan menyoroti saja apa yang disebut oleh judul makalah ini dalam TBDBIS. Sudah tentu, dalam memberikan tanggapan saya tentang pola-pola kalimat bahasa Indonesia, saya mestilah memakai ukuran yang dipakai dalam TBDBIS, yaitu dasar penulisannya, yang dinyatakan sebagai eklektik.

## 2. Pola-Pola Kalimat Bahasa Indonesia

Sebelum membicarakan pola-pola kalimat bahasa Indonesia, ada baiknya saya mengutip apa yang dimaksud oleh para pengarangnya dengan *klausa* dan *kalimat*. Pada halaman 10 terdapat keterangan bahwa: *Klausa merupakan satuan gramatikal yang terjadi dari subjek, predikat, objek, dan keterangan yang masing-masing diungkapkan dengan frasa dan kata*. Pada halaman 208 dalam bab tentang klausa, dijelaskan bahwa: *Klausa ialah satuan gramatikal berupa gabungan kata yang sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat yang mempunyai potensi untuk menjadi kalimat*. Dan pada halaman 222 tentang klausa dan kalimat dijelaskan bahwa: *Klausa merupakan konstruksi inti dari satuan yang konkret, yaitu kalimat*. Pada halaman 10 dijelaskan bahwa: *Kalimat merupakan satuan yang terjadi dari klausa dan intonasi serta partikel apabila ada*.

Dengan berpegang pada definisi-definisi di atas, marilah kita kaji pola-pola kalimat dalam TBDBIS. Untuk memberi fasilitas pada pembicaraan saya, saya terpaksa mengutip pola-pola yang disajikan dalam TBDBIS. Tata bahasa ini membagi kalimat menurut beberapa kriteria, yaitu (a) jumlah klausa, (b) struktur klausa, dan (c) amanat. Menurut (a) terdapat tiga macam pola, yaitu (1) kalimat tunggal, (2) kalimat bersusun, dan (3) kalimat majemuk. Baiklah pertama-tama saya menanggapi ketiga pola pertama ini dulu.

Pada kalimat tunggal (PKT) terbagi menjadi (dengan cara penyajian saya, tetapi lihat halaman 238 dan 239 dalam TBDBIS):

*PKT (a)*  $S \pm P \pm O1 \pm Pel \pm Ket$ , di mana

$S = N, FN, Pr, FPr.$

$P = N, FN, V, FN, A, PA.$

$O1 = N, FN, Pr, FPr.$

$Pel = . . .$

$Ket = FPrep, FA, FN, N.$

*Catatan saya:* Pel tidak jelas dan tidak dapat ditemukan keterangannya dalam daftar lambang yang dipakai dalam rumus. Mungkin 'pelengkap', tetapi pelengkap apa dan apa wujudnya?

Tanggapan saya tidak banyak mengenai pola (1, a) itu, yaitu hanya berupa pertanyaan (yang mungkin hanya disebabkan kekurangtelitian saja): Apakah para pengarang tidak mempertimbangkan urutan seperti:

- (i) a. Kerbau kami tiga ekor.
- b. Sawah Pak Hasan empat hektar.
- c. Anak mereka hanya dua orang.
- (ii) a. Kawan-kawan itu dari Medan.
- b. Anak kami di Malang dengan neneknya.
- c. Kereta api ini ke Surabaya.

sebagai kalimat tunggal juga, sehingga pada P dapat ditambahkan FNum dan FPrep.

Hal yang kedua merupakan pertanyaan pula, yaitu: Jika Ket merangkum FPrep, FA, FN, dan N, apakah kata atau frasa *sebaiknya*, *seyogianya*, *sebenarnya*, termasuk FA? Jika demikian, apakah frasa *semestinya* dan *seharusnya* juga termasuk FA?

PKT (b) S + P + Otl + O1, di mana

S = N, FN, Pr

P = FV, V

Otl = N, FN, Pr

O1 = N, FN, PR

atau

S + P + O1 + Prep + Otl, di mana

S, P, O1 dan Otl sama dengan yang di atas, sedangkan

Prep = untuk bagi

(Mungkin dalam naskah ada salah cetak).

Tanggapan saya, karena dua pola cabang (b) di atas ada hubungannya, yaitu bahwa benefaktif dapat dinyatakan dengan akhiran *-KAN* pada verba atau dengan memakai preposisi *untuk, bagi* antara O1 dan Otl, FV dan V yang berakhiran *-KAN* dan yang tidak, sebaiknya ditandai untuk menghindarkan urutan seperti (a) \**Ibu menggorengkan kerupuk adik* dan (b) \**Ibu menggorengkan kerupuk untuk adik*, yang banyak dipakai dalam masyarakat. Pertanyaan, mengapa PKT (b) tidak berisi Ket sebagai konstituen tidak wajib?

PKT (c) S + P + Pel.S + Ket, di mana

S = N, FN, Pr

P = adalah, merupakan, terdiri atas/dari, ialah, menjadi

Pel.S = N, FN, Pr

Ket = Fprep, FN

Tanggapan saya, bahwa Ket hanya berwujud frasa preposisi atau frasa nomina (1), dapat saya setuju, jika P ialah *adalah, ialah, dan merupakan*. Tetapi Ket, pada hemat saya, dapat berwujud FA juga, jika P ialah *terdiri atas/dari* atau *menjadi*. Dan jika hal itu dapat diterima, hemat saya, mesti dibedakan antara ketiga wujud P pertama dari kedua yang kemudian karena seperti dijelaskan oleh TBDBIS sendiri pada halaman 84, ketiga wujud P pertama itu ialah verba kopulatif, sedangkan kedua yang kemudian ialah verba ekuatif.

Pertanyaan saya, urutan (a) S + *menjadi* + FA dan (b) S + *menjadi* + FNum dimasukkan ke dalam PKT yang mana? Catatan saya, sebenarnya kemungkinan verba *menjadi* diikuti baik oleh FN, FA, maupun FNum, mem-

bedakan verba itu dari yang lain-lain, dan karena itu perlu memperoleh perlakuan tersendiri.

Saya tidak mempunyai tanggapan atas pola (1, d) dan karena itu saya terus ke pola kalimat bersusun (PKB). Pola ini dibagi menjadi lima pola cabang, seperti di bawah ini.

PKB (a) S + Ket. S + P + O ± Ket, di mana  
Ket = Fn, *dengan*, *yang*

*Catatan saya*

- (1) Tanpa diterangkan lagi wujud (atau: isi (?)) S, P, O, dan Ket. saya anggap keempatnya sama isinya dengan yang terdapat pada PKT.
- (2) Saya meragukan kebenaran pola itu. Atau hanya kekurangtelitian saja. Mestinya sesudah S menyusullah FN, *dengan*, *yang*, dan baru berikutnya konstituen Ket. S, sehingga pola itu menjadi:

$$S + \left\{ \begin{array}{l} \text{FN} \\ \text{dengan} \\ \text{yang} \end{array} \right\} + \text{Ket.S} + P + O \pm \text{Ket, yang}$$

pada hemat saya, masih kurang tepat karena predikat dapat saja berwujud verba intransitif, atau FN, FA, FPrep, FNum dan karena itu O mesti dinyatakan sebagai tidak wajib. Atau, ini pun kekurangtelitian?

Pembahasan tentang PKB (1) saya berikan sebagai berikut. Pada hemat saya, tidak hanya subjek saja yang dapat memperoleh keterangan, khususnya yang berwujud klausa relatif, melainkan juga FN yang lain, baik sebagai objek langsung, objek tak langsung, maupun unsur dalam FPrep. Kaidah klausa relatif itu penting, karena menunjukkan kreativitas pemakai bahasa, yang menurut tata bahasa generatif berbentuk:  $FN \rightarrow N (K) (Def)$ , di mana N ialah nomina, K ialah klausa relatif, dan Def ialah definitif. Dengan demikian, kita tidak saja dapat menghasilkan kalimat-kalimat bersusun seperti contoh yang diberikan oleh TBDBIS, (1) – (3) pada halaman 240, tetapi juga kalimat-kalimat bersusun seperti berikut.

- (a) Murid itu membaca buku yang dibeli kakaknya kemarin.
- (b) Ibu memasak adik, yang sedang berulangtahun, gado-gado yang sangat disukainya.

(c) Kemarin keluarga itu pergi ke kampung yang sedang dilanda banjir.

Jika keempat macam klausa relatif itu diterapkan pada sebuah kalimat, kita mungkin memperoleh kalimat seperti (d) di bawah ini:

(d) Anak kami yang sedang belajar bahasa yang dipakai di negara yang sedang dilanda kekeringan yang membunuh . . . .

Saya tidak mempunyai tanggapan atas PKB (b) dan (c), dan karena itu saya bicarakan baik PKB (d) maupun (e), sebagai berikut.

PKB (d)  $S_1 + P_1 \pm \text{bahwa} + O_1 : S_2 + P \pm O_2$

PKB (e)  $\text{bahwa} + O_1 : S_2 + P_2 \pm O_2 + S_1 + P_1$

*Catatan saya:*

- (1) Saya mempertanyakan mengapa Ket tidak wajib tidak dimasukkan ke dalam pola-pola itu.
- (2) Sebenarnya penempatan objek yang didahului oleh *bahwa* ke depan kalimat, tentu mengubah susunan kalimat induk, yaitu yang ditandai dengan  $S_1 + P_1$ , menjadi  $P_1 + S_1$ , atau lebih tepat  $P_1$  (oleh)  $S_1$ . Marilah ambil contoh kalimat (1) dan (2) bagi pola PKB (d), yang berbunyi:

- (1) Dia mengetahui bahwa dirinya tidak disukai.
- (2) Menteri mengumumkan bahwa harga-harga akan stabil.

Penempatan ke depan klausa objek itu tidaklah:

- (1, a) Bahwa dirinya tidak disukai dia mengetahui.
- (2, a) Bahwa harga-harga akan stabil menteri mengumumkan.

melainkan :

- (1, b) Bahwa dirinya tidak disukai diketahui (oleh)-nya.
- (2, b) Bahwa harga-harga akan stabil diumumkan (oleh)menteri.

Pembahasan tentang kedua pola PKB (d) dan (e) adalah sebagai berikut. Konstruksi *bahwa + K(lausa)* saya sebut frasa nominal. Karena itu konstruksi atau struktur itu dapat menggantikan FN yang berfungsi sebagai subjek atau objek, seperti ternyata pada pola PKB (d) dan (e) di atas. Tetapi, di samping itu ada pola yang berisi frasa nominal itu sebagai apa yang saya sebut 'pelengkap FN'. Oleh karena FN dapat berfungsi sebagai subjek, objek atau unsur dalam FP, pelengkap FN itu pun dapat melengkapi subjek, objek, maupun frasa preposisi. Pola-pola itu mungkin dapat dinyatakan sebagai berikut:

- (a)  $S_1 + \text{bahwa} + S_2 + P_2 \pm \text{Ket} + P_1$   
 (b)  $S_1 + P_1 + O_1 + \text{bahwa} + S_2 + P_2 \pm O_2 \pm \text{Ket}$   
 (c)  $S_1 + P_1 + \text{FP} + \text{bahwa} + S_2 + P_2 \pm O_2 \pm \text{Ket}$

dengan contoh kalimat, masing-masing sebagai berikut:

- (a, i) Gambaran bahwa pulau Jawa akan menjadi pulau-kota dalam tahun 2000-an mengerikan benar-benar.  
 (b, i) Bung Hatta mempunyai pendapat bahwa perkembangan suatu masyarakat memerlukan perencanaan yang rasional.  
 (c, i) Kedua-duanya berakar pada kepercayaan bahwa umat manusia di dunia ini dapat dan harus menentukan nasibnya sendiri.

Sekarang baiklah saya terus ke pola kalimat majemuk (PKM), yang dibagi menjadi dua pola cabang, (a) dan (b), sebagai berikut.

PKM (a)  $S_1 \pm \text{Ket. } S_1 + P + O_1 + \text{kon} \pm S_2 \pm P_2 \pm O_2$ , di mana  
 kon = *dan, tetapi, sedangkan, . . .*

Tanggapan saya sebagai berikut. Pola itu tidak cukup sebuah saja, melainkan paling tidak tiga buah. Pertama, hal itu disebabkan karena *dan* di satu pihak serta *tetapi* dan *sedangkan* di pihak lain mempunyai pengertian yang berbeda. Apabila klausa-klausa yang dihubungkan itu sejenis, memang ketiganya dapat dijadikan satu. Tetapi, klausa-klausa yang dapat dibentuk menjadi kalimat majemuk tidaklah selalu sejenis. Ambillah kalimat contoh (2) dan (3). Karena dalam kalimat (2) klausa-klausanya sejenis, ketiga kon, yaitu *dan, tetapi, serta, sedangkan* dapat dipakai. Sekarang ambillah contoh (3), dan tampaknya bahwa hanya *dan* yang dapat dipakai, sedangkan *tetapi* dan *sedangkan* tidak. Hal itu menjadi petunjuk bahwa ketiga kon itu, dan saya kira yang lain-lain juga, tidak dapat dijadikan satu. Paling tidak, jika kita benar-benar memperhitungkan pengertian. Ambillah contoh (4). Karena klausa-klausa yang dihubungkan boleh dikatakan bersifat kontras, kon *tetapi* dapat dipakai, sedangkan *dan* dan *sedangkan* kurang dapat diterima.

Kedua, *dan* sendiri dapat dipakai untuk menghubungkan S yang berbeda, jika P sama, dan sebaliknya *dan* dapat dipakai untuk menghubungkan P yang berlainan, jika S sama. Hal ini tidak berlaku bagi *tetapi* dan *sedangkan*. Agaknya tiap kon mempunyai sifat-sifatnya, dan tata bahasa yang bersifat deskriptif wajib menjelaskannya, lebih lagi jika nanti akan dipakai sebagai referensi. Dengan ini, baiklah saya terus membicarakan PKM (b).

PKM (b)  $\text{kon}_1 + S_1 + P_1 \pm O_1 \pm \text{Ket}_1 + \text{kon}_2 + S_2 + P_2 \pm O_2 \pm \text{Ket}$

*Catatan saya:*

- (1) Seyogianya  $kon_1 \dots kon_2$  dijelaskan berisi apa saja, dan tidak diserahkan kepada 'pengetahuan' pembaca.
- (2) Rumus di atas berbeda sedikit dengan yang terdapat dalam TBDBIS, yaitu bahwa Ket kedua saya nyatakan sebagai manasuka, dan tidak seperti dalam naskah yang merupakan wajib. Jika saya salah, saya minta maaf. Tetapi, lalu saya akan terpaksa bertanya, mengapa mesti wajib?

Tanggapan saya atas pola (b) ini sama saja dengan tanggapan saya atas PKM (a). Dalam hal ini tiga  $kon_1 \dots kon_2$  itu mesti dibagi dua kelompok, yaitu (1) *bukan ... melainkan* dan *bukan ... tetapi* menjadi satu kelompok, dan (2) *baik ... maupun*. Demikian pula  $kon_1 \dots kon_2$  yang lain-lain mesti dijelaskan sifat-sifatnya, sehingga penulisan tata bahasa pedagogis yang didasarkan atas TBDBIS ini kelak tidak akan mengalami "malapetaka".

Hal yang berikut ialah klasifikasi menurut struktur klausa, atau berdasarkan kriteria (B), dan terdapat dua macamnya, yaitu kelompok yang berstruktur lengkap dinyatakan sebagai (1) kalimat lengkap (KL), dan yang disebut berstruktur tak lengkap diberi nama (2) kalimat tak lengkap (KTL). Saya mulai dengan yang pertama:

KL    S    +    P    ±     $\left\{ \begin{array}{c} O \\ Ket \end{array} \right\}$ , di mana

S    =    N, FN, Pr, FPron

P    =    N, FN, V, FV, A, FA

O    =    N, FN, Pr, FPron

Ket =    FPrep, FA, FN

*Catatan saya:*

- (1) Seperti dinyatakan sendiri oleh TBDBIS, tanda  $\left\{ \begin{array}{c} \dots \\ \dots \end{array} \right\}$  ber-

arti 'pilih salah satu'. Tetapi apakah benar, bahwa konstituen tidak wajib di atas, yaitu O dan Ket, hanya pilihan antara objek dan keterangan saja? Apakah tidak mungkin, bahwa baik objek maupun keterangan keduanya terdapat dalam sebuah kalimat lengkap? Jika jawaban atas pertanyaan ini positif, jadi

O dan Ket dapat berkolokasi, rumus di atas perlu diganti, seperti yang terdapat dalam rumus-rumus klasifikasi (A).

- (2) Yang kedua ini ialah mengenai hal yang hampir sama, yaitu tentang Ket yang manasuka (yang berlaku pula bagi Ket dalam pola-pola kalimat pada klasifikasi (A)).

Hemat saya, Ket yang dinyatakan sebagai berisi FPrep, FA, FN, bukanlah hanya pilihan salah satu, melainkan dua atau bahkan semuanya dapat berkolokasi, jika penafsiran saya benar, yaitu FPrep yang merupakan keterangan tempat, PA yang merupakan keterangan apa yang saya sebut "modalitas" dan keterangan cara, dan FN dapat juga merupakan keterangan cara/instrumen. Jika apa yang saya tafsirkan itu betul, rumus KL itu mestilah lain, yaitu bahwa keempat macam keterangan itu diberikan penanda sendiri-sendiri secara tidak wajib.

- (3) Pada rumus ini pun rupanya para pengarang tidak menerima urutan-urutan seperti (a) *Anak Amat empat orang* dan (b) *Keretaapi ini ke Surabaya* sebagai kalimat-kalimat lengkap. Hal ini dinyatakan oleh pola KL dengan P yang tidak berisi FNum dan FPrep. Oleh karena itu saya tanyakan, mengapa?

Tanggapan saya tentang struktur tidak lengkap sebagai berikut. Seperti yang telah saya singgung di atas dalam TBDBIS, telah dijelaskan bahwa kalimat ialah satuan yang menjadi bagian dan terikat pada satuan yang lebih besar, yaitu (paragraf dan) wacana. Memang kalimat berdiri sendiri, tetapi hanya secara relatif. Di samping itu, seperti yang dikatakan oleh TBDBIS ujaran adalah data mentah. "Dari ujaran itulah kita dapat membuat abstraksi-abstraksi untuk penelitian bahasa," demikian saya kutipkan dari halaman 225 pada TBDBIS

Dalam hubungan wacana apa yang kita hadapi merupakan informasi baru, yang biasanya dinyatakan secara eksplisit pada permulaan wacana itu.

Apa yang kita hadapi memang merupakan informasi baru, tetapi pengertian atau penafsiran maknanya berhubungan dan bahkan tergantung pada informasi lama. Apa yang menjadi informasi lama tidak lagi dinyatakan secara eksplisit, sehingga mungkin saja bagian-bagian kalimat tidak disebutkan, karena bagian itu merupakan informasi lama, yang dapat ditelusur kembali dalam wacana itu. Dalam konteks kewacanaan inilah sebenarnya, secara abstraksi tidak ada kalimat yang tidak lengkap. Hal ini, seperti saya singgung di atas,

sayangnya tidak dikembangkan oleh para pengarang TBDBIS, dan hanya secara deskriptif menguraikan apa adanya, tanpa mengadakan abstraksi data bahasa yang dihadapinya.

Jadi, dalam hubungan wacana, ujaran-ujaran itu lengkap, dalam arti ada unsur-unsur yang berfungsi sebagai subjek, sebagai predikator, sebagai objek, sebagai keterangan tempat, sebagai keterangan waktu, sebagai keterangan cara, sebagai keterangan modalitas, dan lain sebagainya. Bergantung pada apa yang merupakan informasi lama, yang mungkin tidak perlu dinyatakan lagi, kita menghadapi data bahasa yang merupakan informasi baru. Jika seandainya kita menghadapi ujaran "adik", bergantung pada apa saja yang merupakan informasi lama (= yang telah diketahui dalam hubungan kewacanaan itu tentang "adik"), "adik" yang merupakan suatu nomina, yang dapat berfungsi sebagai subjek, atau objek, atau unsur pada frasa preposisi, dan lain sebagainya, maka "adik" dapat diabstraksikan sebagai subjek, atau sebagai objek, dan lain sebagainya, bergantung pada apa saja yang telah menjadi informasi lama tentang "adik" itu.

Suatu ujaran yang kita hadapi sebagai data bahasa tidak saja dapat berwujud kalimat lengkap, tetapi juga dapat berwujud sebagai bagian-bagian kalimat yang berfungsi. Di samping abstraksi 'kalimat tunggal', kita dapat juga mengabstraksikan dari wacana itu, ujaran-ujaran sebagai 'kalimat bersusun' dan 'kalimat majemuk'. Sudah tentu, kita tidak dapat mengadakan abstraksi sesuka kita, melainkan mesti ada tanda-tanda (= *signals*) atau pemarkah-pemarkah (= *markers*), yang membenarkan pengabstraksian kita itu. Pronominalisasi, definitif, "itu anafora", dan lain sebagainya merupakan tanda-tanda hubungan kewacanaan. Konektif yang diberi bergaris dalam kalimat-kalimat di bawah ini merupakan juga pemarkah semacam itu, dan secara abstraksi kita dapat menentukan kalimat (4) sebagai kalimat bersusun dan (5) sebagai kalimat majemuk.

- (4) a. *Karena* orang itu tidak membayar pajak.  
b. *Sebab* dia terlalu tinggi hati.
- (5) a. *Dan* promovendus itu kemudian diluluskan.  
b. *Tetapi* anak mereka hidup di tengah-tengah kemewahan.  
c. *Sedangkan* sebagian besar rakyat Indonesia masih miskin.

Dengan tanggapan saya di atas, saya tidak perlu lagi membicarakan kelompok struktur tak lengkap itu, yang dibagi lagi menjadi tujuh. (a) – (g). Jika semuanya dapat diterangkan secara kewacanaan, saya tidak keberatan untuk menerimanya, tetapi jika tidak, tentulah kita tidak dapat menganggap tiap

potong ujaran yang 'tidak lengkap' sebagai bagian dan terikat pada wacana, maksudnya dianggap sebagai kalimat.

Pola-pola kalimat berdasarkan kriteria (C), yaitu amanat (wacana), ada enam macamnya, yaitu (1) deklaratif, (2) interogatif, (3) imperatif, (4) aditif, (5) responsif, dan (6) interjektif. Saya akan mulai dengan yang pertama, tetapi rupanya telah dibicarakan, biarpun saya tidak dapat mencari pola-pola kalimat (A) itu dalam naskah TBDBIS.

Pola kalimat interogatif dibagi menjadi tidak kurang dari tujuh pola cabang.

*Inter. (a)* Int.  $\pm$  P  $\pm$  O  $\pm$  Pel  $\pm$  Ket., di mana

Int =  $\phi$ , *apa, siapa, bila*, . . .

*Catatan saya*

- (1) Secara logis, jika Int. berisi  $\phi$ , pola ini dapat berupa kosong juga, karena yang lain-lain tidak wajib.
- (2) Saya tidak mengerti apa Pel, dan jika itu pelengkap, pelengkap bagi apa?
- (3) Contoh kalimat (1), "Dia yang datang?", tidak jelas dalam rumus, *yang* ditandai oleh apa?

Pada hemat saya, perlu dijelaskan bahwa kalimat tanya dapat menanyakan seluruh kalimat atau bagian-bagian tertentu, dan juga gabungan antara bagian yang satu dengan yang lain. Dan untuk bagian-bagian itu masing-masing terdapat kata tanya atau interogativanya sendiri. Dengan begitu orang akan lebih mudah mengasosiasikan bagian-bagian kalimat tertentu dengan kata tanya atau interogativanya. Sepanjang data bahasa Indonesia yang saya miliki, kalimat interogatif tidak selalu menempatkan interogativanya pada bagian depan kalimat tanya. Banyak kalimat interogatif yang berwujud seperti :

- (4) a. Adikmu membeli durian ini di mana?  
 b. Mereka itu mengerjakan apa di tempat yang panas itu?  
 c. Ibumu bagaimana? Baik-baik saja, bukan?  
 d. Namamu siapa, nak?  
 e. Tuan sudah pergi ke Bali?  
 f. Tamu kita harus pergi juga?  
 g. Si bedebah itu meninggalkan kampung ini kapan?  
 dan lain sebagainya, di samping:

- aa. Di mana (kah) ibu menyimpan buku ku?
- bb. Apa yang mereka kerjakan di tempat yang panas itu?
- cc. Bagaimana keadaan orangtuamu?
- dd. Siapa (kah) mau hidup dalam ketertutupan begini?
- ee. Sudah(kah) engkau belajar bahasa Jepang sekarang?
- ff. Harus ke mana kami bertanya?
- gg. Kapan mereka dapat menikmati hidup ini?

dan lain sebagainya.

Sesuai dengan kemungkinan pemfokusan bagian-bagian kalimat tertentu dengan kaidah fokus, saya menganggap kalimat-kalimat interogatif pertama, (a) – (g), sebagai dasar sedangkan yang kedua (aa) – (gg), sebagai turunan. Biar pun TBDBIS tidak memakai gagasan dasar dan turunan, secara deskriptif dapat saja yang pertama dinyatakan sebagai satu pola, sedangkan yang kedua sebagai pola lain, yang sebenarnya ialah derivasi pemfokusan, yaitu dengan menempatkan bagian-bagian yang difokuskan ke depan kalimat tanya. Hal ini ditambah dengan pemfokusan dengan partikel *kah* dan tanda fokus *yang*. Sudah tentu akan terdapat penggabungan antara pemakaian partikel fokus *kah* dan penanda fokus *yang*, atau antara pemindahan ke depan dan pemakaian partikel fokus "kah", dan gabungan yang lain-lain. Perlu saya susulkan bahwa *yang* dalam kalimat contoh TBDBIS *Dia yang datang?* merupakan penanda fokus.

*Inter. (b)* Adv. + -kah + S + P ± O ± Pel ± Ket, di mana  
Adv. = *bukan, harus, sudah, . . .*

*Catatan saya*

Saya tidak menganggap *harus* dan *sudah* sebagai adverbial.

Seperti yang telah saya terangkan di atas, pola ini bagi saya merupakan struktur interogatif yang memperoleh fokus dengan menempatkan apa yang disebut oleh TBDBIS sebagai adverbial pada bagian depan kalimat. Seperti yang saya pahami, masih ada kalimat-kalimat tanya seperti (Contoh-contoh dalam TBDBIS saya pakai di sini):

- (1) Saya sudah menerangkan hal itu, bukan?
- (2) Anda sudah pergi ke Taman Mini?
- (3) Kami harus menyelesaikan pekerjaan hari ini?

dan kalimat-kalimat yang diberikan sebagai contoh oleh TBDBIS ialah variasi kalimat-kalimat tanya (dasar) di atas.

*Inter. (c)* S + Int. ± P ± O ± Ket ± Pel, di mana  
 Int. = *apa, siapa, ...*

Pola (c) itu bagi saya ialah pola yang telah mengalami pemfokusan, kecuali contoh (1), yang merupakan kalimat tanya dasar. Dengan begitu, sebenarnya terdapat kekacauan analisis di sini, sehingga dua macam pola sebenarnya tercacaukan.

*Inter. (d)* S ± P ± O + Int. ± dem.

Dengan memperhatikan contoh-contoh yang diberikan, pada hemat saya, di sini terdapat kekacauan analisis karena contoh kalimat tanya (1) termasuk dasar, sedangkan contoh (2) termasuk kalimat turunan. Hal yang akhir ini mungkin tidak disadari, karena anjakan tata bahasa TBDBIS memang tidak memakai gagasan *dasar - turunan*, dan kedua mungkin bahwa kata itu dianggap sebagai demonstrativa biasa, sedangkan sebenarnya ialah demonstrativa nominal, sedangkan frasa *pekerjaan siapa* adalah frasa nominal tanya. Bentuk kalimat tanya dasarnya ialah: *Itu pekerjaan siapa?*

Atas pola (e) dan (f) saya tidak mempunyai tanggapan, kecuali bahwa kedua pola itu ialah pola yang sama, dalam arti keduanya adalah pola kalimat tanya turunan. Dan pola (g) ialah pola kalimat tanpa dasar, yaitu kalimat tanya yang menanyakan seluruh klausa. Dan jika pola dasar ini difokuskan, kalimat-kalimat tanya itu menurut pikiran saya, akan menjadi: (1) Bukankah anda senang mengerjakan itu? (2) Bukankah dia sudah menjadi ketua? (3) Bukankah mereka berjanji akan bertemu di sana? dan (4) Bukankah pekerjaan itu tidak makan waktu banyak?

Pola kalimat imperatif dibagi menjadi dua dalam TBDBIS. Yang pertama, pada hemat saya, kemungkinan ada salah cetak/ketik, sehingga rumusnya dinyatakan sebagai:

*Imp. (a)* ± (-lah) ± O ± Pel ± Ket.

*Catatan saya:*

- (1) Kemungkinan salah cetak/ketik itu ialah kurangnya konstituen P wajib.
- (2) Cara menuliskan ± (-lah) pun keliru karena tanda + sama saja dengan tanda kurung, keduanya menyatakan tidak wajib atau mana suka. Karena itu, pakai saja salah satu.

*Imp. (b)* Imp. (+ -lah) ± S + P ± Pel ± Ket, di mana

Imp. = *mari, ayo, biar, silakan, jangan, tidak boleh, tolong*

Pada hemat saya ada baiknya dibedakan antara kalimat imperatif dan kalimat ajakan (= *request*) sebab, saya kira, kata-kata *mari*, *ayo*, *silakan* adalah partikel ajakan, dan bukan partikel menyuruh. Kecuali itu saya akan membedakan imperatif biasa dan imperatif negatif atau larangan karena ada partikel larangan, yaitu *jangan*.

Pola (4), aditif, dan (5), responsif, tidak saya bicarakan karena telah saya tanggapi pada pembicaraan tentang kalimat deklaratif. Tinggallah pola (6), ialah interjektif.

*Interj.*      Intèrj.       $\pm S + P \pm O \pm Pel \pm Ket$ , di mana  
                   Intèrj.      = *alangkah, bukan main, wah, . . .*

Sebuah catatan terpaksa saya berikan, karena, pada hemat saya, contoh (2) dan (3) tidak sesuai polanya dengan rumus yang diberikan. Setelah partikel interjektif *wah* memang urutan kata-kata berikutnya sesuai dengan rumus, tetapi setelah *alangkah* dan *bukan main*, bukanlah diikuti oleh S, melainkan oleh P dan baru S. Oleh karena itu, mesti ada dua pola, yaitu seperti yang terdapat di atas dengan partikel-partikel seperti *wah, cih, aduh, wai*, dlsb. Yang kedua ialah dengan penukaran tempat antara S dan P dengan didahului oleh *alangkah, bukan main*, dlsb.

Sebenarnya ada semacam persesuaian (= *agreement*) antara partikel-partikel itu dengan klausa yang mengikutinya, yaitu dalam hal pengertian. Kita tidak dapat mengatakan:

Cih, gadis itu cantik benar.

Idiiih, engkau memang gagah.

Amboi, kami beruntung sekali hari itu.

dan lain sebagainya. Jika kita memang memperhatikan makna, persesuaian itu mesti kita perhatikan.

## Simpulan

Pada hemat saya, tidak ada gunanya mengadakan klasifikasi kalimat yang berdasarkan atas tiga macam kriteria. Satu saja sudah cukup, yaitu, tentu saja, amanat. Dengan demikian, kita akan memperoleh klasifikasi kalimat (1) deklaratif, (2) interogatif, (3) imperatif, (4) ajakan, (5) interjektif, (6) negatif. Bagi kalimat-kalimat deklaratif, hemat saya, hanya kalimat tunggal yang dapat diberikan polanya secara jelas dan ajeg. Pola-pola cabang kalimat tunggal deklaratif saya rasa penting, yaitu yang terdiri atas lima macam pola. Kalimat bersusun tidak perlu diberikan polanya karena terdapat berpuluh-puluh dan secara teoretis tidak terhingga, setidaknya jika kita mau mengada-

kan pemberian secara tuntas. Oleh karena itu, cukup ditunjukkan bagaimana pola konstruksi atau struktur klausa relatif, apositif, dan pelengkap-pelengkap FN, FV, FA, FNum, dan FProp. Kalimat-kalimat majemuk sederhana perlu diberikan semua polanya, yang memang cukup banyak, tetapi terbatas. Tidak perlu diberikan pola-pola majemuk rumit karena banyak macamnya. Sebagai semacam tambahan data untuk direnungkan, berikut ini saya sertakan sejumlah kalimat bersusun dan majemuk, agar kita tahu betapa rumitnya kalimat-kalimat itu sebenarnya.

- (1) Tambahan yang terakhir itulah dari segala tambahan yang berturut-turut yang menentukan nilai yang memberikan seseorang akan sejumlah barang yang ada padanya.

[ EK - 42 ]

- (2) Ada gambaran pula yang menunjukkan bahwa hubungan antarmanusia di Indonesia masih banyak diwarnai perasaan, menggunakan banyak basa-basi yang efisien, informal, berslogankan gorong-royong yang kurang disertai zakelijkheid, tindakan-tindakan yang rasional, dan lain sebagainya.

[ UM - 11 ]

- (3) Itu berarti bahwa dalam ABRI yang sedang memainkan peranan yang begitu penting dalam hidup negara dan masyarakat kita harus tetap dipupuk sikap yang mendukung pembangunan dan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang mendasari demokrasi, yaitu martabat, kebebasan dan persamaan manusia.

[ SB - 162 ]

- (4) Dalam perekonomian kita, pada dasarnya masalah perlunya perataan partisipasi nasional ini timbul karena golongan yang tergolong ekonomi lemah, yang dalam masyarakat kita hampir selalu bisa diidentifikasi dengan golongan pribumi, tidak bisa menerima kedudukan yang diperankan dalam perekonomian kita, yakni hanya merupakan penerima pasif dari proses perekonomian maupun pertumbuhan yang terjadi.

[ KP - 16 ]

- (5) Pemikiran rasional yang bersifat evolusi dari Bung Hatta ini kadang-kadang dibedakan orang dengan pemikiran teman perjuangannya, Bung Kamo, yang lebih banyak memusatkan kepada cita-cita yang besar seperti bagaimana mencapai Indonesia merdeka secepat mungkin, tetapi sedikit sekali memperhatikan keperluan-keperluan yang dibutuhkan

bangsa Indonesia untuk membangun suatu sistem perekonomian dan politik yang layak dan dapat diandalkan.

[ BC - 35 ]

- (6) Data survai tentang motivasi kerja karyawan di Jakarta menunjukkan bahwa 35,33% karyawan menyatakan pimpinan mereka menyampaikan instruksi-instruksi yang harus diturut tanpa adanya kesempatan pada karyawan untuk mengutarakan ide-ide atau pendapat-pendapat yang bertalian dengan instruksi tadi, baik berdasarkan pengalaman karyawan itu sendiri maupun berdasarkan teori yang diperoleh di bangku sekolah sebelum karyawan itu bekerja di bawah pimpinan tadi.

[ UM - 34 ]

- (7) Hal ini antara lain mungkin disebabkan oleh karena si pemegang tampuk kekuasaan sudah merasa sangat yakin dengan kebijaksanaannya sehingga tidak mau lagi mendengarkan pandangan-pandangan lain, atau oleh karena suasana politik yang semakin sensitif sehingga dirasakan sangat berbahaya oleh cendekiawan-cendekiawan yang berada di lingkungan kekuasaan untuk memberanikan diri mengemukakan apa yang mereka anggap benar tetapi berbeda, apalagi kalau bertentangan dengan kebijaksanaan yang ada.

[ BC - 19 ]

- (8) Meskipun diketahui bahwa tidak semua orang dari angkatan yang kini hampir pensiun atau telah pensiun melakukan hal yang sama, namun kita ketahui dari para karyawan muda dewasa ini suatu sikap "submissive", "patuh tanpa reserve", "kurang berani mengajukan pendapat kepada orang lain terutama atasan", dan selalu "minta" perhatian dari pimpinan, dan tingkah laku yang terarah pada "usaha untuk menyenangkan atasan" meskipun diketahui bahwa perbuatannya ini bertentangan dengan dirinya sendiri.

[ UM - 29 ]

- (9) Ciri-ciri mencolok serupa itu bisa merupakan ciri-ciri fisik, yang misalnya membedakan orang warga negara Amerika Serikat turunan Afrika, ialah orang Negro, dari warga negara yang berkulit putih, tetapi bisa juga merupakan suatu kompleks ciri-ciri yang lebih luas dari itu, seperti misalnya suatu kebudayaan tertentu, dan adat-istiadat serta sistem norma-norma di dalam kebudayaan itu, yang mengatur kehidupan warga dari kolektif itu.

[ PA - 86 ]

## ELEMEN DALAM WACANA DAN PENERAPAN PADA BAHASA INDONESIA

Soenjono Dardjowidjojo

### 1. Pendahuluan

Berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Harimurti dkk yang menggali elemen-elemen formatif dalam wacana untuk mengadakan klasifikasi taksonomik, saya akan menyoroti persoalan ini dari segi-segi yang mendasari pembentukan suatu wacana. Dengan perkataan lain, saya ingin tahu kenapa bentuk-bentuk linguistik tertentu dalam suatu rentetan kalimat mempertalikan kalimat-kalimat tersebut, sedangkan bentuk-bentuk linguistik yang lain tidak mempunyai daya kemampuan seperti ini.

Bagian 2.0 dari tulisan ini merupakan latar belakang teoretis yang akan saya pakai untuk Bagian 3.0 di mana akan saya kaitkan Bab VII dari *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis TBDBIS* oleh Kridalaksana dkk. dengan latar belakang di Bagian 2.0.

### 2. Elemen-Elemen dalam Wacana

Seperti dinyatakan oleh Kridalaksana dkk, bahasa bukanlah kalimat atau kelompok kalimat yang tak terikat satu sama lain. Suatu rentetan kalimat barulah akan membentuk suatu pengertian apabila kalimat-kalimat tadi berpadu. Kalau kita meminjam istilah Longacre (1983), perpaduan ini menyangkut dua lokus. Pertama, dalam *notional deep structure* haruslah terdapat keserasian antara satu nosi di satu kalimat dengan nosi di kalimat yang

lain. Kedua, perpaduan dan pertalian nosi-nosi ini harus mempunyai manifestasi fonetik di *surface structure*. Keberterimaan suatu wacana ditentukan oleh ada—tidaknya hubungan yang serasi antara kedua struktur ini.

Hubungan sesama nosi dalam *deep structure* adalah identik dengan struktur semantik dalam bahasa. Karena di satu pihak struktur semantik adalah semacam kondensasi dari pengetahuan manusia tentang dunia, sedangkan di pihak lain pengetahuan dunia tentulah tak terbatas dan bervariasi, maka sebenarnya kita diperhadapkan pada dua masalah yang saling berlawanan. Kalau kita menginginkan untuk mengetahui apa sebenarnya wacana itu, maka kita harus bisa mengungkapkan secara sistematis elemen-elemen, hubungan antar—elemen, dan kendala yang dimiliki oleh masing-masing nosi beserta realisasi fonetiknya. Di pihak lain, ketakterbatasan dan keragaman pengetahuan manusia tentang dunia membuat pekerjaan kita tidak akan pernah berakhir. Masalah seperti inilah yang sering membuat orang menjadi pesimistis (Chafe, 1972; Grimes, 1975).

Sampai sejauh mana pengetahuan tentang dunia ini patut dipertimbangkan, dan pada batas yang mana kita harus berhenti? Dapatkah kiranya ilmu linguistik membedakan arti *horse shoes* dengan *alligator shoes* dalam kalimat (a) *Yesterday he bought a pair of horse shoes*, dan (b) *Yesterday he bought a pair of alligator shoes*. Pengertian tentang *horse shoes* sebagai sepatu yang dipakai oleh kuda dan *alligator shoes* sebagai sepatu yang dibuat dari kulit buaya kita peroleh semata-mata karena pengetahuan kita tentang dunia: (a) kuda bisa memakai sepatu, buaya tidak, (b) sepatu bisa dibuat dari kulit buaya, tetapi tidak dari kulit kuda. Di negara Ork, tempat si Mork, bisa kebalikannya.

Di samping lingkungan ekstralinguistik seperti di atas, ada lingkungan-lingkungan yang lain. Dalam bahasa-bahasa tertentu, ada kata-kata yang secara kodrati mengandung pengertian definit, baik kata itu dalam suatu kalimat tunggal maupun dalam kalimat dengan kalimat lain di suatu wacana. Dalam bahasa Inggris, misalnya, konsep mengenai langit, matahari, dan bulan harus bermarkah definit: *Fly me to the moon, dear; The sun is very bright today, isn't it?*

Wacana, yang umumnya berbentuk bahasa verbal, bisa pula diwujudkan dalam bentuk fisik. Kalimat (1) tidak perlu didahului kalimat (2) untuk bersama-sama membentuk suatu wacana.

- (1) Coba, Ton, papan tulisnya dihapus.
- (2) Melihat papan tulis yang masih kotor, ibu guru berkata kepada Tono Tono. . . .

Kalimat (2) tidak mutlak harus ada, apabila kalimat (1) diucapkan di dalam ruang kelas untuk belajar. Pemakaian *-nya* pada *papan tulisnya* sudah jelas menunjukkan papan tulis mana yang harus dihapus.

Lingkungan-lingkungan seperti digambarkan di atas adalah lingkungan yang ekstralinguistik. Berbeda dengan lingkungan ekstralinguistik, lingkungan linguistik ditemukan di dalam wacana verbal. Lingkungan linguistik yang paling jelas dan yang sering disebut adalah yang dinamakan "penyebutan sebelumnya" (*prior mention*)<sup>1</sup>. Kalau dalam suatu wacana kita memulai dengan kalimat

(3) Pada jaman dahulu ada janda yang memiliki (seekor) singa  
maka mulai dari sini kita harus menganggap kata benda *singa* definit -- kalau kita masih berbicara tentang referen yang sama. Dengan demikian, maka kalimat kelanjutannya hanya bisa (4a) dan tidak bisa (4b)

(4a) Singa itu sangat bengis dan suka makan kepala orang.

(4b) Seekor singa sangat bengis dan suka makan kepala orang.

Yang menyebabkan terbentuknya suatu wacana dengan menggabungkan kalimat (3) dan (4a) adalah adanya hubungan semantik yang serasi antara *seekor singa* di (3) dengan *singa itu* di (4a). Di (3) konsep mengenai singa barulah pertama kali dinyatakan, dan karena itu kata ini mengandung apa yang oleh Chafe dinamakan informasi baru. Segera setelah kebaruan ini dinyatakan, maka berubahlah statusnya menjadi informasi lama. Dalam contoh-contoh kalimat di atas, informasi baru ini dinyatakan dalam bentuk fonetik (*sëëkor*) *singa* di mana *seekor* adalah mana suka (*optimal*), sedangkan informasi lama dalam bentuk *singa itu*.

Kalau sekarang kita perhatikan kalimat (5) dan (5a),

(5) Pada jaman dahulu ada janda yang suka singa..

(5a) Singa itu besar-besar dan bengis-bengis.

maka akan segera kita ketahui bahwa kedua kalimat ini tidak membentuk wacana, padahal persyaratan informasi baru vs informasi lama telah terpenuhi. Jadi, masalah penunjukan sebelumnya sudah dilaksanakan.

Tampaknya kita tidak bisa hanya menggantungkan pada kriteria seperti di atas. Kita harus menyelam lebih dalam untuk meneliti macam kata kerja yang terdapat dalam kalimat. Perbandingan antara (3) dan (4a) di satu pihak dengan (5) dan (5a) di pihak lain menunjukkan bahwa kata kerja pada anak kalimat di (3), *memiliki*, adalah tak jenerik, sedangkan di (5), *suka*, adalah jenerik. Pengaruh status jenerik dan tak jenerik dari suatu kata kerja sangat besar untuk menciptakan referen wacana (*discourse referent*).

Terjun setapak lebih dalam lagi memaksa kita untuk mengatakan bahwa penyebutan sebelumnya dan status kejenerikan kata kerja saja belum tentu cukup kuat untuk menciptakan suatu referen wacana. Sebelum suatu referen bisa kita anggap terciptakan, terlebih dahulu kita harus tahu bahwa proporsi yang kita ajukan adalah positif. Dengan demikian maka kalimat seperti

(6) Gepeng tidak punya onta

tidak bisa menciptakan referen wacana untuk konsep *onta*. Ini dibuktikan dengan ditolaknya kalimat (6a-c) sebagai kelanjutan dari kalimat (6) dalam satu wacana yang sama. (Kartunnen, 1968; 1976).

(6a) Onta itu tua

(6b) Harganya sangat mahal

(6c) Dia mau memelihara onta itu satu tahun, dsb..dsb.

Dalam kasus-kasus tertentu fitur semantik kata kerja, seperti fitur *random* (Chafe, 1970 & 1976), memunculkan keraguan-arti (*ambiguity*). Kalau kita diberi kalimat

(7) Saya sedang mencari teman

kita tidak yakin apakah pembicara sedang mencari seorang teman tertentu ataukah dia sedang mencari orang untuk dijadikan teman. Interpretasi mana pun bisa membentuk suatu wacana, tetapi tentu saja dengan arti yang berlainan seperti terlihat pada (7a) dan (7b) berikut.

(7a) Namanya Markonah

(7b) Saya orang baru di sini.

Dalam hal fitur *random* ini, saya rasa kita harus pula melihat fitur semantik dari komplemen nominal yang mengikuti kata kerja. Perhatikan kalimat (8).

(8) Saya sedang mencari pacar.

Meskipun *mencari* adalah *random*, namun kalimat (8) tidak menimbulkan keraguan arti. Kalimat yang bisa mengikutinya hanyalah yang macam (7b), tidak mungkin macam (7a). Dari contoh ini jelas bahwa tali wacana tidak hanya merupakan masalah hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain, tetapi juga bisa harus didahului oleh hubungan nasional dari elemen-elemen dalam kalimat itu sendiri.

Masih di dalam arena kata kerja, nampaknya kehadiran kata kerja bantu dalam kata kerja predikatif juga harus diperhatikan. Kartunnen (1976:369), mengatakan bahwa *nonspecific indefinites* tidak bisa menciptakan referen wacana, apabila muncul sebagai komplemen dari suatu kata kerja bantu. Kalau diterapkan dalam bahasa Indonesia maka sesudah kalimat (9) kita

tidak bisa meneruskannya dengan kalimat (9a).

(9) Sumkuning harus membuat jamu.

(9a) Jamu itu/dia enak.

Tidak terciptanya referen wacana pada (9) disebabkan oleh kenyataan bahwa hasil dari perbuatan belumlah merupakan kenyataan, sehingga mustahillah kita bisa memberikan atribut pada sesuatu yang belum ada. Tetapi dengan dalih ini pula kita bisa menyanggah, atau paling tidak merevisi, pernyataan Kartunnen. Tidak terciptanya referen wacana pada (9) nampaknya bukan hanya karena dalam kalimat ini ada kata kerja bantu, tetapi absennya kata kerja bantu pada kalimat (9a) mau tidak mau mempertentangkan antara sesuatu yang tak-riel dengan sesuatu yang riel. Kalau kedua konsep ini diselaraskan maka tentu saja wacana bisa terbentuk. Dari (9) kita bisa meneruskannya dengan (9b) di mana konsep tak-riel ini diwujudkan dalam kata kerja bantu *harus*.

(9b) Jamu itu harus enak, pahit, dsb.

Lingkungan linguistik lain yang memegang peranan dalam pembentukan wacana bertalian dengan pengertian mengenai prasuposisi atau *entailment*. Hidup di dunia memberkati kita manusia dengan pengetahuan-pengetahuan tertentu yang secara kodrati kita miliki sedikit demi sedikit. Salah satu di antaranya adalah pengetahuan kita mengenai benda. Benda di dunia ini memiliki bagian-bagian wajib (*obligatory parts*) yang diperlukan untuk membentuk suatu pengertian secara menyeluruh. Benda seperti *rumah* memiliki bagian-bagian wajib seperti dapur, pintu, jendela, atap, dsb., sedangkan benda seperti *manusia* memiliki mata, telinga, hidung, dsb.

Pengetahuan dunia seperti ini tercerminkan dalam bahasa yang kita pakai. Dalam suatu wacana apabila benda itu disebut, maka sejak itu seluruh bagian-wajib dari benda itu otomatis memiliki fitur definit. Jadi, kalau dalam suatu wacana kita memulai dengan kalimat

(10) Saya sudah dapat pacar sekarang.

maka mata, hidung, telinga, dsb. harus diperlakukan sebagai definit, sehingga kalimat lain yang membentuk wacana hanyalah yang macam (10a), dan bukan yang (10b).

(10a) *Matanya* biru, *rambutnya* lebat, dsb.

(10b) Mata biru; hidung itu mancung, dsb.

Prasuposisi tidak mutlak, tetapi relatif. Bagian-bagian mana yang bisa dianggap wajib tidak selalu mudah ditentukan. Faktor-faktor seperti lokasi geografik, kesadaran budaya, dan jangka waktu bisa pula mempunyai penga-

ruh. Di daerah di mana rumah umumnya didirikan di atas tiang, maka (11) dan (11a) membentuk suatu wacana yang lumrah.

(11) Minggu yang lalu kami membeli rumah.

(11a) Lantainya dua meter dari tanah.

Akan tetapi, kedua kalimat ini akan sangat aneh bagi orang dari daerah lain di mana rumah berdiri langsung di atas tanah.

Pentingnya unsur kesadaran budaya bisa digambarkan dengan contoh kalimat dari Chafe (1972, hlm. 67): "I saw *the letter* that Harry Truman wrote to the music critic of the *Washington Post*". Kecuali kalau kita tahu akan kejadian di mana bekas presiden Amerika Harry Truman menulis surat keras kepada pengritik musik Paul Hume yang mengecam pertunjukan musik yang disajikan oleh putrinya, kita akan mengatakan bahwa pemakaian *the* sebelum *letter* adalah tidak tepat.

Di samping bagian, benda juga memiliki hal-hal yang kodrat (*innate properties*). Termasuk dalam kategori ini adalah ukuran, berat; warna, harga, dsb. Seperti halnya dengan bagian-wajib, bagian-kodrat juga menjadi definit segera setelah benda "induk"-nya dinyatakan. Jadi kalau dalam suatu wacana kita dapati kalimat (12), maka kalimat-kalimat pada (12a) membentuk wacana.

(12) Kemarin Jeng Inem membeli mobil.

(12a) Harganya murah sekali.

Warnanya merah, dsb.

Yang menyebabkan (12) dan (12a) membentuk suatu wacana adalah adanya prasuposisi yang melekat pada kata *mobil* sehingga harga dan warna menjadi bagian-kodrat dari kata ini.

Bahwa benda dan bagian-bagiannya adalah sangat signifikan, bisa dilihat dari situasi berikut. Karena konsep mengenai manusia itu berprasuposisi mata, rambut, dsb., maka kalimat-kalimat seperti (10) dan (10a) adalah lumrah dan membentuk suatu wacana. Kalimat (13) dan (13a) juga lumrah dan membentuk wacana pula karena konsep mengenai keranjang tidak merupakan bagian-wajib atau bagian-kodrat dari sebuah sepeda.

(13) Kemarin saya membeli sebuah sepeda.

(13a) Ada keranjangnya.

Kalau bagian-bagian itu wajib atau kodrat dan kita membentuk kalimat yang paralel dengan (13)–(13a), maka sangat anehlah bunyinya. Perhatikan (14)–(14a).

(14) Kemarin saya dapat pacar.

(14a) Ada hidungnya; Ada rambutnya, dsb.

Prasuposisi kita temukan tidak hanya pada kata benda saja, tetapi juga pada kata kerja. Sementara kita akui bahwa hal ini masih sangat kabur, namun ada cukup alasan untuk mengatakan bahwa kata kerja tertentu menentukan status semantik dari kata benda yang mengiringinya. Misalnya, konsep yang berkaitan dengan menjual dan membeli berprasuposisi adanya pertukaran uang; membunuh dan mati mengakibatkan adanya mayat, dsb.

Karena adanya hal-hal seperti ini, maka wacana seperti pada (15–15a) dan pada (16–16a) bisa terbentuk, meskipun perkataan uang dan jenazah belum pernah dinyatakan sebelumnya.

(15) Saya mau jual mobil.

(15a) Uangnya mau saya pakai untuk beli kerbau.

(16) Pak Raden meninggal kemarin.

(16a) Jenazahnya akan dimakamkan di Batakali.

Di samping (a) penyebutan sebelumnya, (b) sifat kata kerja, (c) peranan kata kerja-bantu, (d) proposisi positif, dan (e) prasuposisi, ada elemen lain yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan wacana. Elemen ini adalah apa yang oleh Fries di tahun 1945 disebut *sequence signals* dan yang kini dijabarkan oleh Longacre (1983) dengan istilah *predications*.

Di dalam bahasa ada bentuk-bentuk linguistik tertentu yang fungsinya memang khusus mempertalikan antara apa yang terjadi sebelumnya dengan apa yang sedang atau akan terjadi kemudian. Kata-kata seperti *kemudian*, *lalu*, *sesudah itu*, dsb. merujuk ke keberuntunan dua peristiwa atau lebih, sedangkan kata *sementara itu* ke bersamaan peristiwa, *akan tetapi* ke dua peristiwa atau lebih yang dikontraskan, dsb. (Selanjutnya, lihat Longacre, 1983, Bab 3). Dengan demikian maka kalimat (17) dan (17a) membentuk suatu wacana, meskipun antara kalimat pertama di (17) dengan kalimat (17a) telah tersisipkan kalimat lain.

(17) Besok saya harus ke Glodok, mau beli alat potong rumput. Saya belum tahu toko mana yang jual alat seperti itu.

(17a) Kemudian saya harus pergi ke Bank Bumi Daya.

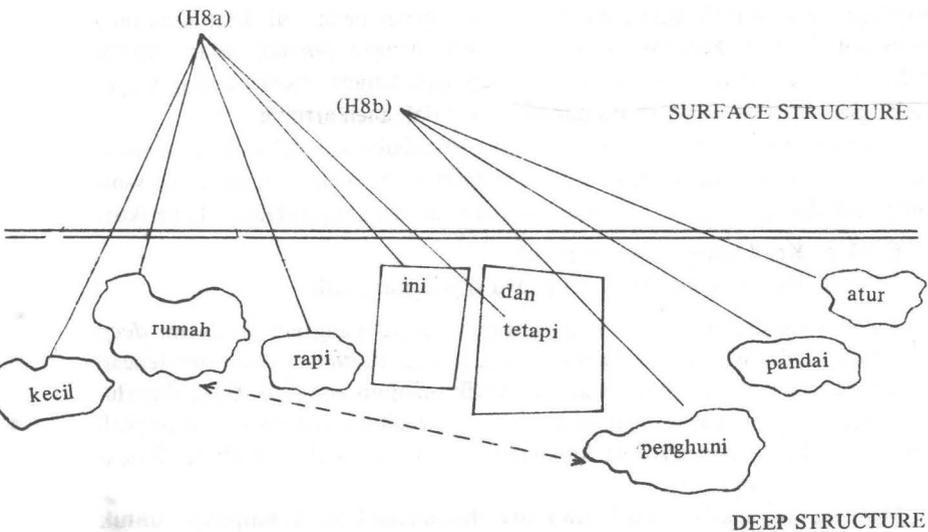
### 3. Perangkai Wacana yang Terselubung

Dari uraian yang disajikan di Bagian 2.0 jelas tampak bahwa alasan apa pun yang kita pakai untuk membentuk suatu wacana, manifestasi dari alasan ini selalu muncul dalam *surface structure*. Perhatikan saja, misalnya, munculnya partikel *-nya*, pemarkah definit *itu*, dan kata penghubung *kemudian*, dsb. Namun, seperti telah disajikan oleh Kridalaksana dkk., manifestasi fonetik ini tidak selalu tampak secara eksplisit.

Dalam Bagian 3.0 ini saya ingin melihat apakah sebenarnya yang mendasari klasifikasi seperti "hubungan sebab," "hubungan syarat-hasil," "hubungan latar-kesimpulan" yang diajukan oleh Kridalaksana dkk. Contoh-contoh kalimat akan saya ambil dari TBDBIS dengan tambahan huruf K di mukanya.

Tampaknya klasifikasi Harimuri dkk., terutama yang berdasarkan aspek semantik, mempunyai kaitan yang erat dengan konsep *notional deep structure* dan *surface structure* yang saya nyatakan di Bagian 2.0. Di samping itu, kewacanaan kalimat-kalimat ini kelihatannya berkaitan pula dengan konsep-konsep seperti prasuposisi, sifat kata kerja, dsb. Bisa dibayangkan adanya hubungan yang multi-arah dari nosi-nosi dalam *deep structure* dengan manifestasi fonetiknya di *surface structure* seperti diilustrasikan di gambar berikut dengan memakai kalimat (K8).

- (K8) a. Rumah ini kecil tetapi rapi.  
b. Rupanya si penghuni pandai mengaturnya.



Dalam akan membuat ujaran yang manifestasinya adalah (K8), pembicara telah mempunyai nosi-nosi tertentu yang berkaitan dengan konsep mengenai benda yang dinamakan "rumah", ukuran dari benda ini (yakni, kecil) dan perbandingan kontradistik antara ukuran ini dengan sifat lain (yakni, rapi). Dia mempunyai konsepsi mengenai jarak antara dia dengan benda yang dipikirkannya, yang terwujud dalam kata *ini*. Hubungan antara nosi-nosi dalam pikiran seseorang akhirnya diwujudkan dalam kalimat (K8a).

Selanjutnya, konsep yang berkaitan dengan kata *rumah*, *kecil*, *rapi* dsb. itu masing-masing mempunyai seperangkat fitur semantik yang berkaitan atau tak berkaitan dengan konsep lain, bertentangan dengan konsep lain atau pun berprasuposisi dengan konsep lain, dst. Jadi, konsep mengenai kata *kecil*, misalnya, bisa berbanding kontradistik dengan kata *rapi* sehingga kalimat (K8a) bisa kita terima. Akan tetapi, fitur dari *kecil* tidak bisa berbanding kontradistik dengan *megah*, sehingga kalimat seperti "Rumah ini kecil tetapi megah" akan menimbulkan kejanggalan.

Konsep yang diwujudkan dalam kata *rumah* mempunyai berbagai prasuposisi, termasuk di antaranya konsep mengenai penghuni. Demikian pula *penghuni* bisa berkolokasi secara semantik dengan *pandai*, tetapi *pandai* tidak bisa berkolokasi dengan rumah, sehingga kalimat (K8b) adalah wajar, sedangkan kalimat "Rumah itu pandai" sangatlah aneh artinya.

Nosi-nosi beserta hubungan sesamanya itu diwujudkan dalam bentuk fonetik pada *surface structure* dan wujud kalimatnya bisa berbeda-beda. Di samping (K8-b), pembicara bisa mewujudkan idenya dengan (K9c-d) berikut.

(K8) c. Kecil tetapi rapi rumah ini.

d. Pandai mengaturnya rupanya si penghuni, dsb.

Tidak mustahil pula bahwa hubungan nosional yang ada di dalam *deep structure* tidak diwujudkan dalam bentuk fonetik di *surface structure* dengan alasan bahwa kehadirannya secara semantik maupun sintaktik tidak diperlukan. Dengan memakai gambar di atas dan *redundancy* seperti ini, barangkali sekarang kita bisa menyoroiti kalimat (K8a-b) dan kalimat-kalimat Kridalaksana dkk. lainnya.

Memang barangkali benar bahwa ada "hubungan latar-kesimpulan" untuk kalimat (K8ab) seperti dikatakan Kridalaksana et al. (1984:254), tetapi kalau kita selami hubungan ini tampaknya ada dua faktor yang menyebabkan terbentuknya wacana antara kedua kalimat ini. Pertama, jelas ada hubungan prasuposisi antara *rumah* dengan *penghuni*. Begitu kita menyebut perkataan *rumah* maka penyebutan kata *penghuni* mau tidak mau menghubungkan kedua konsep yang bersangkutan. Kedua, karena *penghuni* telah dengan jelas

merujuk pada *rumah*, maka manifestasi kata *rumah* di (K8b) tidak mutlak lagi. Sebenarnya (K8b) adalah kependekan dari *Rupanya si penghuni rumah itu pandai mengaturnya*. Pada (K8b) telah terjadi apa yang sementara ini saya namakan *lexical deletion of presupposed object*.

Nampaknya sebagian besar, atau bahkan semua, dari klasifikasi di Bagian 7.2 TBDBIS bisa diringkas dan diterangkan dengan cara-cara di atas. Kalimat (K3) dan (K4), yang mempunyai "hubungan sebab/alasan"

(K3) Tidak banyak buku bacaan tersedia di pasaran pada waktu itu.

Anak-anak hanya dapat membaca komik.

(K4) Tiba-tiba ia merasa rindu kepada anaknya. Tanpa banyak persiapan pergilah ia ke kota yang jauh itu.

masing-masing mengandung prasuposisi dan penyebutan sebelumnya. Dengan telah diperkenalkannya konsep negatif *tidak* dan *buku bacaan* di (K3), maka perkataan *hanya*, *membaca*, dan *komik* hanyalah merupakan konsekuensi lanjutan. Pada (K4) jelas ada penyebutan sebelumnya dengan dipakainya kata *ia* di kalimat kedua. Mungkin pula ada hubungan prasuposisi antara *rindu kepada anaknya* dengan *pergi ke kota yang jauh itu*.

Kalimat (K17) secara implisit juga mengandung penyebutan sebelumnya; demikian pula (K19) yang lebih jelas ditandai dengan pemarkah *itu*. Di (K5) ada pula penyebutan sebelumnya, tetapi di kalimat berikutnya dilakukan pronominalisasi sehingga *pedagang-pedagang Cina* diganti dengan *mereka*. Kebanyakan contoh yang lain mengandung prasuposisi — dari yang sangat jelas dan eksplisit sampai yang agak samar dan implisit. Misalnya *menunggu* pada (K9) tentunya berprasuposisi adanya sesuatu yang datang atau muncul. Dengan demikian maka kalimat *Saudara tidak muncul* tentulah berkaitan dengan penungguan seseorang. Prasuposisi terdapat pula pada kalimat (K11). Di kalimat pertama nomor ini terdapat perkataan *negeri kita*. Konsep mengenai negeri mengandung hal-hal yang wajib atau kodrat, termasuk adanya rakyat yang menghuninya. Jadi, dipakainya perkataan *rakyat* pada kalimat berikutnya mempertalikan kedua kalimat tadi, dan terbentuklah suatu wacana.

Karena kalimat-kalimat lain di Bagian 7.2 TBDBIS ini bisa diterangkan dengan cara-cara di atas, maka saya tidak akan mengupasnya satu per satu lagi.

#### 4. Penutup

Analisis Kridalaksana dkk memang sangat terinci dan *njlimet*, tetapi saya

khawatir bahwa keterincian dan *kenjlimetan* ini malah justru membuat kita tidak tahu ketakterbatasannya — artinya, yakinkah kita bahwa klasifikasi taksonomik ini sudah betul-betul *exhaustive*?

Di pihak lain cara penyorotan saya terhadap masalah wacana ini juga tidak tanpa masalah. Sebagai misal, kita harus bisa menjawab pertanyaan "sampai sejauh mana kita bisa mengatakan bahwa X berprasuposisi Y?" Kalau memang benar kita harus meneliti sifat setiap kata kerja, setiap kata benda, dan setiap kategori sintaktik lainnya, serta setiap hubungan sesamanya, kapankah kita akan tahu di mana kita berhenti? Bisakah kita membuat sistematika untuk hal yang tampaknya tak terbatas ini?

Di permulaan makalah ini telah saya nyatakan kerumitan yang kita hadapi dalam kita membahas wacana. Wacana menyangkut kehidupan manusia yang berkaitan dengan dunia di mana dia tinggal. Untuk merangkum pengetahuan tentang dunia dalam suatu teori yang utuh adalah pekerjaan yang kolosal. Kalau saja pada saat ini kita sudah mulai tahu permasalahannya dan sedikit-sedikit sudah bisa mengajukan hipotesis-hipotesis yang menunjang, saya sudah puas. Lain kali, generasi penerus kita akan menyelesaikannya.

**Catatan:**

1. Banyak ide di sini diambil dari Chafe dan Kartunnen serta Dardjowidjojo 1983.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chafe, Wallace L. 1970. *Meaning and the Structure of Language*. Chicago University of Chicago Press.
- Chafe, Wallace L. 1971. "Linguistic and Human Knowledge." Di dalam R.J. O'Brien, ed. *Monograph Series on Languages and Linguistics*, No.24. Washington D.C.: Georgetown University Press.
- R.J. O'Brien, ed. 1972. "Discourse Structure and Human Knowledge." Di dalam J.B. Carroll dan R.O. Freedle, ed., *Language Comprehension and the Acquisition of Knowledge*. Washington D.C.: V.H. Winston and Sons.
- R.J. O'Brien, ed. 1973. "Language and Memory." *Language*, Vol. XLIX, No. 2.
- R.J. O'Brien, ed. 1974. "Language and Consciousness." *Language*, Vol. L, No. 1.
- R.J. O'Brien, ed. 1975. "Givenness, Contrastiveness, Subjects, Topics, and Point of View." Di dalam C.N. Li, ed., *Subject and Topic*. New York: Academic Press.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 1983. "Penggolong, Itu, -Nya: Cara Berpikir Bangsa Indonesia." Di dalam S. Dardjowidjojo, *Beberapa Aspek Linguistik Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan
- Grimes, Joseph E. 1975. *The Thread of Discourse*. The Hague: Mouton Publishers.

- Karttunen, Lauri. 1967. "The Identity of Noun Phrases." *Rand Corporation Paper*, No. P-3756.
- Karttunen, Lauri. 1968a. "What Do Referential Indices Refer to?" *The Rand Corporation Paper*, No. P-3854.
- Karttunen, Lauri. 1968b. "What Makes Definite Noun Phrases Definite?" *The Rand Corporation Paper*, No. P-3871.
- Karttunen, Lauri. 1976. "Discourse Referents." Di dalam J.D. McCawley, ed. *Syntax and Semantics: Notes from the Linguistics Underground*, Vol. VII. New York: Academic Press.
- Longacre, Robert E. 1983. *The Grammar of Discourse*. New York: Plenum Press.

## ADVERBIA DALAM BAHASA INDONESIA

Maurits Simatupang

Tulisan ini akan membahas beberapa hal mengenai adverbial dalam bahasa Indonesia seperti diuraikan di dalam naskah buku *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis* (TBDBIS) susunan Harimurti Kridalaksana dkk (1984).

Hal yang pertama yang ingin saya singgung ialah kriteria yang digunakan dalam TBDBIS untuk menentukan kategori adverbial dalam bahasa Indonesia. Rumusan yang diberikan dalam TBDBIS tentang adverbial, yaitu "kategori yang mendampingi kategori-kategori. . verbal, adjektival, numeralia, adverbial lain dan proposisi" (Kridalaksana *at al.*, 1984:88), terasa terlalu umum sehingga apa sebenarnya yang dimaksud dengan kategori adverbial itu tidak begitu jelas. Apakah semua kata yang berdampingan dengan kategori verbal, adjektival, numeralia, adverbial lain dan proposisi otomatis dapat digolongkan ke dalam kategori adverbial? Bahasa Indonesia mengenal susunan:

### (1) Ambil seribu.

Konstituen manakah yang akan dipakai sebagai titik tolak analisis untuk menentukan kategori dalam susunan itu? Perumusan seperti yang diberikan TBDBIS tentunya berasumsi bahwa untuk menentukan kategori adverbial, kategori-kategori lain yang mendampinginya sudah diketahui. Rumusan "adverbial adalah kategori yang mendampingi adverbial lain" juga tidak begitu menolong jika kita tinjau dari segi penentuan kategori (*discovery procedure*). Namun, kesulitan yang ditimbulkan oleh perumusan demikian mungkin dapat

diatasi, walaupun tidak seluruhnya, jika analisis unsur bawahan langsung diperhatikan. Untuk jelasnya, baiklah kita perhatikan contoh-contoh berikut:

- (2) Dia sangat gembira.
- (3) Dia berjalan cepat-cepat.
- (4) Dia cantik sekali.

Dapat dilihat bahwa konstituen bawahan langsung yang dapat dihilangkan dari unsur bawahan *sangat gembira*, *berjalan cepat-cepat*, dan *cantik sekali* merupakan (calon) kategori adverbial. Terlihat pula di sini bahwa adverbial itu mana suka, dan dalam penentuan adverbial kemandirian ini diperlukan. Dalam susunan yang konstituennya terdiri atas dua adverbial secara berturut-turut, dapat juga proses eliminasi ini dipakai:

- (5) Kita harus selalu hati-hati.

Kalimat (5) dapat menghasilkan:

- (6) Kita harus hati-hati.

dan

- (7) Kita selalu hati-hati.

Begitu pula susunan seperti:

- (8) Dia memukul saya dua kali.

dapat menghasilkan:

- (9) Dia memukul saya.

dan

- (10) Dia memukul dua kali.

Uraian di atas memperlihatkan kepada kita hubungan yang secara implisit tercakup dalam "mendampingi" perlu dijelaskan dan dibatasi konteksnya. Dengan demikian kemungkinan untuk menganggap semua kategori asal saja mendampingi verba termasuk kategori adverbial dapat dihindari.

Masih ada soal lain yang kiranya perlu diperhatikan sehubungan dengan cara menganalisis seperti dikemukakan di atas, yaitu apa yang disebut di dalam TBDBIS adverbial ekstraklausal. Untuk itu, baiklah kita perhatikan contoh-contoh berikut.

- (11) Memang, saya sudah menduga.

(12) Saya memang sudah menduga.

(13) Saya sudah menduga, memang.

Sesuai dengan rumusan yang diberikan di dalam TBDBIS, *memang* dalam (11) dan (12) berkategori adverbial. Membedakan adverbial ekstraklausal dari intraklausal memang berguna dari segi perbedaan makna kalimat yang diakibatkan perbedaan posisi adverbial. Bahkan perbedaan posisi adverbial yang ekstraklausal pun sebenarnya perlu. Kata *memang* dalam (13) adalah sesuatu yang ditambahkan dan yang dalam bahasa Inggris disebut *after-thought*, jadi berbeda dengan *memang* dalam (11). Pengamatan ini menganjurkan agar posisi adverbial yang dapat berpindah-pindah itu perlu dideskripsikan lebih tuntas lagi. Selain itu, anggota mana dari adverbial dapat menduduki posisi tertentu. Kiranya contoh berikut pun memperkuat anjuran ini:

(14) Dia kerap juga berkunjung kemari.

(15) Dia juga kerap berkunjung kemari.

Untuk menentukan apakah sebuah konstituen kalimat berupa adverbial ekstraklausal atau intraklausal, tampaknya tidaklah selalu mudah, seperti diperlihatkan contoh berikut:

(16) Dia mungkin dikirim ke Bandung dan bukan ke Medan.

(12) Dia masih ingin pergi ke Bandung dan bukan ke Medan.

(13) Mungkin dia dikirim ke Bandung dan bukan ke Medan.

(14) Masih ingin dia pergi ke Bandung dan bukan ke Medan.

Walaupun dari segi posisi kita dapat dan barangkali harus menggolongkan *mungkin* dalam (13) dan *masih ingin* dalam (14) ke dalam adverbial ekstraklausal, rasa bahasa saya, setiak-tidaknya, masih ingin keterangan lebih lanjut. Kalimat (13) akan lebih jelas maknanya jika kita bandingkan dengan kalimat berikut:

(15) Dia dikirim mungkin ke Bandung dan bukan ke Medan.

Jika (14) kita perlakukan demikian, kita akan menghasilkan sebuah kalimat yang tidak berterima:

(16) \*Dia pergi masih ingin ke Bandung dan bukan ke Medan.

Pengamatan di atas ini mengisyaratkan bahwa satuan konteks yang telah disinggung sebelum ini, yaitu satuan unsur bawahan langsung perlu diperluas sehingga mencakup seluruh kalimat, jika kita pun ingin mengartikan kalimat secara tepat.

Melihat kata-kata yang didaftarkan sebagai adverbial di dalam TBDBIS, kita mendapat kesan bahwa analisis data yang dilakukan tidak tuntas. Kita dapat menanyakan, misalnya, alasan apa yang dipakai untuk menyebut *tiada*, *hendak*, dan *mau* adverbial deverbal, dan *saling* dalam *Mereka saling mencintai* adverbial penanda kuantitas. Begitu pula halnya dengan penentuan *mahasiswa*, *malam*, dan *siang* dalam

- (17) Anak saya sudah mahasiswa.
- (18) Adik saya masih mahasiswa.
- (19) Tidak malam, tidak siang, saya selalu terkenang padanya.

sebagai verba. Barangkali kalimat-kalimat berikut dapat dipertimbangkan untuk menganalisis kasus-kasus seperti itu:

- (20) Hari sudah malam.
- (21) Hari sudah petang.
- (22) Hari sudah menjadi malam.
- (23) Hari sudah menjadi petang.

Akhirnya, sebagai penutup pembahasan ringkas tentang adverbial dalam bahasa Indonesia seperti terdapat di dalam TBDBIS, hal-hal berikut dapat dikemukakan.

Agar pemberian adverbial di dalam bahasa Indonesia lebih tuntas, kriteria yang dipakai oleh para penyusun TBDBIS perlu ditinjau kembali, dan begitu pula halnya dengan rumusan dan istilah yang dipakai. Selain itu, kiranya data pun perlu diperbanyak. Adanya bagan yang memuat berbagai posisi adverbial akan sangat menguntungkan.

## **BEBERAPA CATATAN TENTANG KLAUSA**

**Mangasa Silitonga**

Tulisan ini diharapkan merupakan tanggapan atas naskah: *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Tanggapan ini lebih menekankan hal-hal yang penulis anggap belum dibicarakan atau dicakup oleh naskah tersebut.

Pembicaraan ini mencakup masalah:

- a. pengertian klausa,
- b. hubungan antara klausa, dan
- c. penggolongan klausa.

### **1. Pengertian Klausa**

Pada umumnya sebuah klausa diartikan sebagai satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat. Selain dari itu dapat disertai objek, pelengkap, dan keterangan.

Yang menjadi masalah, apakah klausa itu harus sekurang-kurangnya terdiri dari subjek dan predikat? Dalam hal ini kelihatannya perbedaan pendapat mungkin diakibatkan oleh kerangka teori yang berbeda.

Dalam hubungan ini penulis mengajukan usul sebagai berikut:

- a. Klausa adalah satuan gramatikal (konstituen) yang terdiri dari sebuah predikat yang dapat disertai oleh subjek, objek, pelengkap, ataupun keterangan.
- b. Istilah klausa hanya digunakan dalam kaitannya dengan pembicaraan kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Klausa yang dapat berdiri

sendiri (tidak bahagian dari sebuah kalimat) disebut kalimat tunggal atau kalimat sederhana.

Di bawah ini diberikan contoh-contoh kalimat berklause dua atau lebih.

- (1) Jhoni mengakui bahwa dialah yang menulis surat tersebut.
- (2) Sebuah senyuman yang memikat menghiasi bibirnya yang merah itu.
- (3) Kami mendengar suara yang aneh sewaktu mendekati rumah itu.
- (4) Kami sungguh-sungguh memahami keinginan para eksekutif yang sering bepergian dan yang memiliki citarasa yang tinggi.

Istilah klausa hanya dipakai dalam pembicaraan tentang kalimat seperti (6) dan (7) walaupun klausa yang sama terdapat juga dalam (5).

- (5) Dia sudah membyar pajak.
- (6) Saya tidak mengetahui (bahwa) ia sudah membayar pajak.
- (7) Bahwa dia sudah membayar pajak telah dilaporkannya kepada atasannya.

Perlu kiranya diutarakan bahwa frasa tidak selamanya lebih rendah tingkatannya dalam hierarki pemerian bahasa, atau merupakan satuan yang lebih kecil dari klausa.

Perhatikan kalimat-kalimat berikut.

- (8) Pakaian suaminya yang telah robek itu ditambahnya dengan rapi.
- (9) Saudara harus memecahkan masalah yang saya kemukakan tadi.

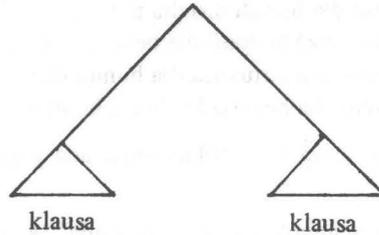
Kalimat (9) mempunyai objek yang terdiri dari sebuah frasa nominal (*masalah yang saya kemukakan tadi*) yang memuat sebuah klausa (*yang saya kemukakan tadi*). Demikian juga dalam (8) klausa *yang telah robek itu* adalah bahagian dari frasa *pakaian suaminya yang telah robek itu*. Klausa yang merupakan bahagian dari suatu frasa nominal seperti di atas biasa disebut *klause relatif*.

## 2. Hubungan antara klausa

Seperti yang sudah diutarakan tadi, istilah klausa dipakai dalam hubungan pembicaraan kalimat luas. Kalimat luas selalu terdiri dari dua klausa atau lebih. Terdapat dua cara utama untuk menghubungkan klausa-klausa tersebut: koordinasi dan subordinasi. Cara yang pertama (koordinasi) menghubungkan dua atau lebih klausa yang setara, sedang subordinasi hanya dapat menghubungkan dua klausa yang tidak setara. Dengan perkataan lain, kita dapat mengatakan bahwa apabila sebuah klausa berfungsi sebagai kons-

tituen klausa lain, maka hubungan yang terdapat di antara klausa disebut *subordinasi*. Klausa yang pertama disebut klausa utama, sedang klausa konstituen disebut klausa sematan. Hubungan antara dua klausa atau lebih disebut *koordinasi* apabila tidak terdapat klausa yang merupakan konstituen klausa yang lain. Kedua hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

Koordinasi:



Subordinasi:



Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini:

- (10) Dia putus asa dan bunuh diri.
- (11) Dia bekerja keras dan berhasil.
- (12) Dia bunuh diri karena dia putus asa.
- (13) Dia berhasil karena dia bekerja keras.

Kalimat (10) dan (11) terdiri dari klausa-klausa yang dihubungkan secara koordinatif, sedang kalimat (12) dan (13) secara subordinatif. Dari segi semantik terdapat persamaan hubungan sebab-akibat yang terdapat dalam klausa-klausa (10) dan (12). Persamaan ini juga kelihatan dalam klausa-klausa

(11) dan (13). Dari segi gramatikalnya terdapat perbedaan yang jelas: klausa yang terdapat pada (12) dan (13) adalah keterangan dalam struktur klausa.

Perbedaan yang lain yang dapat kita amati ialah urutan klausa dalam kalimat. Urutan tersebut pada (10) dan (11) sudah tetap, sedang pada (12) dan (13) dapat berubah.

- (14) \* Dan dia bunuh diri dia putus asa
- (15) \*Dan (dia) berhasil dia bekerja keras.
- (16) Karena dia putus asa dia bunuh diri.
- (17) Karena dia bekerja keras dia berhasil.

Urutan yang tetap ini kelihatannya ada juga hubungannya dengan pronominalisasi.

- (18) *Dia* menyukai lagu keroncong, tetapi *Hasan* tidak mau memberi kaset itu.
- (20) Walaupun *dia* menyukai lagu keroncong, *Hasan* tidak mau memberi kaset itu.

Pada klausa-klausa yang dihubungkan secara koordinatif (18), *dia* dan *Hasan* tidak merujuk kepada orang yang sama. Dengan perkataan lain, pronomina pada klausa yang pertama tidak dapat merujuk pada klausa kedua. Hubungan klausa yang subordinatif seperti (19) pronomina klausa pertama dapat, walaupun tidak harus merujuk pada nomina klausa kedua.

## 2.1 Koordinasi

Seperti yang sudah disinggung tadi, kalimat luas jenis ini terdiri dari dua klausa atau lebih yang dihubungkan oleh kata penghubung (konjungsi). Kata penghubung yang biasa dipakai adalah: *dan, atau, tetapi* beserta kata-kata lain yang artinya sama atau hampir sama dengan kata-kata tersebut: *dan lagi, lagi pula, serta, sedang, sedangkan, akan tetapi, sebaliknya, kemudian, lalu, bahkan* (lihat Ramlan, 1981). Umumnya sebuah kata penghubung klausa tidak dapat didahului oleh kata penghubung yang lain. Kata penghubung *dan, atau, dan tetapi* termasuk dalam golongan ini. Kata penghubung seperti *kemudian, bahkan*, dapat didahului oleh kata penghubung yang lain.

- (20) Sidang mempertimbangkan usul salah seorang peserta *dan kemudian* menerimanya dengan suara bulat.
- (21) Kesakitan itu tidak menunjukkan rasa penyesalan *dan malah* berani mengancam hakim yang memimpin sidang.

Kata penghubung *dan* berfungsi memperlihatkan hubungan antara klausa. Syarat yang harus dipenuhi ialah adanya hubungan semantik antara klausa yang dihubungkan.

- (22) \*Kami baru saja membeli batik dan sebuah morfem mungkin mempunyai beberapa alomorf.

Kalimat (22) dianggap tidak baik karena sulit rasanya mencari hubungan semantik antara kedua klausa tersebut. Tidak selamanya hubungan semantik ini sama ditafsirkan pemakai bahasa. Walaupun demikian, hal ini dapat diperjelas dengan penggunaan kata keterangan (adverbia).

Beberapa hubungan semantik tersebut diberikan di bawah ini.

- (a) Klausa kedua merupakan konsekuensi atau hasil klausa pertama.  
(23) Dia sangat lelah *dan* dia (langsung) tertidur.
- (b) Klausa kedua terjadi sesudah klausa yang pertama tanpa ada hubungan sebab-akibat.  
(24) Mahasiswa itu berkunjung ke Semarang dan dia (kemudian) mengunjungi Surakarta.
- (c) Klausa kedua menunjukkan pertentangan  
(25) Istrinya sangat hemat dan (sebaliknya) suaminya sangat boros.
- (d) Klausa kedua memuat keterangan tambahan pada klausa pertama.  
(26) Dia membeli makanan dan dia (juga) membeli minuman.

Apabila kedua klausa yang dihubungkan oleh *dan* mempunyai persamaan tertentu maka unsur yang sama dapat dihilangkan pada klausa kedua.

- (27) a. Pengurus Dharma Wanita mengunjungi panti asuhan dan mereka memberikan hadiah kepada penghuninya.  
b. Pengurus Dharma Wanita mengunjungi panti asuhan dan memberikan hadiah kepada penghuninya.
- (28) a. Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia menghadiri sidang itu.  
b. A.Halim dan Y. Burhan adalah pengarang buku tentang ujian bahasa.

Pada kalimat (27a) kedua klausa mempunyai subjek yang sama. Subjek klausa kedua dapat dihilangkan seperti terlihat pada (27b). Pada kalimat (28a) kedua klausa mempunyai predikat yang sama apabila kita menganggap-

nya kalimat luas. Tentu kita dapat juga mengatakan bahwa (28a) adalah kalimat sederhana dengan subjek frasa nominal,

Kalimat (28b) dapat ditafsirkan sebagai berikut. Pertama, kedua pengarang itu mengarang buku yang berbeda-beda judulnya tetapi semuanya tentang ujian bahasa. Kedua, mereka bersama-sama mengarang (beberapa) buku tentang ujian bahasa. Penghubung *dan* hanya menunjukkan hubungan semantik antara kedua klausa dan tidak selalu jelas apa hubungan itu. Dalam hal tertentu, untuk menghilangkan keraguan, kita dapat memakai kata penghubung seperti: *baik . . . . maupun*.

- (29) a. Tiap tahun sejumlah siswa SMTA mengikuti Lomba Karya Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan Departemen P dan K dan LIPI.  
 b. Tiap tahun sejumlah siswa SMTA mengikuti Lomba Karya Ilmu Pengetahuan, *baik* yang diselenggarakan Departemen P dan K *maupun* yang diselenggarakan LIPI.

Kalimat (29a) dapat memberikan pengertian adanya dua Lomba Karya yang terpisah, yang satu diselenggarakan oleh Departemen P dan K dan yang satu lagi oleh LIPI. Pengertian yang kedua ialah hanya satu Lomba Karya yang diselenggarakan bersama oleh kedua lembaga tersebut.

Pemakaian *baik . . . . maupun* hanya memungkinkan pengertian yang pertama. Hal yang disebut di atas tidak berlaku bagi semua penggabungan koordinatif. Perhatikan contoh berikut.

- (30) a. A dan B menghadiri seminar.  
 b. A menghadiri seminar dan B menghadiri seminar.  
 (31) a. A dan B berjumpa di Jakarta.  
 b. \*A berjumpa di Jakarta dan B berjumpa di Jakarta.  
 (32) a. A dan B berjabat tangan.  
 b. \*A berjabat tangan dan B berjabat tangan.

Hubungan arti antara kalimat *a* dan *b* pada (30) tidak sama dengan hubungan arti antara *a* dan *b* pada (31) dan (32). Tata bahasa Indonesia diharapkan juga memuat implikasi semantik dari penggabungan klausa dengan kata penghubung seperti *atau* dan *tetapi*.

## 2.2 Subordinasi

Seperti yang sudah disinggung tadi bahwa subordinasi merupakan hubungan antara dua klausa yang salah satu di antaranya merupakan konstituen dari

yang lain. Hubungan ini umumnya ditandai oleh sekelompok kata penghubung seperti *bahwa*, *ketika*, *karena*, *sekalipun*, dan *yang*. Kata-kata penghubung tersebut mendahului klausa sematan.

- (33) Artis Televisi Filipina itu meninggal karena dia menderita radang paru.
- (34) Dia mengatakan bahwa dia sudah lama tinggal di Pulau Bali.
- (35) Ibu-nya meninggal ketika dia baru berumur 3 tahun.

Pembicaraan tentang subordinasi akan lebih terperinci dalam bagian penggolongan klausa.

### 3. Penggolongan Klausa

Berdasarkan hubungan antara klausa di dalam kalimat, klausa dapat dibagi atas klausa bebas (koordinatif) dan klausa terikat (subordinatif). Selanjutnya di dalam sebuah kalimat luas subordinatif terdapat sebuah kalimat utama dan sebuah atau lebih klausa sematik.

- (36) Pak guru mengatakan bahwa murid-murid pasti lulus ujian Sipenmaru apabila mereka bekerja keras.
- (37) Mobil pemadam kebakaran itu baru tiba sesudah rumah itu habis terbakar.

Pada (36) klausa *apabila mereka bekerja keras* adalah klausa yang disematkan pada klausa *bahwa murid-murid pasti lulus ujian Sipenmaru*, dan klausa ini selanjutnya disematkan pada klausa *pak guru menetapkan*.

Kedua klausa yang pertama adalah klausa sematan dan yang terakhir klausa utama. Pada kesempatan ini kita hanya membicarakan klausa sematan. Klausa sematan dapat berfungsi sebagai subjek, objek, dan keterangan.

- (38) Bahwa dia tidak bersalah sudah jelas.
- (39) Semua orang mengetahui dia memilih Golkar.

Pada (38) klausa sematan berfungsi sebagai subjek, pada (39) sebagai objek dan pada (37) sebagai keterangan. Seperti terlihat pada contoh di atas fungsi klausa mempunyai persamaan dengan fungsi unit yang lebih kecil seperti nomina, adverbial, dan objektiva. Sesuai dengan fungsi tersebut, klausa dapat digolongkan atas: klausa *nominal*, *adjektival* atau *relatif*, dan *adverbial*.

### 3.1 Klausula Nominal

Klausula nominal terdiri atas, antara lain, klausula bahwa, klausula interogatif, dan klausula relatif.

#### a. Klausula Bahwa

Klausula ini dapat berfungsi sebagai subjek dan objek.

(40) Bahwa tembakau Deli mahal sudah lama diketahui orang.

(41) Dokter itu menjelaskan bahwa berlari tanpa busana berbahaya bagi kesehatan.

Apabila klausula *bahwa* berfungsi sebagai objek, penghubung *bahwa* dapat dihilangkan.

#### b. Klausula Interogatif

Klausula ini selalu dimulai dengan interogativa.

Klausula ini juga dapat berfungsi sebagai subjek dan objek.

(42) Di mana anda menginap tergantung pada uang yang anda miliki.

(43) Banyak orang bertanya-tanya kapan kesebelasan kita menjadi juara.

#### c. Klausula Relatif

Berbeda dengan kedua klausula yang disebut di atas, klausula relatif tidak dapat berfungsi sebagai subjek atau objek. Klausula ini hanya menerangkan nomina atau frasa nominal.

(44) Bintang film Perancis yang berambut pirang itu baru saja menyelesaikan film-nya yang kelima.

(45) Mahasiswa yang rajin mengunjungi perpustakaan itu selalu lulus dengan nilai baik.

Pada (44) klausula relatif (*yang berambut pirang*) menerangkan frasa nominal *bintang film Perancis* yang biasa disebut *anteseden*. Seperti sudah disinggung tadi frasa nominal dan klausula relatif yang menerangkannya inilah menjadi subjek (44), bukan klausula relatif-nya saja. Demikian juga pada (45) klausula relatif (*yang rajin mengunjungi perpustakaan itu*) menerangkan nominal mahasiswa dan keduanya berfungsi sebagai subjek kalimat (45).

Pada (44) dan (45) jelas kelihatan bahwa klausa relatif itu memperjelas ciri atau identitas frasa nominal atau nominal yang diterangkannya. Pada (44) dari sekian banyak bintang film Perancis dibatasi hanya pada *yang berambut pirang*. Demikian juga pada (45) dari sekian banyak mahasiswa hanya mahasiswa yang rajin mengunjungi perpustakaan yang selalu lulus dengan baik. Inilah yang disebut *klausa relatif restriktif*. Jenis yang kedua ialah *klausa relatif yang tidak restriktif* atau *apositif*. Perhatikan contoh berikut.

- (46) Responden, yang berjumlah 1200 orang, juga memilih sederet nama lain walau angkanya sangat kecil.

Pada (46) kita lihat bahwa klausa relatif (*yang*) *berjumlah 1200 orang* tidak memberikan keterangan tentang identitas *responden* dalam arti keterangan yang membedakan responden yang satu dari yang lain. Klausa relatif ini hanya memberikan keterangan tambahan tentang *responden* yang menurut anggapan penulis (pembicara) mudah diketahui oleh pembacanya (karena sudah dibicarakan sebelumnya).

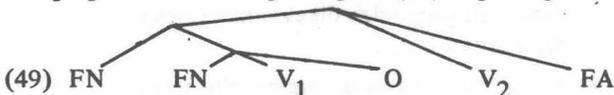
Perbedaan antara kedua jenis klausa relatif ini juga tergambar dalam intonasi yang tidak kita bicarakan pada saat ini. Sekarang marilah kita bicarakan masalah *yang*. Berbagai penulis telah memberikan nama yang berbeda, antara lain, kata "penghubung (konjungsi)", "partikel relatif" (Samsuri, 1985), *ligature*, *replacive*, dan *connective* (Verhaar, 1981). Seperti yang sudah dijelaskan tadi, klausa *yang* itu koreferensial dengan frasa nominal yang diterangkannya. Untuk jelasnya, marilah kita ambil kalimat (47).

- (47) Wanita yang meminum racun itu meninggal di rumah sakit.

Kalimat (47) dapat kita artikan sebagai berikut (48):

- (48) Ada wanita meminum racun; wanita tersebut meninggal di rumah sakit.

Dengan mempergunakan lambang kategori, (48) dapat digambarkan sebagai (49).



FN = frasa nominal

FA = frasa adverbial

V = verba

K = klausa

O = objek

Pada (47) yang menghubungkan FN dan klausa relatif itu ialah *yang*. Perbedaan pendapat timbul di dalam penafsiran terjadinya (47) dari (48). Paling sedikit terdapat dua golongan. Golongan yang pertama mengatakan bahwa FN yang terdapat pada klausa relatif dihilangkan karena koreferensial dengan anteseden, dan *yang* menghubungkan anteseden dengan klausa yang tersisa. Golongan yang kedua berpendapat bahwa FN yang terdapat pada klausa juga dihilangkan karena koreferensial dengan anteseden, tetapi kedudukannya sebagai subjek klausa digantikan oleh *yang*. Golongan yang kedua barangkali mendapat dukungan dari bahasa-bahasa yang memiliki struktur seperti bahasa Inggris. Dalam bahasa ini *Who, Whom, Which, That* dipergunakan sesuai dengan fungsi FN di dalam klausa relatif. Kelihatannya fungsi *yang* dalam bahasa Indonesia tidak sama dengan pronomina relatif dalam bahasa Inggris. Statusnya sebagai argumen yang berfungsi sebagai subjek sukar dipertahankan (lihat Verhaar, 1981). Pendapat golongan yang pertama kelihatan lebih sesuai dengan kaidah sintaksis bahasa Indonesia.

Hal yang paling menyangkut klausa relatif ialah masalah yang menyangkut FN sebagai objek di dalam klausa.

(49) Racun yang diminum wanita itu . . . .

(50) \*Racun yang wanita itu meminum . . . .

Perbedaan antara (49) dan (50) terletak pada fungsi FN di dalam klausa. Pada (49) FN yang koreferensial itu berfungsi sebagai subjek sedangkan pada (50) berfungsi sebagai objek. Kita dapat mengatakan bahwa dalam bahasa Indonesia FN yang koreferensial baru dapat direlatifkan apabila FN tersebut berfungsi sebagai subjek. Ini berarti apabila kita ingin merelatifkan objek maka kita harus mengubah fungsinya dulu menjadi subjek. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah kalimat itu menjadi kalimat pasif seperti terlihat pada (51) dan (52).

(51) a. \*Peraturan yang pemerintah telah  
mengeluarkan . . . .

b. Peraturan yang telah dikeluarkan (oleh)  
pemerintah . . . .

(52) a. \*Penemuan baru yang para peneliti telah  
menghasilkan . . . .

b. Penemuan baru yang dihasilkan para peneliti  
. . . .

Di atas telah disinggung bahwa FN yang koreferensial dihilangkan dari klausa. Kelihatannya pada konstruksi tertentu hal ini tidak berlaku.

- (53) Buku yang sampulnya sudah rusak itu . . . .
- (54) Anak yang uangnya hilang . . . .
- (55) Laki-laki yang kepalanya botak . . . .

Pada contoh di atas anteseden *buku*, *anak*, *laki-laki* koreferensial dengan sebahagian dari FN yang ada di klausa: *sampul buku*, *uang anak*, dan *kepala laki-laki*. Dalam hal ini unsur yang koreferensial itu tidak dihilangkan, tetapi diganti dengan proform-nya. Perlu dicatat bahwa di antara unsur FN yang terdapat dalam klausa itu ada hubungan "pemilikan". Bagi segolongan penutur bahasa Indonesia, penulis tidak termasuk di dalamnya, proform-nya masih dipakai walaupun hubungan pemilikan tidak terdapat di antara unsur-unsurnya.

- (56) Wanita yang sering kali mahasiswa itu menegurnya baru saja lulus ujian.
- (57) Mobil yang sudah lama sekali saya ingin memilikinya naik lagi harganya.

Apabila kalimat-kalimat seperti (56) dan (57) dapat diterima, maka kaidah mengharuskan subjek klausa saja yang dapat direlatifkan tidak berlaku lagi. Bagi mereka yang masih mempertahankan kaidah ini, (56) dan (57) harus diubah menjadi (58) dan (59).

- (58) Wanita yang seringkali ditegur mahasiswa itu baru saja lulus ujian.
- (59) Mobil yang sudah lama sekali ingin saya miliki naik lagi harganya.

Kelihatannya panjangnya klausa relatif seperti (56) dan (57) dapat mempengaruhi diterima tidaknya kalimat tersebut.

Perhatikan contoh berikut:

- (60) Mobil yang saya sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ingin membelinya naik lagi harganya.
- (61) Masalah yang kita semua telah bersama-sama membicarakannya mendapat perhatian penuh dari pemerintah.

Pada klausa relatif yang menunjukkan kontras *proform-nya* juga muncul.

- (62) a. Gulai kambing yang ibu (bukan orang lain) memasaknya enak sekali.  
 b. Batik yang Iwan Tirta (bukan pelukis lain) melukisnya mahal sekali.
- (63) a. Gulai kambing yang dimasak ibu enak sekali.  
 b. Batik yang dilukis Iwan Tirta mahal sekali.

Apabila kita bandingkan (62) dan (63) kontras yang dinyatakan oleh (62) tidak terdapat pada (63). Kelihatannya intonasi juga memegang peranan dalam hal ini. Kalimat (62) mungkin dapat dihubungkan dengan kalimat "topik-komen" (64b) (Sumarmo, 1970).

- (64) a. Ibu memasak gulai kambing yang enak.  
 b. Gulai kambing yang enak itu, ibu memasak-nya.

Objek kalimat (64a) dipindahkan ke depan dan meninggalkan *proform-nya*.

Kalau kita melihat contoh-contoh di atas, maka kelihatannya objek dalam klausa relatif tidak harus dihilangkan tetapi diganti dengan *proform-nya*. Dalam hal subjek kita temukan data yang mendukung adanya *proform* itu. Kalau kalimat yang di bawah ini dapat diterima pemakai bahasa Indonesia maka kita dapat mengatakan bahwa subjek juga tidak selamanya harus dihilangkan.

- (65) Setiap warga Indonesia yang ditanya telah terbukti melanggar hukum akan diajukan ke pengadilan.

### 3.2 Klausa Adverbial

Klausa adverbial pada dasar keterangan dalam kalimat. Seperti sudah disinggung sebelumnya bahwa klausa adverbial mempunyai hubungan yang subordinatif dengan klausa utama. Klausa adverbial dapat menunjukkan waktu, kondisi, pengandaian, penguatan, dan lain-lain.

Contoh:

Klausa Pengandaian:

- (66) a. Seandainya saya diangkat menjadi pelatih PSSI saya akan terapkan sistem Eropah.  
 b. Kalau Anda tidak datang, maka Anda akan dicoret dari daftar anggota.

**Klausa Waktu:**

- (67) a. Tentara Jepang telah mulai menyerang *sementara* banyak orang Amerika sedang menikmati liburnya.  
 b. Dia telah menjual semua harga bendanya *sebelum* dia meninggal.

**Klausa Konsesi:**

- (68) a. Dia berusaha tersenyum, *walaupun* perutnya lapar.  
 b. *Meskipun* anaknya sudah berusaha, dia belum juga dapat masuk perguruan tinggi.

**Penutup**

Tulisan ini telah mencoba mengungkapkan hal-hal yang belum dibicarakan atau baru disinggung sepintas lalu dalam naskah *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis*.

Khusus mengenai pemerian klausa, hubungan antara klausa perlu mendapat perhatian. Hubungan ini berkaitan dengan status klausa, pemindahan klausa, pronominalisasi dan konjungsi.

Pemerian *dan* dan klausa relatif sudah jelas tidak tuntas tetapi hanya mencoba mengutarakan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penulisan *Tata Bahasa Indonesia*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kridalaksana, Harimurti, dkk. 1984. *Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia: Sintaksis*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kridalaksana, Harimurti dan Anton M. Moeliono, ed. 1982. *Pelangi Bahasa*. Jakarta: Brata Karya Aksara.
- Langacker, Ronald W. 1972. *Fundamental of Linguistic Analytis*. New York: Harcourt Brace Yovanovich, Inc.
- MacDöonald and Soenjono. 1967. *A Student's Reference Grammar of Modern Formal Indonesian*. Washington D.C.: George Town University Press.
- Quirk, Randolph, dkk. 1976. *A Grammar of Contemporary English*. London: Longman.
- Ramlan. 1981. *Sintaksis*. Yogyakarta: CV Karyono.
- Rusyana dan Samsuri. ed. 1976. *Pedoman Penulisan Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Samsuri. 1985. *Tata Kalimat Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Sastra Huda-  
daya.

- Soemarmo. 1970. *Subject-Predicate, Focus Presupposition and Topic Comment in Bahasa Indonesia*. Michigan: University of Michigan Microfilms.
- Verhaar, John V.M. 1981. *On The Syntax of Yang In Indonesian*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

## SIMPULAN

Seminar Nasional Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang menyelenggarakan persidangan pada tanggal 11–16 Agustus 1985 di Jakarta, setelah memperhatikan:

- (1) pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan pada upacara pembukaan seminar yang pada dasarnya menekankan perlunya usaha penataan bahasa Indonesia segera dilakukan mengingat pesatnya perkembangan bahasa Indonesia;
- (2) pengarahan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan yang menekankan perlunya para ahli bahasa meningkatkan peranan mereka dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia dan bahasa daerah;
- (3) pengarahan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang menggarisbawahi peranan tata bahasa baku bahasa Indonesia sebagai pedoman pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagaimana diamanatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1983;
- (4) hasil penelitian yang tertuang dalam naskah "Tata Bahasa Deskriptif Bahasa Indonesia" (1984); dan
- (5) hasil pembahasan empat belas buah makalah mengenai berbagai topik tata bahasa yang menanggapi hasil penelitian tersebut;

mencapai kesepakatan mengenai hal-hal berikut:

1. Tata bahasa baku bahasa Indonesia merupakan sarana yang penting bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam pembangunan nasional.

2. Tata bahasa baku bahasa Indonesia merupakan sumber penyusunan berbagai buku tata bahasa pedagogis untuk keperluan pengajaran.
3. Tata bahasa baku bahasa Indonesia akan disusun berdasarkan data ragam bahasa resmi.
4. Penyusunan tata bahasa baku bahasa Indonesia harus diusahakan selesai selambat-lambatnya tahun 1988.
5. Penyusunan tata bahasa baku bahasa Indonesia oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa akan dibantu sepenuhnya oleh para ahli dalam bidang bahasa.
6. Prakarsa perseorangan untuk menyusun buku tata bahasa tetap dihargai dan perlu didorong demi pengembangan ilmu.
7. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu membentuk Panitia Kerja Penyusunan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang antara lain bertugas:
  - a. mengolah hasil seminar (kerangka, data, analisis);
  - b. menetapkan kerangka dan sistematik tata bahasa baku bahasa Indonesia;
  - c. merencanakan jadwal;
  - d. membentuk gugus tugas penyusunan tata bahasa baku berdasarkan kerangka yang ditetapkan; dan
  - e. menyiapkan naskah untuk seminar yang berikutnya berdasarkan hasil kerja gugus tugas.

Para peserta Seminar Nasional Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia yang bersidang di Jakarta pada tanggal 11–16 Agustus 1985, bersetuju membentuk suatu forum kerja sama kebahasaan di antara tenaga pengajar di berbagai perguruan tinggi dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan tujuan:

- (1) peningkatan mutu tenaga kebahasaan;
- (2) peningkatan program pendidikan kebahasaan;
- (3) peningkatan mutu penelitian dan pengajaran bahasa;
- (4) peningkatan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia.

### DAFTAR PESERTA

No.	N a m a	A l a m a t
<b>A. Peserta dari Luar Jawa</b>		
1.	Dr. M. Silitonga	IKIP Medan
2.	Prof. Dr. D.P. Tampubolon	IKIP Medan
3.	Dr. Khaidir Anwar	Universitas Andalas
4.	Dr. M. Diah	Universitas Riau
5.	Prof. Dr. Amran Halim	Universitas Sriwidjaja
6.	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus	Universitas Udayana
7.	Prof. Dr. Husen Abas	Universitas Hasanuddin
8.	Dr. Nurdin Yatim	Universitas Hasanuddin
9.	Dr. W.H.C.M. Lalamentik	Universitas Sam Ratulangi
<b>B. Peserta dari Luar Jakarta</b>		
1.	Prof. Dr. J.S. Badudu	Universitas Padjadjaran
2.	Dr. Yus Rusyana	IKIP Bandung
3.	Prof. Dr. Henry Guntur Tarigan	IKIP Bandung
4.	Dr. Sudaryanto	Universitas Gadjah Mada
5.	Dr. Stephanus Djawanai	Universitas Gadjah Mada
6.	Prof. Dr. Sulastin Sutrisno	Universitas Gadjah Mada
7.	Prof. Dra. Siti Baroroh Baried	Universitas Gadjah Mada
8.	Dr. Darusuprpta	Universitas Gadjah Mada
9.	Prof. Dr. Ramelan	IKIP Semarang
10.	Dr. Retmono	IKIP Semarang

No.	Nama	Alamat
11.	Dr. Soenardji.	IKIP Semarang
12.	Dr. Abbas Badib	IKIP Surabaya
13.	Prof. Dr. Samsuri	IKIP Malang
14.	Prof. Dr. E. Sadtono	IKIP Malang
15.	Dr. Zaini Machmud	IKIP Malang
16.	Dr. Soeseno Kartomihardjo	IKIP Malang
17.	Dr. Subandi Djayengwasito	IKIP Malang
18.	Dr. Imam Syafei	IKIP Malang
19.	Prof. Drs. M. Ramlan	Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta
<b>C. Peserta dari Jakarta</b>		
1.	Prof. Dr. Anton M. Moeliono	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
2.	Prof. Dr. A.M. Ikram	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
3.	Prof. Dr. M.S. Simatupang	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
4.	Dr. Gorys Keraf	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
5.	Dr. Muhadjir	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
6.	Dr. Panuti Sudjiman	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
7.	Dr. Ayatrohaedi	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
8.	Dr. Riris K. Toha Sarumpaet	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
9.	Drs. Harimurti Kridalaksana	Fakultas Sastra Universitas Indonesia
10.	Dr. E. Massinambow	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
11.	Dr. S.W. Rujati Mulyadi	Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
12.	Prof. Dr. Soenjono Dardjowidjojo	Lembaga Bahasa Atma Jaya

No.	Nama	Alamat
13.	Dr. Bambang Kaswanti Purwo	Lembaga Bahasa Atma Jaya
14.	Dr. Bistok A. Siahaan	IKIP Jakarta
15.	Dr. Sabarti Akhadiat	IKIP Jakarta
16.	A. Latief, M.A.	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
17.	Dra. Sri Sukezi Adiwimarta	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
18.	Drs. S. Effendi	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
19.	Drs. Lukman Hakim	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
20.	Drs. Hasan Alwi	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
21.	Drs. Nafron Hasjim	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
22.	Drs. Edwar Djamaris	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
23.	Drs. Dendy Sugono	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
24.	Dra. Yayah B. Lumintintang	Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

**PANITIA PENYELENGGARA  
SEMINAR TATA BAHASA BAKU BAHASA INDONESIA**

**Jakarta, 11-16 Agustus 1985**

No.	Nama	Jabatan	Ditetapkan sebagai
1.	Prof. Dr. Anton M. Moeliono	Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	Pengarah
2.	Drs. Hans Lapoliwa, M.Phil.	Pembantu Pimpinan pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	Ketua
3.	Drs. Koentamadi	Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	Wakil Ketua
4.	Drs. S.R.H. Sitanggang	Pembantu Pimpinan pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	Sekretaris
5.	Drs. Tony S. Rachmadie	Pembantu Pimpinan pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	Seksi Persidangan
6.	Drs. Hasjmi Dini	Kepala Satuan Kerja Perencanaan	Seksi Akomodasi/Konsumsi
7.	Samidjo	Pelaksana pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa	Bendaharawan
8.	Arman	sda.	Seksi Perlengkapan
9.	Setiowati Djuwitaningsih	sda.	Anggota
10.	Suhadi	sda.	Anggota
11.	Ciptodigiyarto	sda.	Anggota

07-6316

PERPUSTAKAAN  
PUSAT PEMBINAAN DAN  
PENGEMBANGAN BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

URUTAN  
9 | 1 | - | 2554

4